

INDEKS DAYA SAING INVESTASI

KABUPATEN/KOTA SE ACEH
TAHUN 2025

dpmpspaceh



<http://dpmpsp.acehprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam senantiasa terlantun kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang istiqamah di jalan-Nya. Atas limpahan rezeki telah memberikan inspirasi bagi para pemimpin kita sebagai pengambil kebijakan pembangunan melalui sunnah-Nya dalam membangun negeri melalui semangat peradaban madani.

Laporan Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten/Kota se Aceh tahun 2025 diharapkan dapat memberikan masukan dan memetakan peringkat daya saing investasi kabupaten/kota se-Aceh serta menjadi bahan referensi perbaikan iklim investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, pembangunan daerah tertinggal, optimalisasi alih teknologi dan pengolahan sumber daya alam.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung penyusunan Laporan IDSI ini dari proses awal pengumpulan dan pengisian data, pengolahan data sampai dengan analisa IDSI Tahun 2025 yang berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan.

Laporan IDSI Kabupaten/Kota se Aceh tahun 2025 mungkin masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penyediaan data, maupun analisa data. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami mengharapkan berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif untuk menjadi bahan perbaikan dan kesempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Demikian dokumen ini disusun untuk kepentingan bersama, semoga Laporan IDSI kabupaten/kota se-Aceh tahun 2025 dapat menjadi salah satu daya tarik investasi atau referensi bagi investor untuk berinvestasi di Aceh, sekaligus mendukung peningkatan daya saing investasi daerah yang berkelanjutan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Banda Aceh, November 2025



Mapran Nusus, B.Hsc, MA
Kepala DPMPTSP Aceh

Editors

Pengarah

Marwan Nusuf, B.HSc, MA

Penulis

Rahmadhani, M.Bus

Firamitha Kartika Devi, S.STP, MM

Irmawati, SE, Ak, MM

Nizar Wahyudi, S.Sos, MM

Dian Eka Sari,SH

Cut Eliza M, SE, M.Si

Asyila Nadiya, ST

Tenaga Ahli :

Tasdik Ilhamudin, M.Si

Tim Penyusun

Tim Kerja Kemitraan, Peta Peluang dan Kebijakan Tata Kelola Penanaman Modal

DPMPTSP Aceh

2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENGANTAR	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sasaran	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Kerangka Pemikiran	5
2.2. Metodologi	6
BAB III ANALISIS INDEKS DAYA SAING INVESTASI	12
3.1. Daya Saing Investasi Kabupaten dan Kota se Aceh	12
3.2. Daya Saing Investasi berdasarkan Lingkup	15
3.3. Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota	21
1. Kabupaten Simeulue	21
2. Kabupaten Aceh Singkil	29
3. Kabupaten Aceh Selatan	36
4. Kabupaten Aceh Tenggara	43
5. Kabupaten Aceh Timur	50
6. Kabupaten Aceh Tengah	58
7. Kabupaten Aceh Barat	66
8. Kabupaten Aceh Besar	74
9. Kabupaten Pidie	82
10. Kabupaten Bireuen	89
11. Kabupaten Aceh Utara	97

12. Kabupaten Aceh Barat Daya	105
13. Kabupaten Gayo Lues.....	113
14. Kabupaten Aceh Tamiang.....	120
15. Kabupaten Nagan Raya	128
16. Kabupaten Aceh Jaya.....	136
17. Kabupaten Bener Meriah.....	144
18. Kabupaten Pidie Jaya.....	151
19. Kota Banda Aceh	158
20. Kota Sabang	166
21. Kota Langsa	172
22. Kota Lhokseumawe.....	179
23. Kota Subulussalam.....	186
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	192
4.1. Kesimpulan.....	192
4.2. Rekomendasi.....	193
LAMPIRAN	164

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2025.....	13
Tabel 3. 2. Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/kota se Aceh Tahun 2024-2025.....	14
Tabel 3. 3. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Tahun 2025	16
Tabel 3. 4. Pemerintahan dan Institusi Publik Tahun 2025	18
Tabel 3. 5. Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Tahun 2025	19
Tabel 3. 6. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025	21
Tabel 3. 7. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Simeulue Tahun 2025.....	22
Tabel 3. 8. Simulasi What If Kabupaten Simeulue	23
Tabel 3. 9. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Singkil Tahun 2025.....	30
Tabel 3. 10. Simulasi What If Kabupaten Singkil	31
Tabel 3. 11. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Selatan Tahun 2025.....	37
Tabel 3. 12. Simulasi What If Kabupaten Aceh Selatan	38
Tabel 3. 13. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Tenggara Tahun 2025.....	44
Tabel 3. 14. Simulasi What If Kabupaten Aceh Tenggara.....	45
Tabel 3. 15. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Timur Tahun 2025.....	51
Tabel 3. 16. Simulasi What If Kabupaten Aceh Timur	52
Tabel 3. 17. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Tengah Tahun 2025.....	59
Tabel 3. 18. Simulasi What If Kabupaten Aceh Tengah.....	60
Tabel 3. 19. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Barat Tahun 2025	67
Tabel 3. 20. Simulasi What If Kabupaten Aceh Barat.....	68
Tabel 3. 21. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Besar Tahun 2025.....	75
Tabel 3. 22. Simulasi What If Kabupaten Aceh Besar	76
Tabel 3. 23. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Pidie Tahun 2025	83
Tabel 3. 24. Simulasi What If Kabupaten Pidie.....	84
Tabel 3. 25. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Bireuen Tahun 2025.....	90
Tabel 3. 26. Simulasi What If Kabupaten Bireuen	91
Tabel 3. 27. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Utara Tahun 2025.....	98
Tabel 3. 28. Simulasi What If Kabupaten Aceh Utara	99
Tabel 3. 29. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2025...	106

Tabel 3. 30. Simulasi What If Kabupaten Aceh Barat Daya	107
Tabel 3. 31. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Gayo Lues Tahun 2025	114
Tabel 3. 32. Simulasi What If Kabupaten Gayo Lues.....	115
Tabel 3. 33. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Tamiang Tahun 2025	121
Tabel 3. 34. Simulasi What If Kabupaten Aceh Tamiang.....	123
Tabel 3. 35. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Nagan Raya Tahun 2025.....	129
Tabel 3. 36. Simulasi What If Kabupaten Nagan Raya	130
Tabel 3. 37. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Aceh Jaya Tahun 2025	137
Tabel 3. 38. Simulasi What If Kabupaten Aceh Jaya.....	138
Tabel 3. 39. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Bener Meriah Tahun 2025.....	145
Tabel 3. 40. Simulasi What If Kabupaten Bener Meriah	146
Tabel 3. 41. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kab. Pidie Jaya Tahun 2025	152
Tabel 3. 42. Simulasi What If Kabupaten Pidie Jaya.....	153
Tabel 3. 43. Peringkat Daya Saing Kota Banda Aceh Tahun 2025.....	160
Tabel 3. 44. Simulasi What If Kota Banda Aceh	161
Tabel 3. 45. Peringkat Daya Saing Kota Sabang Tahun 2025.....	167
Tabel 3. 46. Simulasi What If Kota Sabang	168
Tabel 3. 47. Peringkat Daya Saing Kota Langsa Tahun 2025.....	173
Tabel 3. 48. Simulasi What If Kota Langsa	174
Tabel 3. 49. Peringkat Daya Saing Kota Lhokseumawe Tahun 2025	180
Tabel 3. 50. Simulasi What If Kota Lhokseumawe	181
Tabel 3. 51. Peringkat Daya Saing Kota Subulussalam Tahun 2025	187
Tabel 3. 52. Simulasi What If Kota Subulussalam	187

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.	Skema Perhitungan Indeks Daya Saing ACI.....	14
Gambar 3. 1.	Peta Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten/Kota Aceh	15
Gambar 3. 2.	Peta Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik.....	17
Gambar 3. 3.	Peta Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja	18
Gambar 3. 4.	Peta Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur	20
Gambar 3. 5.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Simeulue Tahun 2021-2025.....	24
Gambar 3. 6.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue	25
Gambar 3. 7.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue.....	26
Gambar 3. 8.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue.....	26
Gambar 3. 9.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue.....	27
Gambar 3. 10.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021-2025.....	31
Gambar 3. 11.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Singkil	32
Gambar 3. 12.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Singkil.....	33
Gambar 3. 13.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Singkil.....	34
Gambar 3. 14.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Singkil	34
Gambar 3. 15.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021-2025	38
Gambar 3. 16.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Selatan.....	40
Gambar 3. 17.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Selatan	40
Gambar 3. 18.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Selatan	41

Gambar 3. 19.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Selatan	42
Gambar 3. 20.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021-2024	46
Gambar 3. 21.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tenggara.....	47
Gambar 3. 22.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tenggara	48
Gambar 3. 23.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tenggara	49
Gambar 3. 24.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tenggara.....	49
Gambar 3. 25.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021-2025	53
Gambar 3. 26.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Timur	54
Gambar 3. 27.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Timur	55
Gambar 3. 28.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Timur	56
Gambar 3. 29.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Timur	57
Gambar 3. 30.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021-2025	61
Gambar 3. 31.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tengah.....	62
Gambar 3. 32.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tengah	63
Gambar 3. 33.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tengah	64
Gambar 3. 34.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tengah.....	65
Gambar 3. 35.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2025.....	69
Gambar 3. 36.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat	70

Gambar 3. 37.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat.....	71
Gambar 3. 38.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat.....	72
Gambar 3. 39.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat	73
Gambar 3. 40.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021-2025	77
Gambar 3. 41.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Besar.....	78
Gambar 3. 42.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Besar	79
Gambar 3. 43.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Besar	80
Gambar 3. 44.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Besar.....	80
Gambar 3. 45.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Tahun 2021-2025.....	84
Gambar 3. 46.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Pidie	86
Gambar 3. 47.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Pidie.....	87
Gambar 3. 48.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Pidie.....	88
Gambar 3. 49.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Pidie	88
Gambar 3. 50.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bireuen Tahun 2021-2025	92
Gambar 3. 51.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Bireuen.....	93
Gambar 3. 52.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Bireuen	94
Gambar 3. 53.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Bireuen	95
Gambar 3. 54.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Bireuen.....	96

Gambar 3. 55.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2025	100
Gambar 3. 56.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Utara.....	101
Gambar 3. 57.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Utara	102
Gambar 3. 58.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Utara	103
Gambar 3. 59.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Utara.....	104
Gambar 3. 60.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021-2025	108
Gambar 3. 61.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat Daya.....	109
Gambar 3. 62.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat Daya	110
Gambar 3. 63.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat Daya	110
Gambar 3. 64.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat Daya.....	111
Gambar 3. 65.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021-2025.....	115
Gambar 3. 66.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Gayo Lues	117
Gambar 3. 67.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Gayo Lues.....	117
Gambar 3. 68.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Gayo Lues.....	118
Gambar 3. 69.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Gayo Lues	119
Gambar 3. 70.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021-2025.....	123
Gambar 3. 71.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tamiang	124
Gambar 3. 72.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tamiang.....	125

Gambar 3. 73.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tamiang.....	126
Gambar 3. 74.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tamiang	127
Gambar 3. 75.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025	131
Gambar 3. 76.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Nagan Raya.....	132
Gambar 3. 77.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Nagan Raya	133
Gambar 3. 78.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Nagan Raya	134
Gambar 3. 79.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Nagan Raya.....	135
Gambar 3. 80.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021-2025.....	139
Gambar 3. 81.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Jaya	140
Gambar 3. 82.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Jaya.....	141
Gambar 3. 83.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Jaya.....	142
Gambar 3. 84.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Jaya	143
Gambar 3. 85.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021-2025	147
Gambar 3. 86.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Bener Meriah.....	148
Gambar 3. 87.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Bener Meriah	149
Gambar 3. 88.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Bener Meriah	150
Gambar 3. 89.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Bener Meriah.....	150
Gambar 3. 90.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2025.....	154

Gambar 3. 91.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Pidie Jaya	155
Gambar 3. 92.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Pidie Jaya.....	156
Gambar 3. 93.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Pidie Jaya.....	157
Gambar 3. 94.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Pidie Jaya	157
Gambar 3. 95.	Peringkat Lingkup Indeks Daya Saing Investasi Kota Banda Aceh Tahun 2021-2025.....	161
Gambar 3. 96.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kota Banda Aceh.....	163
Gambar 3. 97.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kota Banda Aceh	163
Gambar 3. 98.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kota Banda Aceh	164
Gambar 3. 99.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kota Banda Aceh.....	165
Gambar 3. 100.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kota Sabang Tahun 2021-2025.....	168
Gambar 3. 101.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kota Sabang.....	169
Gambar 3. 102.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kota Sabang	170
Gambar 3. 103.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kota Sabang	171
Gambar 3. 104.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kota Sabang.....	171
Gambar 3. 105.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kota Langsa Tahun 2021-2025.....	175
Gambar 3. 106.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kota Langsa.....	176
Gambar 3. 107.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kota Langsa	177
Gambar 3. 108.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kota Langsa	177

Gambar 3. 109.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kota Langsa	178
Gambar 3. 110.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	181
Gambar 3. 111.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kota Lhokseumawe	182
Gambar 3. 112.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kota Lhokseumawe	183
Gambar 3. 113.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kota Lhokseumawe.....	184
Gambar 3. 114.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kota Lhokseumawe.....	185
Gambar 3. 115.	Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kota Subulussalam Tahun 2021-2025	188
Gambar 3. 116.	Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kota Subulussalam	189
Gambar 3. 117.	Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kota Subulussalam.....	190
Gambar 3. 118.	Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kota Subulussalam.....	190
Gambar 3. 119.	Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kota Subulussalam.....	191

BAB I

PENGANTAR

1.1. Pendahuluan

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu faktor penting sebagai penentu keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa atau daerah. Investasi menjadi modal dasar atau *prime mover* bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung peningkatan nilai tambah di daerah melalui penguatan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa.

Faktor-faktor produksi tersebut meliputi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya modal dan sumber daya pengusaha atau kewirausahaan, termasuk juga sumber daya teknologi yang tidak kalah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah melalui investasi yang berkelanjutan yang menghasilkan produktivitas dan daya saing tinggi.

Selain beberapa faktor penentu keberhasilan investasi pada suatu daerah, beberapa faktor penentu lainnya juga perlu menjadi perhatian Pemerintah. Faktor-faktor penentu tersebut, meliputi daya tarik investasi, iklim usaha yang kondusif, kemudahan berinvestasi, kejelasan prosedur berinvestasi dan informasi mengenai proyek-proyek investasi strategis bersifat *clean* and *clear* yang telah memiliki studi kelayakan, termasuk juga ketersediaan infrastruktur pendukung sebagai konektivitas dan indeks daya saing investasi yang akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi.

Oleh karena itu, semua pemerintah di berbagai tingkatan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota terus berusaha mencari cara dan strategi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan investasi di daerah mereka masing-masing. Namun, dalam prakteknya, tentu saja hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Perlu menjadi perhatian semua pihak, investasi akan masuk ke suatu daerah sangat bergantung pada daya tarik investasi di daerah tersebut. Secara keseluruhan, hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki beragam potensi sumber daya alam (SDA) yang sama menariknya, namun daya tarik investasi menjadi penentu bagi suatu daerah untuk menjadi destinasi bagi investor berlabuh.

Pembentukan daya tarik investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh berbagai aspek dan dibutuhkan keseriusan serta kerja sama semua pihak secara holistik, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial dan budaya, serta sentimen positif daerah yang memberikan gambaran umum tentang suasana kondusif di daerah menjadi beberapa faktor utama pembentukan daya tarik investasi suatu daerah. Keberhasilan untuk meningkatkan daya tarik daerah terhadap investasi salah satunya

bergantung kepada komitmen dan kemampuan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan secara konsisten kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha.

Di era globalisasi dan otonomi daerah menjadi wadah atau instrumen bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai momentum untuk mendorong dan menarik minat para investor, baik lokal, nasional, maupun global untuk berinvestasi di wilayah mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan mandat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Dengan demikian, membangun dan memperbaiki citra daerah melalui iklim investasi yang kondusif menjadi tanggung jawab dan tugas penting bagi setiap pemerintah, terutama negara-negara yang memiliki daya saing investasi yang rendah seperti Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi iklim investasi di Indonesia dinilai masih memprihatinkan, termasuk Aceh, sehingga perlu dilakukan berbagai strategi dan inovasi maksimal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui investasi.

Tingkat daya saing investasi juga menjadi salah satu indikator yang memperlihatkan bagaimana iklim investasi suatu daerah dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka semakin kondusif pula iklim investasi yang tercipta, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan serta berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Daya saing investasi menjadi landasan dasar bagi setiap daerah yang memiliki target untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada. Mengukur daya saing oleh suatu daerah yang sedang berkembang dalam rangka mengevaluasi strategi pembangunan ekonomi daerah menjadi sangat penting. Indeks daya saing merupakan alat ukur yang tepat yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, sekaligus menarik minat investor untuk berinvestasi.

Pemerintah kabupaten/kota perlu memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing daerah secara internal, termasuk juga peluang dan tantangan secara eksternal melalui kajian analisa SWOT. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk memahami dan bertindak berdasarkan strategi dan arah kebijakan dari kekuatan dan kelemahan serta potensi daerah masing-masing kabupaten/kota di Aceh melalui pelibatan seluruh pihak terkait.

Penyusunan Laporan Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2025 telah dilaksanakan selama empat tahun sejak Tahun 2021 dengan melibatkan tenaga ahli dari BPS Aceh dan berpedoman pada model yang

dikembangkan oleh Asia Competitiveness Institutes (ACI), sebagai Pusat Penelitian Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore (NUS). Pendekatan ACI terkait daya saing investasi menggunakan kerangka yang komprehensif, terintegrasi dan sistematis dalam menentukan kemampuan suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang substansial dan inklusif dalam kurun waktu panjang, yang terdiri dari 4 lingkup, 12 Sub Lingkup dan 76 indikator.

Untuk penyusunan Laporan Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2025 akan melakukan review 76 (tujuh puluh enam) indikator penyusunan IDSI terhadap iklim investasi, khususnya indikator-indikator yang memiliki pengaruh signifikan, termasuk juga indikator-indikator yang tidak memiliki pengaruh sama sekali.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi terkait daya saing investasi di kabupaten/kota, meliputi:

1. Belum tersedianya pengukuran indeks daya saing di daerah sebagai acuan dalam membuat kebijakan terkait perumusan kebijakan peningkatan daya saing daerah;
2. Belum adanya visi dan persepsi yang sama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan strategi peningkatan daya saing pada tingkat kabupaten/kota;
3. Belum tersedianya *database* yang berfungsi sebagai bank data untuk mendukung kepentingan penyusunan berbagai kajian yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga terkait; dan
4. Belum adanya kesadaran bersama, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pentingnya daya saing investasi pada tingkat kabupaten/kota dalam upaya mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten/Kota se Aceh tahun 2025 bermaksud untuk membangun kesepahaman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memahami kekuatan dan kelemahan di daerah mereka terkait potensi dan peluang investasi di daerah, serta bertindak berdasarkan kekuatan dan kelemahan potensi kabupaten/kota di sekitarnya untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan melalui pelibatan seluruh pihak terkait.

b. Tujuan

Penyusunan Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman kepada para pengambil kebijakan, baik di tingkat Nasional, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota dan sebagai acuan dalam menilai tingkat daya saing investasi Kabupaten/Kota di Aceh;
2. Mengidentifikasi strategi untuk memperbaiki situasi daerah oleh pengambil kebijakan dalam mendorong pola persaingan sehat dan kerja sama Kabupaten/Kota se-Aceh;
3. Menjadi kajian bagi Pemerintah Aceh dalam mensosialisasikan perbedaan tingkat pembangunan (termasuk ketimpangan) daya saing antar Kabupaten/Kota di Aceh;
4. Menjadi tolak ukur untuk melihat daya saing di tingkat Kabupaten/Kota dan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diperbaiki dalam rangka peningkatan daya saing investasi masing-masing daerah; dan
5. Berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Aceh dan membangun kreativitas intelektual kepada khalayak luas melalui pelibatan akademisi, peneliti dan pelaku usaha lainnya.

1.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui Penyusunan Indeks Daya Saing Investasi (IDSI) Kabupaten/Kota se Aceh Tahun 2025:

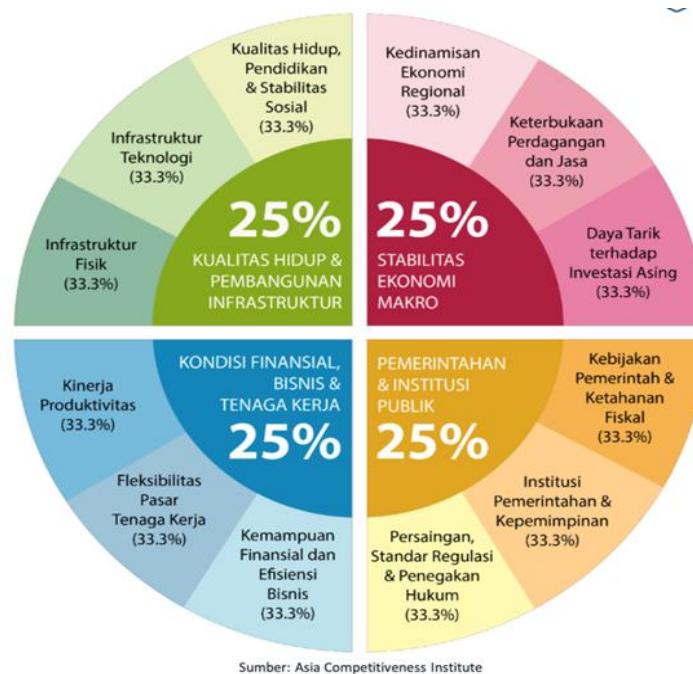
1. Tersosialisasinya pemahaman kepada para pengambil kebijakan, baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan sebagai acuan dalam menilai tingkat daya saing investasi Kabupaten/Kota di Aceh;
2. Teridentifikasinya strategi untuk memperbaiki situasi daerah oleh pengambil kebijakan dalam mendorong pola persaingan sehat dan kerja sama Kabupaten/Kota se Aceh;
3. Tersedianya kajian bagi Pemerintah Aceh dalam memberikan wawasan mengenai perbedaan tingkat pembangunan (termasuk ketimpangan) daya saing investasi antar Kabupaten/Kota yang ada di Aceh;
4. Terciptanya tolak ukur untuk melihat daya saing di tingkat Kabupaten/Kota dan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diperbaiki dalam rangka peningkatan daya saing investasi masing-masing daerah; dan
5. Terciptanya kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Aceh dan menyebarkan kreativitas intelektual kepada khalayak luas melalui pelibatan akademisi, peneliti dan pelaku usaha lainnya.

BAB II METODOLOGI

2.1. Kerangka Pemikiran

Kajian ini mengadopsi model yang dikembangkan oleh *Asia Competitiveness Institute* (ACI) sebagai Pusat Penelitian Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore (NUS). Pendekatan ACI terkait daya saing investasi menggunakan kerangka yang komprehensif, terintegrasi dan sistematis, meliputi faktor-faktor berbeda yang secara kolektif menentukan kemampuan suatu wilayah atau provinsi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang substansial dan inklusif dalam kurun waktu panjang.

Sesuai dengan pendekatan komprehensif tersebut, ACI mendefinisikan daya saing melalui 4 (empat) lingkup berbeda: (a) Stabilitas Ekonomi Makro, (b) Pemerintah dan Institusi Publik, (c) Kondisi Finansial, Bisnis, dan Tenaga Kerja, dan (d) Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur. Untuk skema perhitungan Indeks Daya Saing Investasi masing-masing lingkup diberikan bobot yang sama, yaitu 25%. Skema Perhitungan Indeks Daya Saing berdasarkan ACI dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Skema Perhitungan Indeks Daya Saing berdasarkan ACI

Kerangka analisis daya saing berdasarkan ACI menggunakan pendekatan bertingkat, dimana masing-masing dari empat lingkup tersebut dibagi menjadi tiga Sub Lingkup (setiap Sub Lingkup merupakan bagian dari lingkup yang jenjangnya lebih tinggi). Oleh karena itu, terdapat 12 Sub Lingkup secara keseluruhan. Masing-

masing Sub Lingkup memiliki bobot kontribusi yang sama, yaitu 33,3% pada indeks masing-masing lingkup.

Dalam menggabungkan Sub Lingkup menjadi lingkup, keempat lingkup tersebut menjadi peringkat keseluruhan indeks daya saing. ACI menggunakan mekanisme penghitungan rata-rata dengan bobot setara. Walaupun pemberian bobot yang berbeda-beda untuk berbagai indikator mungkin terlihat sesuai, namun dapat juga menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, untuk mencapai gambaran seimbang dari faktor berbeda yang tergabung menjadi keseluruhan gagasan mengenai daya saing, tim penyusun menggunakan bobot yang sama pada semua indikator.

Dua lingkup dari empat lingkup daya saing ACI didominasi oleh sektor ekonomi dan keuangan, sedangkan sisanya mencakup politik, institusional, sosial, dan kondisi fisik. Secara keseluruhan, terdapat 4 lingkup dan 12 Sub Lingkup dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Stabilitas Ekonomi Makro**, meliputi keseluruhan kondisi ekonomi di provinsi yang terdiri dari tiga sub lingkup, sebagai berikut: *a) Kedinamisan Ekonomi Regional, b) Keterbukaan dalam Perdagangan dan Jasa, dan c) Daya Tarik terhadap Investasi Asing;*
2. **Pemerintah dan Institusi Publik**, mencakup keberhasilan institusi pemerintahan dan juga harapan dari kemajuan di sektor publik yang terdiri dari tiga sub lingkup, sebagai berikut: *a) Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal, b) Institusi, Pemerintahan dan Kepemimpinan, dan c) Persaingan, Standar Regulasi dan Penegakan Hukum;*
3. **Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaga Kerja**, mewakili kinerja dan potensi perusahaan dan juga kondisi yang dihadapi manajer dalam menjalankan perusahaan yang terdiri dari tiga sub lingkup, sebagai berikut: *a) Kemampuan Finansial dan Efisiensi Bisnis, b) Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja, dan c) Kinerja Produktivitas;*
4. **Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur**, mengkombinasikan infrastruktur dengan penyediaan fasilitas sosial dasar yang terdiri dari tiga sub lingkup, sebagai berikut: *a) Infrastruktur Fisik, b) Infrastruktur Teknologi, dan c) Standar Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial.*

2.2. Metodologi

a. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam studi ini berasal dari data sekunder tahun 2024, termasuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), nilai ekspor, nilai impor, panjang jalan beraspal, dan lain-lain. Data tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekretariat Daerah Aceh, dan lain-lain.

b. Peralatan Analisis Data

1) Penghitungan Peringkat Daya Saing

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana mengolah berbagai jenis data yang ada menjadi sebuah analisis yang bersifat ilmiah. Ada 76 indikator yang digunakan dalam penelitian ini, dimana masing-masing menggunakan nilai atau ukuran yang berbeda, seperti PDRB dalam juta rupiah, panjang jalan beraspal dalam kilometer dan lain sebagainya.

Untuk tujuan menyatukan berbagai unit pengukuran ini, selanjutnya digunakan metode statistik nilai terstandarisasi. Nilai terstandarisasi adalah perbandingan relatif kinerja suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/kota. Dengan demikian, unit pengukuran sebagaimana disebutkan di atas tidak lagi relevan.

Nilai terstandarisasi tidak memiliki unit pengukuran karena hanya mengukur kinerja relatif di antara kabupaten/kota, apapun indikatornya. Dengan kata lain, merujuk pada terminologi statistika, nilai terstandarisasi mengukur seberapa besar standar deviasi masing-masing kabupaten/kota dari rata-rata kabupaten/kota.

Dalam hal satu kabupaten/kota memiliki nilai terstandarisasi nol, maka kabupaten/kota tersebut memiliki kinerja rata-rata. Nilai negatif berarti kinerja provinsi atau wilayah tersebut berada di bawah rata-rata. Sebaliknya, nilai yang positif berarti kinerja yang berada di atas rata-rata. Semakin jauh skornya dari nol, berarti kinerja dari kabupaten/kota tersebut semakin jauh dari rata-rata seluruh kabupaten/kota.

Nilai terstandarisasi dari setiap indikator lalu diagregasikan secara sistematis, pertama pada tingkat sub lingkup, dilanjutkan oleh agregasi pada tingkat lingkup dan akhirnya pada tingkatan keseluruhan. Hal ini memungkinkan untuk membandingkan kinerja dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh pada tingkat berbeda, dari daya saing keseluruhan sampai indikator yang spesifik. Secara rinci tahapan dan formulasi perhitungan Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/kota di Aceh adalah sebagai berikut (Tan Khee Giap *et al.* 2018).

1. Hitung rata-rata indikator dengan formulasi berikut:

$$\bar{X}_j = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_{ij}$$

Di mana X_{ij} merepresentasikan nilai dari wilayah i ($i = 1, \dots, M$) mengacu pada indikator j .

2. Untuk setiap indikator j ($j = 1, \dots, M$), hitung standar deviasi (SD),

$$SD_j = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}$$

3. Hitung nilai terstandarisasi dari indikator/*standardized value of indicator* (SVI) tiap wilayah $i (i = 1, \dots, M)$ yang berada pada tiap indikator $j (j = 1, \dots, M)$
4. Hitung 'peringkat' nilai terstandarisasi indikator terkait *rank standardized value of indicator* (RSVI) yang mana tiap wilayah $i (i = 1, \dots, N)$ berada pada masing-masing indikator $j (j = 1, \dots, M)$:

$$RSVI_{ij} = \begin{cases} SVI_{ij}, & \text{jika semakin tinggi nilainya semakin baik} \\ -SVI_{ij}, & \text{jika semakin rendah nilainya semakin baik} \end{cases}$$

5. Untuk setiap indikator $j (j = 1, \dots, M)$, peringkat dapat diperoleh untuk tiap wilayah: wilayah dengan nilai RSVI yang lebih tinggi untuk indikator j menempati posisi di atas wilayah yang memiliki nilai RSVI lebih rendah.
6. Untuk masing-masing wilayah $i (i = 1, \dots, N)$, hitung RSVI dari tiap Sub Lingkup $k (k = 1, \dots, S)$ yang termasuk dalam lingkup $l (l = 1, \dots, C)$,

$$Raw_RSVI_{i,lk} = \frac{1}{y_{lk}} \sum_{p=1}^{y_{lk}} RSVI_{i,jlk,p}$$

$$Mean_RSVI_{lk} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Raw_RSVI_{i,lk}$$

$$SD_RSVI_{lk} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Raw_RSVI_{i,lk} - Mean_RSVI_{lk})^2}$$

$$RSVI_{i,lk} = \frac{Raw_RSVI_{i,lk} - Mean_RSVI_{lk}}{SD_RSVI_{lk}}$$

Dimana y_{lk} adalah jumlah total indikator di bawah sub lingkup k dari lingkup l dan $(RSVI_{i,jlk,1}, \dots, RSVI_{i,jlk,y_{lk}})$ adalah RSVI untuk wilayah i yang terdiri dari sub lingkup k untuk lingkup l .

7. Untuk masing-masing wilayah $i (i = 1, \dots, M)$, hitung RSVI untuk masing-masing lingkup $l (l = 1, \dots, C)$,

$$Raw_RSVI_{i,l} = \frac{1}{S_i} \sum_{k=1}^{S_i} RSVI_{i,lk}$$

$$Mean_RSVI_l = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Raw_RSVI_{i,l}$$

$$SD_RSVI_l = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Raw_RSVI_{i,l} - Mean_RSVI_l)^2}$$

$$RSVI_{i,l} = \frac{Raw_RSVI_{i,l} - Mean_RSVI_l}{SD_RSVI_l}$$

Di mana $(RSVI_{i,1}, \dots, RSVI_{i,S})$ adalah RSVI untuk sub lingkup S di bawah lingkup l

8. Nilai peringkat keseluruhan wilayah i ($i = 1, \dots, M$),

$$Raw_R_i = \frac{1}{C} \sum_{l=1}^C RSVI_{i,l}$$

$$Mean_R = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Raw_R_i$$

$$SD_R = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Raw_R_i - Mean_R)^2}$$

$$R_i = \frac{Raw_R_i - Mean_R}{SD_R}$$

Wilayah dengan R_i lebih tinggi menempati posisi di atas wilayah lain dengan nilai R_i yang lebih rendah, dan wilayah dengan R_i tertinggi adalah wilayah yang paling kompetitif.

Pada angka (5) di atas, memberikan peringkat bagi setiap wilayah untuk masing-masing indikator. Untuk mendapatkan peringkat ini, pada angka (4) menyesuaikan nilai SVI, sehingga nilai yang lebih tinggi akan mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam hal daya saing. Hal ini tergantung pada konteks setiap indikator, dimana nilai yang lebih tinggi atau rendah bisa saja mencerminkan wilayah yang lebih kompetitif. Sebagai contoh, PDRB yang

lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah akan mendorong daya saing suatu wilayah.

Pada situasi dimana nilai yang lebih tinggi menandakan daya saing yang lebih tinggi (contohnya PDRB), nilai SVI wilayah akan digunakan dan wilayah dengan SVI yang lebih tinggi akan mendapatkan peringkat yang lebih baik. Sementara itu, dalam situasi sebaliknya (contohnya tingkat pengangguran), nilai negatif SVI itu akan dibandingkan dan wilayah dengan nilai SVI yang lebih rendah akan memiliki peringkat yang lebih baik. Pada angka (4) ini akan memastikan semua nilai terstandarisasi konsisten dengan tujuan pemeringkatannya.

Pada angka (6) menentukan peringkat Sub Lingkup untuk setiap wilayah. Nilai rata-rata RSVI dari seluruh indikator di Sub Lingkup tertentu lalu dihitung dan distandarisasikan kembali untuk semua wilayah dan kemudian dibandingkan dengan wilayah lainnya. Wilayah dengan nilai rata-rata RSVI yang lebih tinggi akan memiliki peringkat yang lebih baik di Sub Lingkup ini.

Walaupun terdapat jumlah indikator yang berbeda dalam setiap sub lingkup, khusus untuk studi daya saing di Indonesia, terdapat tiga Sub Lingkup untuk setiap lingkup dengan total empat lingkup. Nilai agregat untuk setiap Sub Lingkup memiliki bobot ekuivalen dengan 33.33% dari setiap nilai masing-masing lingkup.

Untuk sampai ke dalam peringkat tiap lingkup, RSVI dari setiap Sub Lingkup dirata-rata dan distandarisasikan kembali untuk setiap wilayah seperti yang dijelaskan di angka (7). Pada angka (8) memerlukan setiap nilai RSVI dari masing-masing lingkup dirata-rata dan distandarisasikan kembali untuk seluruh wilayah dalam menentukan peringkat keseluruhan.

Wilayah dengan RSVI lebih tinggi berada di atas wilayah dengan RSVI yang lebih rendah. Bobot yang sama diberikan untuk tiap lingkup karena keempat lingkup tersebut memberikan kontribusi yang sama terhadap penghitungan indeks daya saing keseluruhan untuk wilayah-wilayah dan provinsi-provinsi di Indonesia. Metode ini dipakai berulang kali dan diaplikasikan secara konsisten untuk seluruh wilayah agar penghitungan peringkat akurat. Secara matematika, metode ini dapat diilustrasikan, sebagai berikut:

“Indeks daya saing keseluruhan kabupaten/kota di Aceh = 25% × (Stabilitas Ekonomi Makro) + 25% × (Pemerintah dan Institusi Publik) + 25% × (Kondisi Finansial, Bisnis dan Tenaga Kerja) + 25% × (Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur)”

c. Simulasi Peningkatan Daya Saing

Untuk melihat implikasi dari kebijakan yang diambil Pemerintah terhadap peningkatan daya saing dapat diamati dengan Simulasi Peningkatan Daya Saing. Dengan menganalisis data yang ada, dapat diidentifikasi, bukan hanya peringkat daya saing keseluruhan, tetapi juga indikator spesifik dimana sebuah kabupaten/kota berkinerja baik atau mengalami kesulitan. Kesimpulan dari simulasi ini selanjutnya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada setiap kabupaten/kota untuk meningkatkan daya saing daerah.

Simulasi daya saing ini dibuat berdasarkan perbaikan dari 20 indikator terlemah di setiap kabupaten/kota dan penghitungan ulang nilai yang terstandarisasi berdasarkan perbaikan tersebut. Untuk menjalankan simulasi tersebut, pertama, diurutkan indikator-indikator untuk tiap kabupaten/kota dari nilai tertinggi sampai terendah.

Dengan begitu, dapat diidentifikasi 20 indikator terlemah setiap kabupaten/kota. Selanjutnya, nilai dari 20 indikator terlemah tersebut ditingkatkan pada level rata-rata. Ini berarti nilai dari indikator yang sebelumnya negatif dinaikkan ke nol. Jika sebelumnya sudah nol atau positif, maka skornya tidak diubah.

Sesudah skornya dinaikkan, maka dapat dihitung ulang peringkatnya, dengan asumsi bahwa kabupaten/kota lainnya tidak berubah. Oleh karena itu, simulasi kebijakan ini dilakukan secara satu per satu untuk masing-masing kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota akan memiliki nilai terstandarisasi yang baru dan meningkat. Dengan demikian dapat diketahui ada tidaknya peningkatan daya saing suatu kabupaten/kota jika faktor-faktor terlemahnya diperbaiki, sementara kabupaten/kota yang lain tidak melakukan tindakan perbaikan apapun.

BAB III

ANALISIS INDEKS DAYA SAING INVESTASI

3.1. Daya Saing Investasi Kabupaten dan Kota se Aceh

Dengan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh *Asia Competitiveness Institute* (ACI), peringkat indeks daya saing investasi diperoleh dengan mengurutkan skor standar setiap kabupaten/kota sebagaimana Tabel 3.1. terkait Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2025. Dilihat dari skor keseluruhan indeks daya saing investasi 23 kabupaten/kota se Aceh tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, terdapat 12 kabupaten/kota yang mengalami penurunan dan 11 kabupaten/kota yang meningkat skor indeks daya saing investasinya.

Tabel 3.1. Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2025 memperlihatkan Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/kota se Aceh yang diukur melalui 4 (empat) lingkup. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat rentang total nilai dari yang terendah sebesar -1,258 diperoleh Kabupaten Simeulue, sampai yang tertinggi sebesar 1,535 diperoleh oleh Kota Banda Aceh. Sebagai ibukota provinsi, Kota Banda Aceh tetap jauh lebih kompetitif dibanding kabupaten/kota yang lain di Aceh. Dari tahun 2019 sampai dengan 2025 Kota Banda Aceh memperoleh peringkat teratas untuk Indeks Daya Saing Investasi Aceh, disusul oleh Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Utara masing-masing di peringkat 2 dan 3. Sementara itu, untuk peringkat terendah sebelumnya diperoleh Kabupaten Simeulue di tahun 2024.

Kabupaten/kota lain mengalami pergeseran peringkat, dan beberapa mengalami peningkatan atau penurunan yang signifikan. Kabupaten/kota yang membaik, namun tidak menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, antara lain Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2024 berada pada peringkat 19 menjadi peringkat 11 pada tahun 2025 dengan skor indeks daya saing sebesar 0,046. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan peringkat yang cukup signifikan, antara lain Kota Sabang pada tahun 2024 berada pada peringkat 17 menjadi peringkat 12 pada tahun 2025 dengan skor indeks daya saing sebesar -0,172 dan Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2024 berada pada peringkat 23 menjadi peringkat 18 pada tahun 2025 dengan skor indeks daya saing sebesar -0,565. Beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan, antara lain Kabupaten Pidie Jaya menjadi peringkat 20 (tahun 2024, peringkat 13), Kabupaten Aceh Jaya peringkat 19 (peringkat 14, tahun 2024), Kabupaten Aceh Selatan peringkat 16 (peringkat 11, tahun 2024) dan Kabupaten Pidie peringkat 13 (peringkat 10, tahun 2024).

Pada tahun 2025, terdapat 11 (sebelas) kabupaten/kota yang memperoleh nilai positif meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 11

(sepuluh) kabupaten/kota. Dengan median skor indeks daya saing investasi sebesar -0,172 yang diperoleh oleh Kota Sabang. Hal ini menggambarkan kondisi daya saing investasi kabupaten/kota rata-rata meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. 1. Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Stabilitas Ekonomi Makro	Pemerintahan dan Institusi Publik	Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur	Nilai Indeks Daya Saing	Peringkat
Banda Aceh	1,684	-0,589	2,636	2,407	1,535	1
Aceh Besar	1,203	0,233	1,196	1,753	1,096	2
Aceh Utara	1,273	1,287	1,387	-0,281	0,917	3
Lhokseumawe	0,616	0,216	1,033	1,379	0,811	4
Aceh Barat	0,958	1,182	0,400	0,025	0,641	5
Aceh Tengah	0,359	0,271	0,767	0,776	0,543	6
Nagan Raya	1,546	0,045	0,777	-0,336	0,508	7
Bireuen	0,596	0,814	0,675	-0,478	0,402	8
Bener Meriah	-0,627	1,071	-0,341	0,347	0,112	9
Aceh Tamiang	0,037	-0,312	0,354	0,235	0,078	10
Aceh Timur	0,336	0,119	-0,277	0,005	0,046	11
Sabang	-0,887	-0,245	-0,616	1,059	-0,172	12
Pidie	0,069	0,346	0,213	-1,461	-0,208	13
Aceh Barat Daya	-0,572	-0,262	-0,530	0,012	-0,338	14
Langsa	-0,551	-0,972	-0,237	0,248	-0,378	15
Aceh Selatan	-0,569	0,335	-0,089	-1,257	-0,395	16
Singkil	-0,459	0,554	-1,236	-0,531	-0,418	17
Gayo Lues	-0,715	0,049	-0,561	-1,032	-0,565	18
Aceh Jaya	-0,779	-0,073	-1,188	-0,398	-0,610	19
Pidie Jaya	-0,904	0,505	-0,854	-1,689	-0,735	20
Aceh Tenggara	-0,861	-0,673	-0,525	-0,888	-0,737	21
Subulussalam	-0,643	-1,514	-1,366	-0,649	-1,043	22
simeulue	-1,296	-2,877	-1,614	0,753	-1,258	23

Dari hasil indeks daya saing investasi ini dapat dijelaskan bahwa penilaian indeks daya saing investasi suatu kabupaten/kota bukan hanya evaluasi terhadap kemajuan yang dicapai suatu daerah, namun juga ini merupakan penilaian relatif yang membandingkan kinerja suatu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Oleh karena itu, peningkatan dan penurunan peringkat yang telah dilakukan sejak tahun 2019 sampai dengan 2025 menunjukkan bahwa peningkatan daya saing investasi kabupaten/kota merupakan suatu proses berkelanjutan dan membutuhkan konsistensi sebuah kabupaten/kota untuk tetap kompetitif dan unggul dibanding kabupaten/kota lainnya.

Jika dibandingkan tahun 2024, indeks daya saing investasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan nilai di 11 (sebelas) kabupaten/kota. Kenaikan atau penurunan nilai indeks daya saing investasi didukung dan dipengaruhi oleh empat lingkup di setiap kabupaten/kota.

Pada peringkat 3 (tiga) teratas tetap diduduki oleh Banda Aceh, Aceh Utara dan Aceh Besar. Sementara untuk peringkat 10 (sepuluh) besar masih didominasi oleh kabupaten/kota yang sama. Peringkat 10 (sepuluh) besar dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2. Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/kota se Aceh Tahun 2024-2025

Kabupaten/ Kota	Stabilitas Ekonomi Makro		Pemerintahan dan Institusi Publik		Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja		Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		Nilai Indeks Daya Saing		Peringkat	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Banda Aceh	1,219	1,684	0,386	-0,589	3,306	2,636	2,501	2,407	1,853	1,535	1	1
Aceh Besar	0,882	1,203	1,439	0,233	0,056	1,196	1,397	1,753	0,944	1,096	3	2
Aceh Utara	1,373	1,273	1,771	1,287	1,123	1,387	0,278	-0,281	1,136	0,917	2	3
Lhokseumawe	0,296	0,616	-0,114	0,216	0,750	1,033	1,237	1,379	0,542	0,811	6	4
Aceh Barat	0,268	0,958	1,913	1,182	0,821	0,400	0,523	0,025	0,881	0,641	4	5
Aceh Tengah	1,049	0,359	-0,374	0,271	0,009	0,767	0,520	0,776	0,301	0,543	8	6
Nagan Raya	1,736	1,546	-0,018	0,045	1,080	0,777	-0,239	-0,336	0,640	0,508	5	7
Bireuen	0,651	0,596	0,097	0,814	1,009	0,675	0,225	-0,478	0,496	0,402	7	8
Bener Meriah	-0,303	-0,627	0,634	1,071	-0,108	-0,341	0,965	0,347	0,297	0,112	9	9
Aceh Tamiang	-0,161	0,037	0,159	-0,312	0,205	0,354	-0,991	0,235	-0,197	0,078	12	10
Aceh Timur	0,531	0,336	-1,479	0,119	0,154	-0,277	-1,837	0,005	-0,658	0,046	19	11
Sabang	-0,762	-0,887	-0,688	-0,245	-0,555	-0,616	0,075	1,059	-0,483	-0,172	17	12
Pidie	0,637	0,069	1,032	0,346	0,088	0,213	-0,965	-1,461	0,198	-0,208	10	13
Aceh Barat Daya	-0,455	-0,572	0,063	-0,262	-0,698	-0,530	-0,696	0,012	-0,447	-0,338	16	14
Langsa	-0,383	-0,551	-1,019	-0,972	-0,764	-0,237	0,480	0,248	-0,421	-0,378	15	15
Aceh Selatan	-0,650	-0,569	0,794	0,335	-0,430	-0,089	-0,146	-1,257	-0,108	-0,395	11	16
Singkil	-1,012	-0,459	-0,053	0,554	-1,138	-1,236	-0,286	-0,531	-0,622	-0,418	18	17
Gayo Lues	-0,804	-0,715	-1,013	0,049	-0,734	-0,561	-1,328	-1,032	-0,969	-0,565	23	18
Aceh Jaya	-0,680	-0,779	-0,492	-0,073	-0,376	-1,188	0,006	-0,398	-0,386	-0,610	14	19
Pidie Jaya	-0,923	-0,904	0,646	0,505	-0,994	-0,854	-0,182	-1,689	-0,363	-0,735	13	20
Aceh Tenggara	-0,665	-0,861	-1,116	-0,673	-0,606	-0,525	-1,459	-0,888	-0,961	-0,737	22	21
Subulussalam	-0,929	-0,643	-0,368	-1,514	-1,104	-1,366	-0,925	-0,649	-0,831	-1,043	20	22
Simeulue	-1,094	-1,296	-2,203	-2,877	-1,091	-1,614	0,844	0,753	-0,886	-1,258	21	23

Kota Banda Aceh menempati peringkat 1 dengan skor indeks 1,535, dipengaruhi oleh tingginya skor dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis, dan Tenaga Kerja (2,636) dan Kualitas Hidup dan Infrastruktur (2,407). Meskipun pada lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik nilainya negatif (-0,589), namun keunggulan di lingkup lain menutupi kekurangan ini.

Kabupaten Aceh Besar berada di peringkat 2 dengan skor 1,096, relatif stabil di semua lingkup, tidak ada nilai negatif. Kabupaten Aceh Utara berada di peringkat 3 dengan skor 0,917, memiliki nilai tinggi di Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

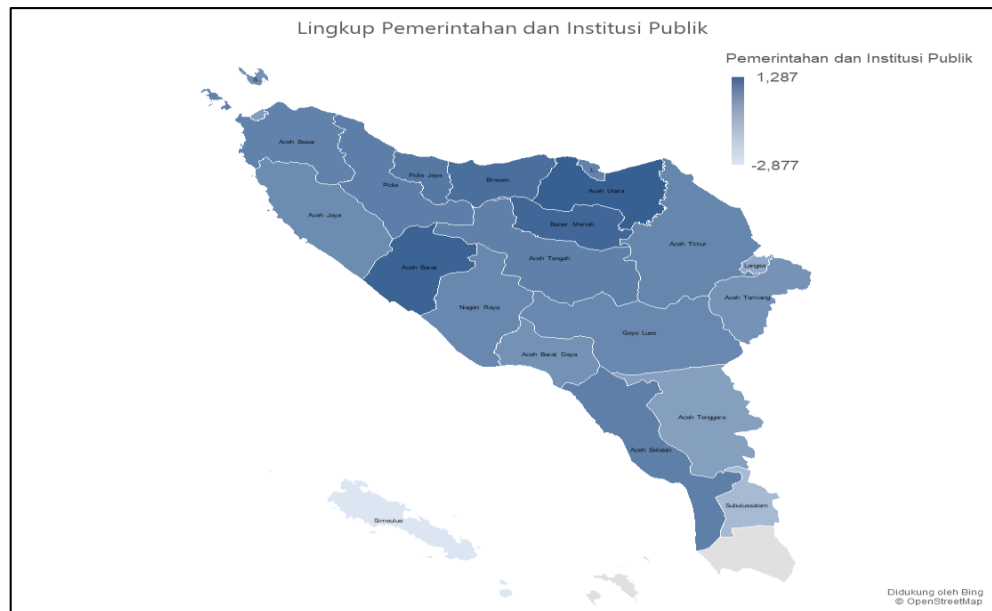
Dibandingkan tahun 2024, pada tahun 2025 rata-rata nilai terstandar kabupaten/kota untuk lingkup ini mengalami penurunan. Terdapat 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang mengalami penurunan nilai terstandar, antara lain Aceh Utara, Aceh Tengah, Nagan Raya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Timur, Sabang, Pidie, Aceh Barat Daya, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Tenggara, dan Simeulue.

Dari 3 (tiga) Sub Lingkup yang mendukung Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, dalam Tabel 3.3. dapat kita lihat untuk Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional yang memiliki nilai positif lebih banyak di kabupaten/kota dibanding 2 (dua) sub lingkup lainnya. Hal ini dapat dilihat antara lain indikator realisasi investasi asing yang masih terbatas serta masih rendahnya kegiatan ekspor dan impor di kabupaten/kota.

Tabel 3. 3. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Tahun 2025

Peringkat		Kabupaten/Kota	Nilai Terstandar		Nilai Terstandar Sublingkup					
2024	2025		2024	2025	Kedinamisan Ekonomi Regional		Keterbukaan Perdagangan dan Jasa		Daya Tarik terhadap Investasi Asing	
3	1	Banda Aceh	1,219	1,684	2,375		0,904		1,309	
1	2	Nagan Raya	1,736	1,546	0,855		0,438		2,920	
2	3	Aceh Utara	1,373	1,273	1,682		2,138		-0,351	
5	4	Aceh Besar	0,882	1,203	1,129		1,208		0,941	
10	5	Aceh Barat	0,268	0,958	1,770		-0,503		1,344	
9	6	Lhokseumawe	0,296	0,616	0,734		0,951		-0,007	
6	7	Bireuen	0,651	0,596	0,598		1,904		-0,878	
4	8	Aceh Tengah	1,049	0,359	0,190		-0,314		1,101	
8	9	Aceh Timur	0,531	0,336	0,297		1,379		-0,761	
7	10	Pidie	0,637	0,069	0,114		0,841		-0,767	
11	11	Aceh Tamiang	-0,161	0,037	-0,077		0,066		0,113	
22	12	Singkil	-1,012	-0,459	-1,176		-1,146		1,071	
13	13	Langsa	-0,383	-0,551	-0,306		-0,668		-0,527	
15	14	Aceh Selatan	-0,650	-0,569	-0,664		-0,602		-0,285	
14	15	Aceh Barat Daya	-0,455	-0,572	-0,627		-0,212		-0,720	
12	16	Bener Meriah	-0,303	-0,627	-0,688		-0,143		-0,876	
21	17	Subulussalam	-0,929	-0,643	-1,014		-1,453		0,714	
19	18	Gayo Lues	-0,804	-0,715	-1,037		-0,675		-0,235	
17	19	Aceh Jaya	-0,680	-0,779	-0,801		-0,696		-0,625	
16	20	Aceh Tenggara	-0,665	-0,861	-0,834		-0,611		-0,903	
18	21	Sabang	-0,762	-0,887	-0,778		-0,731		-0,908	
20	22	Pidie Jaya	-0,923	-0,904	-0,860		-0,743		-0,860	
23	23	simeulue	-1,094	-1,296	-0,883		-1,329		-0,811	

3.2.2. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik



Gambar 3. 2. Peta Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Lingkup Pemerintah dan Institusi, mencakup keberhasilan institusi pemerintahan dan juga harapan dari kemajuan di sektor publik yang terdiri dari 3 (tiga) sub lingkup, antara lain Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal; Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan; dan Persaingan, Standar Regulasi dan Penegakan Hukum.

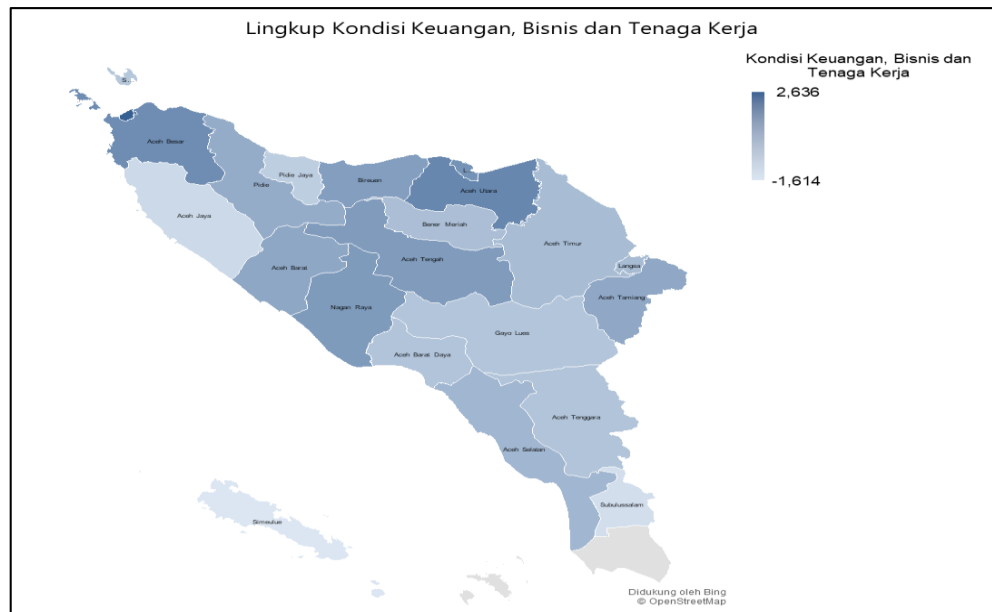
Dilihat dalam Tabel 3.4. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik dan pada Gambar 3.2. Peta Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik, kabupaten/kota dengan kinerja tertinggi tahun 2025, yaitu Kabupaten Aceh Utara dengan nilai terstandar 1,287 dan Kabupaten Aceh Barat dengan nilai terstandar 1,182. Hal ini menandakan peran pemerintahan dan institusi publik relatif kuat pada kabupaten tersebut.

Kabupaten/kota dengan kinerja terendah tahun 2025, yaitu Kabupaten Simeulue dengan nilai terstandar -2,877, Kota Subulussalam dengan nilai terstandar -1,514, dan Kota Langsa dengan nilai terstandar -0,972 menjadi yang terendah. Selain itu, pada Tabel 3.4. dapat dilihat juga bahwa beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu Aceh Timur, Gayo Lues, Bireuen, namun ada juga daerah dengan kemunduran tajam, seperti Subulussalam, Banda Aceh, dan Simeulue).

Tabel 3. 4. Pemerintahan dan Institusi Publik Tahun 2025

Peringkat		Kabupaten/Kota	Nilai Terstandar		Nilai Terstandar Sublingkup				
2024	2025		2024	2025	Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal		Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan		Persaingan, Standar Regulasi dan Penegakan Hukum
2	1	Aceh Utara	1,771	1,287	1,685		0,345		0,216
1	2	Aceh Barat	1,913	1,182	0,648		0,876		0,538
7	3	Bener Meriah	0,634	1,071	-0,469		2,017		0,319
10	4	Bireuen	0,097	0,814	0,972		0,110		0,338
13	5	Singkil	-0,053	0,554	-0,512		1,151		0,326
6	6	Pidie Jaya	0,646	0,505	0,182		0,798		-0,100
4	7	Pidie	1,032	0,346	0,927		-0,604		0,280
5	8	Aceh Selatan	0,794	0,335	0,009		0,265		0,311
16	9	Aceh Tengah	-0,374	0,271	-0,006		0,043		0,435
3	10	Aceh Besar	1,439	0,233	1,805		-1,318		-0,081
14	11	Lhokseumawe	-0,114	0,216	0,274		0,286		-0,183
22	12	Aceh Timur	-1,479	0,119	0,376		0,015		-0,183
19	13	Gayo Lues	-1,013	0,049	-0,572		0,118		0,539
12	14	Nagan Raya	-0,018	0,045	-0,777		0,002		0,853
17	15	Aceh Jaya	-0,492	-0,073	-0,609		0,288		0,193
18	16	Sabang	-0,688	-0,245	-0,604		-0,684		0,860
11	17	Aceh Barat Daya	0,063	-0,262	-1,034		0,401		0,176
9	18	Aceh Tamiang	0,159	-0,312	-0,424		0,613		-0,733
8	19	Banda Aceh	0,386	-0,589	2,081		0,706		-3,814
21	20	Aceh Tenggara	-1,116	-0,673	-0,473		-1,269		0,568
20	21	Langsa	-1,019	-0,972	-0,074		0,373		-1,995
15	22	Subulussalam	-0,368	-1,514	-1,120		-1,962		0,440
23	23	simeulue	-2,203	-2,877	-2,285		-2,573		0,698

3.2.3. Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja



Gambar 3. 3. Peta Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja mencakup keberhasilan keuangan, bisnis dan tenaga kerja yang terdiri dari 3 (tiga) sub lingkup, antara lain Kemampuan Finansial dan Efisien Bisnis, Labor Market Flexibility, serta Kinerja Produktivitas. Dilihat dari Tabel 3.5. Lingkup Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, kabupaten/kota yang menduduki peringkat teratas tahun 2025, yaitu Banda Aceh yang masih menduduki

peringkat 1 dengan nilai terstandar 2,636 yang sangat signifikan perbedaannya dengan kabupaten/kota lainnya. Namun, nilai terstandar Banda Aceh turun 0,669 poin dibandingkan tahun 2024 dengan nilai terstandar 3,306.

Hal ini terlihat jelas perbedaan warna Kota Banda Aceh dengan kabupaten/kota lainnya dalam Gambar 3.3. Peta Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja. Selanjutnya di posisi ke 2 diduduki oleh Kabupaten Aceh Utara dengan nilai terstandar 1,387 dan Kabupaten Aceh Besar diperingkat ke 3 dengan nilai terstandar 1,196 meningkat dari peringkat 10 menjadi 3 dibandingkan tahun sebelumnya.

Dibandingkan tahun 2024, pada tahun 2025 rata-rata nilai terstandar kabupaten/kota untuk lingkup ini mengalami peningkatan. Terdapat 12 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan nilai terstandar, yaitu Aceh Besar, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Barat, Aceh Tengah, Nagan Raya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Sabang, Pidie, Aceh Barat Daya, Langsa, Aceh Selatan, Singkil, Gayo Lues, Aceh Jaya, Pidie Jaya, dan Aceh Tenggara. Pada Tabel 3.5. dapat dilihat bahwa beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain Aceh Besar (+ 1,140), Aceh Tengah (+0,758), dan Langsa (+0,527). Sedangkan, Penurunan yang signifikan yaitu Banda Aceh (-0,670), Aceh Jaya (-0,812) dan Simeulue (-0,523).

Tabel 3. 5. Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Tahun 2025

Peringkat		Kabupaten/Kota	Nilai Terstandar		Nilai Terstandar Sublingkup					
2024	2025		2024	2025	Kemampuan Finansial dan Efisien Bisnis		Labor Market Flexibility		Kinerja Produktivitas	
1	1	Banda Aceh	3,306	2,636	2,527		-0,113		3,141	
2	2	Aceh Utara	1,123	1,387	0,440		2,068		0,414	
10	3	Aceh Besar	0,056	1,196	1,241		1,195		0,083	
6	4	Lhokseumawe	0,750	1,033	1,898		-0,731		1,010	
3	5	Nagan Raya	1,080	0,777	0,534		-0,583		1,686	
11	6	Aceh Tengah	0,009	0,767	0,408		0,606		0,601	
4	7	Bireuen	1,009	0,675	-0,426		2,202		-0,353	
5	8	Aceh Barat	0,821	0,400	-0,272		-0,588		1,702	
7	9	Aceh Tamiang	0,205	0,354	0,695		0,522		-0,472	
9	10	Pidie	0,088	0,213	-0,296		1,434		-0,689	
14	11	Aceh Selatan	-0,430	-0,089	0,637		-0,257		-0,568	
19	12	Langsa	-0,764	-0,237	0,567		-0,884		-0,183	
8	13	Aceh Timur	0,154	-0,277	-0,911		0,696		-0,369	
12	14	Bener Meriah	-0,108	-0,341	-1,021		0,764		-0,462	
16	15	Aceh Tenggara	-0,606	-0,525	-0,313		0,219		-1,013	
17	16	Aceh Barat Daya	-0,698	-0,530	0,036		-0,696		-0,457	
18	17	Gayo Lues	-0,734	-0,561	-0,332		-0,082		-0,770	
15	18	Sabang	-0,555	-0,616	-0,219		-1,159		0,080	
20	19	Pidie Jaya	-0,994	-0,854	-0,268		-0,659		-0,871	
13	20	Aceh Jaya	-0,376	-1,188	-1,621		-0,573		-0,309	
23	21	Singkil	-1,138	-1,236	-0,475		-1,445		-0,685	
22	22	Subulussalam	-1,104	-1,366	-1,086		-0,999		-0,793	
21	23	simeulue	-1,091	-1,614	-1,743		-0,936		-0,723	

Tabel 3. 6. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2025

Peringkat		Kabupaten/Kota	Nilai Terstandar		Nilai Terstandar Sublingkup		
2024	2025		2024	2025	Infrastruktur Fisik	Infrastruktur Teknologi	Kualitas Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial
1	1	Banda Aceh	2,501	2,407	-1,074	2,560	2,216
2	2	Aceh Besar	1,397	1,753	2,502	0,767	-0,573
3	3	Lhokseumawe	1,237	1,379	-1,516	1,972	1,664
11	4	Sabang	0,075	1,059	-1,071	0,778	1,921
7	5	Aceh Tengah	0,520	0,776	-0,429	0,689	0,933
5	6	Simeulue	0,844	0,753	1,009	-0,245	0,394
4	7	Bener Meriah	0,965	0,347	0,540	0,148	-0,154
8	8	Langsa	0,480	0,248	-1,357	1,143	0,596
20	9	Aceh Tamiang	-0,991	0,235	-0,180	-0,146	0,687
6	10	Aceh Barat	0,523	0,025	-0,283	-0,092	0,414
17	11	Aceh Barat Daya	-0,696	0,012	0,093	0,438	-0,513
23	12	Aceh Timur	-1,837	0,005	0,542	-0,517	-0,017
9	13	Aceh Utara	0,278	-0,281	1,828	-1,871	-0,389
15	14	Nagan Raya	-0,239	-0,336	-0,534	-0,331	0,348
12	15	Aceh Jaya	0,006	-0,398	-0,614	0,021	-0,019
10	16	Bireuen	0,225	-0,478	0,482	-0,221	-0,996
16	17	Singkil	-0,286	-0,531	0,737	-0,467	-1,087
18	18	Subulussalam	-0,925	-0,649	-0,104	0,054	-0,948
22	19	Aceh Tenggara	-1,459	-0,888	1,060	-1,178	-1,248
21	20	Gayo Lues	-1,328	-1,032	-0,410	-0,244	-0,933
13	21	Aceh Selatan	-0,146	-1,257	0,672	-0,883	-1,721
19	22	Pidie	-0,965	-1,461	-0,767	-0,979	-0,501
14	23	Pidie Jaya	-0,182	-1,689	-1,126	-1,395	-0,075

3.3. Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota

1. Kabupaten Simeulue

a. Gambaran Umum



Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.838,10 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Simeulue pada tahun 2024 berjumlah 98.633 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 31,94 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Simeulue atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2024 adalah 3.150,76 miliar rupiah, atau meningkat sebesar 215,66 miliar rupiah dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. Berdasarkan distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha, perekonomian Kabupaten Simeulue didominasi pertanian, kehutanan dan perikanan dengan persentase sebesar 38,06

persen. Selanjutnya lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 14,65 persen.

Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Simeulue atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2024 mencapai 1,89 triliun rupiah, ikut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,81 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Simeulue mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,43 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Simeulue pada tahun 2024 adalah sebesar 69,45 miliar rupiah, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 170,71 miliar rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 2,20 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Simeulue adalah di sektor industri makanan dengan nilai investasi 67,31 miliar rupiah, diikuti oleh sektor konstruksi dengan nilai investasi 1,39 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Simeulue pada tahun 2024 berjumlah 51.293 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 842 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71,08 persen. Hal ini diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya 5,85 persen menjadi 5,50 persen di tahun 2024.

Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Simeulue adalah tersedianya Pelabuhan Penyeberangan Simeulue dan Bandara Lasikin, serta infrastruktur jalan beraspal yang mengalami peningkatan 14,89 km pada tahun 2024.

Beberapa kondisi tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Melalui indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.7. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Simeulue terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 7. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Simeulue Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Simeulue	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 23 Nilai Terstandar : -1,258	
Stabilitas Ekonomi Makro 23 Nilai Terstandar : -1,296	Pemerintahan dan Institusi Publik 23 Nilai Terstandar : -2,877

Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 23 Nilai Terstandar : -1,614	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 6 Nilai Terstandar : 0,753
--	---

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan Tabel 3.7. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Simeulue pada tahun 2025 berada di peringkat 23 dengan nilai terstandar -1,258 atau turun dibandingkan tahun 2024 di peringkat 21 dengan nilai terstandar sebesar -0,886. Bila dilihat dari indeks daya saing investasi sebelumnya, nilai terstandar Kabupaten Simeulue terus mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi penurunan semua lingkup dibanding tahun sebelumnya

Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.8. Simulasi What If Kabupaten Simeulue, jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,056 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 12. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing lainnya. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Simeulue akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

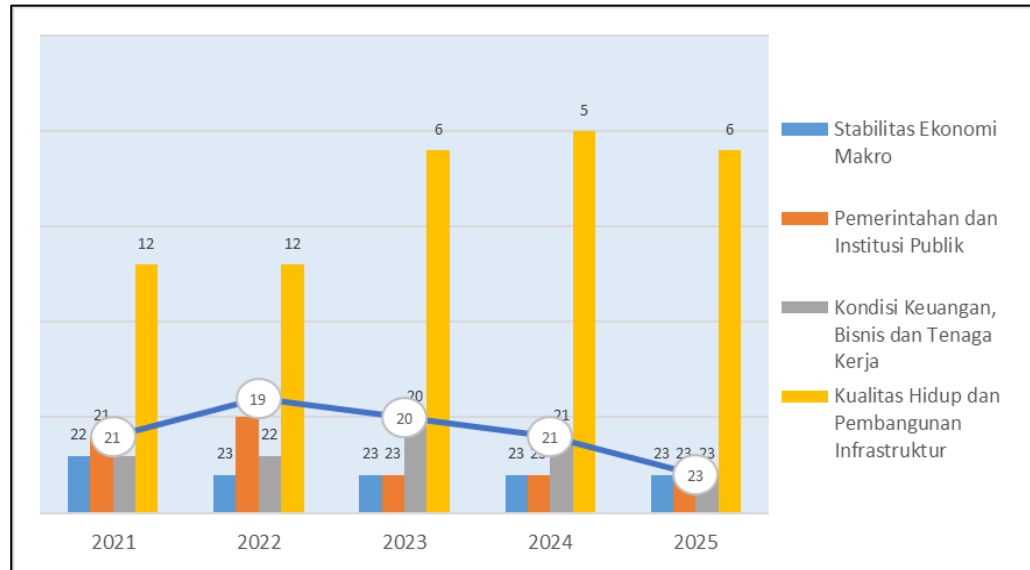
Tabel 3. 8. Simulasi What If Kabupaten Simeulue

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		23		12	
Nilai Terstandar		-1,258		0,056	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	23	16	Peringkat	23	13
Nilai Terstandar	-1,296	-0,657	Nilai Terstandar	-2,877	-0,003
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	23	20	Peringkat	6	3
Nilai Terstandar	-1,614	-0,941	Nilai Terstandar	0,753	1,377

b. Kondisi Daya Saing Investasi

Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur pada Kabupaten Simeulue menjadi lingkup tertinggi di tahun 2025, untuk nilai terstandar semua lingkup menurun dibandingkan tahun 2024. Penurunan

paling signifikan terjadi pada lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik yang menunjukkan tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan.



Gambar 3. 5. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Simeulue Tahun 2021-2025

Gambaran indeks daya saing investasi Kabupaten Simeulue tahun 2021 sampai dengan 2025, Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur menjadi lingkup tertinggi setiap tahunnya dengan nilai positif dan nilai terstandar tertinggi pada tahun 2024. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro memiliki nilai terstandar tertinggi pada tahun 2021, penurunan bertahap sejak 2021, dengan penurunan terbesar antara 2024–2025. Pemerintahan dan Institusi Publik nilai terstandar tertinggi pada tahun 2021, penurunan tajam mulai 2023. Untuk Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja nilai terstandar tahun 2023 nilai terstandar tertinggi.

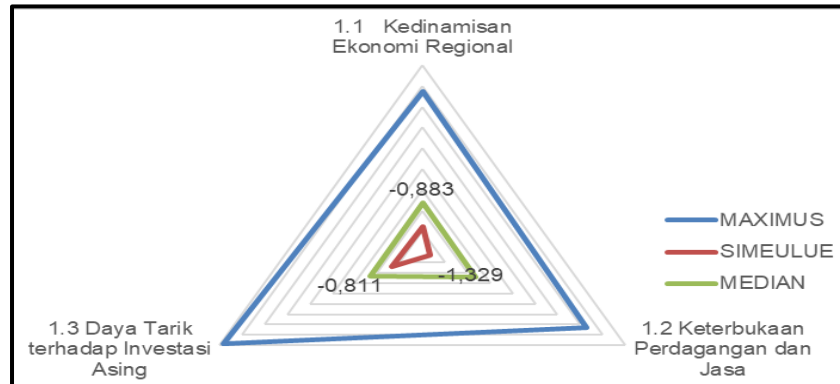
Dapat dilihat dalam Gambar 3.5. Lingkup Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Simeulue Tahun 2021-2025, pada Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan nilai terstandar yang cukup signifikan hal ini menunjukkan masalah serius pada tata kelola, kapasitas institusi, atau kepercayaan publik.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Kabupaten Simeulue berada pada posisi terendah dengan Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Simeulue berada pada urutan ke 23 dengan nilai terstandar sebesar -1,296 menurun 0,202 poin dibandingkan tahun 2024. Berdasarkan Gambar 3.6. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue dapat dilihat bahwa semua sub lingkup yang mendukung lingkup ini berada di bawah rata-rata seluruh kabupaten/kota. Dilihat dari setiap indikator dalam lingkup ini mengalami penurunan realisasi investasi, baik PMA, maupun

PMDN, keterbukaan perdagangan dan jasa (ekspor dan impor). Hal ini dipengaruhi oleh akses pasar, ekspor, dan konektivitas ekonomi masih terbatas.

Jika menggunakan simulasi what if indikator tersebut diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Simeulue dapat meningkat dari peringkat 16 dari 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh dengan peningkatan nilai terstandar menjadi -0,657.

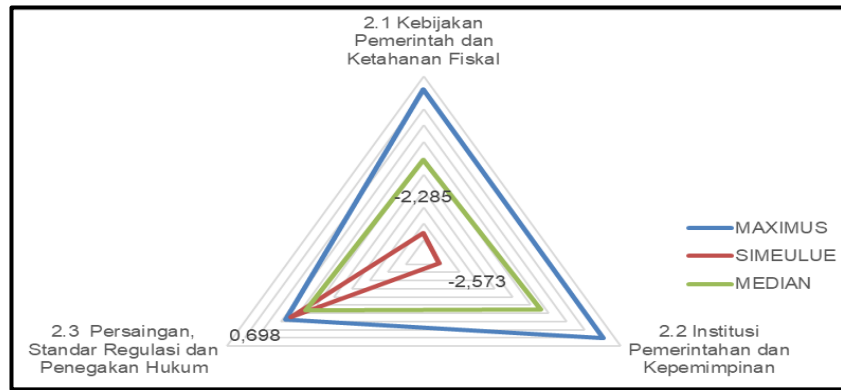


Gambar 3. 6. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Simeulue berada pada urutan ke 23 dengan nilai terstandar sebesar -2,877 atau mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,673 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -2,203. Berdasarkan Gambar 3.7. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan memiliki nilai terstandar -2,573 dan merupakan nilai terburuk, menandakan masalah serius dalam tata kelola, kapasitas kepemimpinan, dan kualitas birokrasi.

Sub Lingkup Persaingan, Regulasi dan Penegakan Hukum dengan nilai terstandar 0,698 merupakan Sub Lingkup dengan nilai positif dan berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya, menunjukkan Kabupaten Simeulue relatif lebih baik dalam aspek regulasi dan penegakan hukum. Indikator yang patut menjadi perhatian adalah evaluasi kinerja pemerintah daerah yang cukup rendah. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Simeulue dapat meningkat sampai peringkat 13 dengan nilai terstandar -0,003.



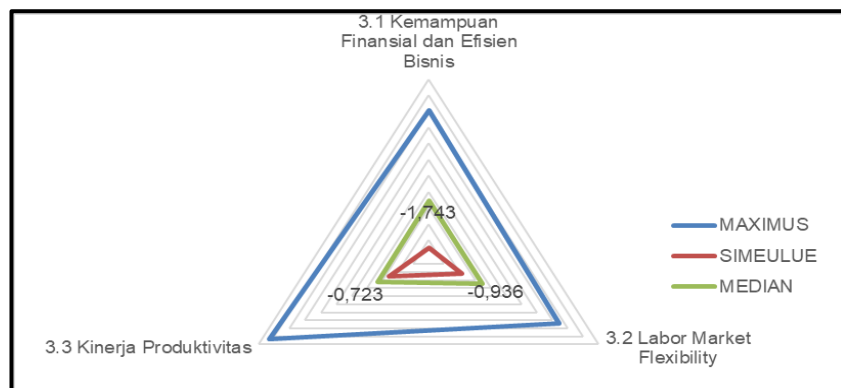
Gambar 3. 7. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Simeulue berada pada urutan ke 23 (tahun 2024, peringkat 21), diikuti dengan nilai terstandar sebesar -1,614 atau menurun sebesar 0,523. Berdasarkan Gambar 3.8. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue, Sub lingkup pada lingkup ini semua berada di bawah rata-rata kabupaten/kota.

Hal ini dipengaruhi bisnis lokal masih sulit berkembang karena keterbatasan akses modal, rendahnya skala usaha, dan efisiensi operasional yang belum optimal, keterampilan pekerja tidak sesuai kebutuhan pasar, mobilitas tenaga kerja rendah, atau aturan ketenagakerjaan yang kurang mendukung fleksibilitas.

Salah satu indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah jumlah Kredit Bermasalah dan Pinjaman Bank. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Simeulue dapat meningkat menjadi peringkat 20 dengan nilai terstandar -0,914.



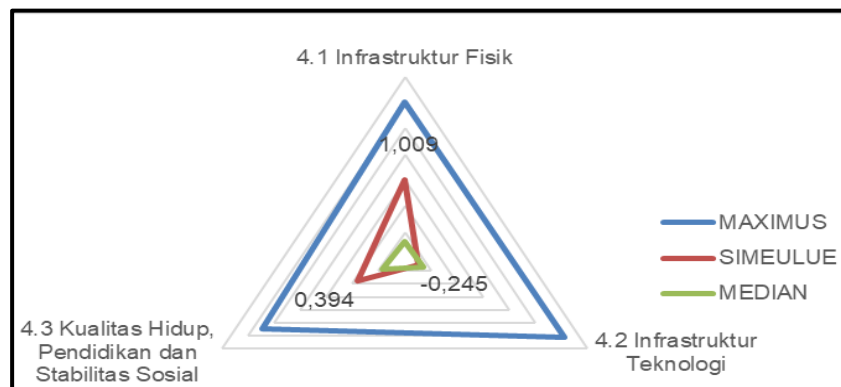
Gambar 3. 8. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Simeulue berada pada urutan ke 6 (tahun 2024, peringkat 5) dengan nilai terstandar sebesar 0,753 menurun 0,091 poin. Lingkup ini merupakan lingkup dengan peringkat tertinggi untuk Kabupaten Simeulue dibandingkan lingkup-lingkup lainnya, dimana Kabupaten Simeulue berada dalam peringkat 10 besar.

Pada Gambar 3.9. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue untuk Sub Lingkup yang mendukung lingkup ini, terdapat 2 (dua) Sub Lingkup yang berada di atas rata-rata kabupaten/kota, yaitu Infrastruktur Fisik serta Kualitas Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, pelabuhan, listrik) sudah relatif memadai dibanding daerah lain dan kualitas hidup masyarakat serta stabilitas sosial relatif baik, meskipun belum setara.

Sedangkan untuk Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi memiliki nilai negatif dan berada di bawah rata-rata kabupaten/kota, dikarenakan keterbatasan pada akses internet, digitalisasi, dan fasilitas teknologi. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain sambungan telepon untuk Masyarakat masih rendah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka harapan hidup saat lahir. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Simeulue dapat meningkat menjadi peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,377.



Gambar 3. 9. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Simeulue

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Simeulue dilakukan perbaikan dan dengan asumsi jika kabupaten/kota lainnya tidak melakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks

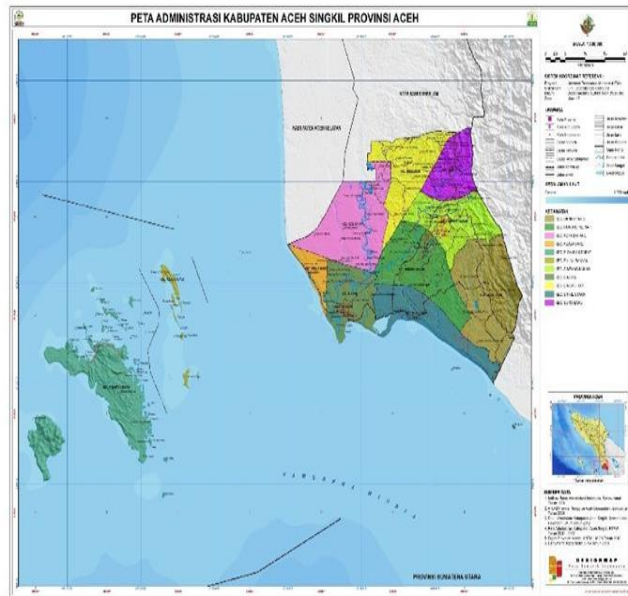
Daya Saing Investasi Kabupaten Simeulue pada tahun 2025 berada pada posisi 23 akan meningkat menjadi peringkat 12.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Memilih sektor/komoditas unggulan/potensi sumber daya lokal yang berorientasi ekspor, peningkatan daya saing, peningkatan kualitas, dan peningkatan permintaan luar negeri untuk menarik investasi asing/domestik;
- b. Memperluas Akses Pasar dengan mendorong perdagangan antar wilayah dan integrasi dengan pasar regional;
- c. Memperkuat Ekonomi Lokal dengan diversifikasi sektor ekonomi agar lebih dinamis, tidak tergantung pada satu sektor;
- d. Mereformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM pemerintahan, dan kepemimpinan berbasis akuntabilitas;
- e. Meningkatkan perencanaan anggaran jangka menengah dan transparansi fiskal;
- f. Mendorong akses pembiayaan UMKM, koperasi, dan usaha kecil melalui kredit mikro atau program pemerintah;
- g. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi;
- h. Menggunakan teknologi tepat guna di sektor unggulan (pertanian, perikanan, pariwisata);
- i. Mendorong kolaborasi usaha lokal dengan investor atau koperasi agar produktivitas meningkat dan nilai tambah lebih tinggi;
- j. Mentransformasi Digital dengan Perluasan jaringan internet dan peningkatan literasi digital Masyarakat serta digitalisasi layanan publik dan UMKM agar lebih kompetitif; dan
- k. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan agar selaras dengan pembangunan fisik.

2. Kabupaten Aceh Singkil

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.857,88 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2024 berjumlah 135.684 orang, dengan nilai PDRB per kapita sebesar 25,36 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Singkil atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun

2024 mencapai 3,44 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 238,57 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 3,20 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai tambah di beberapa lapangan usaha. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2024 dihasilkan oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 32,52 persen. Selanjutnya kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 14,44 persen, disusul oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 12,30 persen.

Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Aceh Singkil atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2024 mencapai 1,97 triliun rupiah, ikut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,91 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Aceh Singkil mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,46 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2024 adalah sebesar 1,15 triliun rupiah atau meningkat jauh sebesar 922,93 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 33,44 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Singkil adalah di sektor industri makanan dengan nilai investasi 661,02 miliar rupiah, diikuti oleh sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan nilai investasi 484,69 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2024 berjumlah 54.492

orang atau mengalami peningkatan sebanyak 1.111 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 57,82 persen. Hal ini diikuti juga dengan menurunnya tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya 6,84 persen menjadi 6,44 persen di tahun 2024.

Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Singkil adalah tersedianya Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Pelabuhan Penyeberangan Pulo Banyak dan Bandara Syekh Hamzah Fansuri, serta meningkatnya infrastruktur jalan beraspal dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.9. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Singkil terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 9. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Singkil	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 17 Nilai Terstandar : -0,418	
Stabilitas Ekonomi Makro 12 Nilai Terstandar : -0,459	Pemerintahan dan Institusi Publik 5 Nilai Terstandar : 0,554
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 21 Nilai Terstandar : -1,236	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 17 Nilai Terstandar : -0,531

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel 3.9. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2025 berada di peringkat 17 dengan nilai terstandar -0,418 atau naik dibandingkan tahun 2024 di peringkat 18 dengan nilai terstandar sebesar -0,662. Peningkatan indeks daya saing investasi dipengaruhi meningkatnya beberapa lingkup yang mempengaruhi indeks ini.

Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.10. Simulasi What If Kabupaten Aceh Singkil, jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,108 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 9. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak

pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Singkil akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

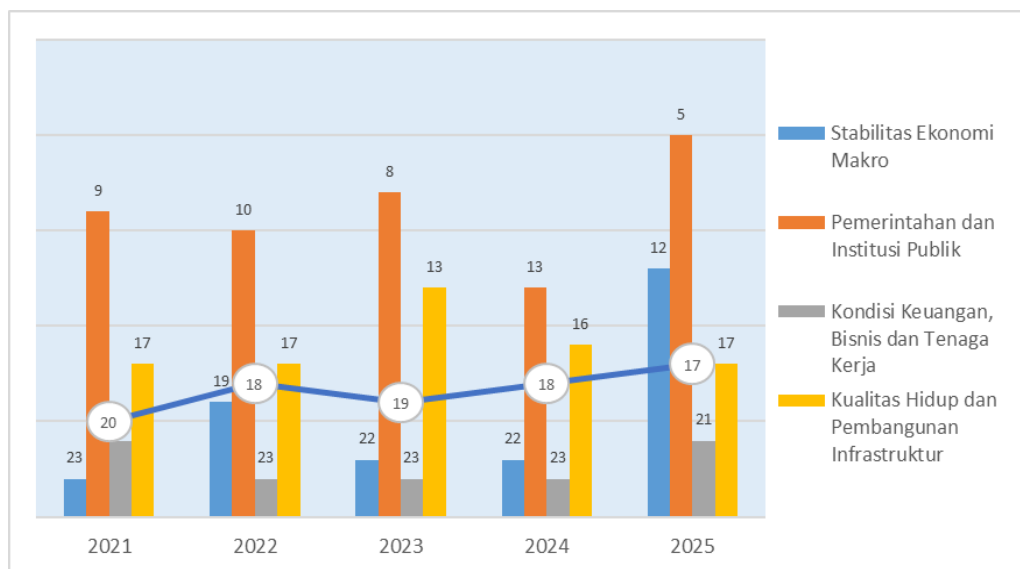
Tabel 3. 10. Simulasi What If Kabupaten Singkil

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		17		9	
Nilai Terstandar		-0,418		0,108	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	12	10	Peringkat	5	4
Nilai Terstandar	-0,459	0,194	Nilai Terstandar	0,554	0,896
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	21	20	Peringkat	17	7
Nilai Terstandar	-1,236	-1,022	Nilai Terstandar	-0,531	0,365

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi

Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan didukung meningkatnya lingkup Stabilitas Ekonomi Makro dengan nilai terstandar -0,459 meningkat 0,553 poin serta Pemerintahan dan Institusi Publik dengan nilai terstandar 0,554 meningkat secara signifikan 0,606 poin. Sedangkan untuk 2 (dua) lingkup lain mengalami penurunan.



Gambar 3. 10. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021-2025

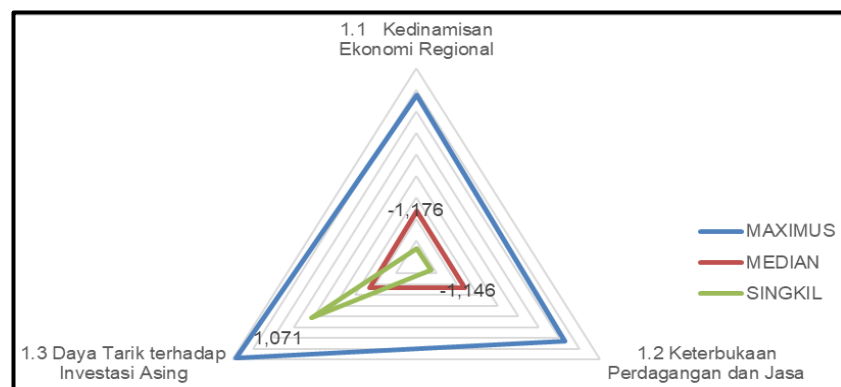
Gambaran Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021 sampai dengan 2025 pada Gambar 3.10. dapat dilihat bahwa Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro selalu memiliki nilai terstandar negatif, pada tahun 2025 terdapat perbaikan signifikan menjadi $-0,459$ (terbaik dalam 5 tahun). Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik memiliki nilai terstandar tertinggi di tahun 2025. Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja memiliki nilai terstandar negatif di setiap tahunnya, nilai tertinggi di tahun 2024. Sedangkan untuk Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur memiliki nilai terstandar tertinggi tahun 2023, Infrastruktur dan kualitas hidup perlu penguatan agar mendukung pembangunan jangka panjang.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Singkil berada pada urutan ke 17 dengan nilai terstandar $-0,418$. Dari 3 (tiga) Sub Lingkup yang mendukung Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional serta Keterbukaan Perdagangan dan Jasa berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi regional di Singkil masih kurang dinamis, pertumbuhan sektor produktif relatif tertinggal, integrasi perdagangan dan jasa Singkil masih lemah.

Untuk Sub Lingkup Daya Tarik terhadap Investasi Asing berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya, walaupun tetap jauh dari nilai maksimum. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi daya tarik investasi relatif lebih baik dibandingkan rata-rata. Hal tersebut dapat lebih jelas terlihat pada Gambar 3.11.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain PDRB, ekspor dan impor. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Singkil dapat meningkat pada peringkat 10 dengan diikuti meningkatnya nilai standar $0,194$.

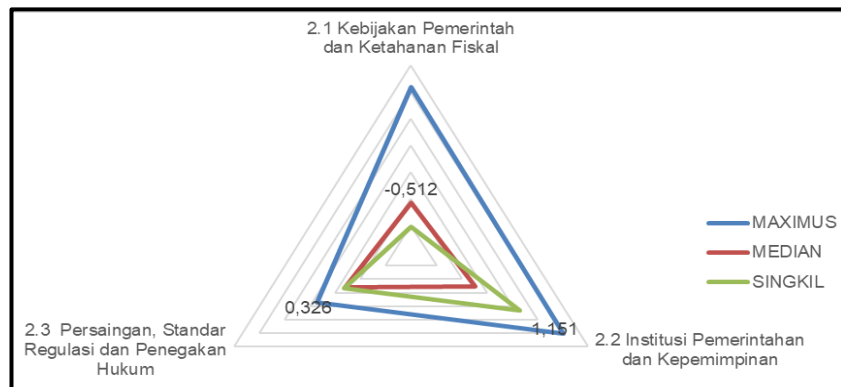


Gambar 3. 11. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Singkil

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Singkil berada pada urutan ke 5 dengan nilai terstandar 0,554. Berdasarkan gambar 3.12. terdapat 2 (dua) Sub Lingkup yang berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya, yaitu Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan serta Persaingan, Standar Regulasi dan Penegakan Hukum. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola, pelayanan publik, atau efektivitas lembaga pemerintah di Aceh Singkil.

Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, yaitu keseimbangan fiskal antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Bila indikator ini diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Singkil meningkat menjadi peringkat 4 dengan nilai terstandar 0,896.

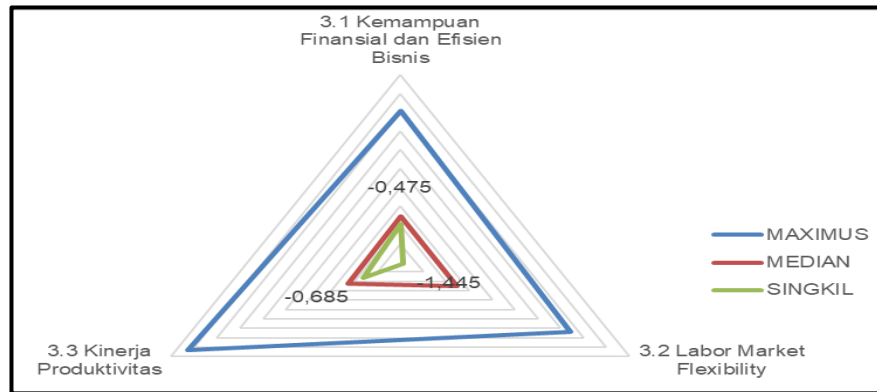


Gambar 3. 12. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Singkil

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi bawah, yaitu pada peringkat 21 dengan nilai terstandar sebesar -1,236. Pada Gambar 3.13. dapat dilihat bahwa, semua sub lingkup pendukung lingkup ini berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya. Permasalahan lapangan kerja, iklim usaha, dan akses keuangan masih menjadi tantangan terbesar pada Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja.

Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah TPAK dan penduduk bekerja. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Singkil dapat meningkat sampai naik pada peringkat 20 dengan nilai terstandar -1,022.

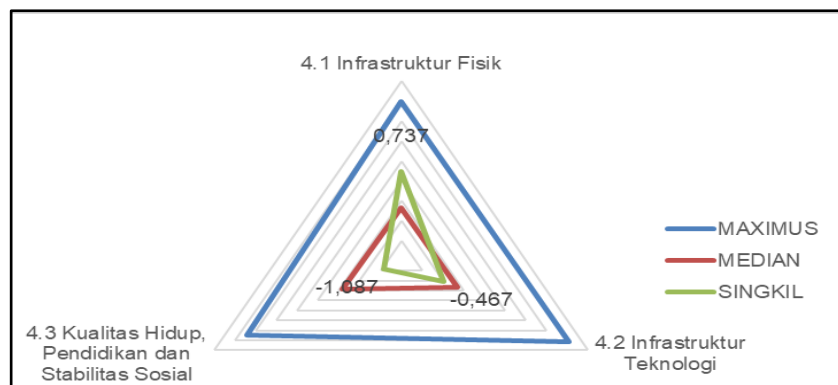


Gambar 3. 13. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Singkil

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Singkil berada pada urutan ke 17 dengan nilai terstandar -0,531, dibandingkan tahun sebelumnya nilai terstandar menurun -0,245 poin (peringkat 16, -0,286). Berdasarkan Gambar 3.14. dapat dilihat bahwa hanya Sub Lingkup Infrastruktur Fisik berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses jalan, transportasi dasar, dan sarana fisik relatif cukup baik dibandingkan daerah lainnya.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain akses internet, digitalisasi layanan, dan infrastruktur teknologi masih terbatas, tingkat buta huruf, APS SMP, sanitasi layak dan angka harapan hidup. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Singkil dapat meningkat sampai naik pada peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,365.



Gambar 3. 14. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Singkil

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

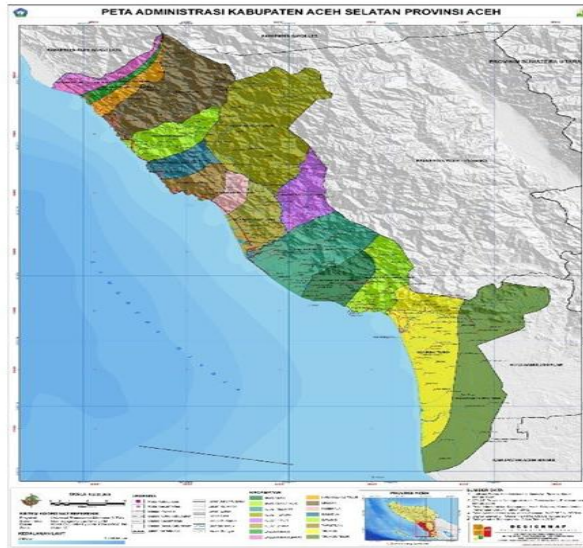
Berdasarkan simulasi What If, jika 20 indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Singkil dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2025 berada pada posisi 17 akan meningkat menjadi peringkat 9 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,108.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, sektor unggulan, dan konektivitas antarwilayah;
- b. Membuka akses perdagangan dan jasa dengan perbaikan infrastruktur distribusi/logistik;
- c. Mengoptimalkan potensi investasi asing dengan promosi potensi unggulan dan penyediaan insentif investasi;
- d. Meningkatkan akses modal dan dukungan UMKM;
- e. Melakukan pelatihan tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar;
- f. Meningkatkan produktivitas melalui teknologi dan efisiensi proses;
- g. Memfokus pada peningkatan infrastruktur teknologi (akses internet, digitalisasi layanan publik, ekosistem ekonomi digital);
- h. Memperbaiki kualitas hidup dan SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- i. Mempertahankan dan meningkatkan infrastruktur fisik agar tetap menjadi keunggulan kompetitif Aceh Singkil.

3. Kabupaten Aceh Selatan

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 4.173,82 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 berjumlah 241.994 orang, dengan nilai PDRB per kapita sebesar 30,85 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 7,47 triliun rupiah atau meningkat sebesar 431,77 miliar rupiah dari nilai tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 4,67 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 4,79 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Aceh Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,21 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 30,52 persen. Selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 15,49 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 adalah sebesar 334,80 miliar rupiah atau meningkat jauh sebesar 298,72 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 4,48 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2023 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Selatan adalah di sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan nilai investasi 190,62 miliar rupiah, diikuti oleh sektor pertambangan dengan nilai investasi 90,18 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2024 berjumlah 109.425 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 1.719 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 59,24 persen. Sedangkan tingkat pengangguran Kabupaten Aceh Selatan juga menunjukkan perbaikan dengan menurunnya tingkat pengangguran dari 4,73 persen pada tahun yang lalu menjadi 4,56 persen di tahun 2024.

Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Selatan adalah tersedianya Pelabuhan Penyeberangan Tapaktuan, Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji dan Bandara Teuku Cut Ali.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.11. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Selatan terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 11. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Selatan	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 16 Nilai Terstandar : -0,395	
Stabilitas Ekonomi Makro 14 Nilai Terstandar : -0,569	Pemerintahan dan Institusi Publik 8 Nilai Terstandar : 0,335
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 11 Nilai Terstandar : -0,089	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 21 Nilai Terstandar : -1,257

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel 3.11. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 berada di peringkat 16 dengan nilai terstandar -0,395 atau turun dibandingkan tahun 2024 di peringkat 11 dengan nilai terstandar -0,108. Penurunan ini dipengaruhi 2 (dua) lingkup mengalami penurunan nilai terstandar, karena aspek kelembagaan dan infrastruktur yang memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.

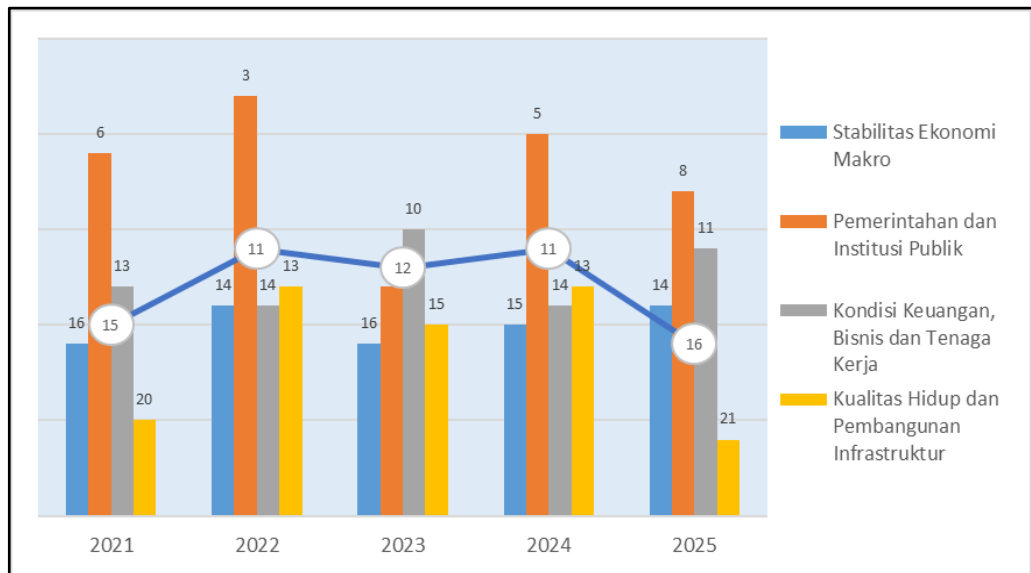
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.12. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,216 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 9. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Selatan akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 12. Simulasi What If Kabupaten Aceh Selatan

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		16		9	
Nilai Terstandar		-0,395		0,216	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat		14	13	Peringkat	8
Nilai Terstandar		-0,569	-0,483	Nilai Terstandar	0,335
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat		11	11	Peringkat	21
Nilai Terstandar		-0,089	0,101	Nilai Terstandar	-1,257

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 15. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021-2025

Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 menurun, dari 4 (empat) lingkup yang mendukung hanya Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik yang memiliki nilai positif, namun dibandingkan tahun sebelumnya lingkup ini mengalami penurunan 0,460 poin. Penurunan yang signifikan terjadi pada Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur. Faktor utama penurunan IDSI dipengaruhi oleh

kelemahan tata kelola pemerintahan dan merosotnya kualitas hidup/infrastruktur

Untuk Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan 0,340 walaupun masih memiliki nilai negatif. Lingkup ini masih rentan fluktuasi, dipengaruhi oleh faktor eksternal (ekonomi global, investasi, pasar kerja).

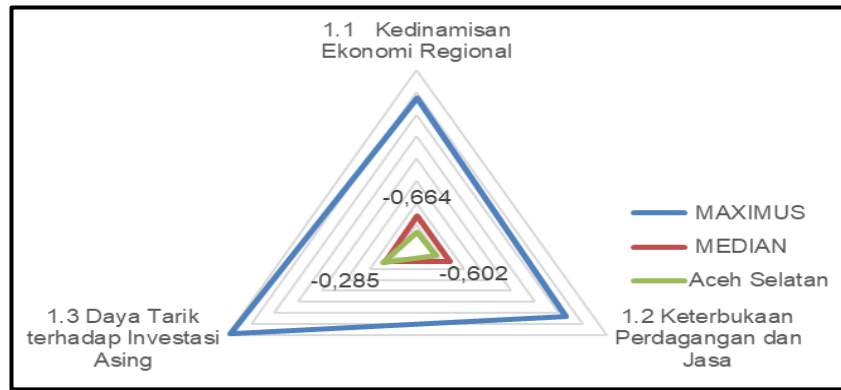
Berdasarkan Gambar 3.15. Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Selatan berada di titik tertinggi pada 2022–2023, lalu mengalami penurunan cukup tajam di 2024–2025. Penurunan pada tahun 2025 dikarenakan kelemahan tata kelola pemerintahan dan merosotnya kualitas hidup/infrastruktur. Jika tidak ada intervensi, tren penurunan ini bisa memperburuk daya tarik investasi dan menurunkan kualitas pembangunan daerah.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, pada tahun 2025 Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Selatan berada pada urutan ke 16 dengan nilai terstandar -0,569 meningkat 0,081 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 3.16. Sub Lingkup pendukung lingkup ini hanya Sub Lingkup Daya Tarik terhadap Investasi Asing berada sedikit lebih tinggi dari rata-rata kabupaten/kota lainnya, namun masih jauh dari nilai maksimum kabupaten/kota. Hal ini dipengaruhi keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum mendukung, atau persepsi risiko investasi yang tinggi.

Untuk Sub Lingkup lainnya berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya, yaitu Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional serta Sub Lingkup Keterbukaan Perdagangan dan Jasa. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi daerah kurang berkembang, daya dorong sektor-sektor ekonomi rendah, masih terbatasnya interaksi ekonomi antarwilayah, rendahnya ekspor/arus barang-jasa, atau belum optimalnya pemanfaatan potensi pasar regional. Dilihat pada setiap indikator pada Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro indikator yang patut mendapat perhatian adalah rendahnya pertumbuhan PDRB.

Jika menggunakan simulasi what if indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Selatan dapat meningkatkan nilai terstandar sebesar -0,483.

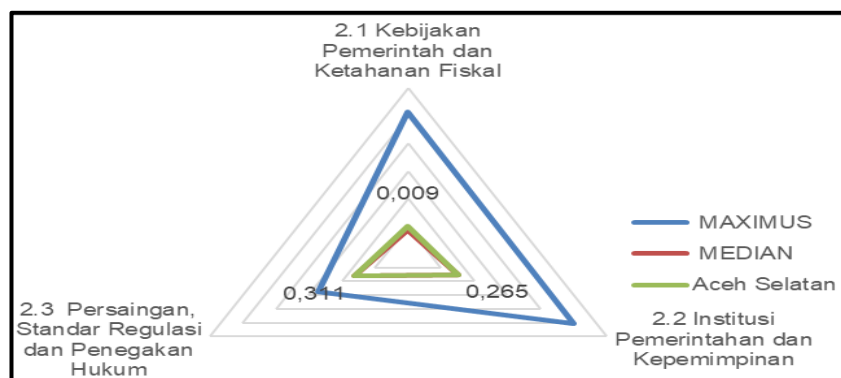


Gambar 3. 16. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Selatan

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 berada pada peringkat 8 dengan nilai terstandar 0,335 atau menurun 0,460 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan gambar 3.17. Sub Lingkup pendukung lingkup ini terdapat 2 (dua) Sub Lingkup berada di garis rata-rata kabupaten/kota dan hanya Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal yang berada sedikit di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini dipengaruhi kapasitas PAD yang rendah, kebijakan fiskal yang belum efektif, kinerja kepemimpinan dan tata Kelola publik masih rendah.

Dari sisi regulasi dan hukum relatif lebih baik dibanding dua Sub Lingkup lainnya, tapi tetap jauh dari standar optimal. Ada indikasi regulasi sudah ada, namun kualitas implementasi dan konsistensi penegakan hukum masih lemah. Dari 9 (sembilan) indikator yang mempengaruhi Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik, indikator pendapatan pajak menjadi salah satu 20 indikator terendah. Jika indikator ini diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Selatan dapat meningkat pada peringkat 7 dengan nilai terstandar menjadi 0,433.



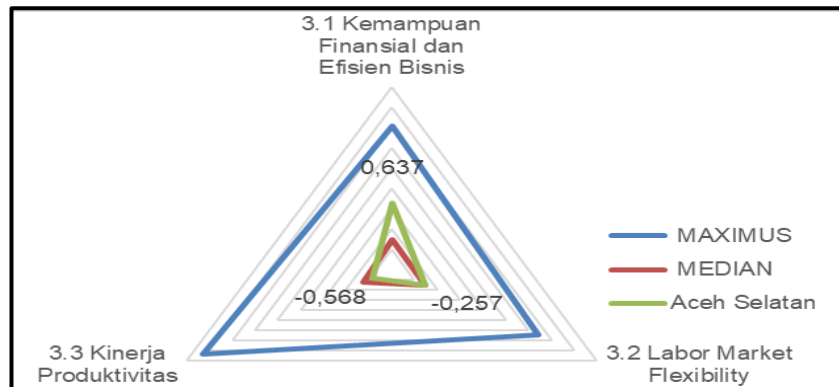
Gambar 3. 17. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Selatan

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Selatan berada pada urutan ke 11 dengan nilai terstandar 0,089 atau meningkat 0,340 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 3.18, Sub Lingkup yang mendukung lingkup ini dapat dilihat bahwa hanya Sub Lingkup Kemampuan Finansial dan Efisiensi Bisnis berada di atas rata-rata kabupaten lainnya, Sedangkan untuk Sub Lingkup lainnya berada di bawah dan di garis rata-rata kabupaten/kota lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa, akses terhadap pembiayaan, efisiensi biaya usaha, serta kapasitas finansial UMKM/industri relatif lebih baik dibanding rata-rata daerah lain. Terkait Fleksibilitas pasar kerja (upah, mobilitas, kesempatan kerja) rendah sehingga pasar tenaga kerja belum mampu menyesuaikan kebutuhan dunia usaha dengan cepat. Untuk kinerja produktivitas rendah disebabkan rendahnya keterampilan tenaga kerja, keterbatasan teknologi, dan lemahnya inovasi di sektor utama.

Jika hal tersebut dapat diperbaiki, maka nilai terstandar Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Selatan dapat meningkat dengan nilai terstandar 0,101.



Gambar 3. 18. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Selatan

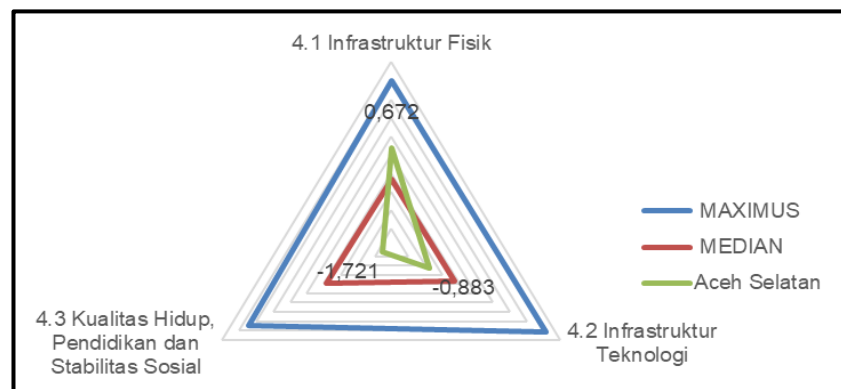
4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Selatan berada pada urutan ke 21 dengan nilai terstandar -1,252 atau menurun -1,111 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 3.19. Sub Lingkup yang mendukung lingkup ini hanya Sub Lingkup Infrastruktur Fisik yang berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini dikarenakan infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan, listrik, air bersih) relatif cukup baik dan mendukung mobilitas barang/jasa, serta memperkuat daya tarik investasi.

Untuk 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di bawah rata-rata yaitu Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi serta Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial. Hal ini dipengaruhi oleh akses internet, digitalisasi, layanan teknologi, dan penetrasi telekomunikasi masih rendah sehingga membatasi inovasi, efisiensi bisnis, serta integrasi ke ekonomi digital.

Selain itu, aspek pendidikan, kesehatan, layanan dasar, serta stabilitas sosial masih jauh tertinggal. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas SDM, memperbesar ketidaksetaraan, dan mengurangi daya tarik investasi.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Selatan dapat meningkat sampai naik pada peringkat 5 dengan nilai terstandar menjadi 0,811.



Gambar 3. 19. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Selatan

c. Perbaiki Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Selatan dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025 berada pada posisi 16 akan meningkat menjadi peringkat 9 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,216.

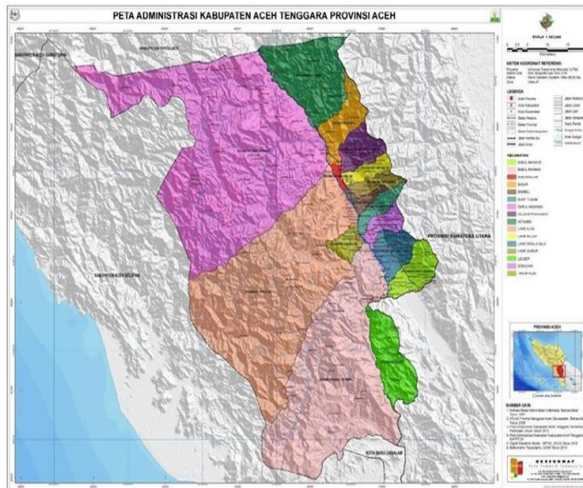
Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Mengembangkan sektor unggulan (pertanian, perikanan, pariwisata) dengan inovasi dan hilirisasi;
- b. Memperbaiki konektivitas logistik, kurangi hambatan distribusi, tingkatkan akses pasar luar daerah;

- c. Meningkatkan daya tarik investasi dengan penyederhanaan regulasi, perbaiki infrastruktur dasar, dan promosikan potensi daerah (misalnya perkebunan, wisata bahari);
- d. Mengoptimalkan PAD melalui pengelolaan aset, pajak dan retribusi daerah, serta inovasi pendapatan;
- e. Mempercepat digitalisasi layanan publik, tingkatkan kapasitas ASN, dan dorong kepemimpinan yang transparan dan akuntabel;
- f. Memperkuat kepastian hukum, dan tingkatkan pengawasan regulasi agar kompetisi usaha lebih sehat;
- g. Mereformasi regulasi ketenagakerjaan, dorong sistem pelatihan berbasis industri, tingkatkan mobilitas tenaga kerja antar-sektor;
- h. Mendorong produktivitas dengan modernisasi teknologi produksi, program peningkatan skill pekerja, insentif inovasi bagi UMKM dan industri kecil;
- i. Mempercepat jaringan internet, pembangunan BTS di wilayah terpencil, digitalisasi layanan publik dan UMKM; dan
- j. Meningkatkan mutu pendidikan (SMK/kejuruan berbasis industri), akses kesehatan, serta program penguatan sosial.

4. Kabupaten Aceh Tenggara

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 4.179,12 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2024 berjumlah 235.589 orang, dengan nilai PDRB per kapita mencapai 28,74 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Tenggara atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 6,74 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 480,05 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai 6,26 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB ADHK Kabupaten Aceh Tenggara mengalami kenaikan dari 3,69 triliun rupiah pada tahun sebelumnya menjadi 3,82 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Aceh Tenggara mengalami

pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya kegiatan di bidang pertanian yang mencapai 43,13 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2024 adalah sebesar 3,96 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebanyak 4,66 miliar rupiah dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,62 miliar rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 0,06 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Tenggara adalah di sektor listrik, gas dan air dengan nilai investasi 2,78 miliar rupiah, diikuti oleh sektor perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi 664,42 juta rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2024 berjumlah 119.906 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 2.308 orang. Hal ini didukung dengan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja yang mencapai 70,51 persen dan menurunnya tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya sebesar 5 persen menjadi 4,79 persen pada tahun 2024. Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Tenggara adalah tersedianya Bandara Alas Leuser, dan meningkatnya infrastruktur jalan beraspal dari tahun yang lalu.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.13. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Tenggara terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 13. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tenggara	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 21 Nilai Terstandar : -0,737	
Stabilitas Ekonomi Makro 20 Nilai Terstandar : -0,861	Pemerintahan dan Institusi Publik 20 Nilai Terstandar : -0,673
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 15 Nilai Terstandar : -0,525	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 19 Nilai Terstandar : -0,888

Berdasarkan tabel 3.13. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2025 berada di peringkat 21 dengan nilai terstandar -0,737 atau meningkat 0,224 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 22 dengan nilai terstandar -0,961. Peningkatan ini didukung 3 (tiga) lingkup mengalami peningkatan nilai terstandar. Namun, Kondisi ekonomi makro masih lemah sehingga perlu penguatan pada sektor-sektor produktif dan ketahanan ekonomi lokal.

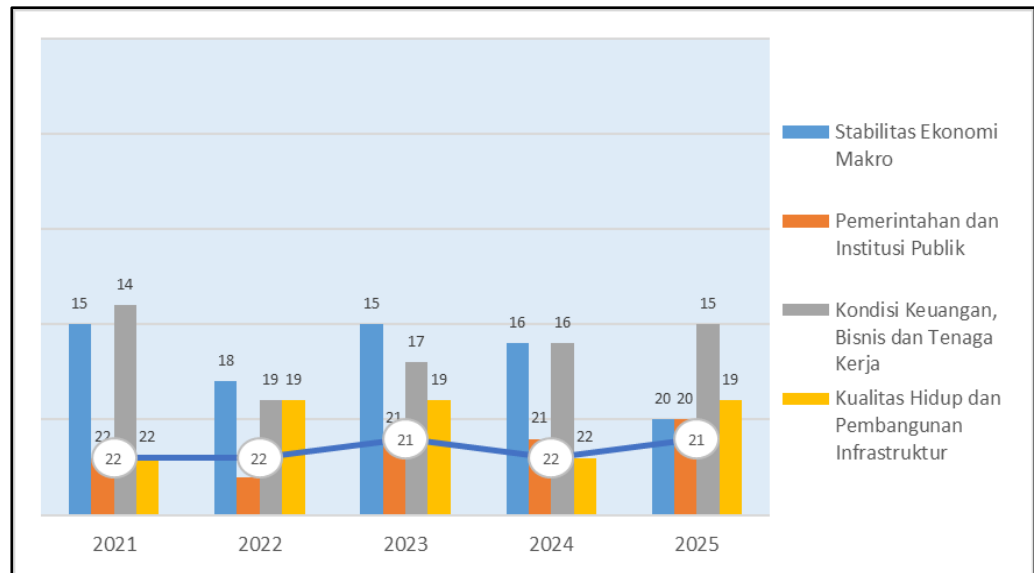
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.14. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,065 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 10. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Tenggara akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 14. Simulasi What If Kabupaten Aceh Tenggara

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		21		10	
Nilai Terstandar		- 0,737		0,065	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	20	13	Peringkat	20	13
Nilai Terstandar	-0,861	-0,506	Nilai Terstandar	-0,673	0,022
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	15	12	Peringkat	19	5
Nilai Terstandar	-0,525	-0,120	Nilai Terstandar	-0,888	0,863

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 20. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021-2024

Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2025 meningkat 1 peringkat dari peringkat 22 menjadi peringkat 21. Peningkatan ini didukung dengan membaiknya 3 (tiga) lingkup, yaitu Pemerintahan dan institusi publik, infrastruktur dan kualitas hidup, serta bisnis dan tenaga kerja. Sedangkan lingkup stabilitas ekonomi makro masih menurun.

Berdasarkan Gambar 3.20. Kabupaten Aceh Tenggara sedang bertransisi menuju perbaikan daya saing investasi. Setelah penurunan pada 2021–2023, tahun 2025 menunjukkan pemulihan struktural di pemerintahan, infrastruktur, dan lapangan kerja. Namun, fondasi ekonomi makro masih rapuh, menjadi hambatan utama daya saing jangka panjang.

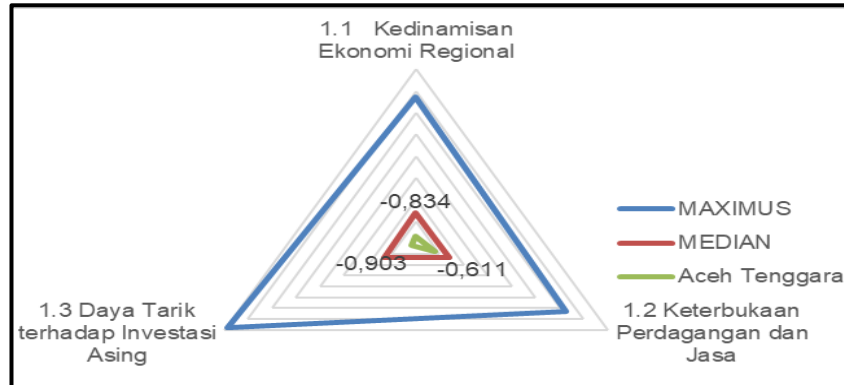
1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tenggara berada pada urutan ke 20 dengan nilai terstandar -0,861 atau menurun 0,197 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 3.21. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup yang mendukung lingkup ini berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya.

Sub Lingkup Keterbukaan Perdagangan dan Jasa menjadi Sub Lingkup yang lebih baik dibanding Sub Lingkup lain (nilai paling tinggi di antara tiga sub lingkup). Hal ini menunjukkan ada sedikit potensi perdagangan dan jasa, meski tetap di bawah kabupaten/kota lainnya.

Untuk Sub Lingkup lainnya menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pergerakan ekonomi masih lemah, terutama dalam hal aktivitas ekonomi regional. Terkait daya tarik terhadap investasi asing merupakan Sub

Lingkup terlemah di lingkup ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tenggara kurang menarik bagi investor asing. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Tenggara dapat meningkat menjadi peringkat 13 diikuti dengan peningkatan nilai terstandar menjadi -0,506.



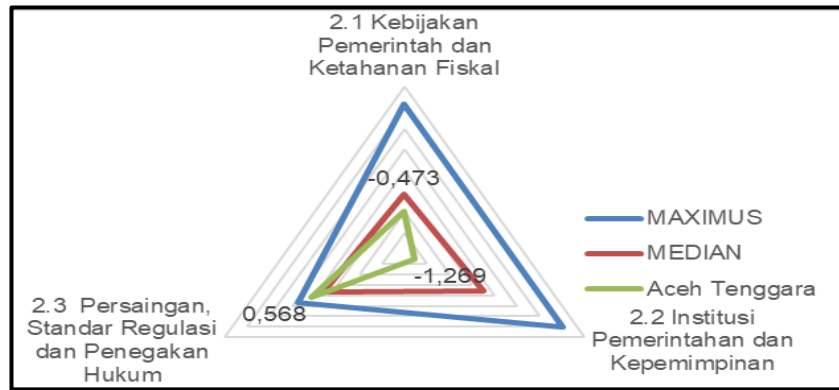
Gambar 3. 21. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tenggara

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tenggara berada pada peringkat 20 dengan nilai terstandar sebesar -0,673 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 sebesar 0,443 poin. Pada Gambar 3.22. dapat dilihat bahwa hanya Sub Lingkup Persaingan, Standar Regulasi dan Penegakan Hukum yang berada di atas rata-rata kabupaten/Kota lainnya. Hal ini menunjukkan Kabupaten Aceh Tenggara relatif lebih baik dalam menciptakan regulasi, standar persaingan usaha, dan penegakan hukum sehingga menjadi modal untuk membangun kepercayaan investor dan mendorong iklim usaha yang sehat.

Sedangkan Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan menunjukkan kelemahan serius dalam tata kelola pemerintahan, kapasitas birokrasi, kualitas kepemimpinan daerah, serta koordinasi antar instansi. Begitu pula pada Sub Lingkup Kebijakan Pemerintahan dan Ketahanan Fiskal menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal masih rendah.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Tenggara dapat meningkat sampai peringkat 13 diikuti dengan peningkatan nilai terstandar menjadi 0,022.



Gambar 3. 22. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tenggara

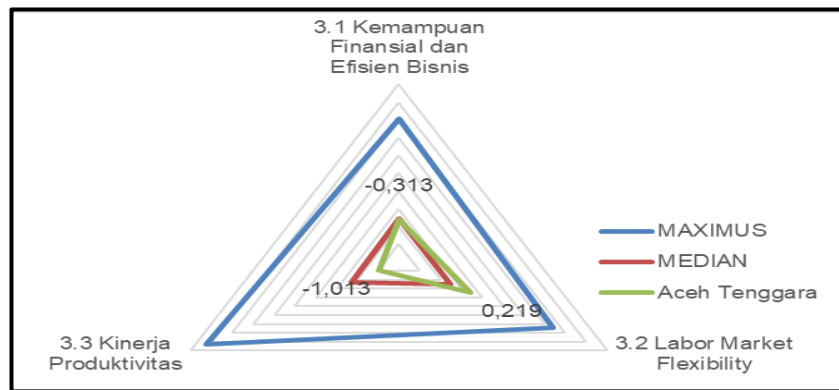
3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tenggara berada pada urutan ke 15 dengan nilai terstandar -0,525 atau meningkat 0,080 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.23. dapat dilihat Sub Lingkup Labor Market Flexibility berada di atas rata-rata Kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan pasar tenaga kerja Kabupaten Aceh Tenggara relatif lebih fleksibel dibanding Sub Lingkup lain. Fleksibilitas ini berarti ketersediaan tenaga kerja cukup, upah relatif kompetitif, atau adanya mobilitas tenaga kerja.

Untuk Sub Lingkup Kemampuan Finansial dan Efisiensi Bisnis berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini mencerminkan keterbatasan dalam mendukung tumbuhnya dunia usaha, khususnya UMKM dikarenakan akses pembiayaan, manajemen keuangan usaha, serta efisiensi biaya operasional masih rendah.

Begitu juga untuk Sub Lingkup Kinerja Produktivitas berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya dan memiliki nilai paling rendah dibandingkan Sub Lingkup lainnya. Rendahnya produktivitas menunjukkan lemahnya output per tenaga kerja, keterbatasan teknologi, serta minimnya inovasi di sektor ekonomi.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tenggara dapat meningkat sampai naik pada peringkat 12 diikuti dengan peningkatan nilai terstandar menjadi -0,120.

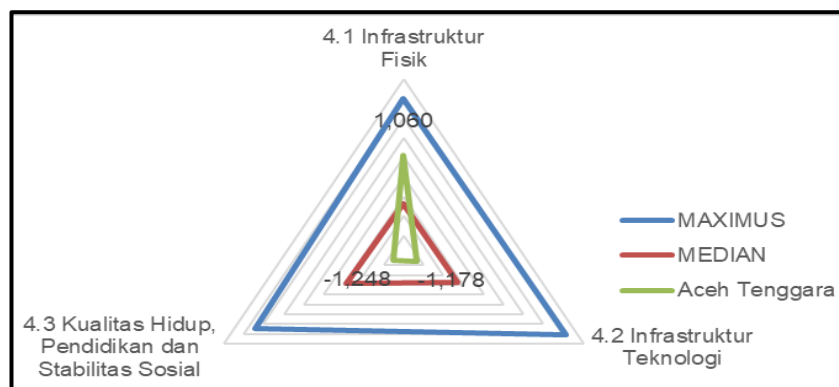


Gambar 3. 23. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tenggara

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tenggara berada pada urutan ke 19 dengan nilai terstandar sebesar -0,888 atau meningkat 0,570 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 3.24. Sub Lingkup Infrastruktur Fisik menjadi Sub Lingkup terkuat pada lingkup ini dengan nilainya positif dan berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas transportasi, dan utilitas (air, listrik) relatif cukup baik.

Sub Lingkup Infrastuktur Teknologi serta Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan akses dan kualitas infrastruktur teknologi (internet, jaringan komunikasi, digitalisasi) masih sangat terbatas, masih rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, layanan sosial, serta stabilitas sosial masyarakat. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka lingkup ini dapat meningkat sampai naik pada peringkat 5 diikuti dengan peningkatan nilai terstandar menjadi 0,863.



Gambar 3. 24. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tenggara

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2025 berada pada posisi 21 akan meningkat menjadi peringkat 10 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,065.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Mendorong penguatan sektor unggulan, peningkatan infrastruktur, serta menciptakan iklim usaha yang lebih ramah investasi;
- b. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja (*upskilling* dan *reskilling*);
- c. Mendukung finansial dan akses pembiayaan untuk UMKM;
- d. Melakukan inovasi teknologi dan manajemen untuk mendorong produktivitas;
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial;
- f. Membangun investasi pada infrastruktur digital (internet cepat, jaringan telekomunikasi); dan
- g. Memanfaatkan infrastruktur fisik yang sudah ada untuk memperluas akses layanan publik dan distribusi ekonomi.

5. Kabupaten Aceh Timur

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 6.040,60 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2024 berjumlah 443.638 orang, dengan nilai PDRB per kapita sebesar 33,67 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 14,93 triliun rupiah, atau meningkat sebesar 1,13 triliun rupiah dibanding tahun 2023 yang mencapai 13,80 triliun rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB pada tahun 2024

oleh kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 44,89 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Timur tercatat mencapai 9,34 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 8,93 triliun rupiah. Selama tahun 2024 Kabupaten Aceh Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,63 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 101,18 miliar rupiah atau menurun sebesar 201,38 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 0,68 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Timur adalah di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan nilai investasi 41,86 miliar rupiah, diikuti oleh sektor jasa lainnya dengan nilai investasi 21,74 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2024 berjumlah 192.746 orang atau meningkat sebanyak 4.721 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 60,84 persen. Hal ini diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Timur dari tahun yang lalu 8,03 persen menjadi 7,75 persen di tahun 2024. Infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Timur adalah meningkatnya panjang jalan beraspal dari tahun sebelumnya sebesar 5,94 km.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.15. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Timur terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 15. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Timur	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 11 Nilai Terstandar : 0,046	
Stabilitas Ekonomi Makro 9 Nilai Terstandar : 0,336	Pemerintahan dan Institusi Publik 12 Nilai Terstandar : 0,119

Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 13 Nilai Terstandar : -0,277	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 12 Nilai Terstandar : 0,005
--	--

Berdasarkan tabel 3.15. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2025 berada di peringkat 11 dengan nilai terstandar 0,046 atau meningkat 0,704 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 19 dengan nilai terstandar -0,658. Peningkatan ini didukung 2 (dua) lingkup mengalami peningkatan nilai terstandar. Kondisi Sektor keuangan, bisnis, dan tenaga kerja justru menurun, serta Stabilitas ekonomi makro melemah, perlu penguatan sektor produktif.

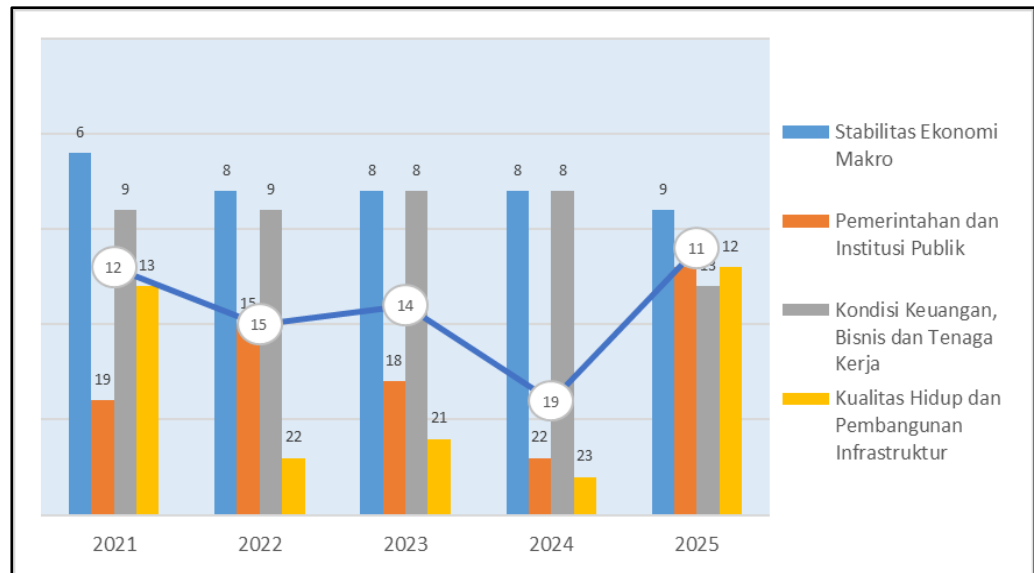
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.16. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,713 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 5. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Timur akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 16. Simulasi What If Kabupaten Aceh Timur

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		11		5	
Nilai Terstandar		0,046		0,713	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	9	6	Peringkat	12	9
Nilai Terstandar	0,336	0,627	Nilai Terstandar	0,119	0,319
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	13	10	Peringkat	12	2
Nilai Terstandar	-0,277	0,324	Nilai Terstandar	-0,005	1,582

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 25. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021-2025

Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2025 meningkat, dari 4 (empat) lingkup yang mendukung hanya Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja yang memiliki nilai negatif, dibandingkan tahun 2021–2023, dan menurun tajam di 2024–2025 hingga negatif (-0,277). Hal ini bisa menunjukkan melemahnya dinamika usaha, investasi, atau pasar tenaga kerja

Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,195 poin. Nilai terstandar tertinggi lingkup pada 2023 (0,547), sedikit turun di 2025 (0,336). Hal ini menunjukkan ekonomi daerah relatif terkendali dengan pertumbuhan moderat, namun belum kuat secara struktural.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik sempat terus menurun hingga titik terendah di 2024 (-1,479), lalu melonjak positif ke 0,119 pada 2025. Perbaikan ini menunjukkan adanya reformasi besar di tata kelola, peningkatan pelayanan publik, dan efisiensi administrasi.

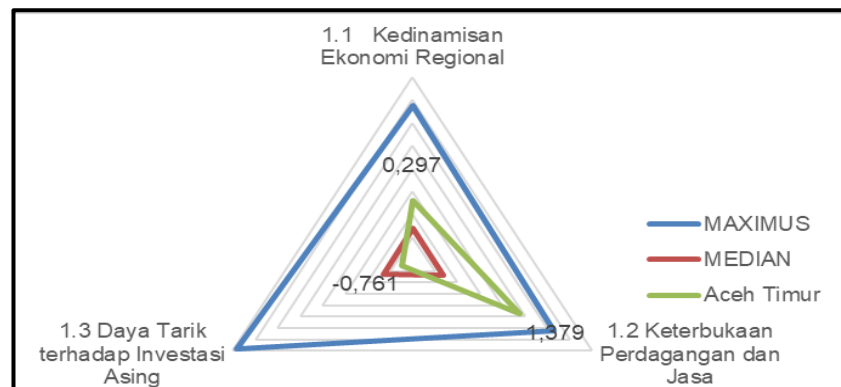
Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur i sempat sangat lemah 2022–2024 (nilai negatif besar), lalu meningkat secara signifikan pada tahun 2025 (0,005). Ini menandakan ada percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar (jalan, air, pendidikan, kesehatan).

Berdasarkan Gambar 3.25. Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Timur pada 2021–2024, Aceh Timur menghadapi tekanan di sektor pemerintahan, infrastruktur, dan bisnis. Namun pada tahun 2025 terjadi penguatan pada tata kelola dan infrastruktur, yang menjadi motor kebangkitan daya saing.

1) **Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro**

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke 9 dengan nilai terstandar sebesar 0,336 atau menurun 0,195 dibanding tahun 2024. Berdasarkan Gambar 3.26. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan ekonomi regional relatif dinamis tetapi masih jauh dari capaian maksimal. Ini menandakan aktivitas ekonomi sudah ada, namun kontribusi sektor unggulan belum terlalu kuat.

Pada Sub Lingkup Keterbukaan Perdagangan dan Jasa memiliki nilai terstandar tertinggi pada lingkup ini. Hal ini menandakan akses perdagangan dan jasa cukup terbuka dan berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Sub Lingkup Daya Tarik terhadap Investasi Asing berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya dan bernilai negatif, menandakan minat investasi asing masih rendah. Faktor penyebab bisa berupa iklim investasi, infrastruktur, atau regulasi yang kurang mendukung investor luar. Jika hal ini diperbaiki, maka nilai standar Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro dapat meningkat menjadi peringkat 6 dengan nilai terstandar 0,627.



Gambar 3. 26. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Timur

2) **Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik**

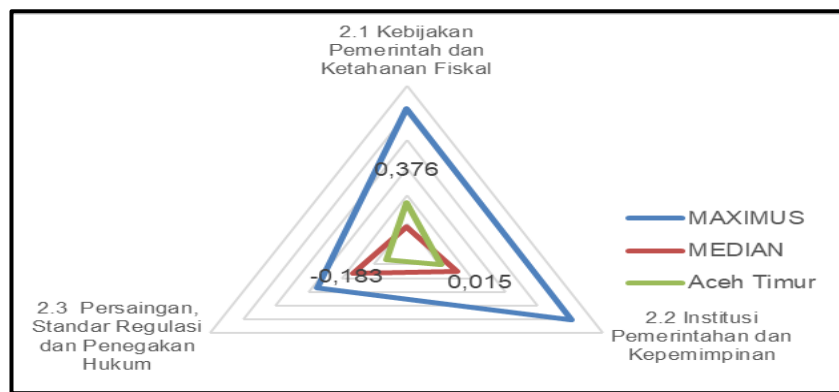
Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke 12 dengan nilai terstandar 0,119 atau meningkat signifikan 1,599 poin. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan total Pemda (+4,7 persen), Evaluasi kinerja Pemda (+14,38 poin), Tingkat penyelesaian kriminalitas (+12,88 persen) dan Tingkat kriminalitas menurun.

Berdasarkan Gambar 3.27. dapat dilihat Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan pengelolaan pendapatan

dan belanja daerah relatif sehat, meskipun masih jauh di bawah maksimum.

Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan berada hampir sama dengan rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan, tata kelola, dan efektivitas institusi pemerintah daerah masih lemah. Hal yang juga pada Sub Lingkup Persaingan, Standar Regulasi, dan Penegakan Hukum menjadi Sub Lingkup paling rendah pada lingkup ini. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing dalam penegakan hukum dan regulasi masih buruk.

Jika hal tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Timur dapat meningkat pada peringkat 9 dengan nilai terstandar 0,319.



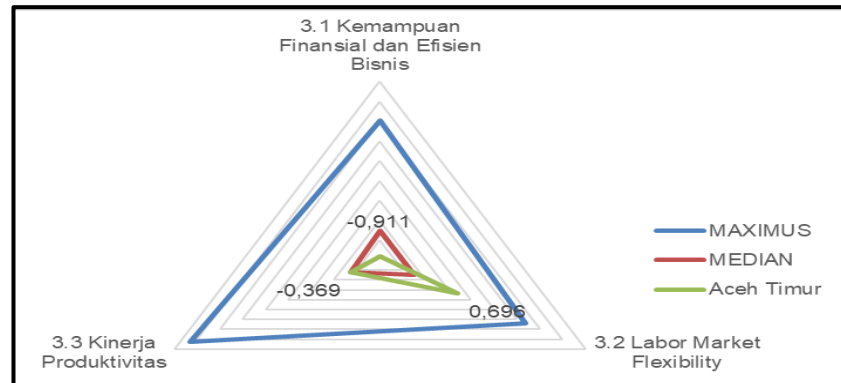
Gambar 3. 27. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Timur

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke 13 dengan nilai terstandar sebesar -0,277 atau menurun 0,431 poin dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 3.28. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kemampuan Finansial dan Efisien Bisnis berada di bawah rata-rata. Ini menunjukkan kelemahan serius dalam efisiensi biaya bisnis, akses pembiayaan, maupun kemampuan keuangan perusahaan lokal.

Untuk Sub Lingkup Kinerja Produktivitas berada pada garis rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja atau sektor usaha masih rendah, kemungkinan disebabkan keterbatasan teknologi, kualitas SDM, atau rendahnya nilai tambah sektor utama. Sedangkan Sub Lingkup Labor Market Flexibility merupakan kekuatan utama pada lingkup ini. Hal ini berarti pasar tenaga kerja relatif fleksibel, ketersediaan tenaga kerja cukup, serta mobilitas atau adaptasi pasar kerja mendukung aktivitas ekonomi.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka nilai terstandar pada Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Timur meningkat menjadi 0,324 dengan peringkat tetap ke 10.



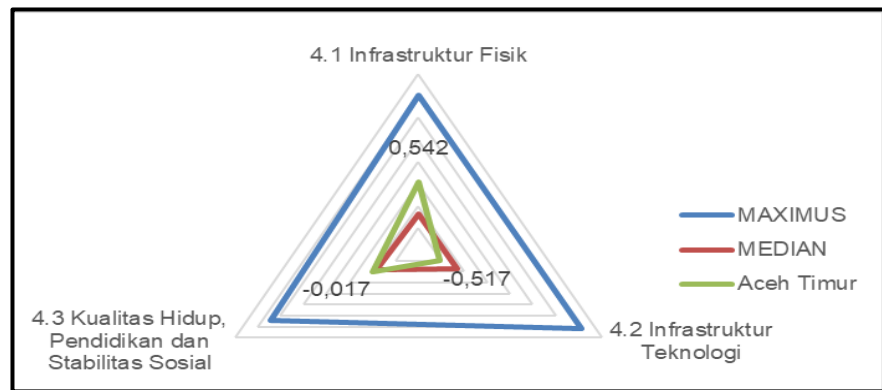
Gambar 3. 28. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Timur

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Timur berada pada urutan ke 12 dengan nilai terstandar sebesar 0,005 atau meningkat 1,843 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 3.29. dapat disimpulkan Sub Lingkup Infrastruktur Fisik berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menandakan ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, transportasi, energi, air bersih) sudah lebih baik.

Sedangkan Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi menjadi Sub Lingkup yang berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan akses internet, jaringan telekomunikasi, dan pemanfaatan teknologi digital masih rendah. Hal yang sama terjadi pada Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan, dan Stabilitas Sosial, hampir mendekati rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat, akses pendidikan, dan stabilitas sosial berada pada level rata-rata.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Timur dapat meningkat pada peringkat 6 dan diikuti meningkatnya nilai terstandar menjadi 0,672.



Gambar 3. 29. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Timur

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Timur dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2025 berada pada posisi 11 akan meningkat menjadi peringkat 5 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,713.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- Meningkatkan promosi investasi dan penyederhanaan regulasi untuk menarik investor;
- Memperkuat infrastruktur pendukung perdagangan untuk menjaga keunggulan keterbukaan yang sudah ada;
- Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (inovasi, digitalisasi, keterbukaan informasi);
- Memperbaiki regulasi dan penegakan hukum, terutama dalam penyelesaian kasus kriminal dan kepastian hukum investasi;
- Memanfaatkan stabilitas fiskal untuk memperkuat kelembagaan dan mendanai reformasi birokrasi;
- Memperluas akses pembiayaan (perbankan, koperasi, fintech) untuk UMKM/IKM;
- Melakukan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar produktivitas naik;
- Menyederhanakan biaya dan prosedur usaha agar efisiensi bisnis meningkat;

adalah di sektor listrik, gas dan air dengan nilai investasi 1,16 triliun rupiah, diikuti oleh sektor pertambangan dengan nilai investasi 19,87 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2024 berjumlah 127.765 orang atau meningkat sebanyak 2.964 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 77,41 persen. Hal ini juga diikuti dengan menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Tengah dari tahun sebelumnya sebesar 4,42 persen menjadi 4,21 persen pada tahun 2024. Infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah adalah meningkatnya panjang jalan beraspal dari tahun sebelumnya sebesar 10,40 km.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.17. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Tengah terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 17. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tengah	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 6 Nilai Terstandar : 0,543	
Stabilitas Ekonomi Makro 8 Nilai Terstandar : 0,359	Pemerintahan dan Institusi Publik 9 Nilai Terstandar : 0,271
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 6 Nilai Terstandar : 0,767	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 5 Nilai Terstandar : 0,776

Berdasarkan tabel 3.17. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025 berada di peringkat 6 dengan nilai terstandar 0,543 atau meningkat 0,242 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 8 dengan nilai terstandar 0,301. Peningkatan ini didukung 3 (tiga) lingkup mengalami peningkatan nilai terstandar. Lonjakan besar dalam tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dengan meningkatnya Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik sebesar 0,645 poin. Kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja menunjukkan kemajuan paling signifikan, menandakan aktivitas ekonomi mulai menggeliat dan efisiensi bisnis meningkat di 2025.

Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur (+0,256), menunjukkan kenaikan moderat karena perbaikan berkelanjutan di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur teknologi. Sedangkan untuk Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro merupakan satu-satunya lingkup yang menurun tajam dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tekanan inflasi lokal atau nasional. Menunjukkan bahwa sektor riil masih rentan, meski sektor finansial dan bisnis menunjukkan perbaikan.

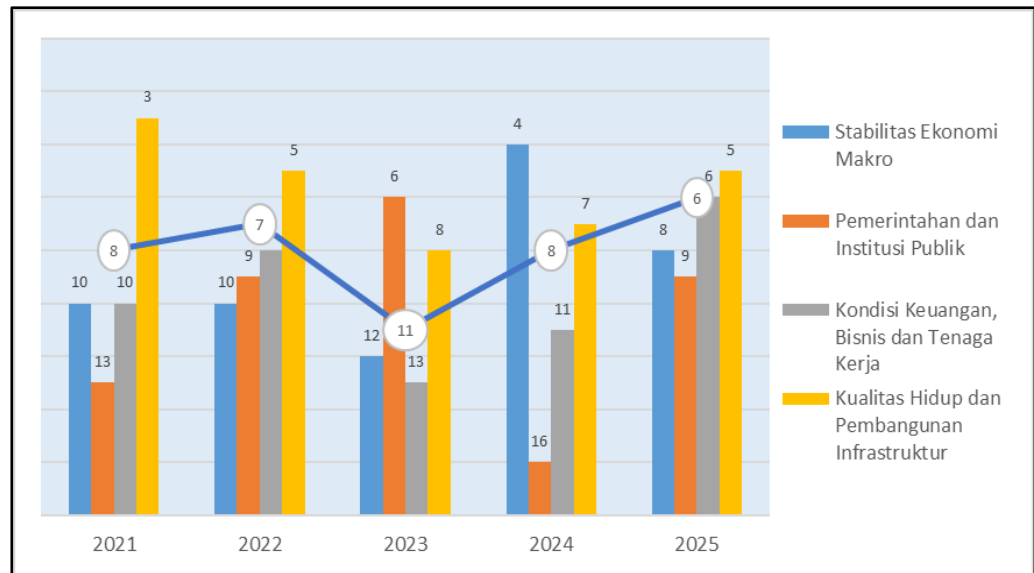
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.18. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,882 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 4. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Tengah akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 18. Simulasi What If Kabupaten Aceh Tengah

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		6 0,543		4 0,882	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	8	8	Peringkat	9	7
Nilai Terstandar	0,359	0,567	Nilai Terstandar	0,271	0,439
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	6	5	Peringkat	5	3
Nilai Terstandar	0,767	0,962	Nilai Terstandar	0,776	1,560

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 30. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025 meningkat, peningkatan ini didukung meningkatnya 3 (tiga) lingkup dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro menurun. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro pada tahun 2021-2023 memiliki nilai negatif menunjukkan tekanan ekonomi (kemungkinan pandemi, inflasi, dan lambatnya konsumsi masyarakat). Pada tahun 2024 (+1,049) meningkat signifikan, menandakan stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi membaik tajam. Namun 2025 turun ke 0,359, menandakan pemulihan belum sepenuhnya stabil.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik pada tahun 2021–2023 tren positif, menunjukkan pemerintahan semakin efektif dan akuntabel. Tahun 2024 terjadi penurunan tajam ke -0,374, kemungkinan karena gangguan tata kelola, perubahan kebijakan, atau penurunan kualitas pelayanan publik. Tahun 2025 mulai pulih (0,271), menandakan ada reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Lingkup Keuangan, Bisnis, dan Tenaga Kerja pada tahun 2021–2022 meningkat (0,122 menjadi 0,447), namun sempat melemah di 2023 (-0,069), pada tahun 2024 meningkat drastis hingga 0,767 dan pada 2025 tertinggi sepanjang periode. Hal ini menandakan pemulihan aktivitas ekonomi lokal, naiknya lapangan kerja, dan iklim bisnis yang makin kondusif.

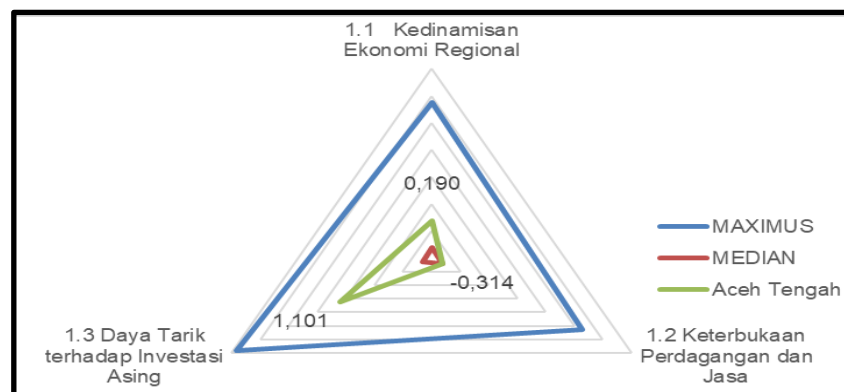
Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, pada tahun 2022–2023 terjadi penurunan signifikan hingga 0,501, dan stagnan di 2024 (0,520). Tahun 2025 kembali naik menjadi 0,776 menjadi menandakan perbaikan layanan dasar dan pembangunan fisik kembali berjalan.

Berdasarkan Gambar 3.30. Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Tengah berada di titik tertinggi pada 2024-2025, mengalami penurunan cukup tajam di tahun 2023 (pasca-pandemi, tekanan ekonomi). Peningkatan di tahun 2025 didorong oleh bisnis, tenaga kerja dan pemerintahan.

1) **Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro**

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tengah berada pada urutan ke 8 dengan nilai terstandar 0,359 atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,690 poin. Pada Gambar 3.31. dapat dilihat terdapat 2 (dua) Sub Lingkup berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya, yaitu Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional dan Sub Lingkup Daya Tarik terhadap Investasi Asing. sedangkan Sub Lingkup Keterbukaan Perdagangan dan Jasa berada pada garis rata-rata kabupaten/kota lainnya.

Penurunan lingkup ini dipengaruhi oleh penurunan PDRB yang cukup signifikan dan terjadi pada semua sektor terutama sektor jasa. Selain itu inflasi pun mengalami peningkatan sehingga menekan daya beli masyarakat. Investasi asing maupun domestik mengalami penurunan pada 2025, mencerminkan menurunnya minat investor akibat kontraksi ekonomi. Keterbukaan dalam Perdagangan sedikit naik meskipun nilai ekspor-impor menurun, karena PDRB juga turun. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Tengah dapat meningkatkan menjadi peringkat 8 dengan nilai terstandar menjadi 0,567.



Gambar 3. 31. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tengah

2) **Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik**

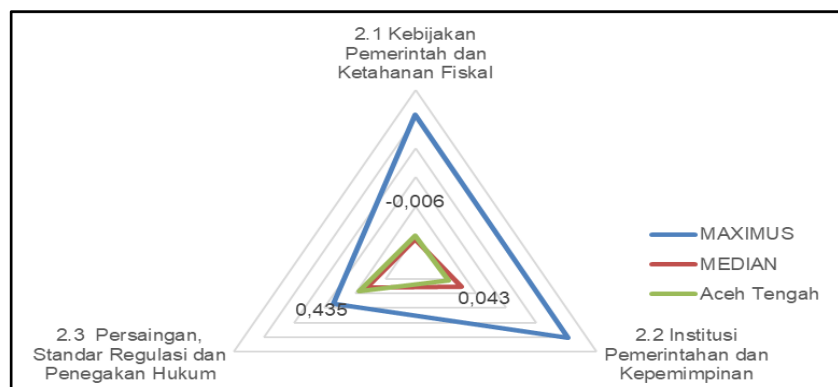
Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tengah berada pada urutan ke 9 dengan nilai terstandar sebesar 0,271 atau meningkat 0,645 dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.32. dapat dilihat Sub Lingkup

Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal serta Sub Lingkup Persaingan Standar Regulasi dan Penegakan Hukum berada sedikit di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan masih lemahnya kemandirian fiskal (ketergantungan tinggi pada transfer pusat, kontribusi pajak daerah kecil, dan efektivitas pengelolaan APBD belum optimal) dan efektivitas penyelesaian kasus kriminal cukup tinggi (91 persen tahun 2025), namun masih ada tantangan berupa meningkatnya jumlah kasus kriminal.

Untuk Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan berada sedikit di bawah rata-rata kabupaten/kota, walaupun kinerja pemda (evaluasi, audit) cenderung meningkat, dampaknya terhadap tata kelola belum kuat, sehingga perlu peningkatan kapasitas birokrasi, kepemimpinan, dan digitalisasi layanan publik.

Peningkatan dipengaruhi oleh kondisi keseimbangan fiskal relatif lebih sehat pada 2025 karena pengeluaran lebih terjaga dibanding pendapatan, evaluasi kinerja pemda meningkat karena ada perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik, serta penegakan hukum makin efektif walaupun tantangan keamanan bertambah.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Tengah dapat meningkat menjadi peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,439.



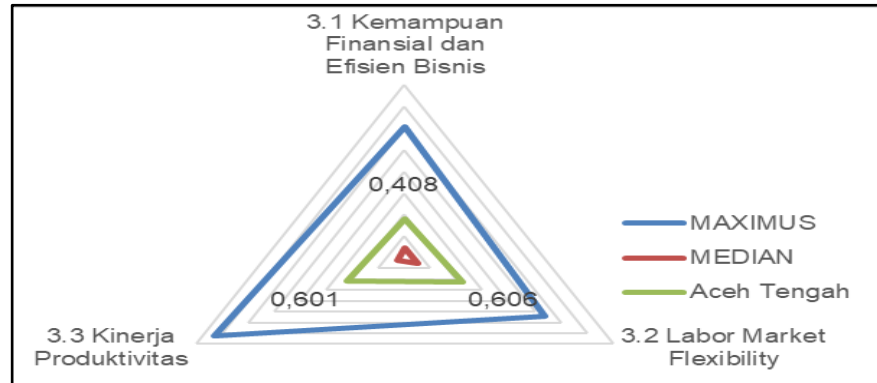
Gambar 3. 32. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tengah

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tengah berada pada urutan ke 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,767 atau meningkat sebesar 0,758 poin dari tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.33. dapat dilihat semua sub lingkup pendukung lingkup ini berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Peningkatan ini dipengaruhi oleh sektor keuangan

semakin sehat di 2025 (akses kredit meningkat, kredit bermasalah menurun, layanan bank bertambah), pasar kerja membaik (pengangguran turun, partisipasi kerja naik), sedangkan untuk kinerja produktivitas naik di semua sektor terutama industri sekunder.

Namun terdapat indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, yaitu produktivitas industri primer. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah dapat meningkat sampai naik pada peringkat 5 dengan nilai terstandar 0,962.



Gambar 3. 33. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tengah

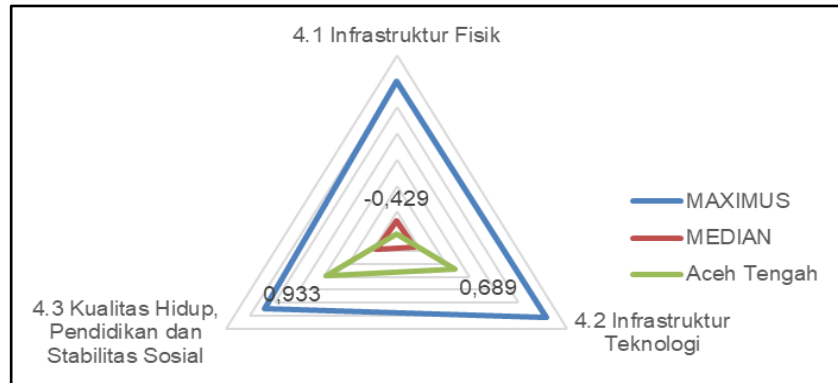
4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tengah berada pada urutan ke 5 dengan nilai terstandar sebesar 0,776 atau meningkat 0,256 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 3.34. dapat dilihat terdapat 2 (dua) Sub Lingkup berada di atas rata-rata kabupaten/kota, yaitu Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi serta Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial.

Hal ini menunjukkan hampir seluruh rumah tangga sudah memiliki akses internet dan pengguna komputer meningkat, serta kualitas pendidikan dan kesehatan semakin membaik, memberi fondasi sosial yang kuat. Untuk Sub Lingkup Fisik berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan keterbatasan kualitas infrastruktur dasar (jalan, listrik, air bersih, perumahan).

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh Infrastruktur fisik membaik terutama jalan beraspal dan kepemilikan rumah, akses internet rumah tangga dan handphone sudah hampir terpenuhi, pendidikan membaik (angka buta huruf turun, APS tinggi), kesehatan meningkat (rasio penduduk per fasilitas turun tajam, imunisasi naik), harapan hidup juga naik.

Indikator yang perlu diperhatikan adalah tekanan dari pertumbuhan penduduk, keterbatasan air bersih, serta kepadatan kendaraan. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Tengah dapat meningkat menjadi peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,560.



Gambar 3. 34. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tengah

c. Perbaiki Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Tengah dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025 berada pada posisi 6 akan meningkat menjadi peringkat 4 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,882.

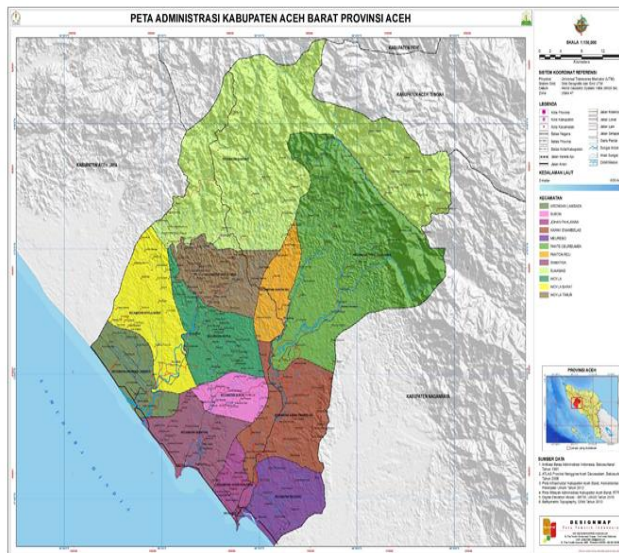
Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Mengendalikan inflasi dan dorong kembali pertumbuhan;
- b. Memberi stimulus ekonomi seperti insentif untuk industri sekunder dan tersier agar tidak terus melemah;
- c. Memastikan regulasi, kemudahan izin, dan insentif pajak agar PMA/PMDN tidak makin turun;
- d. Melakukan diversifikasi komoditas selain kopi, perbaikan logistik;
- e. Memperkuat pendapatan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat;
- f. Mengefisiensi belanja daerah, terutama untuk sektor produktif;
- g. Membuat strategi keamanan preventif, agar jumlah kasus kriminal bisa ditekan walaupun penanganan sudah lebih baik;

- h. Memperbaiki tata kelola publik harus dilanjutkan, terutama pada transparansi keuangan, digitalisasi layanan, dan partisipasi masyarakat;
- i. Mendorong sektor industri (sekunder) agar tidak kehilangan tenaga kerja meski produktivitas naik (Misalnya dengan pelatihan tenaga kerja berbasis teknologi);
- j. Memperkuat sektor jasa (tersier) karena menjadi penyerap tenaga kerja yang terus meningkat;
- k. Memanfaatkan kesehatan sektor perbankan untuk memperluas pembiayaan UMKM dan investasi;
- l. Mengendalikan risiko inflasi agar daya beli masyarakat sejalan dengan kenaikan produktivitas;
- m. Membangun infrastruktur fisik (tambah jalan baru, kelola transportasi, perluasan air bersih dan listrik untuk menjaga kualitas hidup);
- n. Mempercepat digitalisasi sekolah; dan
- o. Memperkuat fasilitas layanan dasar agar tetap merata seiring pertumbuhan penduduk.

7. Kabupaten Aceh Barat

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 2.927,95 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2024 berjumlah 209.220 orang, dengan nilai PDRB per kapita sebesar 67,95 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Barat atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 14,05 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,57 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Barat juga mengalami kenaikan dari 8,06 triliun rupiah pada tahun sebelumnya menjadi 8,66 triliun rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2024 mencapai 7,50 persen jauh lebih cepat dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,08 persen. Sektor pertanian,

kehutanan dan perikanan memberikan peranan terbesar terhadap struktur ekonomi Kabupaten Aceh Barat sebesar 28,79 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 24,34 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 1,41 triliun rupiah atau meningkat jauh sebesar 767,19 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 10,01 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Barat adalah di sektor pertambangan dengan nilai investasi 541,36 miliar rupiah, diikuti oleh sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan nilai investasi 332,56 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2024 berjumlah 94.038 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 2.235 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 60,23 persen. Sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan perbaikan dengan menurunnya tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya sebesar 6,07 persen menjadi 5,58 persen di tahun 2024. Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat adalah tersedianya Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.19. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Barat terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 19. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 5 Nilai Terstandar : 0,641	
Stabilitas Ekonomi Makro 5 Nilai Terstandar : 0,958	Pemerintahan dan Institusi Publik 2 Nilai Terstandar : 1,182
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 8 Nilai Terstandar : 0,400	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 10 Nilai Terstandar : 0,025

Berdasarkan tabel 3.19. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2025 berada di peringkat 5 dengan nilai terstandar 0,641 atau menurun 0,240 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 4 dengan nilai terstandar 0,881. Penurunan ini dipengaruhi 3 (tiga) lingkup mengalami penurunan nilai terstandar. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami penurunan cukup signifikan, menandakan penurunan efektivitas tata kelola fiskal dan penurunan kinerja kelembagaan.

Lingkup Kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja menunjukkan ada perlambatan kinerja produktivitas dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Meskipun tabungan dan pinjaman meningkat, efektivitas penyaluran kredit masih rendah. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, melemah signifikan (-0,498) indikator infrastruktur fisik dan teknologi masih stagnan atau turun serta Kualitas layanan sosial (pendidikan dan kesehatan) belum meningkat. Sedangkan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro meningkat kuat, dipengaruhi PDRB dan pertumbuhan ekonomi 2025 mengalami kenaikan signifikan, menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi, serta Inflasi terkendali dan investasi mulai naik.

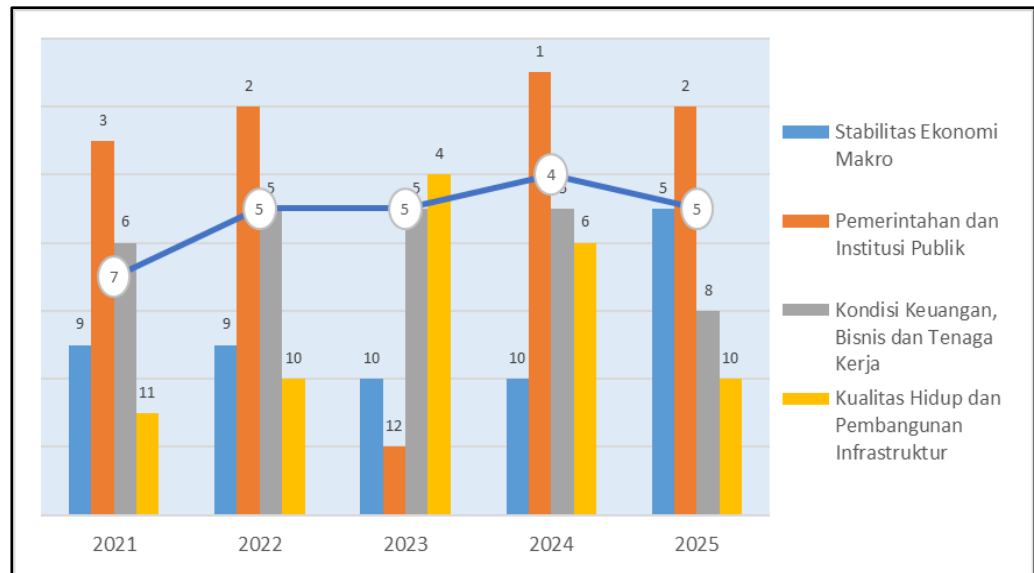
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.20. jika hal ini diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 1,129 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 2. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Barat akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 20. Simulasi What If Kabupaten Aceh Barat

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		5 0,641		2 1,129	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	5	3	Peringkat	2	2
Nilai Terstandar	0,958	1,284	Nilai Terstandar	1,182	1,182
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	8	5	Peringkat	10	4
Nilai Terstandar	0,400	0,936	Nilai Terstandar	0,025	1,114

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 35. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2025 menurun menjadi peringkat 5. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro menurun. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro meningkat secara konsisten sejak 2022, puncak di 2025 (0,958). Ini menunjukkan bahwa perekonomian Aceh Barat mengalami pemulihan kuat, didukung oleh peningkatan PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas harga (inflasi terkendali). Hal ini mengindikasikan fondasi ekonomi daerah mulai kokoh kembali pasca pandemi.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik sempat menurun pada tahun 2023, pada tahun 2024 naik signifikan namun menurun kembali 2025, ini menandakan adanya tantangan dalam konsistensi tata kelola dan efektivitas fiskal. Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja relatif stabil 2021-2024 (0,745 menjadi 0,821), tetapi turun tajam 2025 (0,400), menandakan aktivitas bisnis dan efisiensi tenaga kerja mulai stagnan, disebabkan oleh penurunan produktivitas, terbatasnya lapangan kerja baru, atau daya saing UMKM yang menurun, serta akses kredit dan efisiensi pembiayaan juga masih rendah.

Hal yang sama terjadi pada Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur naik tinggi pada 2023 (1,224) lalu turun drastis hingga 0,025 di 2025, mengindikasikan bahwa pemeliharaan infrastruktur dan pemerataan layanan pendidikan-kesehatan belum terjaga. Tahun 2021-2023 memiliki nilai negatif menunjukkan tekanan ekonomi (kemungkinan pandemi, inflasi, dan lambatnya konsumsi masyarakat). Pada tahun 2024 (+1,049) meningkat signifikan, menandakan stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi membaik tajam. Namun 2025 turun ke 0,359, menandakan pemulihan belum sepenuhnya stabil.

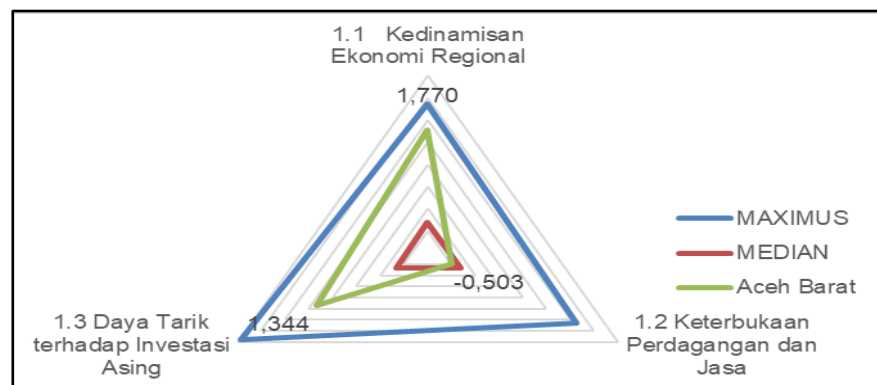
Berdasarkan Gambar 3.35. Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Barat berada di titik tertinggi pada 2024-2025, mengalami penurunan cukup tajam di tahun 2023 (pasca-pandemi, tekanan ekonomi). Peningkatan di tahun 2025 didorong oleh pemulihan ekonomi cepat dan stabil.

1) **Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro**

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat berada pada urutan ke 5 dengan nilai terstandar sebesar 0,958 atau meningkat 0,690 poin dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Gambar 3.36. dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) Sub Lingkup yang berada di atas rata-rata kabupaten/kota, yaitu Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional dan Sub Lingkup Daya Tarik terhadap Investasi Asing. Hal ini menandakan tingkat dinamisme yang cukup baik dibanding rata-rata, dengan aktivitas ekonomi regional yang cukup aktif serta adanya potensi yang cukup menarik untuk investasi asing, meskipun belum optimal.

Untuk Sub Lingkup Keterbukaan Perdagangan dan Jasa berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menandakan bahwa surplus perdagangan menyempit karena Ekspor cenderung stagnan impor naik. Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh pertumbuhan sehat dengan PDRB naik lebih 6 persen dan PDRB per kapita meningkat, struktur ekonomi masih didominasi sektor primer, tapi ketiga sektor sama-sama tumbuh, Inflasi terkendali, Investasi Domestik (PMDN) stabil, menjadi penopang utama di tengah penurunan PMA.

Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah realisasi investasi asing dan nilai ekspor serta impor, jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Barat dapat meningkat drastis sampai pada peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,284.

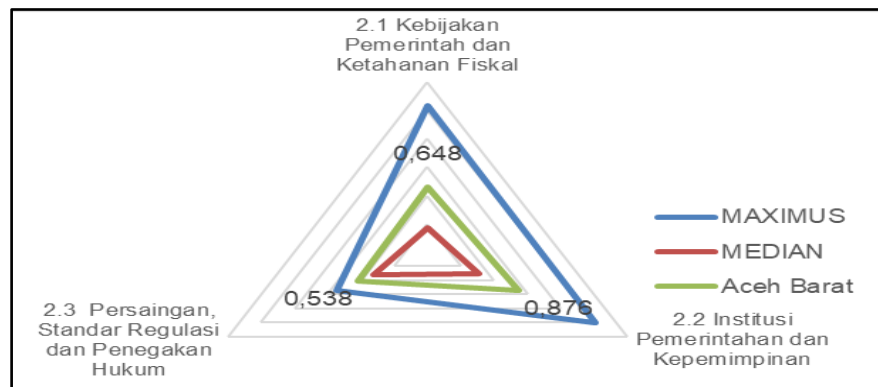


Gambar 3. 36. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 berada pada peringkat 2 dengan nilai terstandar sebesar 1,182 atau menurun 0,731 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.37. dapat dilihat bahwa semua sub lingkup berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menandakan bahwa secara fiskal Aceh Barat cukup stabil (pendapatan lebih besar pengeluaran), namun kontribusi pajak daerah masih rendah sehingga kapasitas fiskalnya belum maksimal.

Terkait kinerja pemerintahan, akuntabilitas, dan tata kelola di Aceh Barat relatif kuat. Tingkat kriminalitas (yang sempat naik di 2025), walaupun penyelesaian kasus oleh aparat cukup tinggi. Jadi tantangannya ada di sisi pencegahan kriminalitas dan penguatan regulasi.



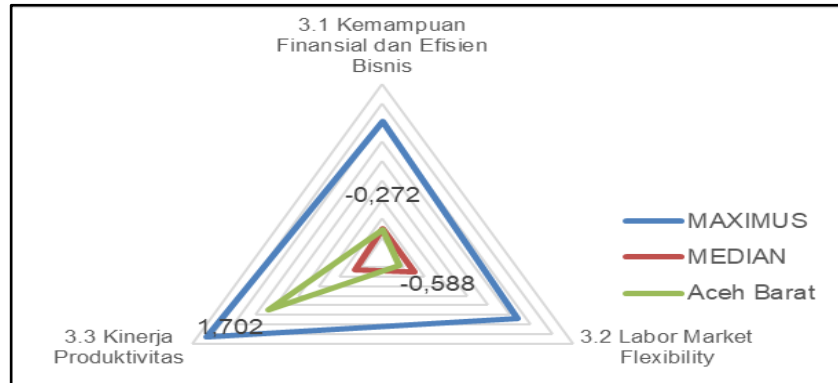
Gambar 3. 37. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat berada pada urutan ke 8 dengan nilai terstandar sebesar 0,400 atau menurun 0,421 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.38. dapat disimpulkan bahwa Sub Lingkup Kemampuan Finansial dan Efisien Bisnis masih lemah, meskipun lebih baik dibanding rata-rata. Hal ini terkait dengan akses pembiayaan usaha yang masih terbatas dan produktivitas bisnis yang belum optimal.

Sedangkan Sub Lingkup Labor Market Flexibility masih terbatas, disebabkan oleh rigiditas regulasi ketenagakerjaan, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, serta kurangnya mobilitas tenaga kerja antar sektor. Sub Lingkup Kinerja Produktivitas relatif baik, menunjukkan sektor-sektor unggulan (misalnya pertanian, perikanan, tambang, atau jasa tertentu) memiliki output yang cukup tinggi.

Penurunan lingkup ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pertumbuhan tabungan meningkat, kredit tumbuh pesat, tapi risiko kredit bermasalah meningkat sehingga perlu penguatan manajemen risiko, angkatan kerja tumbuh, pengangguran menurun, tetapi partisipasi masih rendah. Struktur tenaga kerja mulai seimbang antara sektor primer dan jasa. Produktivitas sektor pertanian dan industri mulai melemah. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka nilai terstandar Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat dapat meningkat menjadi sebesar 0,936 dengan peringkat 5.



Gambar 3. 38. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat

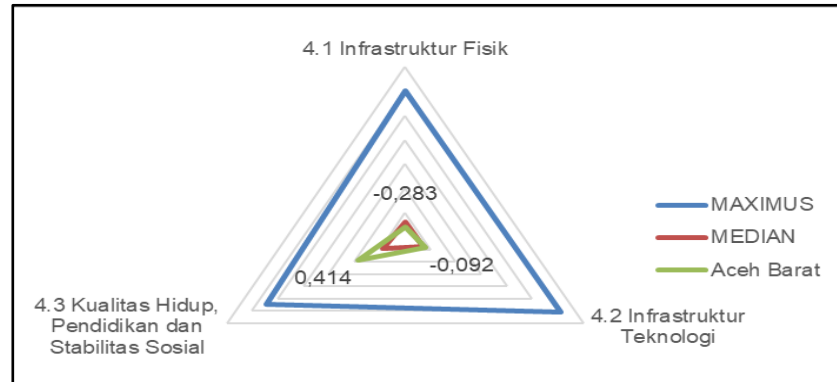
4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar sebesar 0,025 atau menurun 0,498 dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.39. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, listrik, air bersih, dan fasilitas publik.

Untuk Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi sedikit berada di atas rata-rata hal ini mengindikasikan akses internet, jaringan telekomunikasi, dan adopsi teknologi belum optimal. Sedangkan untuk Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial menjadi Sub Lingkup dengan nilai tertinggi di lingkup ini. Hal ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan stabilitas sosial) relatif lebih baik meski masih jauh dari maksimal.

Beberapa indikator yang mempengaruhi penurunan lingkup ini, antara lain kondisi fisik (seperti jalan, transportasi umum, air bersih, dan listrik) belum banyak mengalami perbaikan, akses internet, jaringan telekomunikasi, dan pemanfaatan teknologi digital masih terbatas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan

Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Barat dapat meningkat menjadi peringkat 4 dengan nilai terstandar 1,114.



Gambar 3. 39. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Barat dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2025 berada pada posisi 5 akan meningkat menjadi peringkat 2 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 1,129.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Memperkuat iklim investasi: memperbaiki infrastruktur, kepastian regulasi, dan pelayanan perizinan agar lebih menarik investor asing;
- b. Mendorong ekspor dan perdagangan jasa: meningkatkan akses pasar, promosi produk unggulan daerah, serta kerja sama antar wilayah;
- c. Menjaga momentum dinamisme ekonomi: memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendukung sektor produktif (pertanian, perkebunan, pariwisata, energi);
- d. Memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada pusat;
- e. Mengarahkan pengeluaran Pemda untuk pembangunan ekonomi produktif dan layanan publik agar dampak lebih terasa;
- f. Mengantisipasi lonjakan kriminalitas 2025 dengan kebijakan sosial, lapangan kerja, serta penguatan keamanan lokal;
- g. Memperkuat akses pembiayaan usaha (koperasi, kredit UMKM, digital finance) agar efisiensi bisnis meningkat;

- h. Mendorong akses kredit yang sehat dan perkuat inklusi keuangan agar kredit bermasalah tidak melonjak;
- i. Meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja lewat pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan digital, dan mendorong mobilitas lintas sektor;
- j. Mendorong sektor unggulan dengan produktivitas tinggi agar tetap menjadi penopang pertumbuhan daerah;
- k. Mempercepat pembangunan jalan antar kecamatan, perbaikan pelabuhan/transportasi, dan penyediaan listrik merata;
- l. Memperluas jaringan internet (4G/5G) dan program literasi digital; dan
- m. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

8. Kabupaten Aceh Besar

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 2.903,49 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 berjumlah 428.254 orang, dengan nilai PDRB per kapita sebesar 42,99 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Besar atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun

2024 mencapai sebesar 18,41 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,34 triliun rupiah dibandingkan dengan nilai PDRB tahun 2023 yang sebesar 17,07 triliun rupiah.

Sementara itu dari nilai harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK tahun 2024 juga mengalami kenaikan dari 101,12 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 11,67 triliun rupiah pada tahun 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan selama tahun 2024 Kabupaten Aceh Besar mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2023 sebesar 4,37 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 dihasilkan dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 21,02 persen, diikuti oleh lapangan usaha konstruksi dengan distribusi PDRB mencapai 19,24 persen, selanjutnya perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor dengan peranan sebesar 16,66 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 adalah sebesar 615,96 miliar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 210,72 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 3,35 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Besar adalah di sektor konstruksi dengan nilai investasi 228,81 miliar rupiah, diikuti oleh sektor pertambangan dengan nilai investasi 122,94 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024 berjumlah 211.495 orang atau meningkat sebanyak 5.058 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,05 persen. Sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 8,17 persen menjadi 7,93 persen di tahun 2024.

Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Besar adalah tersedianya Pelabuhan Penyeberangan Malahayati, Pelabuhan Penyeberangan Lamteng, Pelabuhan Lhoknga dan Bandara Sultan Iskandar Muda, serta infrastruktur jalan beraspal yang mengalami peningkatan 3,49 km dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.21. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Besar terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 21. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Besar	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 2 Nilai Terstandar : 1,096	
Stabilitas Ekonomi Makro 4 Nilai Terstandar : 1,203	Pemerintahan dan Institusi Publik 10 Nilai Terstandar : 0,233

Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 3 Nilai Terstandar : 1,196	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 2 Nilai Terstandar : 1,753
---	--

Berdasarkan tabel 3.21. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025 berada di peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,096 atau meningkat 0,153 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 3 dengan nilai terstandar 0,9441, daya saing Aceh Besar membaik secara signifikan pada 2025, terutama karena penguatan pada aspek ekonomi dan infrastruktur. Peningkatan ini dipengaruhi 3 (tiga) lingkup mengalami kenaikan, yaitu Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Lingkup Keuangan, Bisnis, dan Tenaga Kerja, serta Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur.

Aceh Besar menunjukkan kemajuan besar di sektor ekonomi, bisnis, dan infrastruktur pada 2025. Namun, penurunan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi satu-satunya faktor penghambat utama yang perlu segera dibenahi agar daya saing dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

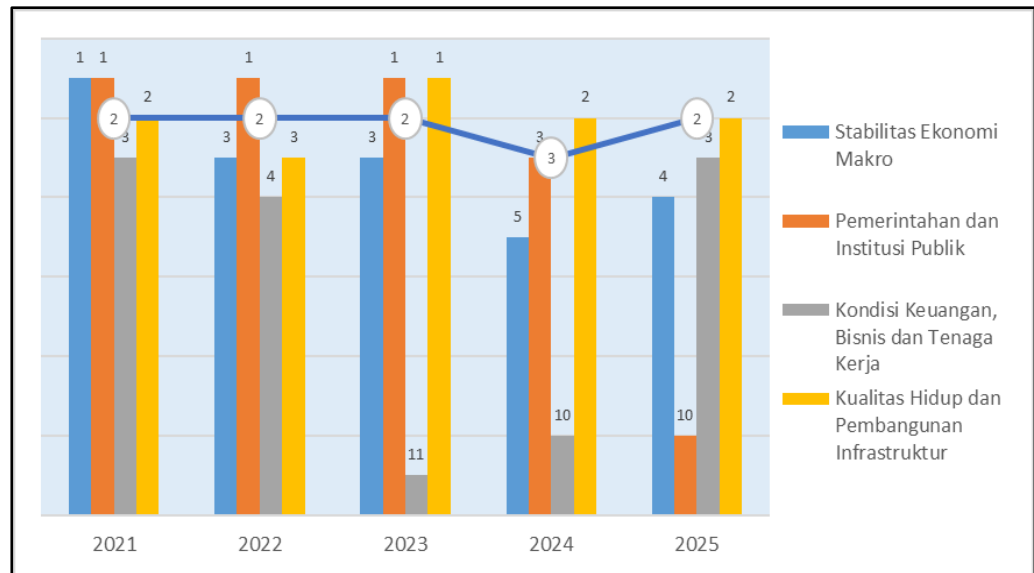
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.22. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 1,562 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 1. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Besar akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 22. Simulasi What If Kabupaten Aceh Besar

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		2		1	
Nilai Terstandar		1,096		1,562	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	4	4	Peringkat	10	3
Nilai Terstandar	1,203	1,255	Nilai Terstandar	0,233	1,080
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	3	3	Peringkat	2	1
Nilai Terstandar	1,196	1,343	Nilai Terstandar	1,753	2,600

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 40. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025 meningkat menjadi peringkat 2. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro mengalami penurunan cukup besar dari 2,472 (2021) menjadi 0,882 (2024), namun mulai pulih di tahun 2025 menjadi 1,203 (+0,32 dari 2024). Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi daerah mulai terlihat kembali setelah masa perlambatan (mungkin pasca-COVID), dengan indikator, seperti PDRB dan inflasi yang mulai membaik.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik meningkat tajam di 2022 (1,745), menurun perlahan 2023–2024, lalu turun drastis ke 0,233 di 2025, ini menunjukkan melemahnya tata kelola pemerintahan, efektivitas birokrasi, atau kualitas kebijakan publik pada 2025. Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja mengalami penurunan tajam 2021–2024 (1,142 menjadi 0,056), lalu melonjak ke 1,196 pada 2025. Peningkatan ini didorong Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan, peningkatan tenaga kerja produktif, aktivitas UMKM dan investasi yang membaik.

Hal yang sama terjadi pada Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur sempat turun di 2024, nilai tetap relatif tinggi dan meningkat kembali di 2025, mengindikasikan bahwa perbaikan terjadi pada sektor sosial dasar yaitu pendidikan, kesehatan, akses air bersih, dan infrastruktur dasar (jalan, listrik, internet).

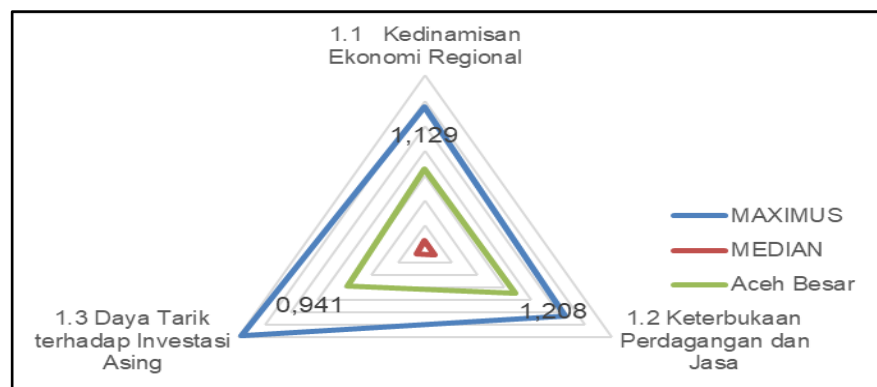
Tahun 2021-2023 memiliki nilai negatif menunjukkan tekanan ekonomi (kemungkinan pandemi, inflasi, dan lambatnya konsumsi masyarakat). Pada tahun 2024 (+1,049) meningkat signifikan, menandakan stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi membaik tajam. Namun 2025 turun ke 0,359, menandakan pemulihan belum sepenuhnya stabil.

Berdasarkan Gambar 3.40. Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2024–2025 menunjukkan pemulihan kuat pada ekonomi dan bisnis, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat Aceh Besar. Namun, kemerosotan di sektor pemerintahan dan institusi publik menjadi penghambat utama yang perlu segera ditangani untuk menjaga momentum peningkatan daya saing secara berkelanjutan.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Peringkat daya saing dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro pada tahun 2025 berada pada peringkat 4 dengan nilai 1,203 atau meningkat 0,321 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.41. dapat dilihat bahwa semua sub lingkup berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi daerah Aceh Besar cukup baik ditandai dengan pertumbuhan tetap stabil (6–7 persen), PDRB per kapita bisa menembus 45 juta, Investasi tetap kuat meski kemungkinan pertumbuhan tidak setajam 2024.

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan, antara lain akses perdagangan dan jasa di Aceh Besar belum terlalu terbuka, daya tarik untuk investasi asing masih terbatas dan memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun iklim investasi. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka nilai terstandar Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Besar meningkat menjadi sebesar 1,255.



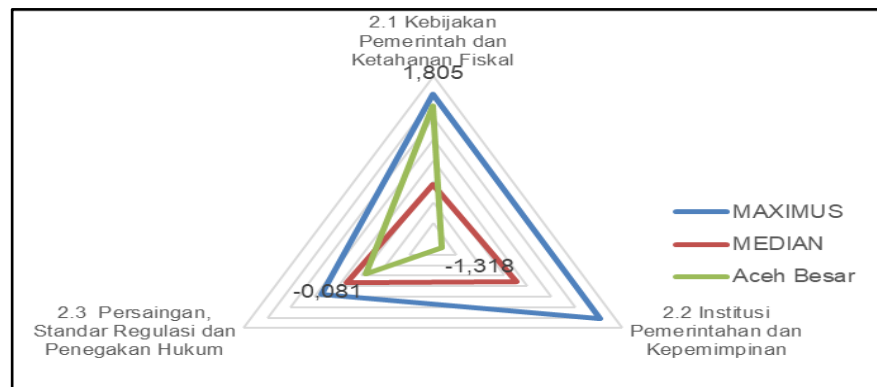
Gambar 3. 41. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Besar

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Besar berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar 0,233 atau menurun -1,207 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.42. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan Aceh Besar sangat kuat dalam

aspek kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan pemerintah, stabilitas fiskal cukup baik, mendekati daerah terbaik.

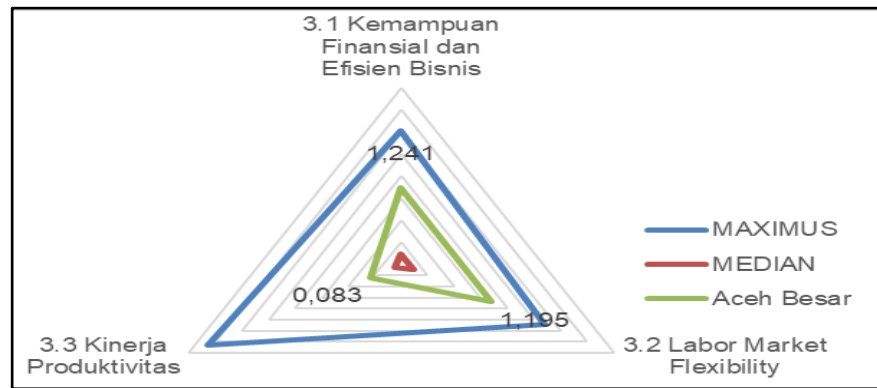
Sedangkan untuk 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan kualitas institusi pemerintahan dan kepemimpinan masih lemah, terutama dalam hal efektivitas birokrasi, koordinasi, dan tata kelola pemerintahan. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah keseimbangan fiskal dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Besar dapat meningkat pada peringkat 3 dengan nilai terstandar menjadi 1,080.



Gambar 3. 42. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Besar

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Besar berada pada urutan ke 3 dengan nilai terstandar 1,196 atau meningkat 1,140 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.43. dapat dilihat bahwa semua sub lingkup berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menandakan efisiensi bisnis dan kapasitas finansial di Aceh Besar relatif positif, adaptasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar cukup tinggi (misalnya dalam hal regulasi ketenagakerjaan, mobilitas pekerja, atau struktur upah), dan untuk Sub Lingkup Kinerja Produktivitas sedikit di atas rata-rata karena produktivitas tenaga kerja dan dunia usaha masih rendah. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Besar meningkat pada peringkat 3 dengan nilai terstandar sebesar 1,343.

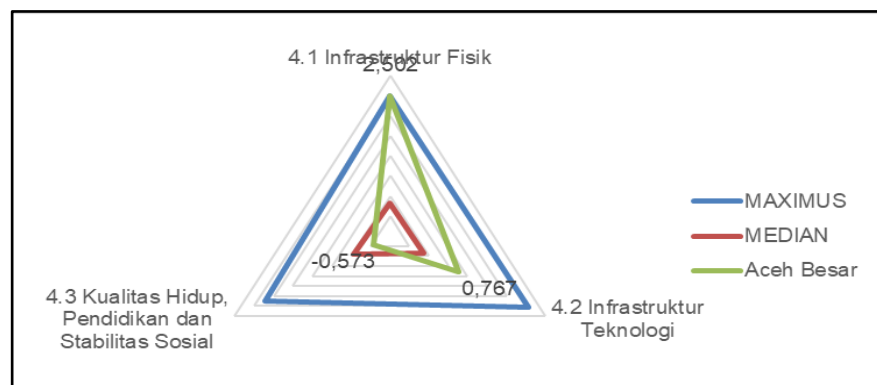


Gambar 3. 43. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Besar

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025 berada pada urutan ke 2 dengan nilai terstandar sebesar 1,753 atau meningkat 0,356 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.44. dapat dilihat Sub Lingkup Infrastruktur Fisik memiliki nilai maksimal dan menjadi kekuatan utama Aceh Besar. Untuk Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kualitas teknologi (internet, digitalisasi, jaringan telekomunikasi) cukup baik, tetapi belum maksimal.

Sedangkan Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial di bawah rata-rata kabupaten/kota menunjukkan tantangan pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan aspek sosial (seperti kesenjangan, stabilitas sosial, atau layanan publik dasar). Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, adalah risiko bencana yang meningkat dan urbanisasi yang bisa menekan layanan publik. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Besar dapat meningkat pada peringkat 1 dengan nilai terstandar 2,600.



Gambar 3. 44. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Besar

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

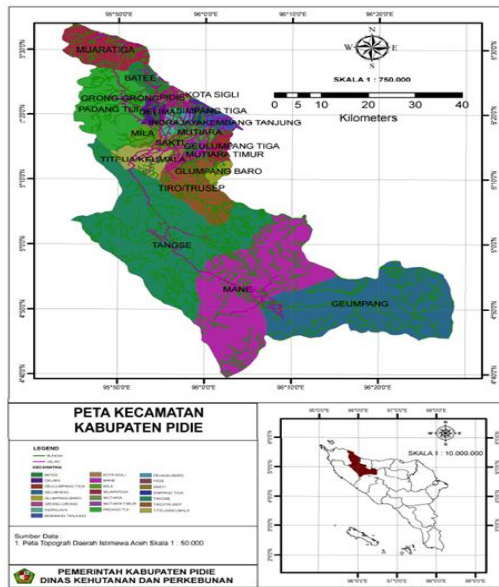
Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Besar dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2025 berada pada posisi 2 akan meningkat menjadi peringkat 1 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 1,562.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Meningkatkan konektivitas perdagangan, pengembangan UMKM ekspor, serta kerja sama antarwilayah;
- b. Menyusun kebijakan pro-investor: penyederhanaan perizinan, promosi investasi berbasis potensi lokal, dan peningkatan infrastruktur dasar;
- c. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, industri kecil);
- d. Mengintegrasikan kebijakan fiskal daerah dengan dukungan sektor keuangan untuk mendorong investasi produktif;
- e. Memperkuat ekosistem bisnis ramah investor, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah PMA/PMDN, seperti tahun 2024 bisa berlanjut;
- f. Melakukan diversifikasi ekonomi, sehingga tidak hanya bergantung pada sektor tertentu, tetapi seimbang dengan sektor primer, sekunder, dan tersier lainnya;
- g. Mempertahankan keunggulan infrastruktur fisik dan pastikan pemeliharaan berkelanjutan agar tidak menurun kualitasnya; dan
- h. Mendorong penguatan infrastruktur teknologi dengan perluasan internet cepat, digitalisasi layanan publik, dan dukungan bagi UMKM digital.

9. Kabupaten Pidie

a. Gambaran Umum



Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 3.184,45 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Pidie pada tahun 2024 berjumlah 452.547 orang, dengan nilai PDRB per kapita sebesar 32,15 juta rupiah.

PDRB Kabupaten Pidie atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 senilai 14,55 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,06 triliun rupiah dibandingkan dengan

tahun 2023 yang mencapai 13,49 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK juga mengalami kenaikan dari 8,62 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 8,98 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Pidie mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,15 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pidie pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 40,39 persen, selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 15,17 persen, disusul oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,90 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Pidie pada tahun 2024 adalah sebesar 31,02 miliar rupiah atau mengalami penurunan yang sangat jauh sebesar 648,71 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 0,21 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Pidie, meliputi sektor pertambangan dengan nilai investasi 20,03 miliar rupiah, diikuti oleh sektor perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi 6,58 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Pidie pada tahun 2024 berjumlah 212.462 orang atau meningkat sebanyak 4.630 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 62,17 persen. Sementara tingkat pengangguran menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,92 persen menjadi 5,74 persen di tahun 2024. Infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan perekonomian

di Kabupaten Pidie adalah meningkatnya panjang jalan beraspal dari tahun sebelumnya sebesar 10,64 km.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.23. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Pidie terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 23. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 13 Nilai Terstandar : -0,208	
Stabilitas Ekonomi Makro 10 Nilai Terstandar : 0,069	Pemerintahan dan Institusi Publik 7 Nilai Terstandar : 0,346
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 10 Nilai Terstandar : 0,213	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 22 Nilai Terstandar : -1,461

Berdasarkan tabel 3.23. di atas, dapat disimpulkan bahwa melemahnya kondisi ekonomi makro daerah, misalnya karena inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat, atau penurunan PDRB per kapita bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Pidie pada tahun 2025 berada di peringkat 13 dengan nilai terstandar -0,208 atau menurun 0,406 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 10 dengan nilai terstandar 0,198. Penurunan ini dipengaruhi 3 (tiga) lingkup mengalami penurunan nilai terstandar, hanya Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja yang meningkat.

Penurunan pada 3 (tiga) lingkup ini menandakan melemahnya kondisi ekonomi makro daerah, karena inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat, atau penurunan PDRB per kapita. Terjadi kemunduran pada tata kelola pemerintahan, efektivitas birokrasi, atau persepsi transparansi publik, serta kualitas hidup (pendidikan, kesehatan, sanitasi) dan infrastruktur (jalan, air, listrik, internet) menurun atau tertinggal dari daerah lain.

Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.24. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,622 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 5. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing

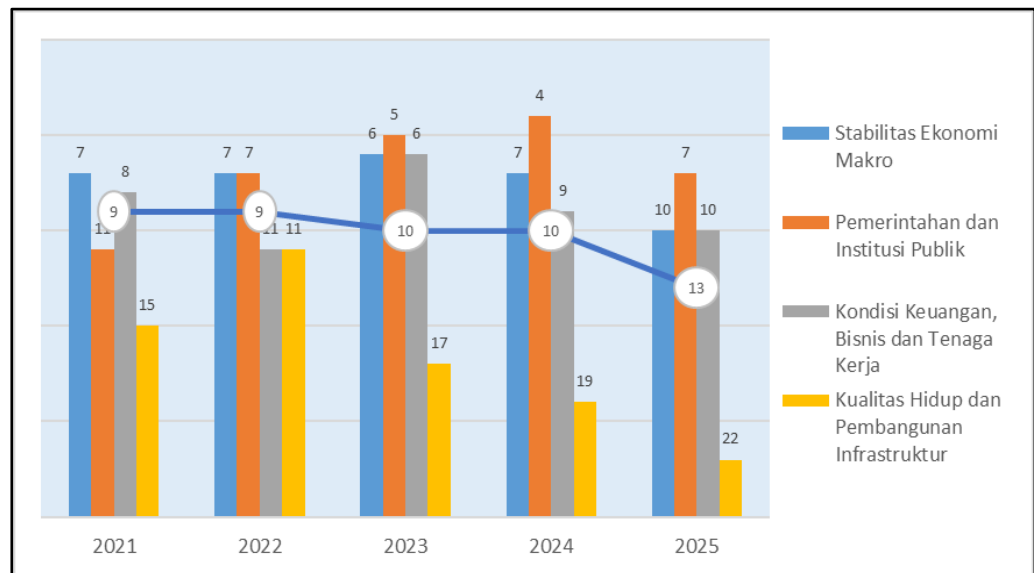
investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Pidie akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 24. Simulasi What If Kabupaten Pidie

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		13		5	
Nilai Terstandar		-0,208		0,622	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	10	10	Peringkat	7	5
Nilai Terstandar	0,069	0,266	Nilai Terstandar	0,346	0,677
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	10	8	Peringkat	22	4
Nilai Terstandar	0,213	0,529	Nilai Terstandar	-1,461	1,017

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 45. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks daya saing investasi Kabupaten Pidie pada tahun 2025 menurun pada peringkat 13. Penurunan ini dipengaruhi penurunan 3 (tiga) lingkup, yaitu Stabilitas Ekonomi Makro; Pemerintahan dan Institusi Publik; serta Kualitas Hidup dan Infrastruktur. Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga

Kerja sedikit meningkat, menunjukkan sedikit pemulihan dibanding 2024, kemungkinan ada peningkatan aktivitas bisnis atau lapangan kerja.

Lingkup Stabilitas ekonomi Pidie mulai melemah signifikan di tahun 2025, menunjukkan perlunya kebijakan menjaga daya beli dan pertumbuhan sektor riil, nilai tertinggi pada tahun 2023, namun menurun tajam di tahun 2024-2025. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik meningkat pada tahun 2021-2024, namun turun secara signifikan pada tahun 2025. Hal ini menandakan melemahnya kinerja institusi publik, mungkin akibat ketidakstabilan kebijakan, lemahnya koordinasi, atau rendahnya kepercayaan publik.

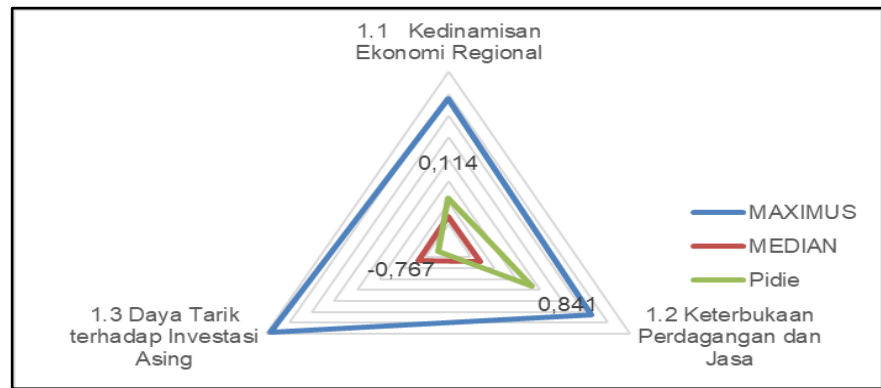
Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, pada tahun 2022 turun signifikan, lalu naik sedikit di 2023 dan 2025, menunjukkan sedikit pemulihan dibanding 2024, kemungkinan ada peningkatan aktivitas bisnis atau lapangan kerja. Sedangkan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur memiliki nilai positif pada tahun 2022, namun menurun signifikan pada tahun 2025. Hal ini menandakan kualitas hidup (pendidikan, kesehatan, akses dasar) dan infrastruktur makin tertinggal dari daerah lain. Berdasarkan Gambar 3.45. Indeks daya saing investasi Kabupaten Pidie berada di titik tertinggi pada 2021-2022, mengalami penurunan cukup tajam di tahun 2025.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar sebesar 0,069 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,569 poin. Pada Gambar 3.46. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional berada sedikit di atas rata-rata kabupaten/kota, menandakan bahwa Kabupaten Pidie sudah menunjukkan dinamika ekonomi. Sub Lingkup Keterbukaan Perdagangan dan Jasa berada di atas rata-rata dan hampir mendekati nilai maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan dan jasa relatif baik.

Sedangkan untuk Sub Lingkup Daya Tarik terhadap Investasi Asing berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan tantangan terbesar Pidie, yaitu menarik investasi asing, karena faktor infrastruktur, regulasi, iklim usaha, atau promosi investasi yang belum optimal.

Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah nilai impor lebih banyak dari ekspor sehingga keterbukaan perdagangan menurun. Investasi, baik PMA, maupun PMDN turun drastis pada 2025. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka nilai terstandar Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Pidie dapat meningkat menjadi sebesar 0,266 pada peringkat 10.



Gambar 3. 46. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Pidie

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie berada pada urutan ke 7 dengan nilai terstandar sebesar 0,346 atau menurun sebesar 0,686 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.47. dapat disimpulkan bahwa Pidie cukup kuat dalam ketahanan fiskal dan pengelolaan kebijakan fiskal dibanding median, meski masih jauh dari nilai maksimum.

Pada aspek kepemimpinan dan tata kelola, Pidie masih lemah, bahkan di bawah median. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik, kepemimpinan, dan kinerja birokrasi. Dalam penegakan hukum masih tertinggal dari daerah dengan performa terbaik. Ini berarti sistem hukum bekerja cukup baik (terlihat dari tingkat penyelesaian kriminalitas yang tinggi), namun standar regulasi masih perlu diperkuat.

Tahun 2025 menunjukkan kemajuan signifikan pada sisi fiskal dan tata kelola pemerintahan, meski masih menghadapi tantangan pada defisit anggaran dan meningkatnya kriminalitas. Namun, keberhasilan dalam meningkatkan penyelesaian kasus kriminal dan opini audit yang konsisten baik menjadi modal penting bagi stabilitas institusi publik di Pidie. Jika indikator yang menurun dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Pidie dapat meningkat sampai naik pada peringkat 5 dengan nilai terstandar 0,677.



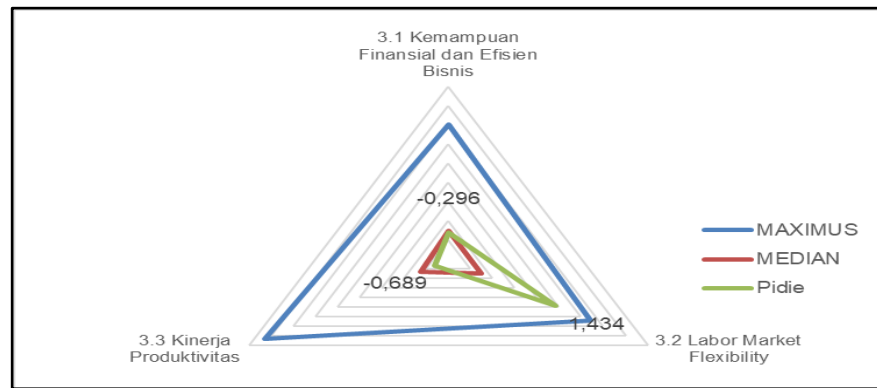
Gambar 3. 47. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Pidie

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar sebesar 0,213 atau meningkat 0,125 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.48. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kemampuan Finansial dan Efisiensi Bisnis di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan akses permodalan, manajemen keuangan, dan efisiensi operasional usaha masih menjadi tantangan.

Sub Lingkup Labor Market Flexibility relatif tinggi. Hal ini menunjukkan adanya ketersediaan SDM, kemampuan adaptasi tenaga kerja, serta regulasi ketenagakerjaan yang tidak terlalu kaku. Sedangkan untuk Sub Lingkup Kinerja Produktivitas, Pidie sangat tertinggal dikarenakan output tenaga kerja, efisiensi produksi, dan nilai tambah sektor usaha masih rendah.

Tahun 2025 Pidie mengalami kemajuan ekonomi dari sisi perbankan, tenaga kerja, dan produktivitas, meskipun ada tantangan berupa rendahnya produktivitas sektor sekunder dan penurunan tabungan masyarakat. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah jumlah kredit bermasalah, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan produktivitas industri. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie dapat meningkat nilai terstandar menjadi 0,529 dengan peringkat 8.

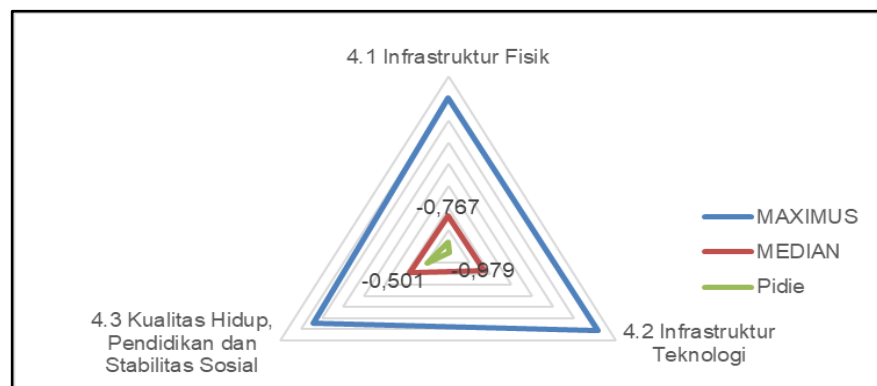


Gambar 3. 48. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Pidie

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie berada pada urutan ke 22 dengan nilai terstandar sebesar -1,461 atau menurun 0,496 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.49. dapat dilihat bahwa Sub lingkup pada lingkup ini berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan infrastruktur baik fisik maupun teknologi masih terbatas dan kurang optimal (kondisi jalan, transportasi, energi, air bersih, dan fasilitas publik, akses internet, jaringan telekomunikasi, digitalisasi layanan, dan teknologi informasi), serta kualitas pendidikan, layanan kesehatan, tingkat kesejahteraan sosial, dan stabilitas keamanan masih di bawah rata-rata.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Pidie dapat meningkat drastis sampai naik pada peringkat 4 dengan nilai terstandar 1,017.



Gambar 3. 49. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Pidie

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

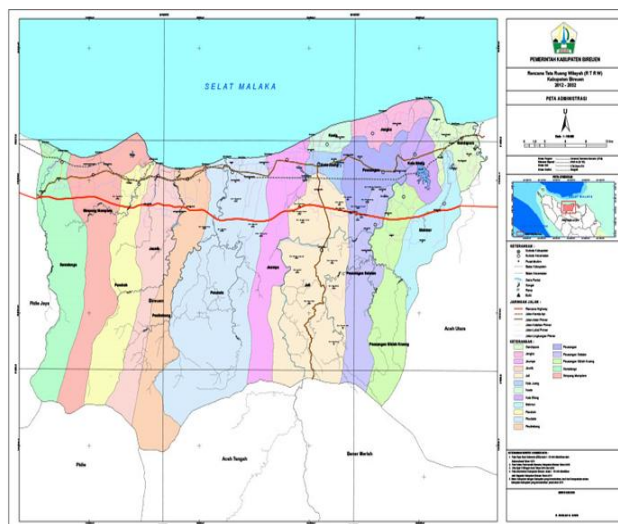
Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Pidie dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie pada tahun 2025 berada pada posisi 13 akan meningkat menjadi peringkat 5 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,622.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Memperbaiki iklim investasi asing dengan regulasi yang lebih ramah investor, infrastruktur pendukung, serta promosi potensi unggulan daerah;
- b. Memperbaiki Infrastruktur Teknologi Fisik untuk mempercepat transformasi ekonomi;
- c. Meningkatkan Kualitas SDM dan Produktivitas melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja; dan
- d. Mempenguatan Tata Kelola Pemerintah dan Fiskal Daerah dengan digitalisasi pelayanan, optimalisasi pajak.

10. Kabupaten Bireuen

a. Gambaran Umum



Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.798,25 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2024 berjumlah 459.073 orang, dengan nilai PDRB per kapita sebesar 40,04 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 sebesar 18,38 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,35 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu sebesar 17,03 triliun rupiah. Sedangkan Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2024 sebesar 11,81 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak

511,11 miliar rupiah. Nilai PDRB ini juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2024 Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,52 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 32,88 persen. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 23,46 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Bireuen pada tahun 2024 mencapai 28,26 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebanyak 43,38 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 0,15 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Bireuen adalah di sektor perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi 19,35 miliar rupiah, diikuti oleh sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan nilai investasi 4,60 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Bireuen pada tahun 2023 berjumlah 226.792 orang atau naik sebanyak 4.368 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,24 persen. Sedangkan tingkat pengangguran Kabupaten Bireuen menunjukkan perbaikan dengan menurunnya tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya 4,14 persen menjadi 3,93 persen pada tahun 2024. Infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Bireuen adalah meningkatnya panjang jalan beraspal dari tahun sebelumnya sebesar 32,58 km.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.25. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Bireuen terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 25. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bireuen Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bireuen	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 8 Nilai Terstandar : 0,402	
Stabilitas Ekonomi Makro 7 Nilai Terstandar : 0,596	Pemerintahan dan Institusi Publik 4 Nilai Terstandar : 0,814

Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 7 Nilai Terstandar : 0,675	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 16 Nilai Terstandar : -0,478
---	--

Berdasarkan tabel 3.25. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Bireuen pada tahun 2025 berada di peringkat 8 dengan nilai terstandar 0,402 atau menurun 0,094 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,496. Penurunan ini dipengaruhi 3 (tiga) lingkup mengalami penurunan nilai terstandar. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro mengalami sedikit penurunan, menandakan perlambatan pertumbuhan ekonomi meskipun relatif stabil. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami peningkatan terbesar, dipengaruhi peningkatan opini audit LKPD (WTP), kinerja fiskal dan keseimbangan anggaran membaik, dan peningkatan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Lingkup Kondisi keuangan, bisnis, dan tenaga kerja mengalami penurunan, menandakan sektor bisnis dan produktivitas melemah. Untuk Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, menurun signifikan (-0,703) dipengaruhi akses infrastruktur kesehatan menurun (rasio penduduk per fasilitas meningkat), kualitas lingkungan dan sosial belum membaik, infrastruktur teknologi dan jalan mengalami stagnasi.

Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.26. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 1,135 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 2. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Bireuen akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

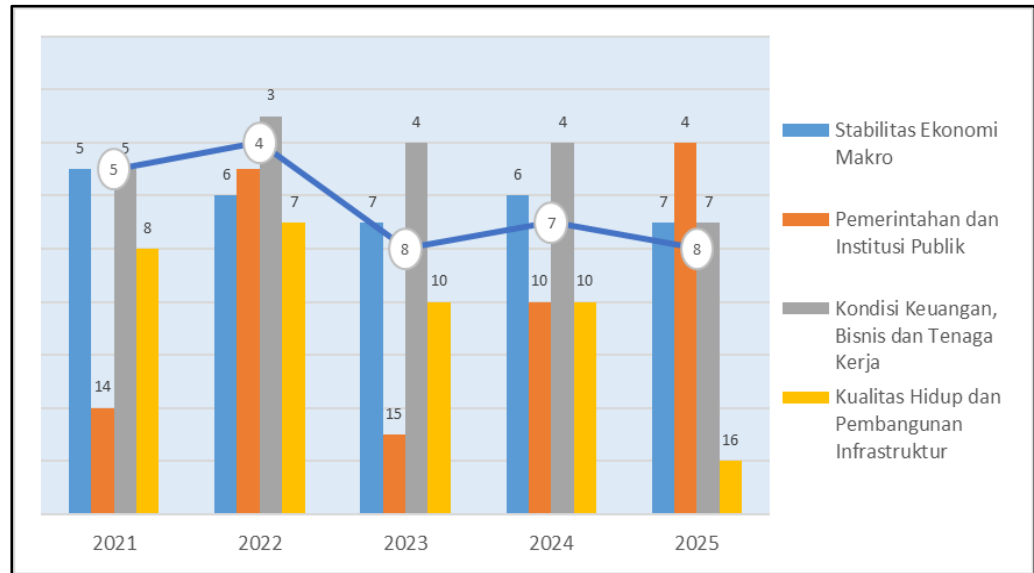
Tabel 3. 26. Simulasi What If Kabupaten Bireuen

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		8		2	
Nilai Terstandar		0,402		1,135	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	7	6	Peringkat	4	3
Nilai Terstandar	0,596	0,904	Nilai Terstandar	0,814	1,096

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	7	4	Peringkat	16	3
Nilai Terstandar	0,675	1,126	Nilai Terstandar	-0,478	1,415

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 50. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bireuen Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks daya saing investasi Kabupaten Bireuen pada tahun 2025 menurun menjadi peringkat 8. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan 3 (tiga) lingkup dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro; Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja; serta Kualitas Hidup dan Infrastruktur.

Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro memiliki kinerja tertinggi pada 2022, menandakan ekonomi sempat pulih pasca pandemi, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan bertahap. Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja mengalami tren positif hingga 2024 (1,009), lalu turun di 2025 (0,675). Hal ini dipengaruhi keterbatasan akses pembiayaan usaha kecil, pelemahan produktivitas tenaga kerja, dan penurunan iklim usaha lokal.

Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur mengalami penurunan terus menerus dari 0,457 sampai dengan -0,478, ini menandakan penurunan kualitas layanan dasar (Infrastruktur jalan, air bersih, atau listrik tidak berkembang signifikan, kualitas kesehatan dan lingkungan belum membaik).

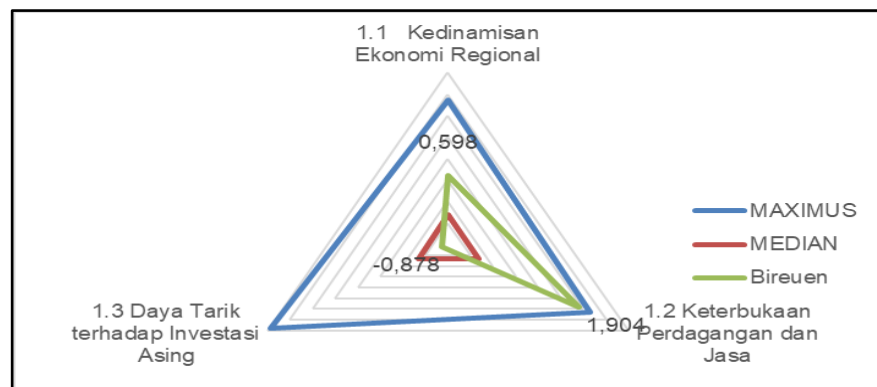
Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik sempat menurun pada tahun 2023, pada tahun 2024–2025 kembali membaik hingga 0,814. Meningkatnya lingkup ini menandakan perbaikan tata kelola dan transparansi anggaran, serta peningkatan kinerja aparatur dan kepatuhan fiskal.

Berdasarkan Gambar 3.50. Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Barat berada di titik tertinggi pada 2022, adanya pemulihan ekonomi dan pemerintahan yang kuat. Pada tahun 2025, pemerintahan membaik pesat, tapi ekonomi dan infrastruktur melemah.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bireuen berada pada urutan ke 7 dengan nilai terstandar sebesar 0,596 atau menurun 0,055 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.51. dapat dilihat Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional serta Sub Lingkup Keterbukaan Perdagangan dan Jasa berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan Bireuen memiliki dinamika ekonomi regional yang cukup berkembang, tidak stagnan, namun masih belum mampu menyaingi daerah dengan performa terbaik. Kabupaten Bireuen juga mempunyai akses perdagangan dan jasa yang relatif terbuka dan kompetitif dibanding banyak daerah lain.

Sedangkan untuk Sub Lingkup Daya Tarik Terhadap Investasi Asing, Kabupaten Bireuen berada di bawah rata-rata. Hal ini menggambarkan Bireuen sudah mulai menarik investor, tetapi masih kalah jauh dibanding daerah yang menjadi pusat investasi asing. Penurunan lingkup ini dipengaruhi oleh penurunan nilai investasi, baik PMDN, maupun PMA. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Bireuen dapat meningkat menjadi peringkat 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,904.



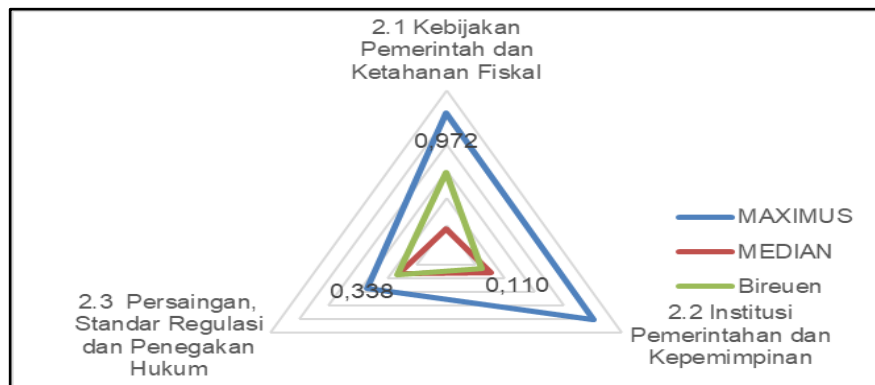
Gambar 3. 51. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Bireuen

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bireuen berada pada urutan ke 10 dengan nilai terstandar sebesar 0,814 atau meningkat 0,717 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.52. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan ketahanan fiskal di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Bireuen relatif kuat, pendapatan daerah dan keseimbangan fiskal cukup baik. Untuk Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan di bawah rata-rata, Kabupaten Bireuen cukup konsisten dalam opini WTP dan peningkatan kinerja pemda, tetapi masih tertinggal jauh dibanding daerah dengan tata kelola terbaik.

Sedangkan Sub Lingkup Persaingan, Standar Regulasi dan Penegakan Hukum berada hampir sama dengan rata-rata. Ini menunjukkan terdapat perbaikan kriminalitas dan penyelesaian kasus, tapi standar regulasi dan daya saing hukum belum sekuat daerah lainnya. Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan, keseimbangan fiskal positif, konsistensi WTP, meningkatnya evaluasi kinerja pemda dan penyelesaian kriminalitas sangat baik.

Indikator yang perlu menjadi perhatian adalah kontribusi pajak terhadap pendapatan pemda. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Bireuen dapat meningkat sampai peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,096.



Gambar 3. 52. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Bireuen

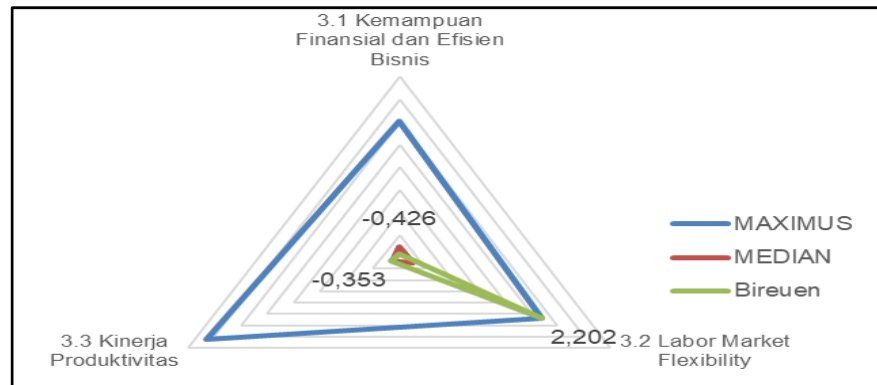
3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bireuen berada pada urutan ke 7 dengan nilai terstandar sebesar 0,675 atau meningkat 0,334 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Gambar 3.53. dapat disimpulkan bahwa pada lingkup ini Sub Lingkup Fleksibilitas pasar

tenaga kerja menjadi kekuatan utama Bireuen. Pasar tenaga kerja sangat fleksibel, baik dari sisi ketersediaan, penyerapan, maupun adaptasi kebutuhan pasar. Potensi besar untuk menarik investor padat karya.

Sedangkan 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan akses pembiayaan, manajemen bisnis, efisiensi operasional belum optimal, serta produktivitas tenaga kerja dan usaha masih rendah. Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh akses layanan perbankan makin membaik, pengangguran menurun, kondisi pasar tenaga kerja positif, produktivitas meningkat cukup tajam di sektor jasa dan primer.

Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, yaitu peningkatan NPL, penurunan produktivitas sektor sekunder. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Bireuen dapat meningkat sampai peringkat 4 dengan nilai terstandar 1,126.



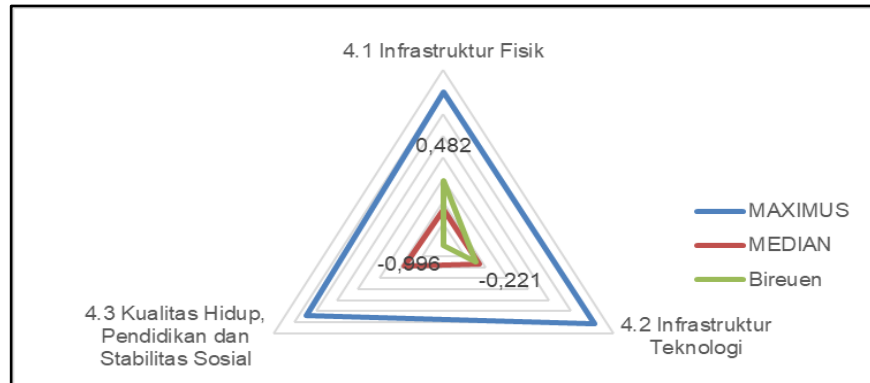
Gambar 3. 53. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Bireuen

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bireuen berada pada urutan ke 16 dengan nilai terstandar sebesar -0,478 atau menurun 0,703 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.54. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur Fisik menjadi kekuatan di lingkup ini dengan ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, transportasi, utilitas) relatif memadai.

Untuk 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan akses dan kualitas internet, telekomunikasi, digitalisasi layanan masih terbatas, serta kualitas hidup, pendidikan, dan stabilitas sosial, yang masih tertinggal jauh dari standar terbaik.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain akses komputer dan internet sekolah rendah, fasilitas kesehatan tidak bertambah sebanding dengan jumlah penduduk. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup ini dapat meningkat sampai peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,415.



Gambar 3. 54. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Bireuen

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Bireuen dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie pada tahun 2025 berada pada posisi 8 akan meningkat menjadi peringkat 2 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 1,135.

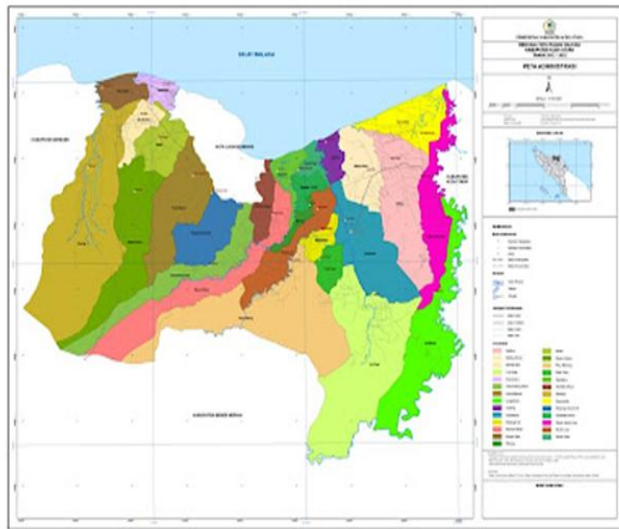
Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- Mendorong hilirisasi sektor unggulan agar keterbukaan perdagangan berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi regional;
- Memperkuat iklim investasi dengan regulasi ramah investor, penyediaan kawasan industri, dan insentif fiskal untuk menarik modal asing;
- Mengembangkan infrastruktur dan SDM supaya kedinamisan ekonomi lebih meningkat dan tidak hanya bergantung pada perdagangan;
- Memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pajak daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat;
- Mereformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- Meningkatkan iklim investasi dengan regulasi ramah usaha, kepastian hukum, dan pemberantasan praktik ekonomi biaya tinggi;

- g. Memperkuat kualitas kredit dengan seleksi lebih ketat dan pendampingan UMKM agar NPL tidak terus naik;
- h. Mendorong sektor sekunder (industri pengolahan) dengan investasi dan teknologi agar produktivitas tidak tertinggal dari sektor lain; dan
- i. Memperluas jaringan internet broadband sebagai digitalisasi layanan publik.

11. Kabupaten Aceh Utara

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 2.705,26 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2024 berjumlah 631.984 orang, dengan nilai PDRB per kapita sebesar 47,60 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2024 mencapai 30,08 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 1,71 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 28,38 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 17,81 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 18,44 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan pada tahun 2024 Kabupaten Aceh Utara mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,56 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Distribusi dari sektor ini menyentuh angka sebesar 33,41 persen. Selanjutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 23,92 persen, disusul lapangan usaha lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 11,46 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2024 mencapai 324,07 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 34,22 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 1,08 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh

Utara adalah di sektor industri kimia dan farmasi dengan nilai investasi 230,46 miliar rupiah, diikuti oleh sektor industri lainnya dengan nilai investasi 39,85 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2024 berjumlah 274.121 orang atau meningkat sebanyak 5.027 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 59,07 persen. Sedangkan tingkat pengangguran menurun dari tahun 2023 sebesar 7,07 persen menjadi 6,88 persen pada tahun 2024.

Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Utara adalah tersedianya Bandara Malikussaleh, dan infrastruktur jalan beraspal yang mengalami peningkatan 18,54 km dari tahun sebelumnya.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.27. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Utara terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 27. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Utara	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 3 Nilai Terstandar : 0,917	
Stabilitas Ekonomi Makro 3 Nilai Terstandar : 1,273	Pemerintahan dan Institusi Publik 1 Nilai Terstandar : 1,287
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 2 Nilai Terstandar : 1,387	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 13 Nilai Terstandar : -0,281

Berdasarkan tabel 3.27. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2025 berada di peringkat 3 dengan nilai terstandar 0,917 atau menurun 0,220 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,136. Penurunan ini dipengaruhi 3 (tiga) lingkup yang mengalami penurunan nilai terstandar. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro mengalami sedikit penurunan dengan nilai terstandar sebesar 0,100 poin, menandakan kondisi makroekonomi Aceh Utara masih stabil, tetapi tekanan ekonomi mulai

meningkat di tahun 2025 yang disebabkan oleh inflasi lokal dan ketergantungan sektor primer, atau lemahnya diversifikasi ekonomi.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami penurunan sebesar 0,483 poin, menunjukkan melemahnya tata kelola pemerintahan dan efektivitas institusi publik. Hal ini dikarenakan birokrasi yang belum efisien, koordinasi antar-instansi, serta menurunnya transparansi dan kepercayaan publik. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, menurun 0,559 poin, menandakan kurangnya peningkatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi). Hal ini dapat menahan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

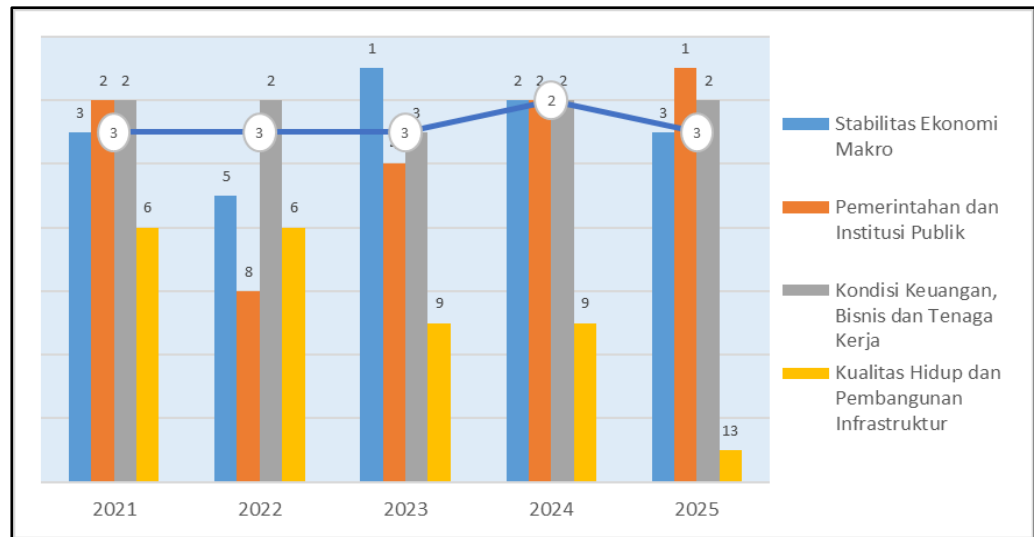
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis, dan Tenaga Kerja mengalami peningkatan sebesar 0,265 poin, menandakan daya adaptasi ekonomi lokal mulai menguat. Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.28. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 1,537 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 1. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing lainnya. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Utara akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 28. Simulasi What If Kabupaten Aceh Utara

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		3		1	
Nilai Terstandar		0,917		1,537	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	3	3	Peringkat	1	1
Nilai Terstandar	1,273	1,484	Nilai Terstandar	1,287	1,287
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	2	2	Peringkat	13	2
Nilai Terstandar	1,387	1,854	Nilai Terstandar	-0,281	1,524

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 55. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2025 menurun menjadi peringkat 3. Pada tahun 2025, daya saing Aceh Utara menunjukkan penurunan di tiga dari empat lingkup, terutama pada pemerintahan publik dan kualitas hidup. Hanya sektor keuangan dan tenaga kerja yang mengalami peningkatan signifikan, menjadi satu-satunya pilar penguat daya saing daerah.

Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro sempat menurun pada 2022 dengan nilai terstandar 1,031 kemudian naik kembali pada 2023 dengan nilai terstandar 1,627. Pada Tahun 2025 turun kembali menjadi 1,273. Penurunan ini disebabkan oleh inflasi daerah, penurunan kinerja ekspor/produksi lokal, atau menurunnya konsumsi masyarakat.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik memiliki nilai terstandar tertinggi pada tahun 2024 (1,771) dan kembali menurun 1,287 pada tahun 2025. Penurunan ini menandakan adanya penurunan efektivitas birokrasi, pengawasan fiskal, atau partisipasi publik dalam kebijakan daerah. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur juga mengalami penurunan dengan -0,281 pada tahun 2025, ini menandakan penurunan kualitas layanan publik, akses infrastruktur, dan kesejahteraan dasar masyarakat.

Sedangkan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja meningkat pada tahun 2025 dengan nilai terstandar 1,387. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan fleksibilitas tenaga kerja dan kemampuan bisnis lokal beradaptasi.

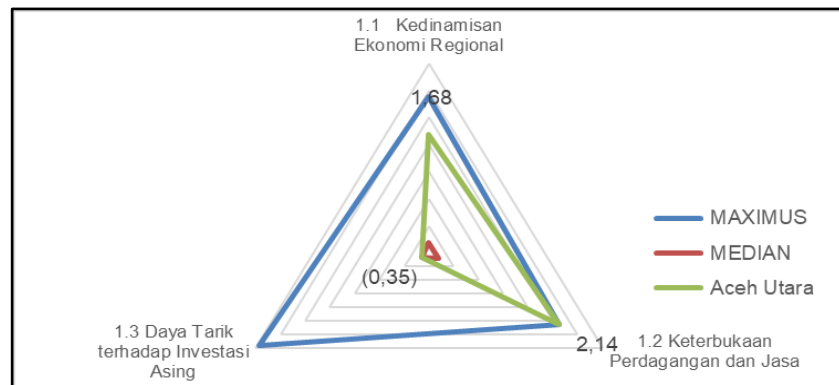
Berdasarkan Gambar 3.55. Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2025 menunjukkan penurunan di tiga dari empat dimensi utama, terutama pada pemerintahan publik dan kualitas hidup. Hanya sektor

keuangan dan tenaga kerja yang mengalami peningkatan signifikan, menjadi satu-satunya pilar penguat daya saing daerah.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke 3 dengan nilai terstandar sebesar 1,273 atau menurun 0,100 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.56. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional serta Keterbukaan Perdagangan dan Jasa berada di atas rata-rata dan setara dengan maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh Utara memiliki dinamika ekonomi regional yang cukup baik, serta keterbukaan perdagangan dan jasa di Aceh Utara sudah optimal.

Sedangkan Sub Lingkup Daya Tarik terhadap Investasi Asing berada pada garis rata-rata. Hal ini menandakan masih belum menarik bagi investasi asing dan menjadi kelemahan utama yang perlu diperhatikan. Penurunan lingkup ini dipengaruhi oleh penurunan tajam investasi asing. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Utara dapat meningkat menjadi nilai terstandar 1,484.



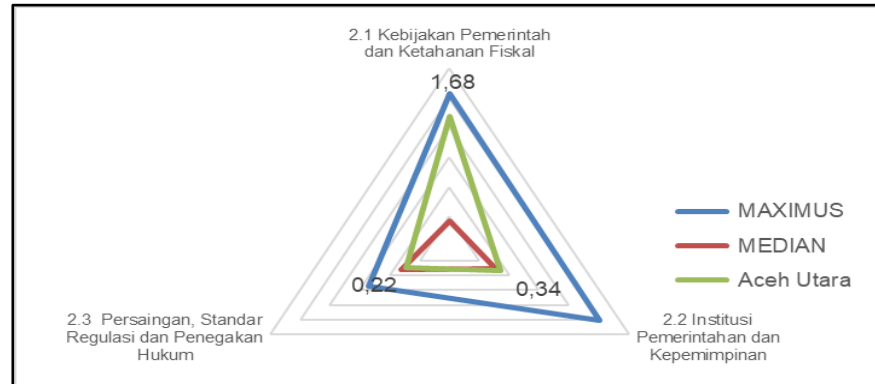
Gambar 3. 56. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Utara

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke 1 dengan nilai terstandar sebesar 1,287 atau menurun 0,483 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.57. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah relatif baik dalam kebijakan fiskal dan ketahanan keuangan.

Untuk Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan berada sedikit di atas rata-rata. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah

relatif baik dalam kebijakan fiskal dan ketahanan keuangan serta peningkatan kinerja pemerintahan. Sedangkan Sub Lingkup Persaingan, Standar Regulasi dan Penegakan Hukum berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi, standar persaingan usaha, dan penegakan hukum. Penurunan ini dipengaruhi oleh rendahnya kontribusi pajak dan meningkatnya angka kriminalitas.



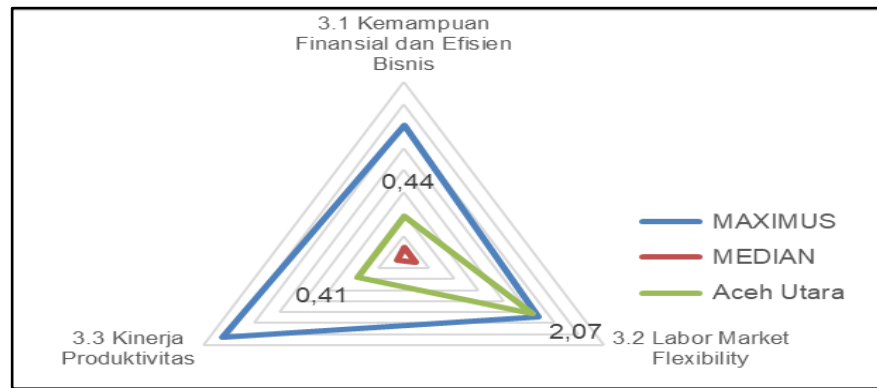
Gambar 3. 57. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Utara

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke 2 dengan nilai terstandar sebesar 1,387 atau meningkat 0,265 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.58. dapat dilihat bahwa seluruh sub lingkup yang mendukung lingkup ini berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Kondisi keuangan dan efisiensi bisnis di Aceh Utara cukup baik, tetapi belum optimal.

Terkait fleksibilitas tenaga kerja yang sangat baik, seperti ketersediaan tenaga kerja, adaptasi terhadap kebutuhan pasar, serta mobilitas pekerja yang tinggi. Sedangkan produktivitas tenaga kerja dan usaha di Aceh Utara masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas SDM, teknologi, dan efisiensi proses produksi yang masih terbatas.

Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, yaitu produktivitas yang rendah, efisiensi operasional, biaya produksi, dan akses pembiayaan. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan nilai terstandar menjadi 1,854.



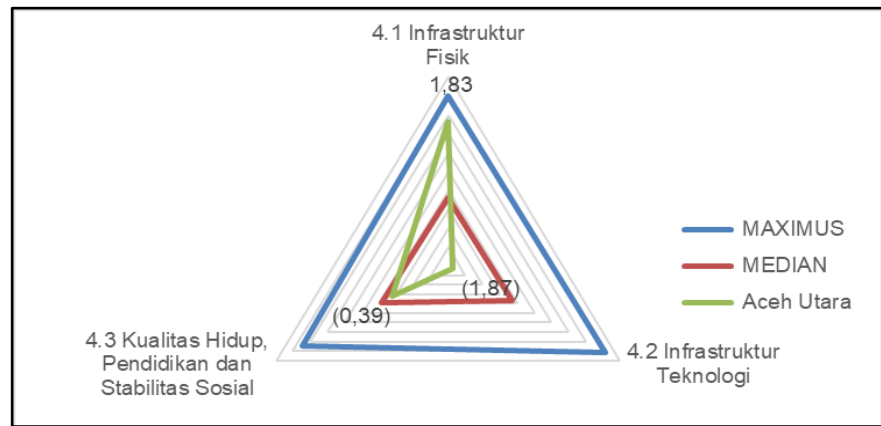
Gambar 3. 58. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Utara

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Utara berada pada urutan ke 13 dengan nilai terstandar sebesar -0,281 atau menurun 0,559 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.59. dapat dilihat Sub Lingkup Infrastruktur Fisik berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan keunggulan kompetitif Aceh Utara pada aspek infrastruktur fisik seperti jalan, fasilitas transportasi, maupun sarana umum.

Sedangkan 2 (dua) sub lingkup lainnya berada jauh di bawah rata-rata. Ini menunjukkan rendahnya penetrasi internet, adopsi teknologi digital, maupun kesiapan layanan berbasis IT, serta menunjukkan ada tantangan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan stabilitas sosial, namun tidak separah aspek teknologi.

Penurunan lingkup ini dipengaruhi beberapa indikator, antara lain Infrastruktur teknologi masih tertinggal (rendahnya akses komputer dan internet institusional), fasilitas kesehatan primer terbatas, beban pasien per fasilitas naik drastis, jalan beraspal stagnan, tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Utara dapat meningkat menjadi peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,524.



Gambar 3. 59. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Utara

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Utara dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2025 berada pada posisi 3 akan meningkat menjadi peringkat 1 diikuti dengan peningkatan nilai terstandar menjadi 1,537.

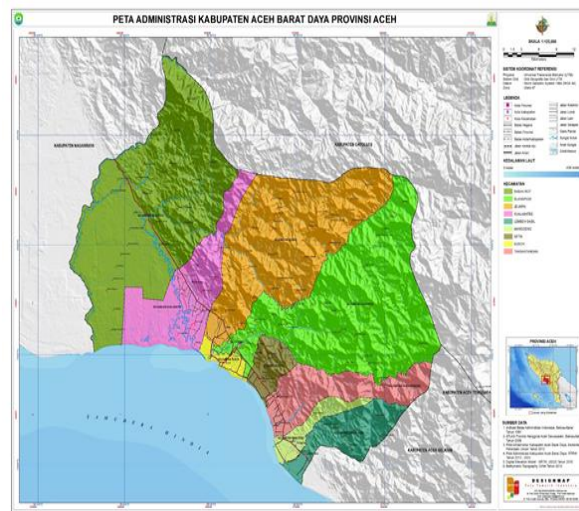
Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- Meningkatkan iklim investasi: perbaikan regulasi, insentif pajak, promosi kawasan industri, dan peningkatan infrastruktur;
- Membuat strategi khusus menarik investor asing agar tidak terus menurun, sekaligus menjaga minat investor lokal;
- Membuat strategi dan perencanaan pembangunan daerah, dengan memperhatikan pergeseran sektor ekonomi dari tahun ke tahun untuk meningkatkan PDRB;
- Melakukan diversifikasi pendapatan daerah dengan memperbesar basis pajak lokal untuk mengurangi ketergantungan transfer pusat;
- Mengendalikan Belanja Daerah agar tidak terus masuk defisit, pengeluaran harus lebih selektif dan efisien;
- Meningkatkan kinerja pemerintahan dengan inovasi pelayanan publik berbasis digital;
- Membuat strategi menekan angka kriminalitas, misalnya dengan pengawasan berbasis teknologi, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat regulasi usaha agar kondusif bagi investasi;

- h. Mendorong produktivitas melalui pelatihan SDM untuk meningkatkan keterampilan kerja, sertifikasi keahlian, dan pelatihan vokasi;
- i. Meningkatkan kualitas jalan dan transportasi publik untuk mengatasi beban kendaraan;
- j. Memperluas jaringan broadband/internet fiber optic, terutama di sekolah, kantor, dan desa terpencil;
- k. Melakukan kerja sama dengan operator seluler untuk memperkuat sinyal 4G/5G di daerah rural;
- l. Menambah fasilitas kesehatan primer (puskesmas, klinik desa); dan
- m. Menciptakan Digitalisasi layanan kesehatan (rekam medis elektronik, telemedicine).

12. Kabupaten Aceh Barat Daya

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.882,99 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2024 berjumlah 159.187 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 33,72 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya atas dasar harga berlaku (ADHB) senilai 5,37 triliun rupiah di tahun 2024, meningkat sebesar 403,06 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Secara umum, nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 mencapai 3,45 triliun rupiah, dari tahun sebelumnya senilai 3,31 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,24 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya sampai tahun 2024 masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan peranan sebesar 31,05 persen terhadap total PDRB. Kontribusi kedua terbesar adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan peranan sebesar 17,51 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2024 mencapai 125,26 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 182,61 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 2,33 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah di sektor industri makanan dengan nilai investasi 104,65 miliar rupiah, diikuti oleh sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan nilai investasi 9,20 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2024 berjumlah 72.651 orang atau meningkat sebanyak 1.418 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 60,50 persen. Sedangkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,08 persen menjadi 3,83 persen pada tahun 2024.

Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah tersedianya Pelabuhan Penyeberangan Susoh dan Bandara Kuala Batee, serta infrastruktur jalan beraspal yang mengalami peningkatan dari tahun yang lalu.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.29. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 29. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 14 Nilai Terstandar : -0,338	
Stabilitas Ekonomi Makro 15 Nilai Terstandar : -0,572	Pemerintahan dan Institusi Publik 17 Nilai Terstandar : 1,287
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 16 Nilai Terstandar : -0,530	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 11 Nilai Terstandar : 0,012

Berdasarkan tabel 3.29. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2025 berada di peringkat 14 dengan nilai terstandar -0,338 atau meningkat 0,109 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 16 dengan nilai terstandar -0,447. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan signifikan pada Lingkup Kualitas Hidup dan Infrastruktur dan membaiknya Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja. Hal ini menandakan perbaikan pada kondisi perbankan, tenaga kerja, efisiensi bisnis, serta peningkatan signifikan di akses infrastruktur, layanan publik, pendidikan, atau kesehatan.

Sedangkan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro serta Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami penurunan, menunjukkan stabilitas ekonomi melemah yang disebabkan fluktuasi inflasi, pertumbuhan ekonomi yang melambat serta mengindikasikan penurunan kinerja tata kelola pemerintahan, transparansi atau efektivitas pelayanan publik.

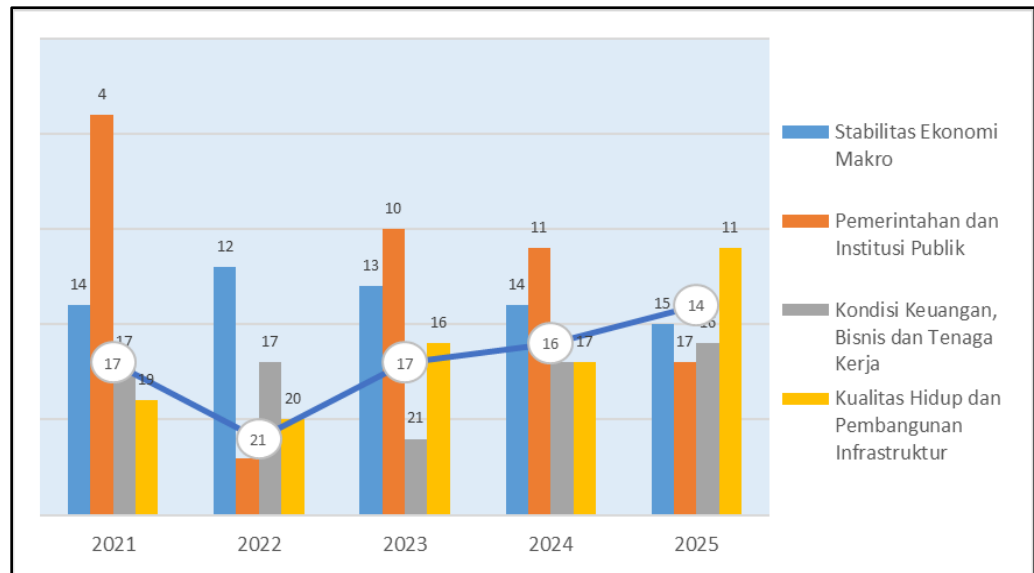
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.30. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,125 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 9. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Barat Daya akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 30. Simulasi What If Kabupaten Aceh Barat Daya

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		14		9	
Nilai Terstandar		-0,338		0,125	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	15	13	Peringkat	17	9
Nilai Terstandar	-0,572	-0,377	Nilai Terstandar	-0,262	0,065
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	16	16	Peringkat	11	5
Nilai Terstandar	-0,530	-0,240	Nilai Terstandar	0,012	1,053

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 60. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2025 meningkat menjadi peringkat 14. Pada Gambar 3.60. Kondisi Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2021-2025 dapat disimpulkan bahwa peningkatan signifikan terjadi di sektor sosial dan infrastruktur menjadi motor utama peningkatan daya saing investasi, dipengaruhi oleh investasi pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Sektor bisnis dan tenaga kerja membaik perlahan, didukung oleh peningkatan jumlah tabungan, pinjaman bank dan produktivitas industri.

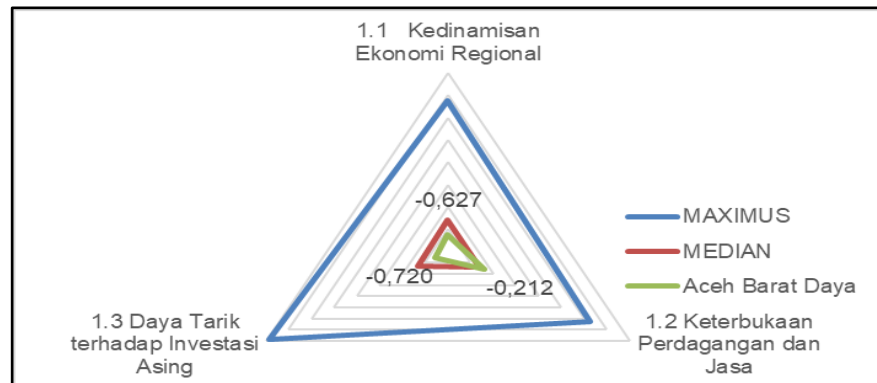
Kinerja pemerintahan dan ekonomi makro masih menjadi tantangan dalam peningkatan daya saing, karena memiliki nilai terstandar negatif. Hal ini menunjukkan belum optimalnya kebijakan fiskal, koordinasi lintas sektor dan efektivitas belanja daerah.

1) **Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro**

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada urutan ke 15 dengan nilai terstandar sebesar -0,572 atau menurun 0,117 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.61. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional dan Daya Tarik terhadap Investasi Asing berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan dinamika ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya masih stagnan dan daya tarik investasi asing masih sangat rendah.

Sedangkan Sub Lingkup Keterbukaan Perdagangan dan Jasa berada sedikit di atas rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan akses perdagangan dan jasa relatif cukup terbuka, meskipun masih jauh dari maksimal. Penurunan nilai terstandar ini dipengaruhi oleh penurunan

realisasi investasi dalam negeri, jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Barat Daya dapat meningkat dengan nilai terstandar -0,377 pada peringkat 13.

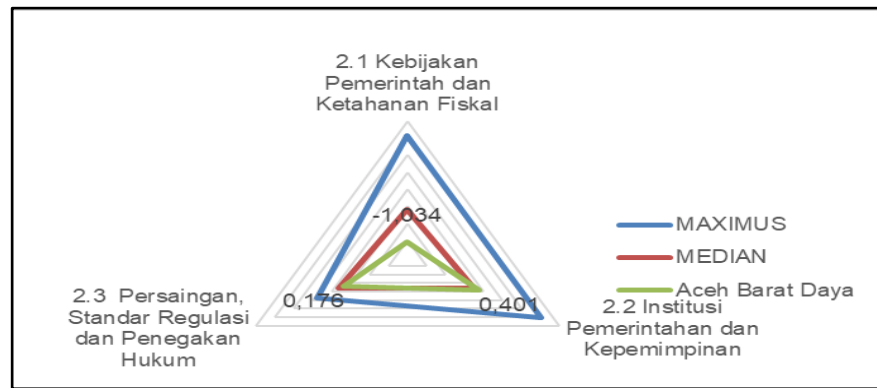


Gambar 3. 61. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat Daya

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada urutan ke 17 dengan nilai terstandar sebesar -0,262 atau meningkat -0,324 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.62. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal berada jauh di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini mengindikasikan fiskal daerah lemah (APBD terbatas, ketergantungan tinggi pada transfer pusat, efektivitas kebijakan rendah). Hal yang sama terjadi pada Sub Lingkup Persaingan, Standar Regulasi, dan Penegakan Hukum berada di bawah rata-rata, ini menunjukkan masih ada kelemahan dalam regulasi bisnis, transparansi aturan, serta kepastian hukum.

Sedangkan Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan berada di atas rata-rata, ini menunjukkan kualitas tata kelola dan kepemimpinan relatif baik. Peningkatan lingkup ini dipengaruhi meningkat secara signifikan kinerja pemda dan penyelesaian kasus kriminalitas. Namun terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan, antara lain meningkatnya kasus kriminalitas dan kemandirian fiskal rendah. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Barat Daya dapat meningkat menjadi peringkat 9 dengan nilai terstandar 0,065.

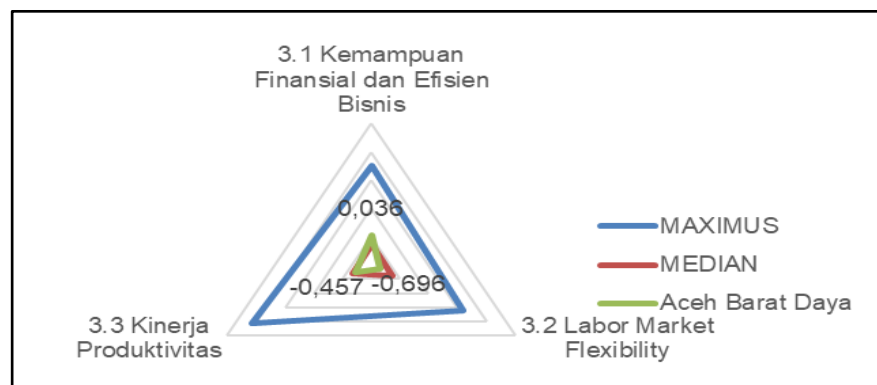


Gambar 3. 62. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat Daya

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada urutan ke 16 dengan nilai terstandar sebesar -0,530 atau menurun 0,168 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.63. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kemampuan Finansial dan Efisiensi Bisnis berada sedikit di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan kemampuan bisnis cukup stabil, relatif tidak terlalu lemah, namun efisiensi masih rendah bila dibandingkan daerah terbaik.

Sedangkan 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di bawah rata-rata, ini menandakan adanya indikasi keterbatasan kualitas SDM dan rigiditas pasar kerja dan tenaga kerja belum menghasilkan output yang maksimal. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya dapat meningkat dengan nilai terstandar -0,240.



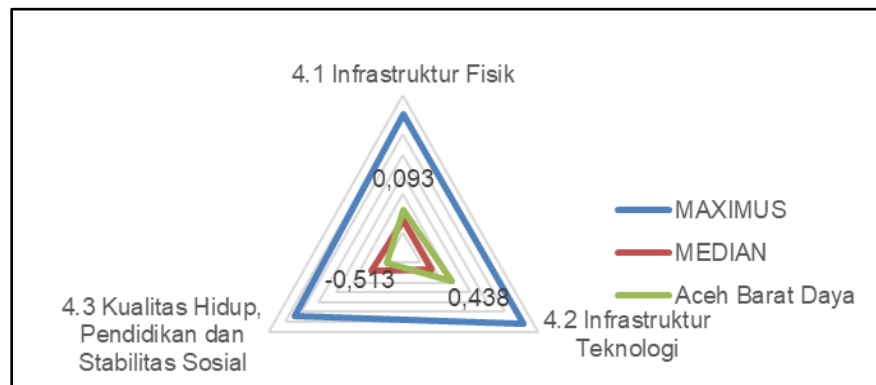
Gambar 3. 63. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat Daya

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada urutan ke 11 dengan nilai terstandar sebesar 0,012 atau meningkat 0,708 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.64. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur Fisik sedikit di atas rata-rata kabupaten/kota, ini menandakan infrastruktur jalan dan listrik baik, kepemilikan rumah membaik, tetapi akses air bersih masih menjadi tantangan serius.

Untuk Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan performa teknologi cukup baik, penggunaan internet rumah dan telepon genggam sangat tinggi. Sedangkan Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan, dan Stabilitas Sosial berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Kondisi ini dipengaruhi oleh APS SMP turun, beban guru meningkat, fasilitas kesehatan makin terbatas, dan bencana alam meningkat.

Beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu akses air bersih sangat rendah (<1 persen), akses internet sekolah masih minim, APS SMP menurun signifikan, rasio penduduk per fasilitas kesehatan makin tinggi, dan bencana alam meningkat. Jika indikator ini dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Barat Daya dapat meningkat pada peringkat 5 dengan nilai terstandar 1,053.



Gambar 3. 64. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Barat Daya

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

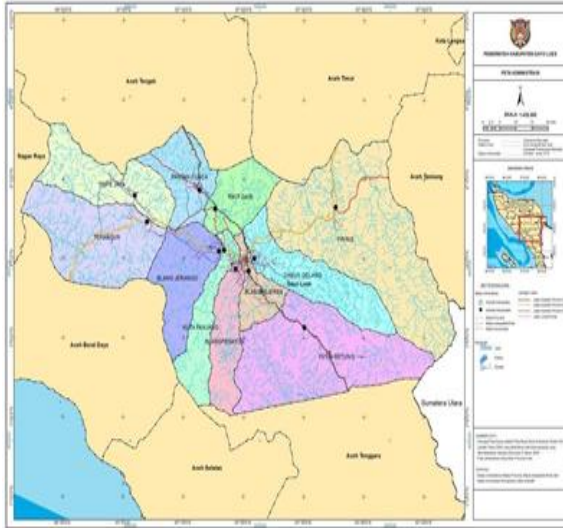
Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2025 berada pada posisi 14 akan meningkat menjadi peringkat 9 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,125.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Mendiversifikasikan sektor unggulan (pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM berbasis lokal);
- b. Mendorong hilirisasi produk lokal agar nilai tambah ekonomi meningkat;
- c. Meningkatkan infrastruktur perdagangan (pasar modern, kawasan logistik);
- d. Meningkatkan kepastian hukum dan transparansi regulasi;
- e. Menyediakan infrastruktur dasar (energi, telekomunikasi, transportasi) untuk mendukung iklim investasi;
- f. Melakukan promosi aktif potensi daerah ke investor asing terkait potensi unggulan daerah (misalnya agroindustri, pariwisata bahari) melalui pameran dan platform digital;
- g. Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan memperluas basis pajak daerah dan retribusi;
- h. Mendorong kerja sama dengan swasta/BUMD untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat;
- i. Mengendalikan pengeluaran agar belanja pembangunan tidak terganggu;
- j. Memperkuat program pencegahan kriminalitas (ekonomi masyarakat, pemuda, pengawasan wilayah rawan);
- k. Meningkatkan koordinasi antar-aparat agar tingkat kriminalitas bisa ditekan;
- l. Mendorong regulasi usaha yang lebih ramah investasi sehingga menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi potensi kriminalitas berbasis ekonomi;
- m. Memprioritaskan pembangunan air bersih melalui jaringan pipa, sumur bor, atau SPAM berbasis desa;
- n. Meningkatkan kualitas jalan beraspal terutama akses ke pusat ekonomi (pasar, kawasan wisata, pelabuhan);
- o. Mengoptimalkan transportasi publik sederhana untuk mengimbangi kenaikan kendaraan bermotor; dan
- p. Menyediakan program internet masuk sekolah bekerja sama dengan provider, agar kualitas pembelajaran digital meningkat.

13. Kabupaten Gayo Lues

a. Gambaran Umum



Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 5.549,91 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2024 berjumlah 106.791 orang, dengan nilai PDRB per kapita sebesar 33,55 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Gayo Lues atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 3,58 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 246,85 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2024 mencapai 2,20 triliun rupiah, juga mengalami kenaikan sebesar 69,53 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gayo Lues tahun 2024 sebesar 3,26 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 40,07 persen, selanjutnya lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi sebesar 12 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2024 adalah sebesar 122,46 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 53,23 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 175,68 miliar rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 3,42 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Gayo Lues adalah di sektor listrik, gas dan air dengan nilai investasi 58,27 miliar rupiah, diikuti oleh sektor pertambangan dengan nilai investasi 29,89 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2024 berjumlah 60.088 orang atau meningkat sebanyak 1.449 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 79,25 persen. Sedangkan tingkat pengangguran Kabupaten Gayo Lues mengalami penurunan dari tahun yang lalu, yaitu 2,65 persen menjadi 2,40 persen pada tahun 2024. Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Gayo Lues adalah tersedianya Bandara Blangkejeren.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.31. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Gayo Lues terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 31. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 18 Nilai Terstandar : -0,565	
Stabilitas Ekonomi Makro 18 Nilai Terstandar : -0,715	Pemerintahan dan Institusi Publik 13 Nilai Terstandar : 0,049
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 17 Nilai Terstandar : -0,561	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 20 Nilai Terstandar : -1,032

Berdasarkan tabel 3.31. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2025 berada di peringkat 18 dengan nilai terstandar -0,565 atau meningkat 0,405 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 23 dengan nilai terstandar -0,969. Pada Tahun 2025 menjadi titik peningkatan Kabupaten Gayo Lues, Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik menjadi pendorong perbaikan daya saing. Peningkatan peringkat ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Gayo Lues mulai lebih kompetitif di antara kabupaten/kota lain di Aceh.

Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro mengalami sedikit perbaikan yang konsisten, menunjukkan pemulihan ekonomi lokal berjalan, dengan pertumbuhan PDRB dan inflasi yang mulai terkendali. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami kenaikan yang paling signifikan. Hal ini menandakan tata kelola pemerintahan membaik yang dipengaruhi oleh peningkatan akuntabilitas, transparansi keuangan daerah, opini audit LKPD serta kinerja birokrasi yang lebih efisien.

Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja mengalami perubahan meskipun masih memiliki nilai terstandar negatif. Hal ini menandakan aktivitas bisnis mulai tumbuh, namun pasar tenaga kerja belum fleksibel dan iklim investasi masih rendah. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur mengalami peningkatan yang cukup signifikan, ini menunjukkan infrastruktur dasar dan layanan publik membaik.

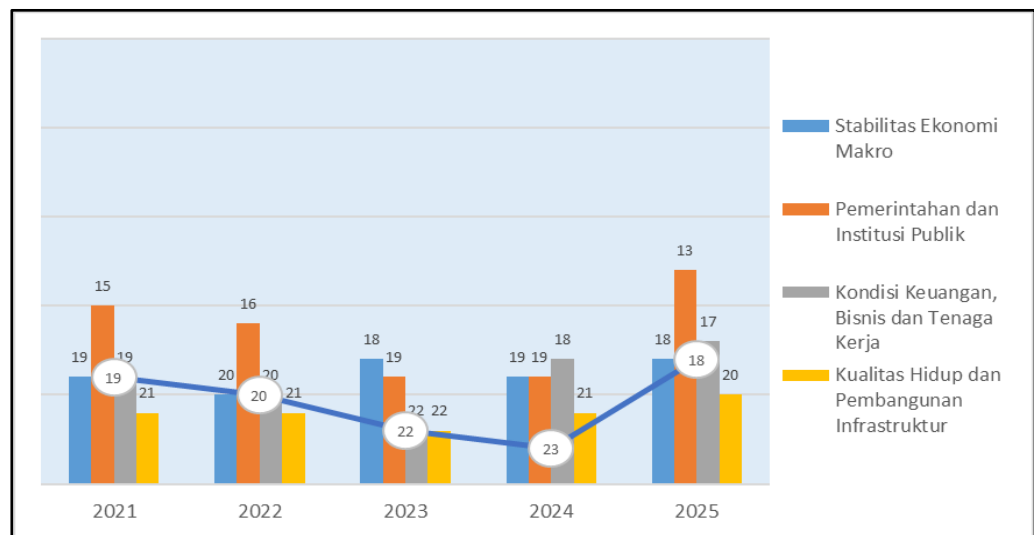
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.32. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,221 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 9. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Gayo Lues akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang

Tabel 3. 32. Simulasi What If Kabupaten Gayo Lues

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		18		9	
Nilai Terstandar		- 0,565		0,221	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	18	12	Peringkat	13	13
Nilai Terstandar	-0,715	-0,276	Nilai Terstandar	0,049	0,049
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	17	11	Peringkat	20	4
Nilai Terstandar	-0,561	-0,077	Nilai Terstandar	-1,032	1,149

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 65. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2025 meningkat menjadi peringkat 18. Pada Gambar 3.65. Kondisi Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues tahun 2021-2025 menunjukkan perbaikan pada Tahun 2025 dibanding 2024 yang berada posisi terendah. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro membaik secara bertahap 2023-2025. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang stabil, ditandai dengan meningkatnya PDRB, Inflasi terkendali dan daya beli masyarakat yang mulai pulih.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik dari tahun 2021 ke 2024 mengalami penurunan tajam dalam tata kelola pemerintahan, pada tahun 2025 terjadi lonjakan positif besar, naik dari -1,013 menjadi 0,049. Ini menandakan adanya reformasi tata kelola, peningkatan disiplin fiskal, dan perbaikan pelayanan publik yang mulai berdampak nyata.

Pada tahun 2022-2023 Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja menunjukkan stagnasi pada titik terendah, menandakan sektor bisnis dan tenaga kerja tertekan. Namun mulai 2024-2025, terjadi perbaikan bertahap, menunjukkan adanya pemulihan aktivitas usaha, peningkatan fleksibilitas tenaga kerja, dan efisiensi bisnis. Hal ini kemungkinan didorong oleh stabilitas pemerintahan dan dukungan terhadap UMKM.

Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur dari tahun 2021-2023, nilai terus menurun, menunjukkan peningkatan ketimpangan kualitas hidup dan infrastruktur yang belum merata. Namun pada 2024-2025, terjadi perbaikan cukup signifikan (naik 0,296 poin). Hal ini menunjukkan peningkatan infrastruktur dasar (jalan, listrik, jaringan komunikasi) serta perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan.

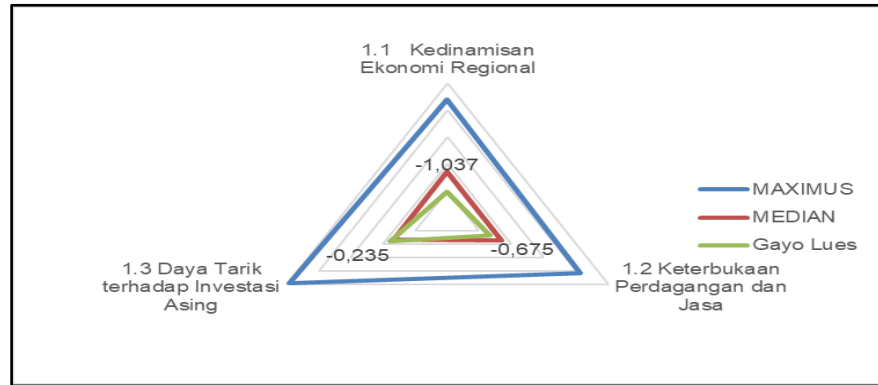
Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 menjadi tahun pemulihan besar bagi Gayo Lues di hampir seluruh lingkup. Pemerintahan dan tata kelola publik menjadi penggerak utama perbaikan, menular pada efisiensi ekonomi dan bisnis.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues berada pada urutan ke 18 dengan nilai terstandar sebesar 0,715 atau menurun 0,089 dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Gambar 3.66. dapat dilihat bahwa hampir semua sub lingkup dalam lingkup ini berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya. Ini menandakan dinamika ekonomi regional masih lemah, karena adanya hambatan dalam perdagangan dan jasa, namun terdapat sedikit potensi daya tarik investasi asing, meski masih lemah.

Beberapa indikator yang perlu diperhatikan, antara lain nilai impor lebih besar daripada ekspor dan kontribusi PMA masih relatif kecil. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi

Makro Kabupaten Gayo Lues dapat meningkat pada peringkat 12 dengan nilai terstandar -0,276.

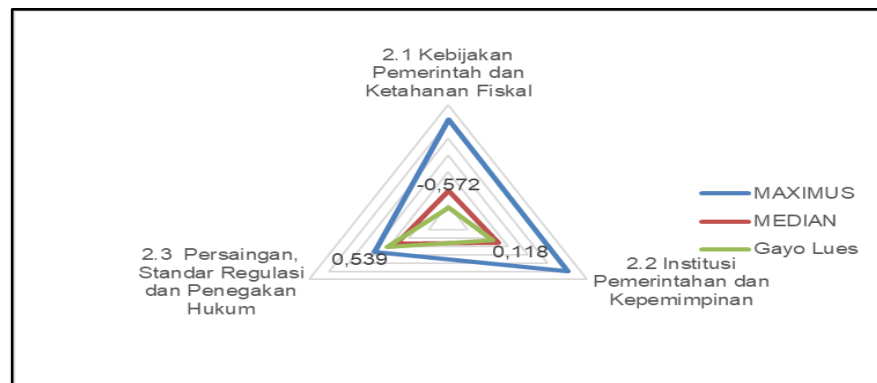


Gambar 3. 66. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Gayo Lues

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues berada pada urutan ke 13 dengan nilai terstandar sebesar 0,049 atau menurun 1,062 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.67. dapat dilihat bahwa seluruh sub lingkup pendukung lingkup ini berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa Gayo Lues dalam hal kebijakan fiskal dan ketahanan masih tertinggal signifikan, tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan melemah, serta daya saing, regulasi, dan penegakan hukum di Gayo Lues masih lemah dan perlu penguatan signifikan.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah rendahnya kontribusi pajak daerah, masih rendahnya kinerja pemda, dan meningkatnya tingkat kriminalitas. Jika indikator ini diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi dapat meningkat pada peringkat 13 dengan nilai terstandar 0,049.

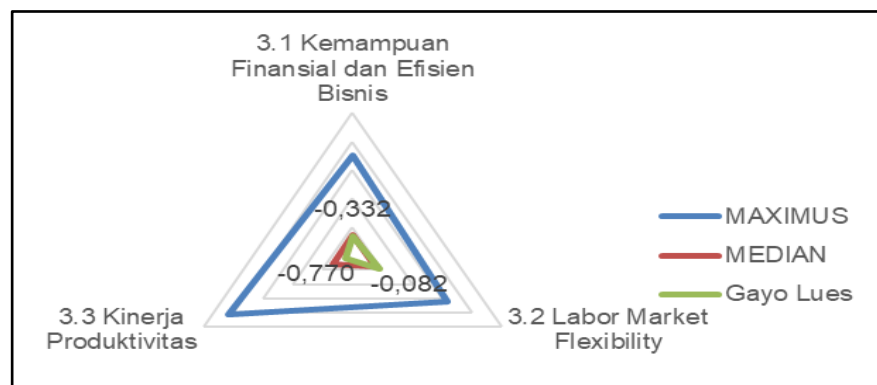


Gambar 3. 67. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Gayo Lues

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues berada pada urutan ke 17 dengan nilai terstandar sebesar -0,561 atau meningkat 0,173 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.68. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kemampuan Finansial dan Efisien Bisnis serta Sub Lingkup Kinerja Produktivitas berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan kemampuan finansial dan efisiensi bisnis Gayo Lues masih terbatas, terutama akses modal dan efisiensi operasional. Produktivitas Gayo Lues juga melemah ditandai dengan rendahnya output per tenaga kerja atau keterbatasan inovasi dan teknologi.

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh peningkatan signifikan dalam efisiensi dan inklusi keuangan, serta kualitas kredit membaik. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain total pinjaman bank, layanan perbankan, jumlah pekerja di sektor tersier dan produktivitas industri primer. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Gayo Lues dapat meningkat pada peringkat 11 dengan nilai terstandar -0,077.



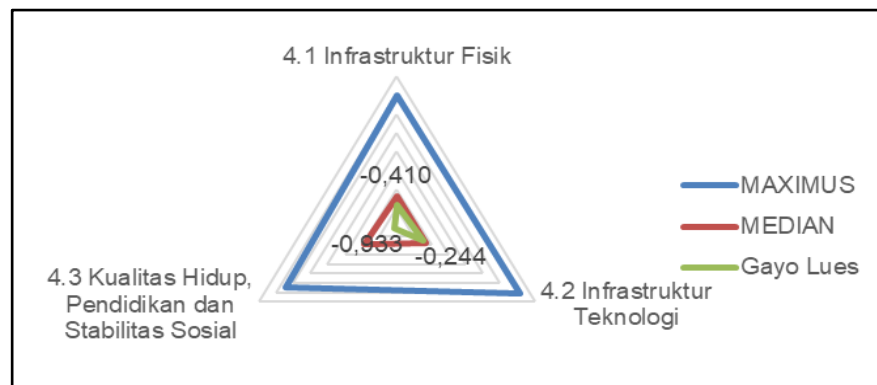
Gambar 3. 68. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Gayo Lues

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues berada pada urutan ke 20 dengan nilai terstandar sebesar -1,032 atau meningkat 0,295 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.69. dapat dilihat bahwa semua sub lingkup pada lingkup ini berada di bawah rata-rata kabupaten/kota, ini menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur fisik (jalan, transportasi, energi, air) di Gayo Lues belum memadai dan masih tertinggal dari median daerah lain.

Infrastruktur teknologi (akses internet, jaringan telekomunikasi, digitalisasi) di Gayo Lues relatif lebih baik dibanding aspek lain, namun tetap di bawah rata-rata. Kualitas hidup masyarakat (pendidikan, kesehatan, stabilitas sosial) di Gayo Lues masih jauh tertinggal dan perlu menjadi prioritas utama pembangunan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh membaiknya beberapa indikator, yaitu urbanisasi dan kepemilikan rumah meningkat, akses air minum dan listrik membaik, IPM dan harapan hidup meningkat, serta akses internet via HP hampir universal.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain akses internet di sekolah sangat rendah, rasio kendaraan terhadap jalan naik, dan persentase buta huruf naik. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Gayo Lues dapat meningkat drastis pada peringkat 4 dengan nilai terstandar 1,149.



Gambar 3. 69. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Gayo Lues

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Gayo Lues dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Gayo Lues yang pada tahun 2024 berada pada posisi 18 akan meningkat menjadi peringkat 9 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,211.

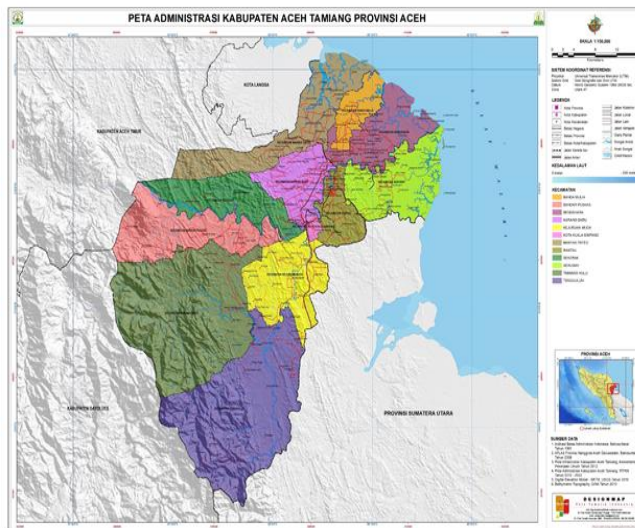
Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- Mendorong sektor unggulan (pertanian organik, kopi, perkebunan, pariwisata alam) agar tidak terlalu bergantung pada sektor primer;
- Memfasilitasi pelaku usaha lokal masuk ke pasar regional/nasional dengan *branding* produk khas Gayo Lues;

- c. Mengembangkan industri kecil-menengah agar kebutuhan lokal tidak terlalu bergantung pada impor;
- d. Memberikan insentif fiskal (keringanan pajak daerah, penyederhanaan izin) dan perbaikan iklim usaha agar investor asing tertarik;
- e. Memperluas basis pajak (misalnya pajak usaha kecil-menengah, pajak properti, retribusi berbasis digital);
- f. Melakukan efisiensi belanja daerah: pastikan pengeluaran difokuskan pada program produktif (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar);
- g. Mempercepat implementasi e-government agar layanan lebih transparan, cepat, dan efisien;
- h. Memperkuat Penegakan Hukum: tingkatkan sinergi aparat keamanan dan peradilan agar tren penyelesaian kriminalitas tetap tinggi (>90 persen); dan
- i. Memperluas jaringan internet dan telekomunikasi sebagai fondasi transformasi digital.

14. Kabupaten Aceh Tamiang

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.957,02 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2023 berjumlah 309.039 orang, dengan nilai PDRB per kapita sebesar 37,35 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Tamiang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 11,54 triliun rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,73 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB ADHK juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya senilai 6,40 triliun rupiah menjadi 6,67 triliun rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,25 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Aceh Tamiang pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 41,26 persen dan diikuti dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 15,67 persen. Kontribusi terbesar pada sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2024 adalah sebesar 376,42 miliar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 40,06 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 336,36 miliar rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 3,26 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang adalah di sektor industri makanan dengan nilai investasi 176,19 miliar rupiah, diikuti oleh sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan nilai investasi 165,28 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2024 berjumlah 159.589 orang atau meningkat sebanyak 3.687 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,76 persen. Sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Tamiang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,21 persen menjadi 6,95 persen pada tahun 2024. Sementara infrastruktur fisik yang mendukung kegiatan perekonomian semakin membaik di Kabupaten Aceh Tamiang dengan meningkatnya panjang jalan beraspal dari tahun sebelumnya sebesar 24,12 km.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.33. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Tamiang terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 33. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 10 Nilai Terstandar : 0,078	
Stabilitas Ekonomi Makro 11 Nilai Terstandar : 0,037	Pemerintahan dan Institusi Publik 18 Nilai Terstandar : -0,312

Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 9 Nilai Terstandar : 0,354	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 9 Nilai Terstandar : 0,235
--	---

Berdasarkan tabel 3.33. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2025 berada di peringkat 10 dengan nilai terstandar 0,078 atau meningkat 0,276 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 12 dengan nilai terstandar -0,197. Peningkatan ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) lingkup yang mengalami kenaikan nilai terstandar. Hal ini menunjukkan kinerja daya saing meningkat secara menyeluruh.

Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro meningkat 0,198 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengelolaan fiskal yang lebih baik. Lingkup Keuangan, Bisnis, dan Tenaga Kerja juga mengalami peningkatan, yang mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur mengalami kenaikan yang sangat besar, dari -0,991 menjadi 0,235 (1,226 poin). Terjadi lonjakan signifikan dalam kualitas infrastruktur dan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan akses publik.

Sedangkan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini menunjukkan adanya penurunan efektifitas tata kelola pemerintahan atau kinerja birokrasi pada aspek pelayanan publik, transparansi atau koordinasi antarinstansi.

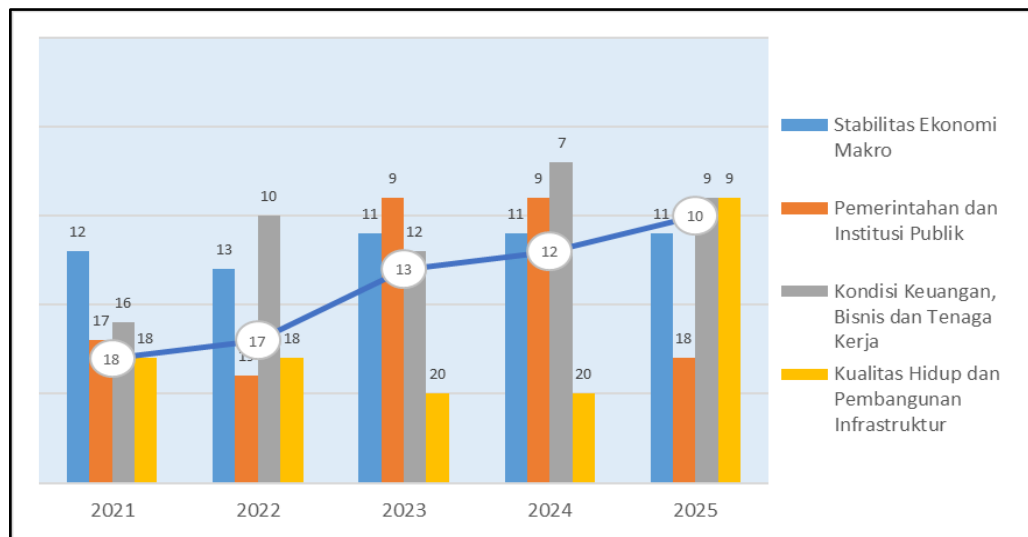
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.34. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,583 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 6. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Tamiang akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 34. Simulasi What If Kabupaten Aceh Tamiang

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		10 0,078		6 0,583	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	11	10	Peringkat	18	11
Nilai Terstandar	0,037	0,124	Nilai Terstandar	-0,312	0,211
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	9	7	Peringkat	9	3
Nilai Terstandar	0,354	0,673	Nilai Terstandar	0,235	1,323

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 70. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2025 meningkat menjadi peringkat 10. Pada Gambar 3.70. Kondisi Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2021-2025 menunjukkan perbaikan secara umum. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro membaik secara bertahap sejak tahun 2022 hingga 2025. Hal ini menunjukkan stabilitas ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang makin membaik, dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi fiskal yang semakin stabil.

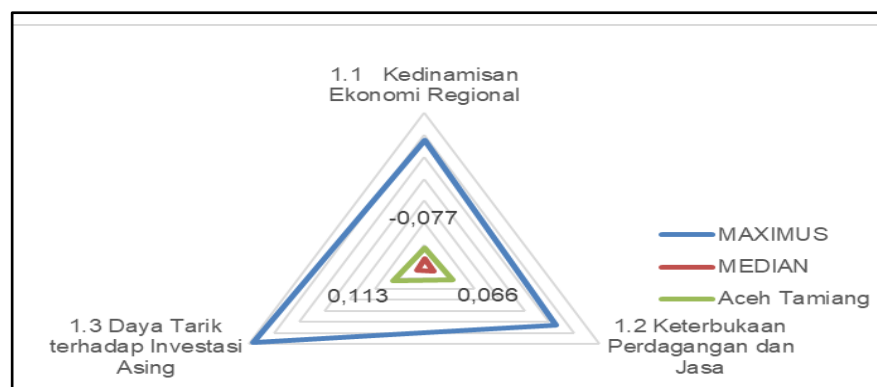
Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik terjadi fluktuasi cukup besar. Setelah membaik di tahun 2023-2024, nilai terstandar kembali turun di tahun 2025. Hal ini menunjukkan penurunan kinerja tata kelola pemerintahan, seperti efektivitas birokrasi atau kepercayaan publik. Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja menunjukkan tren positif yang konsisten sejak tahun 2022 (0,187 menjadi 0,354). Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan iklim usaha, aktifitas bisnis dan ketersediaan tenaga kerja produktif.

Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2025. Dari nilai terstandar negatif selama tahun 2021 hingga 2024 (-0,833 menjadi -0,991), di tahun 2025 berhasil memperoleh nilai terstandar positif (0,235). Ini menunjukkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (akses jalan, listrik, air bersih, layanan publik).

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang berada pada urutan ke 11 dengan nilai terstandar sebesar 0,037 atau meningkat 0,198 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.71. dapat dilihat bahwa seluruh sub lingkup di lingkup ini berada sedikit di atas rata-rata. Hal ini menandakan pertumbuhan atau dinamika ekonomi belum stabil/kuat, adanya peluang untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa, terutama yang berbasis keunggulan lokal, serta Aceh Tamiang punya potensi menarik investor, meski skalanya masih kecil dibanding daerah.

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB melonjak (4,25 persen), ekspor-impor meningkat pesat, investasi asing dan domestik meningkat sehingga menunjukkan kebangkitan ekonomi. Namun, penurunan PDRB per kapita menjadi alarm distribusi pendapatan yang tidak merata. Jika hal ini dapat diperbaiki, maka lingkup ini dapat meningkatkan pada peringkat 10 nilai terstandar 0,124.

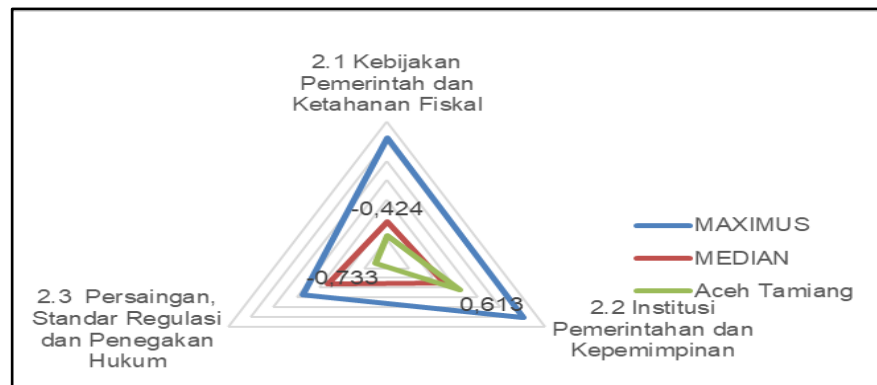


Gambar 3. 71. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tamiang

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang berada pada urutan ke 18 dengan nilai terstandar sebesar -0,312 atau menurun -0,471 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.72. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan ketahanan Fiskal serta Sub Lingkup Persaingan, Standar Regulasi dan Penegakan Hukum berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan ketahanan fiskal dan efektivitas kebijakan pemerintah masih lemah, serta regulasi, iklim persaingan, dan penegakan hukum masih menjadi hambatan besar.

Untuk Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan berada sedikit di atas rata-rata kabupaten/kota. Ini menandakan kepemimpinan dan kelembagaan relatif kuat dibanding daerah lain. Penurunan lingkup ini dipengaruhi oleh tekanan fiskal mulai terlihat (defisit), pendapatan pajak makin rendah, dan penyelesaian kasus sedikit melemah. Jika hal tersebut diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Tamiang dapat meningkat sampai peringkat 11 dengan nilai terstandar 0,211.



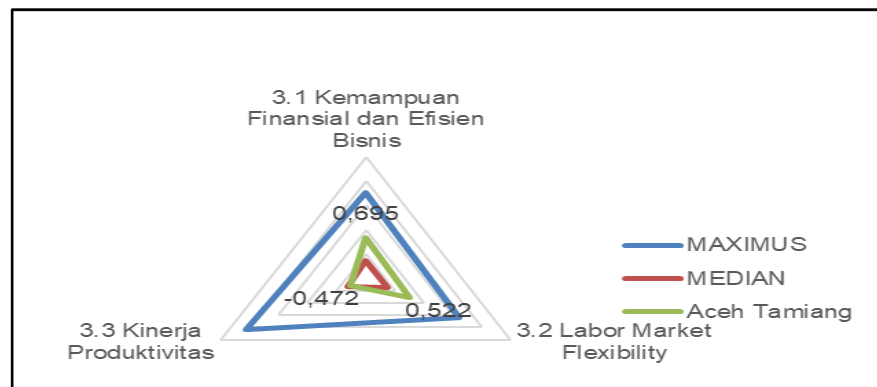
Gambar 3. 72. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tamiang

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang berada pada peringkat ke 9 dengan nilai terstandar sebesar 0,354 atau meningkat 0,149 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.73. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kemampuan Finansial dan Efisiensi Bisnis serta Sub Lingkup Labor Market Flexibility berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bisnis relatif efisien dan akses finansial lebih baik serta fleksibilitas pasar tenaga kerja cukup mendukung daya saing daerah.

Sedangkan untuk Sub Lingkup Kinerja Produktivitas sedikit berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan produktivitas tenaga kerja rendah dapat disebabkan keterbatasan teknologi, keterampilan SDM, dan minimnya inovasi. Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh meluasnya akses perbankan, adanya pertumbuhan tabungan dan kredit, angkatan kerja dan penduduk bekerja meningkat, pengangguran turun, produktivitas keseluruhan meningkat, terutama di sektor sekunder (industri).

Namun terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian, antara lain ketergantungan ke sektor primer masih tinggi, kredit bermasalah meningkat walau masih terkendali, dan produktivitas sektor primer mulai menurun. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tamiang dapat meningkat sampai peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,673.

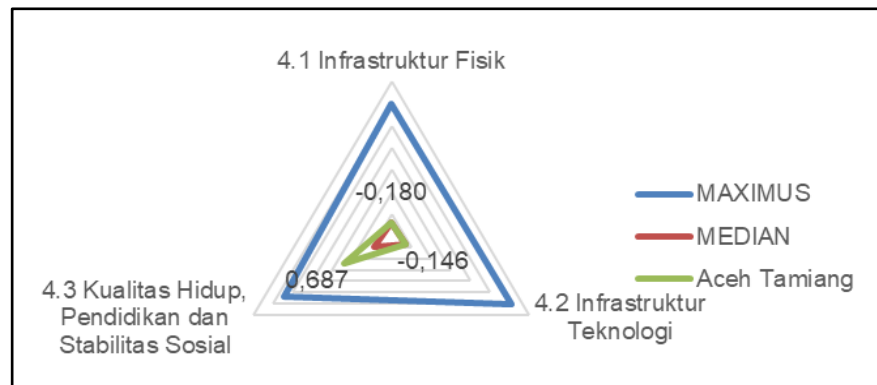


Gambar 3. 73. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tamiang

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang berada pada urutan ke 9 dengan nilai terstandar sebesar 0,235 atau meningkat 1,226 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.74. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur Fisik dan Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi berada pada garis rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan kondisi jalan, transportasi, energi, dan fasilitas umum belum menjadi keunggulan daya saing, serta adanya keterbatasan pada akses internet, digitalisasi layanan publik, dan teknologi penunjang produktivitas. Sedangkan Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Ini menandakan kondisi sosial relatif stabil, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat cukup baik.

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh perluasan jalan beraspal dan akses transportasi membaik, Internet hampir universal di sekolah, rumah, kantor, IPM naik cukup signifikan, akses kesehatan membaik, serta kepemilikan rumah dan literasi tinggi. Namun terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian, antara lain akses air bersih masih rendah (<10 persen), APS tingkat menengah turun tajam, ketimpangan (Rasio Gini) naik, Penggunaan HP sedikit menurun. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Tamiang dapat meningkat drastis sampai peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,323.



Gambar 3.74. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Tamiang

c. Perbaiki Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Tamiang yang pada tahun 2024 berada pada posisi 10 akan meningkat menjadi peringkat 6 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,583.

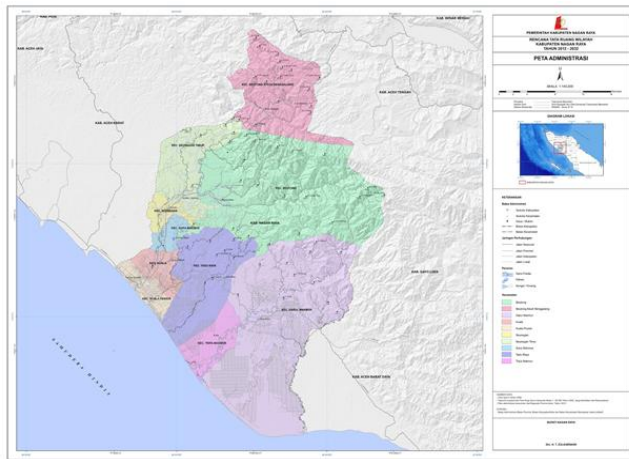
Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Mendorong sektor sekunder dan tersier (industri pengolahan, jasa modern) agar tidak terlalu bergantung pada sektor primer;
- b. Memperkuat akses pasar melalui kerja sama antar-daerah dan pengembangan produk unggulan ekspor;
- c. Mempermudah perizinan, berikan insentif fiskal untuk investasi pada sektor berorientasi ekspor dan padat karya;
- d. Meningkatkan porsi pajak daerah terhadap total pendapatan agar tidak terlalu bergantung pada transfer pusat;

- e. Memperkuat sistem regulasi dan penanganan kriminalitas agar kepercayaan investor dan stabilitas sosial meningkat;
- f. Memperluas layanan perbankan digital untuk UMKM dan masyarakat pedesaan;
- g. Mempercepat pembangunan jalan beraspal agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat lancar; dan
- h. Mencegah penurunan angka partisipasi sekolah menengah dengan bantuan beasiswa, program wajib belajar, dan sekolah alternatif.

15. Kabupaten Nagan Raya

a. Gambaran Umum



Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 3.544,9 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 berjumlah 176.429 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 70,46 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Nagan Raya atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 12,43 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 560 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 11,87 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,76 triliun rupiah menjadi 8,09 triliun rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 mencapai 4,38 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 50,29 persen. Selanjutnya, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 11,62 persen, disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,69 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 adalah sebesar 997,07 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebanyak 2,75 triliun rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 3,75 triliun rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 8,02 persen PDRB tahun 2024.

Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Nagan Raya adalah di sektor listrik, gas dan air dengan nilai investasi 432,74 miliar rupiah, diikuti oleh sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan nilai investasi 245,55 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 berjumlah 85.020 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 1.540 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,91 persen. Sedangkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Nagan Raya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,74 persen menjadi 5,22 persen pada tahun 2024. Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Nagan Raya adalah tersedianya Bandara Cut Nyak Dhien dan infrastruktur jalan beraspal yang tidak mengalami perubahan/penurunan dari tahun yang lalu.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.35. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Nagan Raya terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 35. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 7 Nilai Terstandar : 0,508	
Stabilitas Ekonomi Makro 2 Nilai Terstandar : 1,546	Pemerintahan dan Institusi Publik 14 Nilai Terstandar : 0,045
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 5 Nilai Terstandar : 0,777	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 14 Nilai Terstandar : -0,336

Berdasarkan tabel 3.35. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2025 berada di peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,508 atau menurun 0,132 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 5 dengan nilai terstandar 0,640. Hal ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) lingkup yang mengalami penurunan nilai terstandar.

Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro menurun 0,190 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dan tekanan inflasi. Namun nilai terstandar masih tergolong tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain.

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja mengalami penurunan signifikan. Hal ini menandakan penurunan iklim usaha, investasi dan daya serap tenaga kerja di sektor non pemerintahan. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur juga menurun dan nilai terstandar masih diangka negatif. Adanya kesenjangan antara kebutuhan pelayanan dasar dan realisasi pembangunan infrastruktur produktif.

Sedangkan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami sedikit peningkatan. Adanya langkah perbaikan dalam tata kelola, pelaporan keuangan dan implementasi kebijakan publik. Namun peningkatan ini belum cukup kuat untuk mendorong daya saing investasi secara keseluruhan.

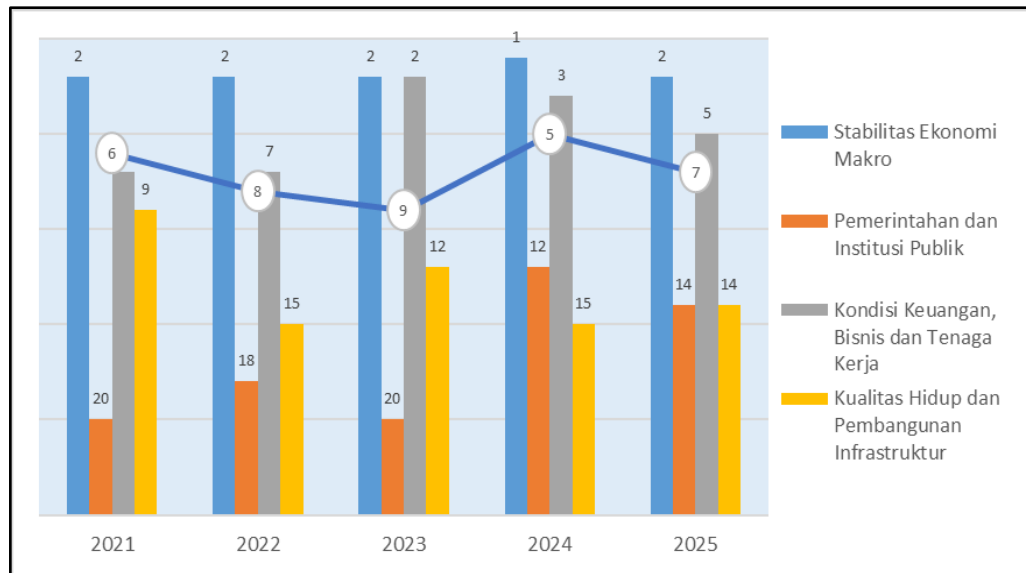
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.36. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 1,024 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 3. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Nagan Raya akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 36. Simulasi What If Kabupaten Nagan Raya

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		7 0,508		3 1,024	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	2	2	Peringkat	14	7
Nilai Terstandar	1,546	1,546	Nilai Terstandar	0,045	0,457
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	5	4	Peringkat	14	4
Nilai Terstandar	0,777	1,099	Nilai Terstandar	-0,336	1,086

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 75. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2025 menurun menjadi peringkat 7. Pada Gambar 3.75. Kondisi Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya tahun 2021-2025 cenderung stabil dengan sedikit penurunan agregat di tahun 2025. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro masih stabil dan tetap menjadi keunggulan utama Kabupaten Nagan Raya, walau sedikit melemah di tahun 2025.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik dari tahun 2021-2023 menunjukkan kelemahan signifikan (nilai terstandar negatif), namun terjadi peningkatan tajam pada tahun 2024-2025. Ini menandakan peningkatan efektifitas tata kelola, kepercayaan publik dan kapasitas institusi pemerintahan daerah.

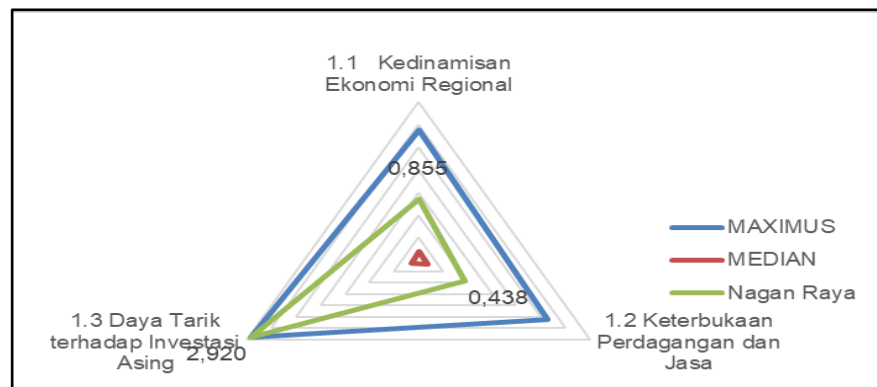
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja mengalami pertumbuhan pesat di tahun 2021-2023. Setelah puncak di tahun 2023, terjadi penurunan di tahun 2024-2025. Kinerja sektor bisnis dan keuangan masih baik, tetapi ada perlambatan. Sedangkan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur terjadi penurunan bertahap dari 0,270 (2021) ke -0,336 (2025). Hal ini menunjukkan tantangan pada kualitas hidup masyarakat dan pemerataan infrastruktur.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya berada pada urutan ke 2 dengan nilai terstandar sebesar 1.546 atau meningkat -0,190 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.76. dapat dilihat bahwa semua sub lingkup di lingkup ini berada di atas rata-rata kabupaten/kota, namun masih rendah dibandingkan nilai maksimum. Hal ini menandakan bahwa

pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan sektor produksi di Nagan Raya belum optimal, aktivitas ekspor-impor dan keterhubungan dengan pasar luar masih terbatas. Untuk daya tarik terhadap investasi asing menunjukkan Nagan Raya memiliki potensi besar menarik investor asing, kemungkinan karena SDA (energi, perkebunan, atau industri dasar).

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain peningkatan PDRB per kapita, Sektor jasa (tersier) dan perdagangan internasional menjadi motor pertumbuhan, inflasi terkendali, ekspor lebih tinggi dari impor, dan investasi asing melonjak drastis.



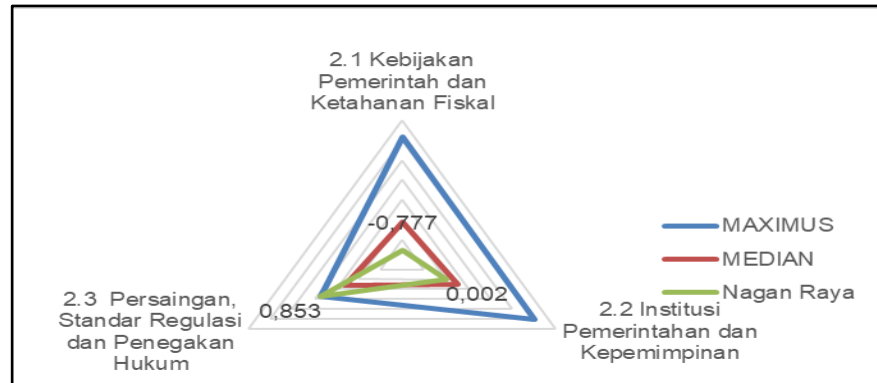
Gambar 3. 76. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Nagan Raya

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya berada pada urutan ke 14 dengan nilai terstandar sebesar 0,045 atau meningkat 0,062 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.77. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal serta Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan kemampuan fiskal, perencanaan kebijakan, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah masih lemah, serta kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan belum signifikan dalam mendukung pembangunan.

Sedangkan untuk Sub Lingkup Persaingan, Standar Regulasi, dan Penegakan Hukum memiliki nilai terbaik pada lingkup ini. Hal ini menunjukkan regulasi, standar persaingan usaha, dan aspek legalitas relatif lebih baik. Peningkatan pada lingkup ini dipengaruhi oleh beberapa indikator, antara lain opini audit keuangan baik, kinerja pemda meningkat, penyelesaian kasus membaik sehingga efektivitas penegakan hukum meningkat.

Namun terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian, yaitu penurunan pendapatan daerah dan keseimbangan fiskal. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Nagan Raya dapat meningkat sampai peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,457.



Gambar 3. 77. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Nagan Raya

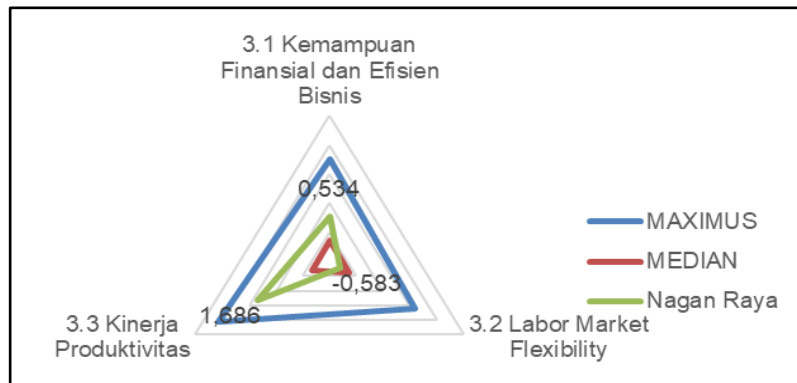
3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya berada pada urutan ke 5 dengan nilai terstandar sebesar 0,777 atau menurun - 0,303 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.78. dapat dilihat Sub Lingkup Labor Market Flexibility berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan rigiditas aturan ketenagakerjaan, keterbatasan keterampilan pekerja, serta ketidakserasian antara kebutuhan industri dan SDM lokal.

Sedangkan 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di atas rata-rata kabupaten/kota, ini menunjukkan kemampuan finansial dan efisiensi bisnis mulai terbentuk, terutama terkait dengan potensi sektor energi (PLTU), perkebunan kelapa sawit, dan industri pendukung. Terkait produktivitas menandakan bahwa sektor unggulan (pertanian, perkebunan, energi) cukup produktif dan dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Kondisi lingkup ini pada tahun 2025 menunjukkan beberapa hal, antara lain likuiditas masyarakat meningkat, akses perbankan makin baik. Hal ini diikuti dengan, kredit perbankan turun tajam dan kredit bermasalah meningkat. Selain itu, angkatan kerja dan jumlah pekerja meningkat, distribusi tenaga kerja menunjukkan pertumbuhan di semua sektor, tingkat pengangguran terkendali. Produktivitas semua sektor mengalami peningkatan produktivitas, terutama sekunder dan primer, yang mengindikasikan efisiensi ekonomi makin membaik.

Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagan Raya dapat meningkat pada peringkat 4 dengan nilai terstandar 1,009.



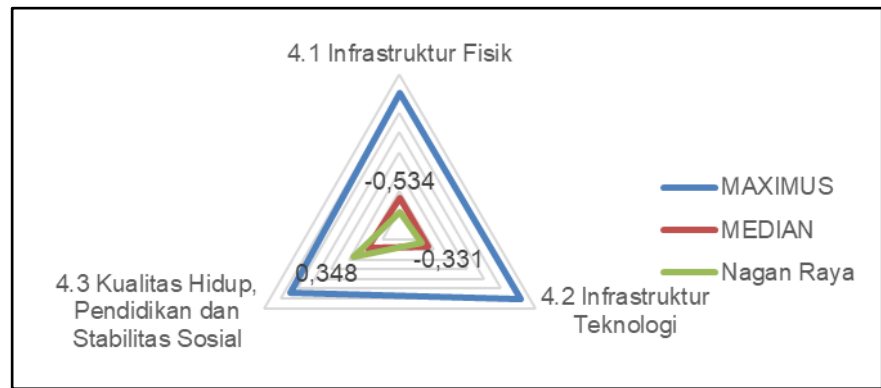
Gambar 3. 78. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Nagan Raya

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya berada pada urutan ke 14 dengan nilai terstandar sebesar -0,336 atau menurun -0,097 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.79. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur Fisik berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan kualitas infrastruktur fisik (jalan, transportasi, bandara, pelabuhan, air bersih, listrik, perumahan) belum memadai.

Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi pun masih rendah ditunjukkan dengan akses internet rumah tangga, kantor, sekolah, dan adopsi teknologi digital masih terbatas. Sedangkan untuk Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan, dan Stabilitas Sosial berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup (pendidikan dasar dan menengah, stabilitas sosial, angka harapan hidup) relatif lebih baik.

Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa indikator, antara lain akses air bersih sangat rendah, jalan tidak bertambah sementara jumlah kendaraan terus naik, literasi digital rendah, dan APS di SMA masih rendah. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Nagan Raya dapat meningkat drastis sampai peringkat 4 dengan nilai terstandar 1,086.



Gambar 3. 79. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Nagan Raya

c. Perbaiki Daya Saing Investasi

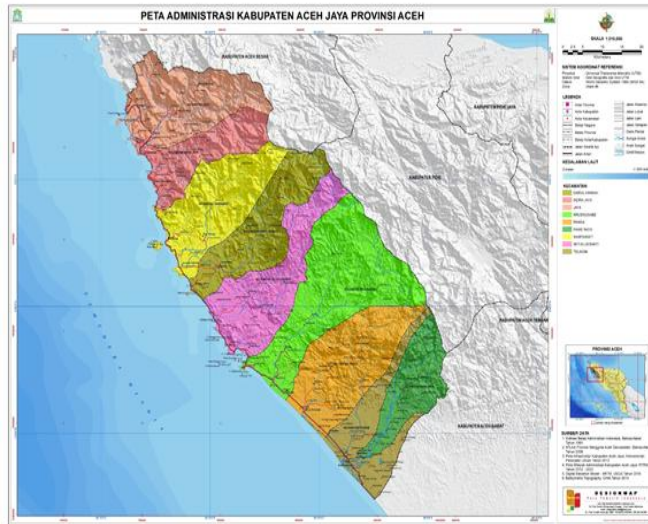
Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Nagan Raya dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Nagan Raya yang pada tahun 2024 berada pada posisi 7 akan meningkat menjadi peringkat 3 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 1,024.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- Menjaga momentum investasi asing dengan regulasi yang ramah investor dan insentif fiskal, tapi tetap melindungi sektor domestik;
- Melakukan diversifikasi ekspor agar tidak tergantung pada komoditas tertentu, meningkatkan nilai tambah produk;
- Mendorong industri sekunder (manufaktur) agar tidak hanya jadi pasar impor bahan baku;
- Mengoptimalkan pajak daerah dengan digitalisasi sistem perpajakan, pengawasan, dan insentif kepatuhan;
- Mengendalikan kriminalitas dengan pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kasus baru;
- Membangun jalan baru dan transportasi publik untuk mengatasi kepadatan lalu lintas; perlu investasi besar di air bersih;
- Meningkatkan akses internet di sekolah dan kantor, serta literasi komputer masyarakat; dan
- Mendorong partisipasi SMA/SMK lebih tinggi, program beasiswa dan keterampilan vokasional.

16. Kabupaten Aceh Jaya

a. Gambaran Umum



Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 3.872,23 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2024 berjumlah 99.200 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 36,36 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Jaya atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 3,61 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 233 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2024 mencapai 2,28 triliun rupiah, atau meningkat dari tahun sebelumnya dari angka 2,20 triliun rupiah di tahun 2023. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Jaya tahun 2024 adalah sebesar 3,83 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 33,04 persen. Selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 15,40 persen, disusul oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 12,48 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2024 adalah sebesar 183,69 miliar rupiah atau meningkat jauh sebanyak 111,32 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 72,38 miliar rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 5,09 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Aceh Jaya adalah di sektor industri makanan dengan nilai investasi 118,27 miliar rupiah, diikuti oleh tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan nilai investasi 43,91 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2024 berjumlah 50.863 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 1.387 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 70,91 persen. Sementara, tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan perbaikan dengan

menurunnya tingkat pengangguran dari tahun sebelumnya sebesar 2,88 persen menjadi 2,75 persen pada tahun 2024.

Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Aceh Jaya adalah tersedianya Pelabuhan Penyeberangan Calang dan infrastruktur jalan beraspal yang mengalami peningkatan 2,27 km pada tahun 2024.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.37. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Aceh Jaya terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 37. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Jaya	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 19 Nilai Terstandar : -0,610	
Stabilitas Ekonomi Makro 19 Nilai Terstandar : -0,779	Pemerintahan dan Institusi Publik 15 Nilai Terstandar : -0,073
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 20 Nilai Terstandar : -1,188	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 15 Nilai Terstandar : -0,398

Berdasarkan tabel 3.37. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2025 berada di peringkat 19 dengan nilai terstandar -0,610 atau meningkat 0,224 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 14 dengan nilai terstandar -0,386. Penurunan ini dipengaruhi 3 (tiga) lingkup mengalami penurunan nilai terstandar.

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja mengalami penurunan paling tajam dikarenakan menurunnya daya serap tenaga kerja lokal, efisiensi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur juga menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kemunduran pada aspek layanan dasar, seperti infrastruktur fisik (jalan, listrik, air bersih) belum optimal dan akses layanan kesehatan dan pendidikan menurun.

Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro hanya mengalami sedikit penurunan, yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan kurangnya diversifikasi ekonomi daerah dan ketergantungan pada sektor primer (pertanian, perikanan) yang fluktuatif. Sedangkan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik meningkat signifikan ditandai dengan adanya perbaikan tata kelola dan efektivitas birokrasi yang didukung oleh peningkatan pelayanan publik digital, koordinasi antar instansi dan transparansi pemerintahan

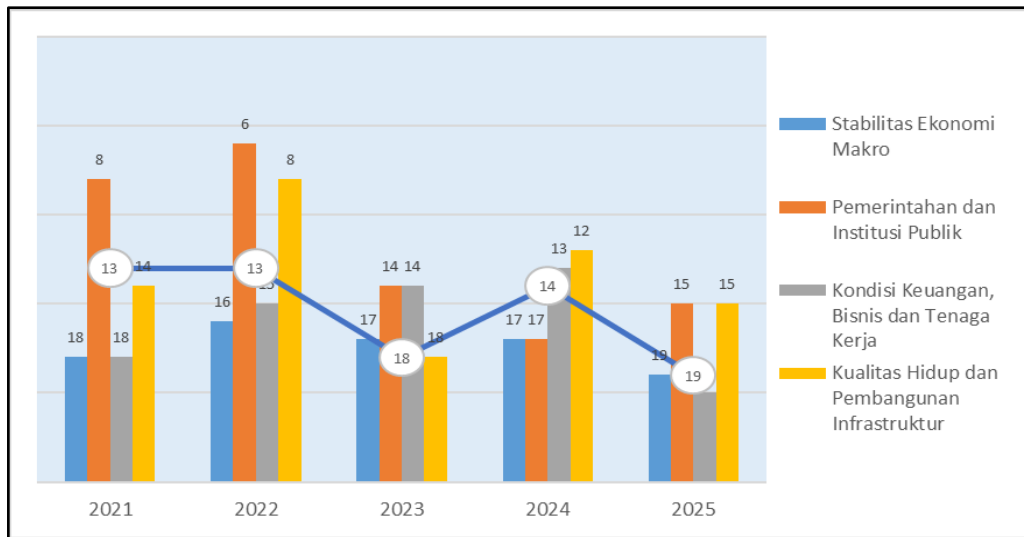
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.38. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,105 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 9. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Aceh Jaya akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 38. Simulasi What If Kabupaten Aceh Jaya

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		19 -0,610		9 0,105	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	19	12	Peringkat	15	15
Nilai Terstandar	-0,779	-0,359	Nilai Terstandar	-0,073	-0,073
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	20	11	Peringkat	15	5
Nilai Terstandar	-1,188	-0,046	Nilai Terstandar	-0,398	0,900

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 80. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2025 menurun menjadi peringkat 19. Pada tahun 2025, daya saing Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan penurunan di 3 (tiga) lingkup. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro cenderung stabil, namun nilai terstandar selalu berada di angka negatif sejak tahun 2021-2025. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pada pengendalian inflasi daerah dan diversifikasi ekonomi lokal.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami peningkatan tajam di tahun 2022, namun terjadi penurunan tajam pada tahun 2023-2024. Tahun 2025 mulai membaik kembali, efek dari reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, atau digitalisasi.

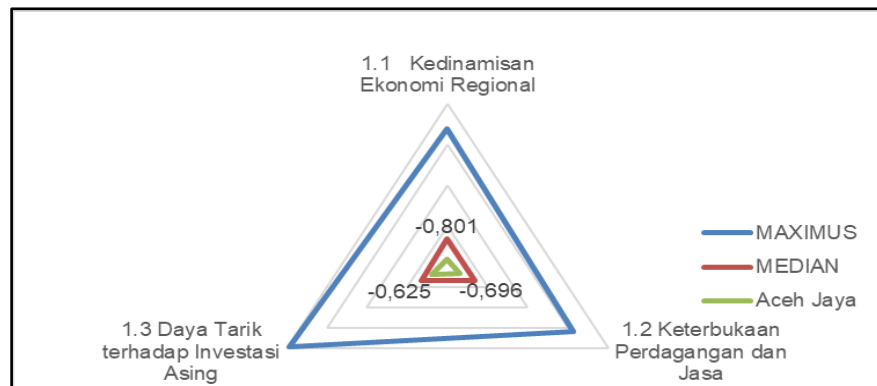
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja menunjukkan tren perbaikan pada tahun 2021-2023, namun pada tahun 2025 terjadi penurunan tajam. Hal ini menunjukkan lemahnya efisiensi bisnis, akses pembiayaan, dan ketenagakerjaan yang disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja produktif, atau turunnya kinerja UMKM. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur sangat fluktuatif. Pada Tahun 2022 menunjukkan peningkatan luar biasa, namun penurunan kembali di tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa keberlanjutan proyek infrastruktur dan layanan dasar belum stabil.

Berdasarkan Gambar 3.80. Indeks daya saing investasi Kabupaten Aceh Jaya mengalami fluktuasi. Setelah sempat membaik pada tahun 2022, beberapa aspek mengalami penurunan kembali sejak tahun 2023 hingga 2025. Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan di satu periode belum mampu dipertahankan secara konsisten di tahun-tahun berikutnya.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Jaya berada pada urutan ke 19 dengan nilai terstandar sebesar -0,779 atau meningkat 0,099 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.81. dapat dilihat seluruh sub lingkup di lingkup ini berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan ekonomi Aceh Jaya masih kurang berkembang, perputaran sektor ekonomi lokal relatif lambat, konektivitas perdagangan antar daerah dan jasa belum berkembang optimal, serta rendahnya minat investor asing masuk ke Aceh Jaya.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya PDRB, inflasi terkendali, perdagangan meningkat, investasi asing melonjak besar dan fiskal daerah sehat. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah nilai ekspor dan impor, pembentukan modal tetap bruto dan PDRB. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkat menjadi peringkat 12 dengan nilai terstandar -0,359.



Gambar 3. 81. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Jaya

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Jaya berada pada urutan ke 15 dengan nilai terstandar sebesar -0,073 atau menurun 0,419 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.82. dapat dilihat semua sub lingkup masih tertinggal. Hal ini menandakan bahwa kemampuan fiskal daerah (PAD, ketergantungan transfer pusat, manajemen APBD) masih rendah dan belum mampu menjadi instrumen penggerak pembangunan, selain itu kepemimpinan dan institusi mulai berfungsi namun belum sekuat daerah lain, lemahnya regulasi, kepastian hukum, serta iklim persaingan sehat masih menghambat daya tarik investasi dan kepastian usaha.

Penurunan ini dipengaruhi oleh keseimbangan menurun karena belanja naik lebih cepat dibanding pendapatan. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkat dengan menjadi peringkat 15 nilai terstandar - 0,073.

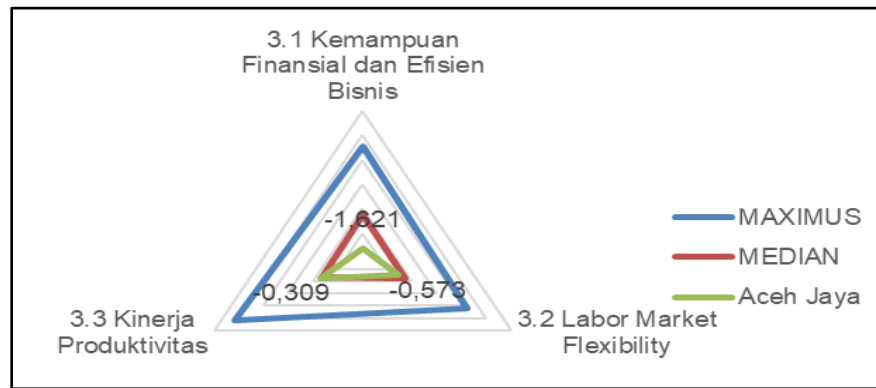


Gambar 3. 82. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Jaya

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Jaya berada pada urutan ke 20 dengan nilai terstandar sebesar -1,188 atau menurun -0,812 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.83. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kinerja Produktivitas memiliki nilai tertinggi dan berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas kerja relatif lebih baik dibanding aspek keuangan dan tenaga kerja.

Sedangkan 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menandakan adanya keterbatasan akses keuangan formal, rendahnya tabungan dan pinjaman produktif, serta tingginya biaya usaha. Selain itu, fleksibilitas pasar tenaga kerja masih rendah, bisa disebabkan ketidaksesuaian keterampilan, keterbatasan lapangan kerja formal, atau regulasi pasar kerja yang kurang mendukung. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah meningkatnya kredit bermasalah. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkat menjadi peringkat 11 dengan nilai terstandar -0,046.



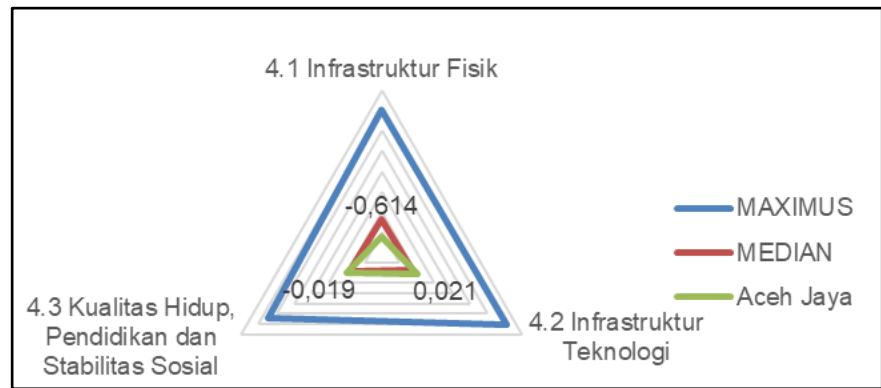
Gambar 3. 83. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Jaya

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Jaya berada pada urutan ke 15 dengan nilai terstandar sebesar -0,398 atau meningkat -0,404 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.84. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi menjadi Sub Lingkup yang berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan akses teknologi sudah relatif baik.

Sedangkan untuk 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di bawah rata-rata. Ini menandakan Keterbatasan jalan, transportasi publik, pelabuhan/bandara, air bersih, dan listrik masih jadi tantangan besar, serta indikator kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial relatif baik, meski masih ada kekurangan di sanitasi dan fasilitas kesehatan. Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh adanya tekanan kepemilikan rumah meski kebutuhan meningkat, akses internet di kantor naik, akses internet dengan telepon genggam stabil tinggi, penggunaan komputer naik, AHH meningkat, dan indikator pendidikan relatif sangat baik.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain jumlah penduduk, panjang jalan beraspal, dan kapasitas fasilitas kesehatan makin terbebani. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Aceh Jaya dapat meningkat sampai peringkat 5 dengan nilai terstandar 0,900.



Gambar 3. 84. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Aceh Jaya

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Aceh Jaya dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Aceh Jaya yang pada tahun 2024 berada pada posisi 19 akan meningkat menjadi peringkat 9 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,105.

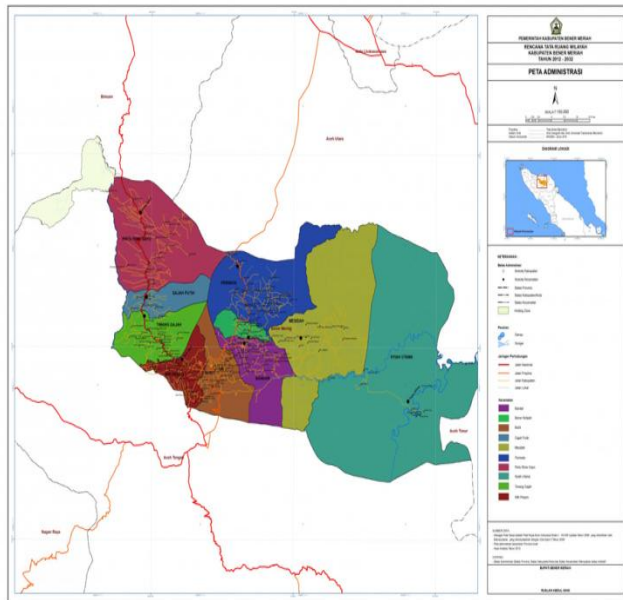
Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- Mendorong pengembangan sektor unggulan lokal (pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis alam);
- Meningkatkan akses UMKM pada pembiayaan (KUR, koperasi, kemitraan swasta);
- Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan digital marketing untuk memperluas pasar;
- Mempermudah perizinan usaha dengan digitalisasi layanan publik;
- Memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran melalui sistem informasi keuangan daerah yang terbuka;
- Meningkatkan kapasitas aparatur sipil melalui pelatihan regulasi investasi dan pelayanan publik;
- Memperluas akses kredit dan investasi daerah melalui kerja sama dengan BUMN/BUMD;
- Memperbaiki jalan penghubung antar-kecamatan dan akses ke sentra ekonomi;
- Meningkatkan layanan listrik dan air bersih, terutama di pedesaan;

- j. Mendorong digitalisasi layanan publik, pendidikan online, dan e-commerce lokal;
- k. Memperbaiki fasilitas kesehatan dasar dan tenaga medis;
- l. Menyediakan program peningkatan kualitas pendidikan (guru, sarana sekolah, beasiswa); dan
- m. Memperkuat program pemberdayaan sosial untuk menjaga stabilitas.

17. Kabupaten Bener Meriah

a. Gambaran Umum



Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.941,61 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2024 berjumlah 172.036 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 37,90 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Bener Meriah atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 6,52 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 502 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 6,02 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK Kabupaten Bener Meriah juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024 mencapai angka 4,22 triliun rupiah, dari tahun sebelumnya 4,09 triliun rupiah. Selama tahun 2024 Kabupaten Bener Meriah mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,27 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 53,80 persen. Kedua, lapangan usaha konstruksi sebesar 14,23 persen dan ketiga lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 7,56 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2024 adalah sebesar 8,95 miliar rupiah atau meningkat sebesar 4,54 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 4,41 miliar rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 0,14 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data

manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Bener Meriah adalah di sektor pertambangan dengan nilai investasi 6,17 miliar rupiah, diikuti oleh sektor listrik, gas dan air dengan nilai investasi 1,96 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2024 berjumlah 103.915 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 2.474 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 83,82 persen. Sedangkan, tingkat pengangguran di Kabupaten Bener Meriah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,45 persen menjadi 2,2 persen pada tahun 2024. Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten Bener Meriah adalah tersedianya Bandara Rembele.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.39. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Bener Meriah terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 39. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bener Meriah	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 9 Nilai Terstandar : 0,112	
Stabilitas Ekonomi Makro 16 Nilai Terstandar : -0,627	Pemerintahan dan Institusi Publik 3 Nilai Terstandar : 1,071
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 14 Nilai Terstandar : -0,341	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 7 Nilai Terstandar : 0,347

Berdasarkan tabel 3.39. di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2025 berada di peringkat 9 dengan nilai terstandar 0,112 atau tetap berada di peringkat yang sama dengan tahun 2024. Namun nilai terstandar keseluruhan mengalami penurunan 0,185 poin dari tahun 2024.

Terdapat 3 (tiga) lingkup yang mengalami penurunan nilai terstandar, Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro turun 0,324 poin. Penurunan ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi (5,22 persen menjadi 3,27 persen) dan tingginya inflasi (4,4 persen menjadi 9 persen). Penyebab

utamanya adalah ketergantungan ekonomi pada sektor primer dan lemahnya investasi baru.

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja juga mengalami penurunan, yang disebabkan oleh naiknya jumlah kredit bermasalah, dan produktivitas kerja yang belum meningkat signifikan. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur mengalami penurunan terbesar dibandingkan lingkup lainnya (0,618 poin). Hal ini dipengaruhi oleh lambatnya pembangunan infrastruktur sosial, terutama akses internet, dan meningkatnya tekanan inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami peningkatan tajam. Kabupaten Bener Meriah menunjukkan peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas pemerintahan. Hal ini menunjukkan pengelolaan fiskal dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, opini audit tetap WTP, serta tingkat penyelesaian kriminalitas meningkat.

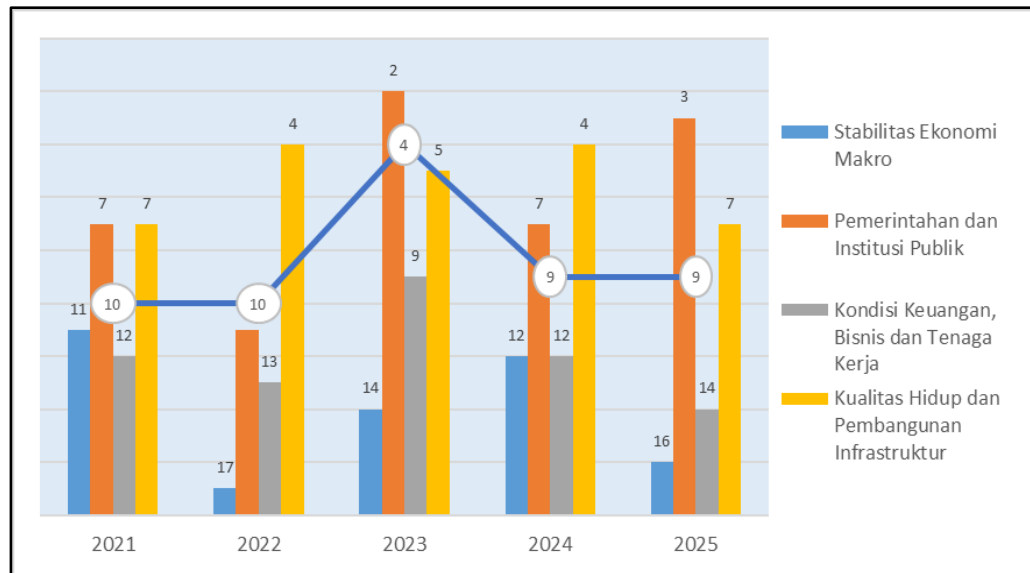
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.40. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,663 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 5. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Bener Meriah akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang

Tabel 3. 40. Simulasi What If Kabupaten Bener Meriah

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		9		5	
Nilai Terstandar		0,112		0,663	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	16	12	Peringkat	3	3
Nilai Terstandar	-0,627	-0,289	Nilai Terstandar	1,071	1,071
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	14	8	Peringkat	7	3
Nilai Terstandar	-0,341	0,413	Nilai Terstandar	0,347	1,458

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 85. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021-2025

Pada Gambar 3.85. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2025 tetap berada di peringkat 9. Secara umum, daya saing Kabupaten Bener Meriah menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dalam periode 2021–2025. Beberapa aspek mengalami kemajuan signifikan, sementara aspek lain menunjukkan penurunan yang perlu diantisipasi.

Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro cenderung menurun, nilai terstandar bergerak dari -0,342 (2021) ke -0,627 (2025). Tahun 2024 sempat membaik (-0,303), namun tahun 2025 kembali melemah. Hal ini menunjukkan tekanan ekonomi daerah masih terus berlanjut, dan membutuhkan kebijakan pengendalian inflasi serta diversifikasi ekonomi.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik menunjukkan perbaikan signifikan (0,424 menjadi 1,071). Peningkatan ini mencerminkan penguatan tata kelola pemerintahan, transparansi fiskal, serta peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan peningkatan opini audit dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja bergerak fluktuatif. Tahun 2023 mencapai nilai terstandar positif (0,239), namun dua tahun terakhir (2024-2025) kembali menurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pemulihan pada periode sebelumnya, daya dorong sektor keuangan dan tenaga kerja belum stabil.

Sedangkan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu pilar terkuat. Nilai terstandar tinggi pada tahun 2022-2024, namun mengalami penurunan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan lambatnya pembangunan infrastruktur dasar serta penurunan capaian sosial

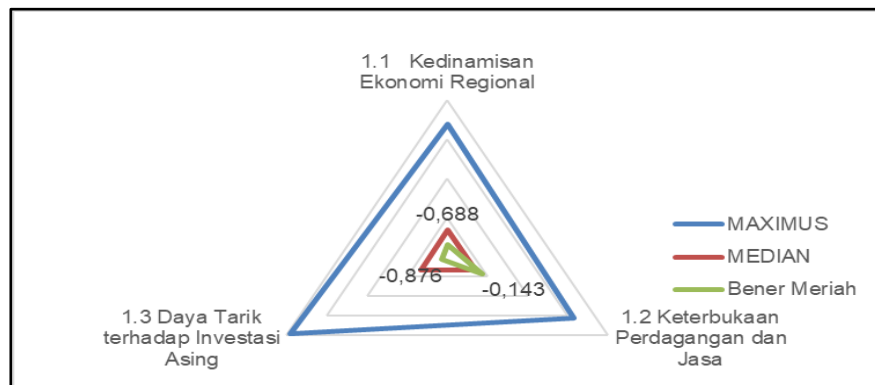
seperti akses internet dan layanan publik. Meski demikian, aspek ini tetap berada di atas rata-rata daerah lain.

1) **Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro**

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bener Meriah berada pada urutan ke 16 dengan nilai terstandar sebesar -0,627 atau meningkat -0,324 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.86. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional dan Sub Lingkup Daya Tarik Investasi Asing berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB masih tertinggal dan daya tarik investasi masih rendah.

Sedangkan untuk Sub Lingkup Keterbukaan Perdagangan dan Jasa berada di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan perdagangan relatif terbuka namun belum maksimal. Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh PDRB dan PDRB per Kapita meningkat, struktur ekonomi didominasi sektor tersier, keterbukaan perdagangan relatif stabil, dan meningkatnya ekspor.

Namun terdapat beberapa indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan ekonomi melambat, inflasi naik secara signifikan, daya tarik investasi menurun, baik PMA, maupun PMDN. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Bener Meriah dapat meningkat sampai peringkat 12 dengan nilai terstandar -0,289.



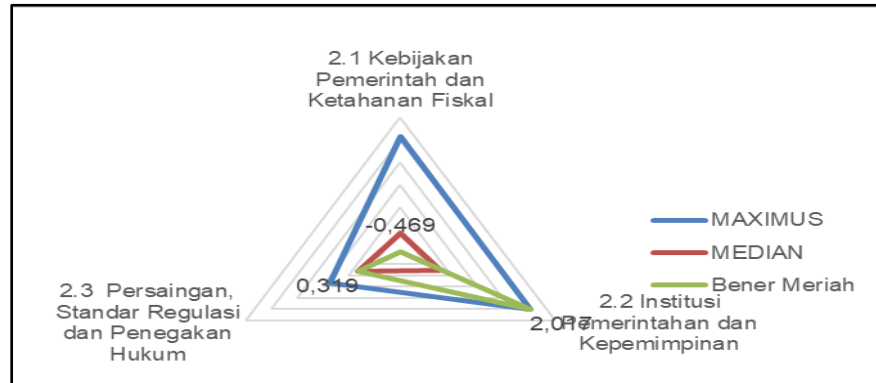
Gambar 3. 86. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Bener Meriah

2) **Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik**

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bener Meriah berada pada urutan ke 3 dengan nilai terstandar sebesar 1,071 atau menurun 0,436 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.87. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Institusi dan Kepemimpinan berada segaris dengan

nilai maksimum dan Sub Lingkup persaingan dan regulasi hukum juga berada di atas rata-rata. Ini menandakan tata kelola pemerintahan kuat (audit WTP, kepemimpinan baik) dan aspek regulasi dan hukum cukup baik.

Sedangkan untuk Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal jauh di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan bahwa kapasitas fiskal relatif rendah. Penurunan ini dipengaruhi oleh pendapatan daerah sedikit meningkat, keseimbangan fiskal menurun patut menjadi perhatian.

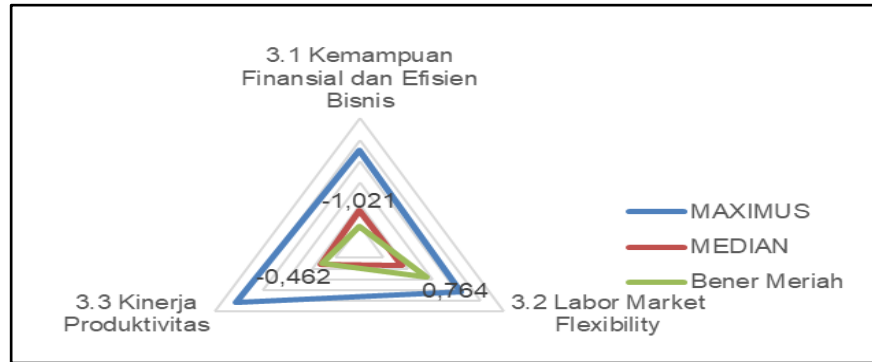


Gambar 3. 87. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Bener Meriah

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bener Meriah berada pada urutan ke 14 dengan nilai terstandar sebesar -0,341 atau menurun -0,233 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.88. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Efisiensi Finansial dan Bisnis serta Sub Lingkup Kinerja Produktivitas berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menandakan perbankan dan kredit belum optimal serta produktivitas kerja masih rendah.

Sedangkan Sub Lingkup Labor Market Flexibility berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja cukup fleksibel. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya total pinjaman bank dan kredit bermasalah. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah dapat meningkat sampai peringkat 8 dengan nilai terstandar 0,413.



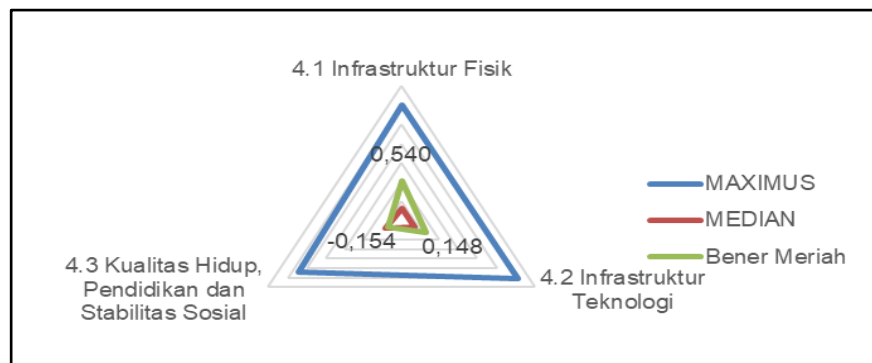
Gambar 3. 88. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Bener Meriah

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bener Meriah berada pada urutan ke 7 dengan nilai terstandar sebesar 0,347 atau meningkat -0,618 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.89, dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur Fisik dan Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur fisik relatif bagus serta akses internet sekolah dan rumah tangga cukup optimal.

Sedangkan Sub Lingkup Kualitas Hidup dan Stabilitas Sosial berada di bawah rata-rata kabupaten/kota walaupun terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun belum signifikan peningkatannya. Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas hidup, IPM dan harapan hidup naik, akses pendidikan tinggi, tapi akses internet di sekolah masih rendah.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain ketersediaan pelabuhan, masih rendahnya angka partisipasi sekolah (SD), dan kejadian bencana alam. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka lingkup ini dapat meningkat sampai peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,458.



Gambar 3. 89. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Bener Meriah

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

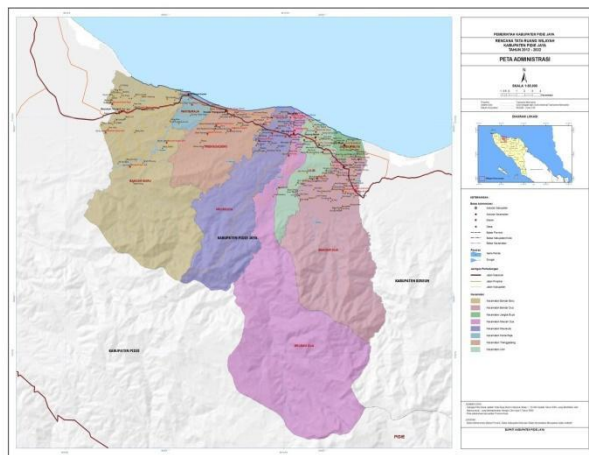
Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Bener Meriah dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Bener Meriah yang pada tahun 2024 berada pada posisi 9 akan meningkat menjadi peringkat 5 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,663.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- Mengendalikan inflasi dengan menjaga pasokan pangan lokal;
- Meningkatkan investasi melalui insentif dan perbaikan iklim usaha;
- Mendorong produktivitas sektor unggulan (kopi dan agroindustri);
- Memperluas infrastruktur digital agar mendukung pendidikan dan UMKM; dan
- Memperkuat fiskal daerah lewat pajak dan retribusi berbasis digital.

18. Kabupaten Pidie Jaya

a. Gambaran Umum



Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki luas wilayah 952,12 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 berjumlah 166.467 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 28,38 juta rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Pidie Jaya atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tercatat PDRB ADHB sebesar 4,35 triliun rupiah dan meningkat menjadi 4,72 triliun rupiah pada tahun 2024. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 mencapai 2,97 triliun rupiah atau meningkat sebesar 129,39 miliar rupiah dibanding tahun 2023 yang hanya mencapai 2,85 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Pidie Jaya mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,55 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 46,58 persen, selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,71 persen.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 adalah sebesar 39,46 miliar rupiah atau meningkat sebanyak 6,12 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 33,34 miliar rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 0,84 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kabupaten Pidie Jaya adalah di sektor jasa lainnya dengan nilai investasi 18,09 miliar rupiah, diikuti oleh sektor perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi 17,21 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2024 berjumlah 74.392 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 1.144 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 59,91 persen. Sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Pidie Jaya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,34 persen menjadi 3,82 persen pada tahun 2024.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.41. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kabupaten Pidie Jaya terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 41. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Jaya	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 20 Nilai Terstandar : -0,735	
Stabilitas Ekonomi Makro 22 Nilai Terstandar : -0,904	Pemerintahan dan Institusi Publik 6 Nilai Terstandar : 0,505
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 19 Nilai Terstandar : -0,854	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 23 Nilai Terstandar : -1,689

Berdasarkan tabel 3.41. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2025 berada di peringkat 20 dengan nilai terstandar -0,735 atau menurun 0,372 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 13 dengan nilai terstandar -0,363. Hal ini dipengaruhi oleh 2 (dua) lingkup yang mengalami penurunan nilai terstandar. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami penurunan efektivitas tata kelola pemerintahan, yang menunjukkan adanya penurunan kinerja pelayanan publik, lemahnya koordinasi atau efisiensi birokrasi yang belum optimal.

Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur mengalami penurunan drastis hingga 1,507 poin. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas layanan dasar, terhambatnya proyek infrastruktur atau perawatan fasilitas publik.

Sedangkan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro hanya mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi daerah relatif stabil, dengan sedikit perbaikan. Namun nilai terstandar masih negatif menandakan perekonomian belum sepenuhnya pulih. Lingkup Keuangan, Bisnis, dan Tenaga Kerja juga mengalami perbaikan kecil, dikarenakan meningkatnya aktifitas ekonomi lokal atau dukungan kebijakan terhadap UMKM. Namun nilai terstandar juga masih negatif, dimana iklim usaha belum sepenuhnya kompetitif.

Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.42. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,009 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 12. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kabupaten Pidie Jaya akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang

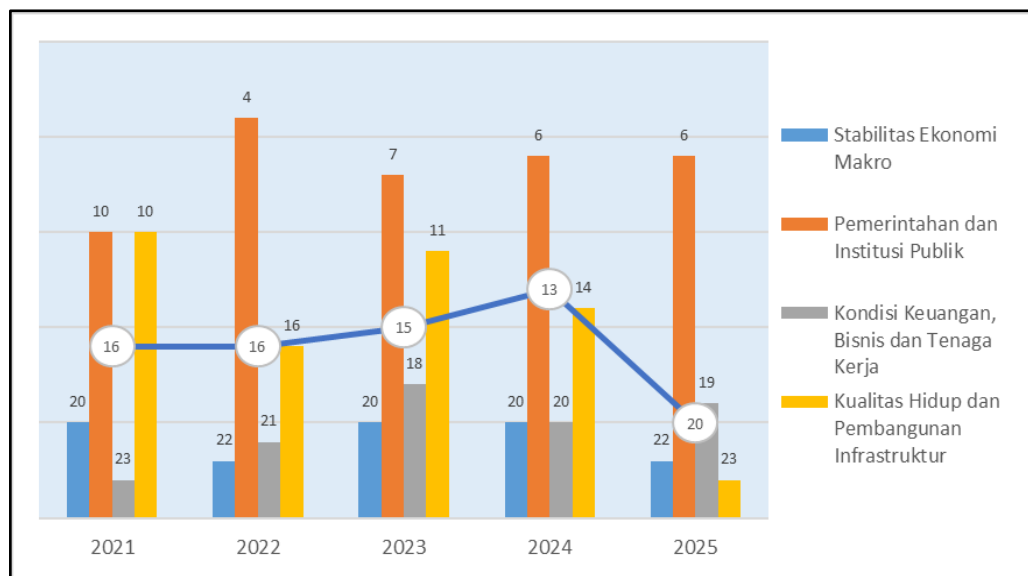
Tabel 3. 42. Simulasi What If Kabupaten Pidie Jaya

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		20 - 0,735		12 0,009	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	22	12	Peringkat	6	6
Nilai Terstandar	-0,904	-0,447	Nilai Terstandar	0,505	0,505

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	19	15	Peringkat	23	7
Nilai Terstandar	-0,854	-0,454	Nilai Terstandar	-1,689	0,361

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3.90. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021-2025

Pada Gambar 3.17 Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2025 berada di peringkat 20, mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro relatif stabil (-0,769 menjadi -0,904), namun pertumbuhan ekonomi dan kestabilan fiskal daerah belum optimal. Pada tahun 2025 mengalami sedikit perbaikan, yang menunjukkan adanya upaya pemulihan, seperti inflasi yang terkendali dan peningkatan aktivitas ekonomi dasar.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami fluktuasi, terjadi peningkatan signifikan di tahun 2022, namun selanjutnya menurun kembali. Pada tahun 2025 mengalami penurunan nilai terstandar, namun nilai tetap positif yang menandakan tata kelola publik relatif baik dibandingkan lingkup lainnya.

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja fluktuatif, namun di tahun 2025 sedikit membaik dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kecil dalam aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Sedangkan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

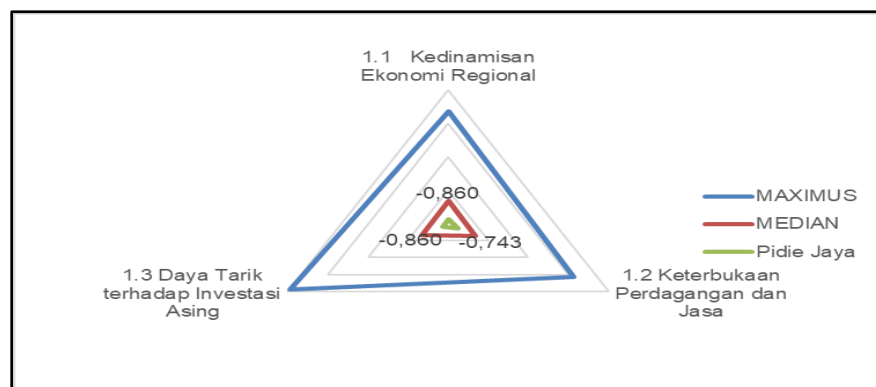
menunjukkan penurunan drastis di tahun 2025 diantara seluruh lingkup. Hal ini menjadi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan dasar.

Berdasarkan Gambar 3.90. Indeks daya saing investasi Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan tren stagnan hingga menurun dalam daya saing keseluruhan, terutama karena kemunduran signifikan pada Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang menjadi faktor utama penurunan indeks daya saing investasi.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Jaya berada pada urutan ke 22 dengan nilai terstandar sebesar -0,904 atau meningkat 0,020 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.91. dapat dilihat bahwa semua sub lingkup di lingkup ini berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan dinamika PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita masih rendah dibanding daerah lain, perdagangan dan jasa belum berkembang optimal, ekspor/impor relatif rendah, serta Pidie Jaya masih kurang menarik bagi investor asing.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, yaitu ekonomi menunjukkan pertumbuhan cukup sehat, daya tarik investasi meningkat, namun impor tinggi masih menjadi tantangan. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Pidie Jaya dapat meningkat drastis sampai peringkat 12 dengan nilai terstandar -0,447.



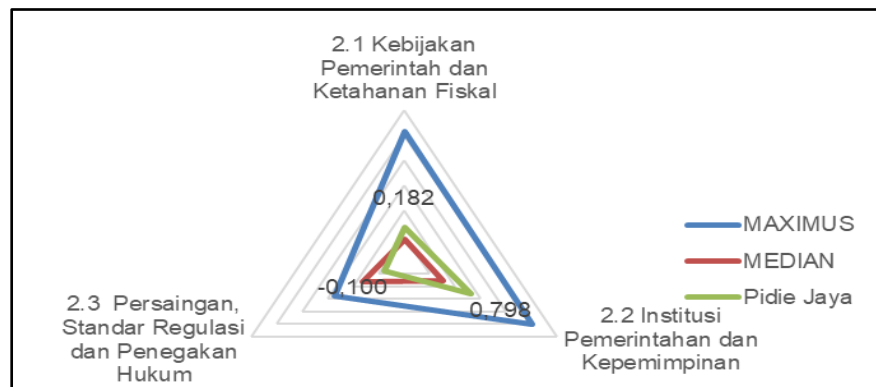
Gambar 3. 91. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kabupaten Pidie Jaya

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Jaya berada pada urutan ke 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,505 atau menurun -0,141 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.92. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup

Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal serta Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan Pengelolaan fiskal daerah cukup baik dan ata kelola pemerintahan relatif kuat.

Sedangkan untuk Sub Lingkup Persaingan, Regulasi dan penegakan hukum berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menandakan kelemahan pada penegakan hukum dan regulasi persaingan. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain Kapasitas fiskal daerah membaik, pendapatan pajak meningkat drastis. Tata kelola pemerintahan cenderung stabil dengan penegakan hukum cukup baik Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Pidie Jaya dapat meningkat drastis sampai peringkat 6 dengan nilai terstandar 0,505.

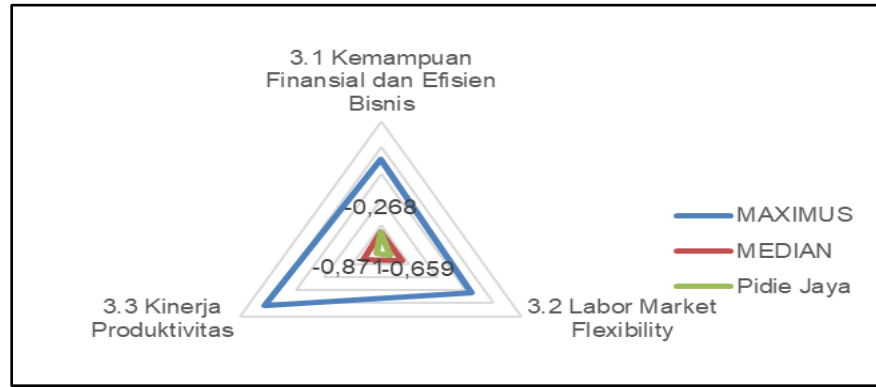


Gambar 3. 92. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kabupaten Pidie Jaya

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan Bisnis dan Tenaga Kerja, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Jaya berada pada urutan ke 19 dengan nilai terstandar sebesar -0,854 atau menurun 0,140 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.93. dapat dilihat bahwa seluruh sub lingkup di lingkup ini berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menandakan keterbatasan akses perbankan, tabungan, dan intermediasi keuangan, pasar tenaga kerja masih kurang fleksibel, partisipasi angkatan kerja rendah, produktivitas di semua sektor (primer, sekunder, tersier) masih rendah.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah Iklim usaha kondusif, tenaga kerja terserap lebih baik, namun kredit bermasalah dan produktivitas sektor primer perlu perhatian. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan Bisnis dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Jaya dapat meningkat sampai peringkat 15 dengan nilai terstandar -0,454.

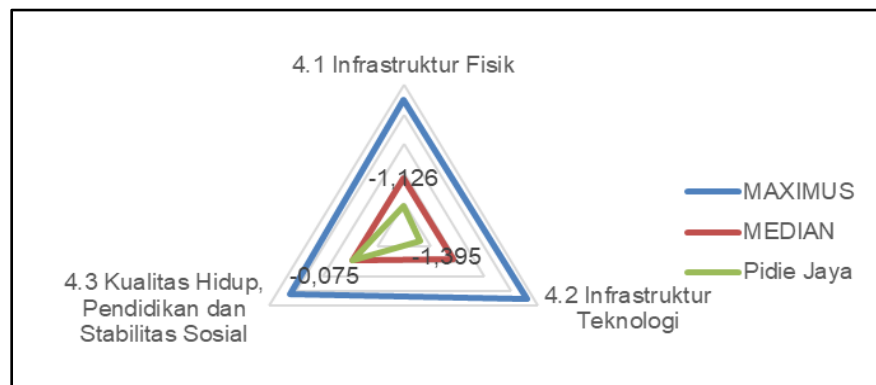


Gambar 3. 93. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kabupaten Pidie Jaya

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Jaya berada pada urutan ke 23 dengan nilai terstandar sebesar -1,689 atau menurun -1,507 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.94. dapat dilihat bawah dilingkup Kualitas hidup dan infrastruktur relatif rata-rata, namun infrastruktur fisik dan teknologi menjadi kelemahan paling besar.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan menunjukkan perbaikan, tantangan ada pada pertumbuhan kendaraan yang lebih cepat daripada jalan. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka lingkup ini dapat meningkat drastis sampai peringkat 7 dengan nilai terstandar 0,361.



Gambar 3. 94. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kabupaten Pidie Jaya

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan perbaikan, maka Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Pidie Jaya yang pada tahun 2024 berada pada

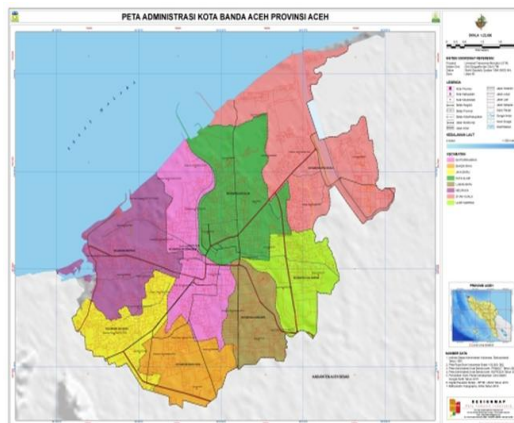
posisi 20 akan meningkat menjadi peringkat 12 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,009.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Mengembangkan sektor unggulan lokal (pertanian bernilai tambah, perikanan, UMKM berbasis digital);
- b. Mendorong ekspor dengan fasilitasi produk lokal ke pasar luar daerah/luar negeri dengan kemitraan BUMN/swasta;
- c. Melakukan promosi investasi dengan membuat investment profile Pidie Jaya, tawarkan insentif pajak/retribusi untuk investor sektor agroindustri;
- d. Memperkuat regulasi bisnis dengan menyederhanakan perizinan, buat layanan berbasis digital (OSS daerah);
- e. Mendorong pembukaan cabang/unit bank di kecamatan, literasi keuangan digital, KUR untuk UMKM;
- f. Meningkatkan SDM dengan pelatihan vokasi;
- g. Memperluas jaringan internet desa;
- h. Melakukan digitalisasi sekolah (akses TIK di semua SMA/SMK);
- i. Melaksanakan program pencegahan stunting dan gizi; dan
- j. Mendorong pendidikan menengah/kejuruan berbasis kebutuhan pasar kerja.

19. Kota Banda Aceh

a. Gambaran Umum



Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki luas wilayah 61,36 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2024 berjumlah 265.310 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 98,20 juta rupiah.

Nilai PDRB Kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 26,03 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,25 triliun rupiah dibandingkan dengan

tahun 2023. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh juga mengalami kenaikan, dari 17,08 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 18,12 triliun rupiah pada tahun 2024. Perekonomian Kota Banda Aceh tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 5,06 persen pada tahun 2023 menjadi 6,08 persen pada tahun 2024.

Kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Kota Banda Aceh, kontribusi lapangan usaha ini mencapai 22,06 persen. Selanjutnya diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai kontributor terbesar kedua sebesar 21,30 persen dan disusul oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 11,09 persen.

Jumlah realisasi investasi Kota Banda Aceh pada tahun 2024 adalah sebesar 936,20 miliar rupiah atau meningkat jauh sebanyak 353,99 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 3,60 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kota Banda Aceh adalah di sektor pertambangan dengan nilai investasi 344,85 miliar rupiah, selanjutnya sektor jasa lainnya dengan nilai investasi 329,49 miliar rupiah, dan diikuti oleh sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan nilai investasi 143,47 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kota Banda Aceh pada tahun 2024 berjumlah 126.258 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 2.531 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 65,07 persen. Sedangkan, tingkat pengangguran Kota Banda Aceh menunjukkan perbaikan dengan menurunnya tingkat pengangguran dari tahun 2023 sebesar 8,03 persen menjadi 7,55 persen pada tahun 2024. Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kota Banda Aceh adalah tersedianya Pelabuhan Penyberangan Ulee Lheue.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.43. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kota Banda Aceh terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 43. Peringkat Daya Saing Kota Banda Aceh Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten Banda Aceh	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 1 Nilai Terstandar : 1,535	
Stabilitas Ekonomi Makro 1 Nilai Terstandar : 1,684	Pemerintahan dan Institusi Publik 19 Nilai Terstandar : -0,589
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 1 Nilai Terstandar : 2,636	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 1 Nilai Terstandar : 2,407

Berdasarkan tabel 3.43. di atas, dapat dilihat bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kota Banda Aceh pada tahun 2025 berada di peringkat 1 dengan nilai terstandar 1,535 atau tetap berada di peringkat yang sama dengan tahun 2024. Namun nilai terstandar keseluruhan mengalami penurunan 0,318 poin dari tahun 2024. Walaupun terjadi sedikit penurunan nilai, Kota Banda Aceh tetap menjadi daerah paling kompetitif.

Terdapat 3 (tiga) lingkup yang mengalami penurunan nilai terstandar, Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik yang mengalami penurunan tajam sebesar 0,975 poin. Terjadi kemunduran signifikan dalam aspek tata kelola, transparansi atau efektivitas pelayanan publik, yang menandakan adanya tantangan birokrasi atau rendahnya partisipasi publik.

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja mengalami penurunan nilai terstandar sebesar 0,669 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun menjadi lingkup dengan nilai tertinggi dan posisi yang unggul, namun terjadi sedikit pelemahan yang disebabkan oleh penyesuaian investasi atau stagnasi lapangan kerja baru. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur relatif stabil walau mengalami sedikit penurunan (0,093 poin). Kota Banda Aceh tetap unggul dari sisi infrastruktur dan kualitas layanan publik. Penurunan kecil mencerminkan perlunya inovasi berkelanjutan dalam pemeliharaan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Sedangkan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro mengalami peningkatan signifikan, yang menunjukkan penguatan ekonomi yang stabil. Daya tahan ekonomi Kota Banda Aceh tetap kuat menghadapi fluktuasi makro, yang didorong oleh pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan aktivitas ekonomi perkotaan yang meningkat.

Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.44. jika beberapa lingkup dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 2,509 dan peringkat daya saing investasi tetap berada di peringkat 1. Hal ini

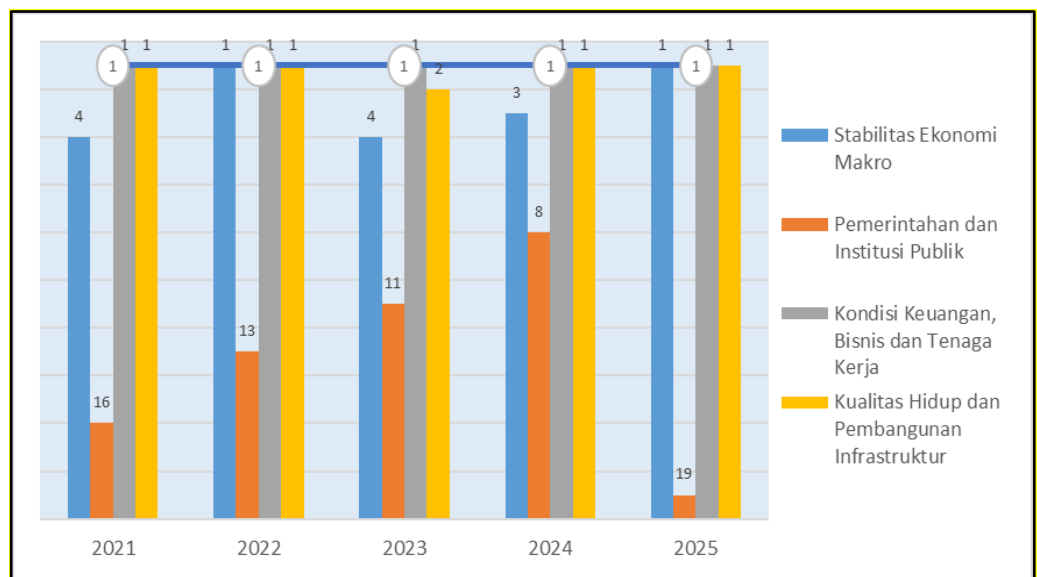
diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kota Banda Aceh akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang

Tabel 3. 44. Simulasi What If Kota Banda Aceh

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat Nilai Terstandar		1 1,535		1 2,509	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	1	2	Peringkat	19	1
Nilai Terstandar	1,684	1,884	Nilai Terstandar	-0,589	1,434
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	1	1	Peringkat	1	1
Nilai Terstandar	2,636	3,178	Nilai Terstandar	2,407	3,540

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 95. Peringkat Lingkup Indeks Daya Saing Investasi Kota Banda Aceh Tahun 2021-2025

Pada Gambar 3.95. Peringkat Indeks Daya Saing Investasi Kota Banda Aceh pada tahun 2025 berada di peringkat 1, bertahan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro terjadi fluktuasi, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 (1,843). Tahun 2023-2024 sempat menurun, namun kembali meningkat di tahun 2025 (1,684). Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi daerah cukup baik meskipun dipengaruhi kondisi eksternal seperti pemulihan pasca pandemi dan tekanan inflasi.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik menunjukkan perubahan yang tidak stabil. Ada peningkatan berkelanjutan dari tahun 2021 hingga 2024, kemudian turun tajam di tahun 2025 (-0,589). Ini menandakan turunnya kinerja tata kelola, koordinasi pemerintahan, atau kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah.

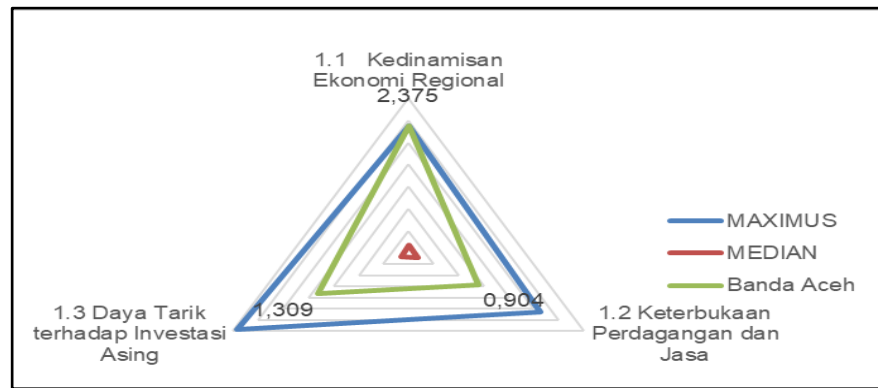
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja merupakan kekuatan utama Kota Banda Aceh, dengan nilai tertinggi dan posisi tertinggi sepanjang tahun 2021-2025. Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan nilai dikarenakan berkurangnya ekspansi sektor bisnis.

Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur sempat menurun dari tahun 2021-2023, namun membaik signifikan di tahun 2024 dan relatif stabil di tahun 2025. ini menunjukkan adanya peningkatan infrastruktur perkotaan dan layanan publik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kota Banda Aceh berada pada urutan ke 1 dengan nilai terstandar sebesar 1,684 atau menurun 0,645 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.96. dapat dilihat bahwa seluruh sub lingkup pada lingkup ini berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan Banda Aceh memiliki kinerja ekonomi regional terbaik. Namun untuk perdagangan dan jasa kurang berkembang dan masih ada gap besar dalam daya tarik investasi asing.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah ekonomi tumbuh stabil, PDRB per kapita naik, daya beli meningkat, tapi inflasi perlu dijaga agar tidak menggerus kesejahteraan. Selain itu struktur investasi bergeser ke domestik, ekspor membaik, tapi impor tetap dominan. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kota Banda Aceh dapat meningkat dengan nilai terstandar sebesar 1,884.

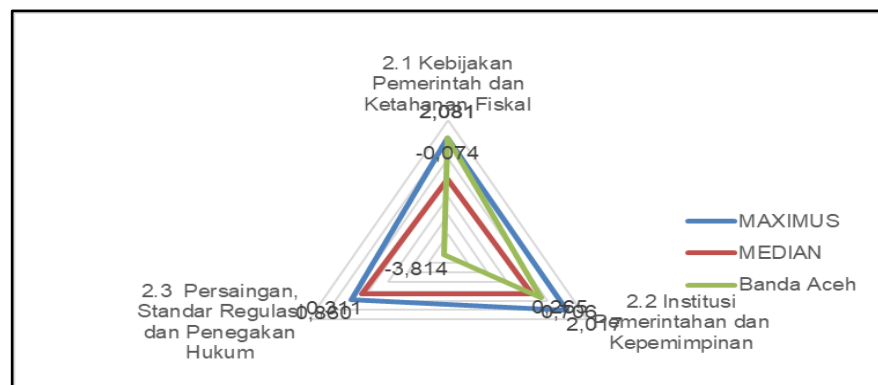


Gambar 3. 96. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kota Banda Aceh

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kota Banda Aceh berada pada urutan ke 19 dengan nilai terstandar sebesar -0,589 atau meningkat -0,975 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.97. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Persaingan, Regulasi dan Penegakan Hukum berada jauh dari rata-rata kabupaten/kota. Ini menandakan persaingan usaha dan penegakan hukum menjadi tantangan besar untuk Banda Aceh. Sedangkan 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di atas rata-rata kabupaten/kota, dalam tata kelola fiskal Kota Banda Aceh cukup kuat namun terkait kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan perlu adanya perbaikan.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah pendapatan dan belanja daerah seimbang, stabilitas fiskal terjaga. Namun, efektivitas penyelesaian kriminalitas menurun sehingga terdapat potensi masalah tata kelola hukum. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kota Banda Aceh dapat meningkat drastis sampai peringkat 1 dengan nilai terstandar 3,540.

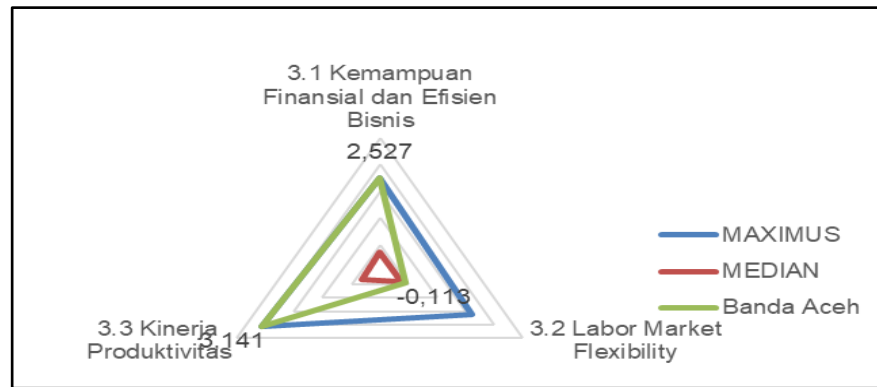


Gambar 3. 97. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kota Banda Aceh

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kota Banda Aceh berada pada urutan ke 1 dengan nilai terstandar sebesar 2,636 atau menurun -0,669 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.98. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Labor Market Felxibility berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan pasar tenaga kerja kurang fleksibel. Sedangkan 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di atas rata-rata kabupaten/kota ditunjukkan dengan produktivitas tinggi dan sektor finansial yang efisien.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain stabilitas keuangan meningkat, pengangguran menurun sedikit, meski pertumbuhan angkatan kerja terbatas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dapat meningkat dengan nilai terstandar sebesar 3,178.

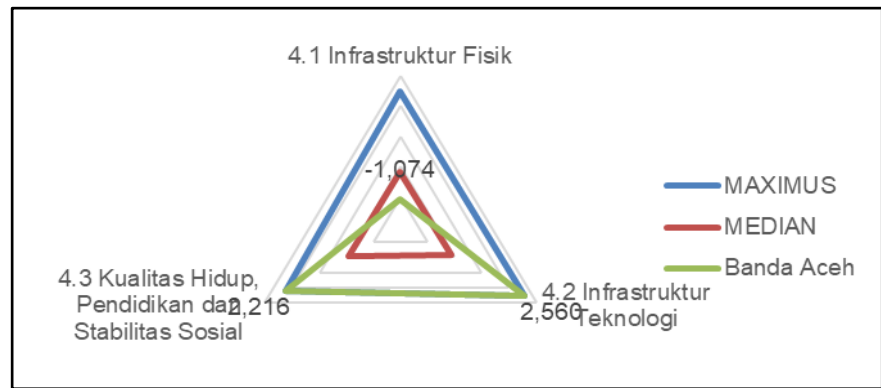


Gambar 3. 98. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kota Banda Aceh

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kota Banda Aceh berada pada urutan ke 1 dengan nilai terstandar sebesar 2,407 atau meningkat -0,093 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 3.99. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur fisik menjadi kelemahan bagi Banda Aceh. Sedangkan untuk Sub Lingkup lainnya unggul karena berada dinilai maksimum.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan mengalami perbaikan signifikan dan infrastruktur digital makin merata. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain infrastruktur fisik stagnan (jalan dan pelabuhan tidak bertambah), Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kota Banda Aceh dapat meningkat dengan nilai terstandar sebesar 3,540.



Gambar 3. 99. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kota Banda Aceh

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kota Banda Aceh dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kota Banda Aceh pada tahun berikutnya tetap berada pada posisi 1 dengan peningkatan nilai terstandar menjadi 2,509.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Melakukan reformasi hukum dan regulasi untuk mengurangi hambatan usaha dan meningkatkan kepercayaan investor;
- b. Melakukan penguatan perdagangan dan investasi menjadi memperbesar ekspor, promosi investasi asing, perkuat UMKM;
- c. Mempercepat infrastruktur fisik menjadi jalan, pelabuhan, energi untuk mendukung distribusi dan industri;
- d. Melakukan transformasi tenaga kerja menjadi vokasi, fleksibilitas kerja, link dan match industri; dan
- e. Mempertahankan keunggulan menjadi teknologi digital dan kualitas SDM yang sudah unggul diperluas skalanya.

20. Kota Sabang

a. Gambaran Umum



Kota Sabang merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki luas wilayah 122,14 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2024 berjumlah 43.470 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 42,81 juta rupiah.

Nilai PDRB Kota Sabang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 1,86 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami

kenaikan sebesar 115 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 1,75 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK Kota Sabang tahun 2024 juga meningkat mencapai 1,27 triliun rupiah dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,22 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kota Sabang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,16 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Sabang pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi, yaitu mencapai 29,05 persen. Selanjutnya, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 16,89 persen, disusul oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 14,56 persen. Jumlah realisasi investasi Kota Sabang pada tahun 2024 adalah sebesar 8,04 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 3,70 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 11,74 miliar rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 0,43 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kota Sabang adalah di sektor perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi 6,57 miliar rupiah, diikuti oleh sektor hotel dan restoran dengan nilai investasi 1,17 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kota Sabang pada tahun 2024 berjumlah 21.593 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 608 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 68,03 persen. Sedangkan, tingkat pengangguran Kota Sabang mengalami penurunan dari 3,92 persen pada tahun sebelumnya menjadi 2,95 persen di tahun 2024.

Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kota Sabang adalah tersedianya Pelabuhan Penyeberangan Balohan dan Bandara Maimun Saleh, serta infrastruktur jalan beraspal yang tidak mengalami perubahan/penurunan dari tahun yang lalu.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di

daerah. Pada tabel 3.45. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kota Sabang terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 45. Peringkat Daya Saing Kota Sabang Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kota Sabang	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 1 Nilai Terstandar : 1,535	
Stabilitas Ekonomi Makro 12 Nilai Terstandar : -0,172	Pemerintahan dan Institusi Publik 16 Nilai Terstandar : -0,245
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 18 Nilai Terstandar : -0,616	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 4 Nilai Terstandar : 1,059

Berdasarkan tabel 3.45. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kota Sabang pada tahun 2025 berada di peringkat 12 dengan nilai terstandar -0,172 atau meningkat 0,310 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 17 dengan nilai terstandar -0,483. Peningkatan ini dipengaruhi oleh Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami peningkatan nilai terstandar sebesar 0,444 poin, menandakan adanya perbaikan tata kelola dan pelayanan publik. Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur mengalami peningkatan yang sangat tajam hingga naik 0,984 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemajuan besar dalam infrastruktur dan pelayanan publik, yang didukung dengan peningkatan konektivitas, fasilitas umum, dan kebersihan kota.

Sedangkan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro mengalami penurunan sebesar 0,125 poin, karena dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap sektor pariwisata dan biaya logistik tinggi. Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja mengalami sedikit penurunan hanya sebesar 0,061 poin. Lingkup ini cenderung stabil, namun aktivitas ekonomi belum tumbuh optimal. Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.46.

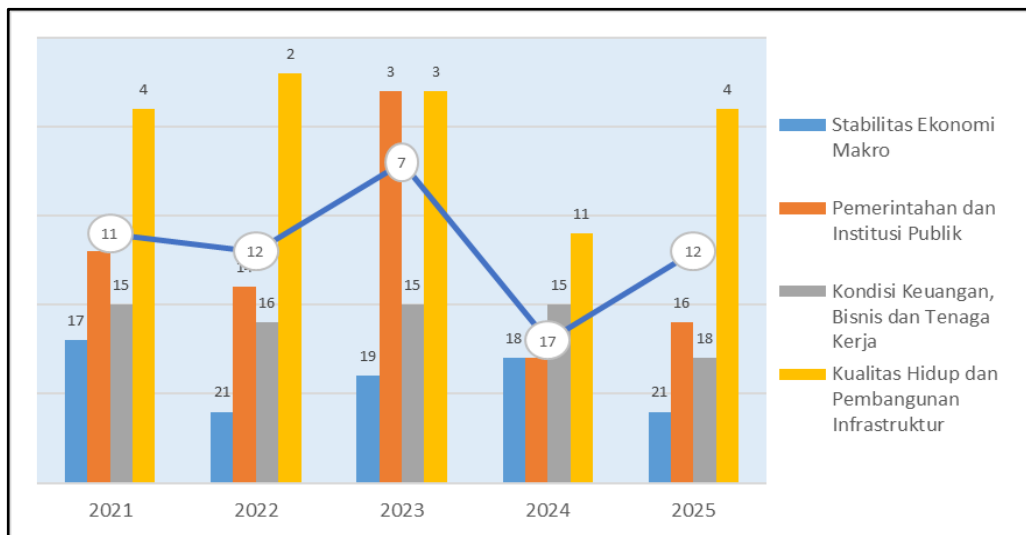
jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,521 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 6. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kota Sabang akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 46. Simulasi What If Kota Sabang

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		12		6	
Nilai Terstandar		-0,172		0,521	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	21	12	Peringkat	16	13
Nilai Terstandar	-0,887	-0,291	Nilai Terstandar	-0,245	0,088
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	18	10	Peringkat	4	2
Nilai Terstandar	-0,616	0,249	Nilai Terstandar	1,059	2,036

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 100. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kota Sabang Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks daya saing investasi Kota Sabang pada tahun 2025 meningkat menjadi peringkat 12. Pada Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro nilai terstandar selalu negatif sepanjang periode tahun 2021-2025 (-0,649 menjadi -0,887), menunjukkan kondisi makroekonomi Kota Sabang belum stabil, dengan tekanan dari aspek inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah yang fluktuatif serta keterbatasan investasi produktif.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik mengalami fluktuatif, sempat naik signifikan di tahun 2023 (1,363) lalu menurun tajam pada tahun 2024 (-0,688) dan sedikit membaik pada tahun 2025 dengan nilai terstandar -0,245. Setelah capaian tinggi di tahun 2023, penurunan ini disebabkan perubahan kebijakan atau lemahnya tata kelola pasca pandemi. Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja dari tahun 2021-2025 memiliki nilai terstandar negatif dan relatif stabil (-0,492

menjadi -0,616) tanpa ada tanda perbaikan signifikan. Struktur ekonomi masih lemah, aktifitas bisnis dan ketenagakerjaan belum tumbuh optimal.

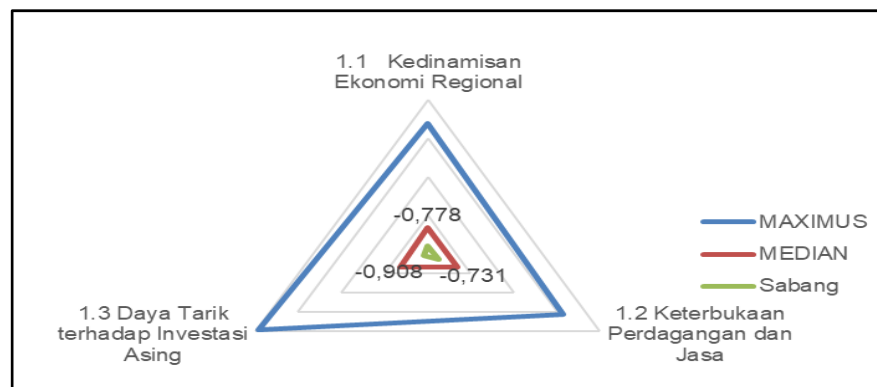
Sedangkan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur menunjukkan tren sangat positif dibandingkan dengan lingkup lainnya, meskipun sempat menurun di tahun 2024 (0,075), namun kembali melonjak di tahun 2025 (1,059). Kota Sabang unggul dalam pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup (air bersih, kesehatan, pendidikan, transportasi).

Berdasarkan Gambar 3.100. Indeks daya saing investasi Kota Sabang unggul dalam Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang menopang indeks daya saing keseluruhan. Sedangkan Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga kerja, serta Stabilitas Ekonomi Makro belum mengalami perbaikan.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kota Sabang berada pada urutan ke 21 dengan nilai terstandar sebesar -0,887 atau meningkat -0,125 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.101. dapat dilihat bahwa pada lingkup, seluruh sub lingkup berada jauh di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan bahwa dinamika ekonomi masih lemah, pertumbuhan belum optimal, Perdagangan dan jasa masih kurang berkembang, serta investasi masih sangat minim.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh pada tahun 2025 menunjukkan pemulihan ekonomi lebih baik dibanding 2024, dengan pertumbuhan lebih cepat, PDRB per kapita naik, dan inflasi masih terkendali. Namun terdapat indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain PDRB, PDRB non mineral, ekspor dan impor non migas, serta pembentukan modal tetap bruto. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kota Sabang dapat meningkat drastis sampai peringkat 12 dengan nilai terstandar -0,291.



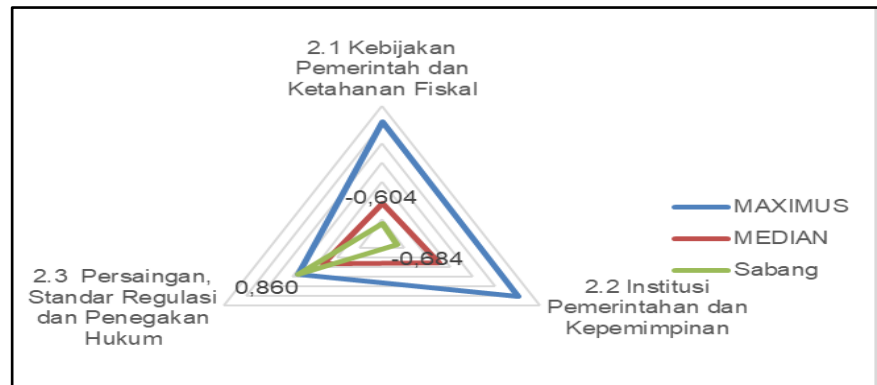
Gambar 3. 101. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kota Sabang

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kota Sabang berada pada urutan ke 16 dengan nilai terstandar sebesar -0,245 atau meningkat 0,444 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.102. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Persaingan, regulasi dan penegakan hukum

berada digaris maksimum kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan penegakan hukum cukup mendukung.

Sedangkan 2 (dua) sub lingkup lainnya berada jauh di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah masih lemah serta kepemimpinan dan tata kelola relatif baik. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan kinerja tata kelola publik dan penyelesaian kriminalitas yang lebih efektif. Namun terdapat sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah pengeluaran pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kota Sabang dapat meningkat sampai peringkat 13 dengan nilai terstandar 0,088.

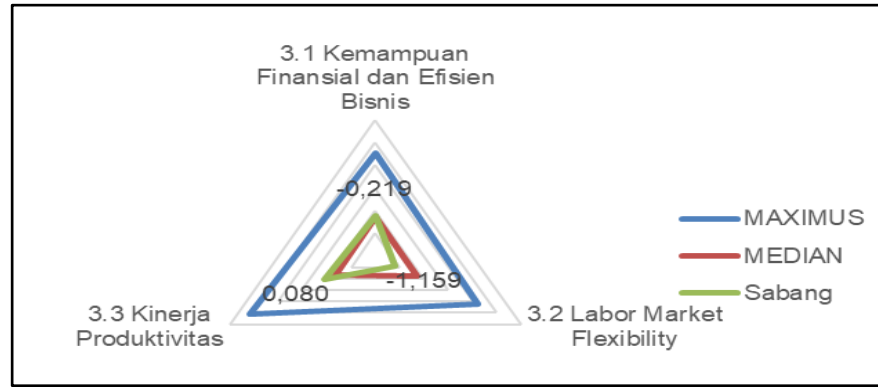


Gambar 3. 102. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kota Sabang

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kota Sabang berada pada urutan ke 18 dengan nilai terstandar sebesar -0,616 atau meningkat -0,061 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.103. dapat dilihat bahwa Sub lingkup pada lingkup ini berada hampir digaris rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa Pasar tenaga kerja fleksibel (positif), tapi masalah ada di produktivitas yang masih lemah.

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh perbaikan signifikan di pasar tenaga kerja (pengangguran turun), pembiayaan perbankan lebih kuat, dan produktivitas meningkat. Namun terdapat indikator yang patut menjadi perhatian, antara lain meningkatnya pinjaman bank, jumlah penduduk yang bekerja dan angkatan kerja. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kota Sabang dapat meningkat drastis sampai peringkat 10 dengan nilai terstandar 0,249.

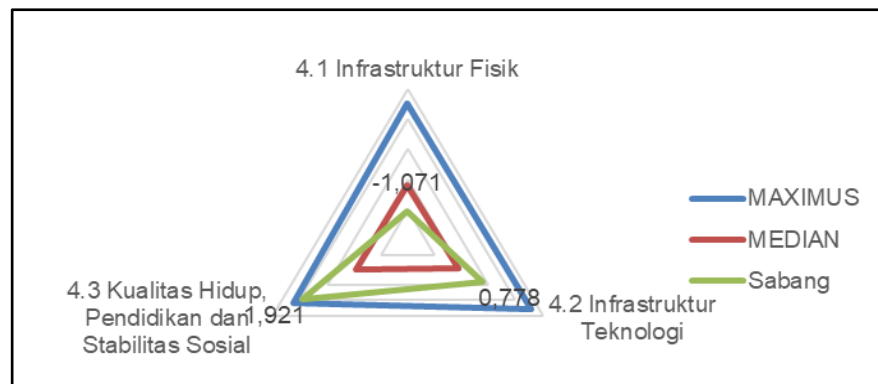


Gambar 3. 103. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kota Sabang

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kota Sabang berada pada urutan ke 4 dengan nilai terstandar sebesar 1,059 atau menurun 0,984 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.104. dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) Sub Lingkup yang berada di atas rata-rata kabupaten/kota, yaitu Sub Lingkup Teknologi dan Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan, dan Stabilitas Sosial. Hal ini menandakan bahwa Infrastruktur digital relatif baik serta indikator sosial dan pendidikan sangat kuat.

Sedangkan Sub Lingkup Infrastruktur Fisik berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan infrastruktur jalan, pelabuhan, transportasi masih kurang. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain masih kurangnya infrastruktur fisik (jalan beraspal dan kepemilikan rumah) dan akses internet dengan telepon genggam. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kota Sabang dapat meningkat sampai peringkat 2 dengan nilai terstandar 2,036.



Gambar 3. 104. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kota Sabang

c. Perbaiki Daya Saing Investasi

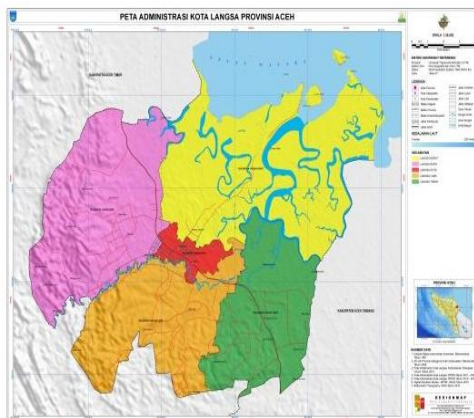
Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kota Sabang dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kota Sabang yang pada tahun 2024 berada pada posisi 12 akan meningkat menjadi peringkat 6 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,521.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Mendorong pariwisata berbasis internasional (eco-tourism, cruise, diving spot) untuk menarik investasi asing langsung.
- b. Membentuk kemitraan perdagangan maritim dengan Banda Aceh dan regional Asia Tenggara.
- c. Memberikan insentif fiskal (tax holiday, keringanan retribusi) bagi investor asing yang membuka usaha di sektor jasa dan pariwisata.
- d. Melakukan diversifikasi sumber PAD (Pajak Hotel, Restoran, dan Retribusi Wisata).
- e. Mengoptimalkan BUMD di sektor pariwisata dan transportasi laut.
- f. Memperluas kerja sama dengan pusat agar Sabang dapat akses dana khusus (Dana Otsus, Dana Pariwisata, Dana Infrastruktur).
- g. Melakukan program pelatihan vokasi pariwisata, hospitality, dan ekonomi kreatif.
- h. Mempercepat pembangunan pelabuhan modern dan bandara sebagai pintu masuk wisatawan.
- i. Membangun jalan lingkar Sabang agar akses antar destinasi wisata lebih lancar.

21. Kota Langsa

a. Gambaran Umum



Kota Langsa merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki luas wilayah 239,83 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kota Langsa pada tahun 2024 berjumlah 197.909 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 37,01 juta rupiah.

Nilai PDRB Kota Langsa atas dasar harga berlaku (ADHB) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 meningkat hingga mencapai 7,32 triliun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,85 triliun rupiah. Secara umum, nilai PDRB Kota Langsa atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 mencapai 4,52 triliun rupiah, dari tahun sebelumnya

yang mencapai 4,33 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kota Langsa mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,43 persen.

Kategori yang memegang peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kota Langsa pada tahun 2024 adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yakni sebesar 30,38 persen dari total PDRB Kota Langsa. Selanjutnya adalah kategori konstruksi yang berperan sebesar 9,14 persen. Kategori dengan peranan terbesar ketiga adalah kategori industri pengolahan sebesar 9,01 persen pada tahun 2024.

Jumlah realisasi investasi Kota Langsa pada tahun 2024 adalah sebesar 243,49 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 115,69 miliar rupiah tahun sebelumnya. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 3,32 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kota Langsa adalah di sektor perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi 140,25 miliar rupiah, diikuti oleh sektor konstruksi dengan nilai investasi 46,99 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kota Langsa pada tahun 2024 berjumlah 90.162 orang atau meningkat sebanyak 1.749 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 60,02 persen. Sedangkan, tingkat pengangguran Kota Langsa mengalami penurunan dari 7,73 persen dari tahun sebelumnya menjadi 7,34 persen pada tahun 2024. Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kota Langsa adalah tersedianya Pelabuhan Penyeberangan Kuala Langsa dan infrastruktur jalan beraspal yang mengalami peningkatan dari tahun yang lalu.

Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.47. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kota Langsa terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 47. Peringkat Daya Saing Kota Langsa Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kota Langsa	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 15 Nilai Terstandar : -0,378	
Stabilitas Ekonomi Makro 13 Nilai Terstandar : -0,551	Pemerintahan dan Institusi Publik 21 Nilai Terstandar : -0,972
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 12 Nilai Terstandar : -0,237	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 8 Nilai Terstandar : 0,248

Berdasarkan tabel 3.47. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kota Langsa pada tahun 2025 berada di peringkat 15 dengan nilai terstandar -0,378 atau meningkat 0,043 poin dibandingkan tahun 2024 yang

masih sama berada di peringkat 15 dengan nilai terstandar -0,421. Meskipun nilai terstandar sedikit meningkat, namun posisi peringkat yang tetap menunjukkan belum adanya perubahan daya saing relatif terhadap daerah lain. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik meningkat 0,047 poin dari tahun sebelumnya. Ada peningkatan kecil yang menunjukkan perbaikan efektivitas tata kelola publik, tetapi masih berada di zona negatif.

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis, dan Tenaga Kerja mengalami peningkatan signifikan, meningkat 0,527 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terjadi pemulihan ekonomi yang kuat. Sedangkan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro dan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur mengalami penurunan nilai terstandar. Stabilitas ekonomi menurun di tahun 2025 disebabkan adanya tekanan ekonomi seperti inflasi dan berkurangnya investasi. Kualitas hidup yang menurun disebabkan keterlambatan pembangunan infrastruktur dan penurunan layanan publik.

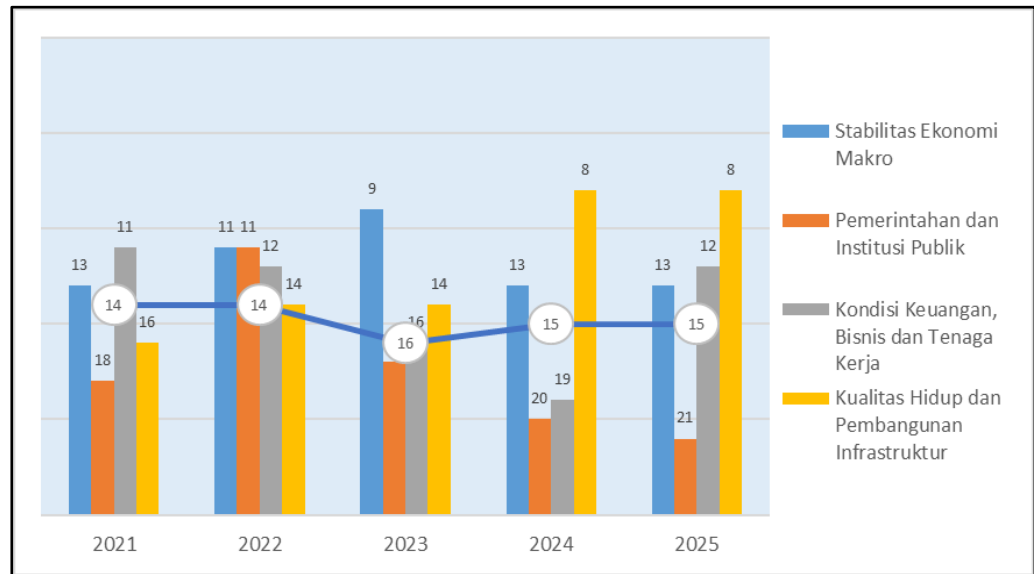
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.48. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,505 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 6. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kota Langsa akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 48. Simulasi What If Kota Langsa

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		15		6	
Nilai Terstandar		-0,378		0,505	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	13	12	Peringkat	21	12
Nilai Terstandar	-0,551	-0,245	Nilai Terstandar	-0,972	-0,116
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	12	11	Peringkat	8	2
Nilai Terstandar	-0,237	0,163	Nilai Terstandar	0,248	1,986

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 105. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kota Langsa Tahun 2021-2025

Peringkat Indeks daya saing investasi Kota Langsa pada tahun 2025 tetap berada di peringkat 15. Kinerja daya saing Kota Langsa cenderung fluktuatif, belum menunjukkan tren peningkatan. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro mengalami perbaikan pada tahun 2023 (masuk ke nilai positif 0,049), namun kembali menurun di tahun 2024-2025. Hal ini menandakan bahwa perbaikan ekonomi sebelumnya belum berkelanjutan.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik terjadi penurunan tajam sejak tahun 2023 hingga 2025, terutama pada tahun 2024 (-1,019). Mengindikasikan lemahnya tata kelola pemerintahan, efektivitas birokrasi serta transparansi publik. Sedangkan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja sempat turun tajam pada tahun 2023-2024, namun mulai mengalami pemulihan di tahun 2025 (-0,777 menjadi -0,237). Hal ini menandakan adanya upaya pemulihan aktivitas ekonomi dan perbaikan pasar tenaga kerja.

Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur mengalami lonjakan positif pada tahun 2024 (0,480), namun nilai terstandar sedikit menurun kembali pada tahun 2025 (0,248). Hal ini menunjukkan ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dasar, tetapi perlu keberlanjutan agar dampaknya merata.

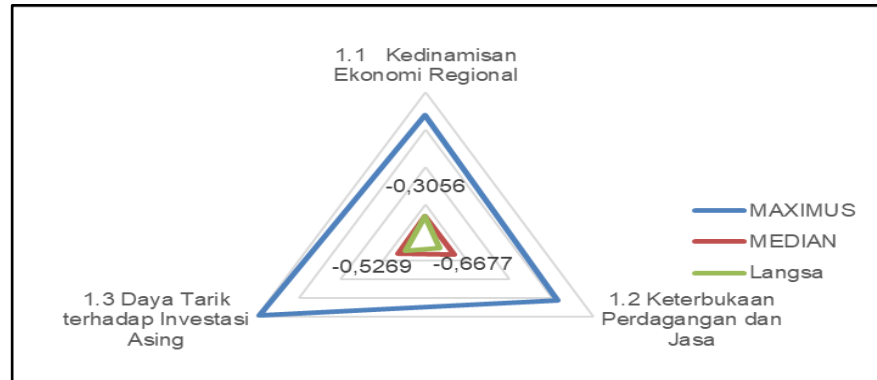
Berdasarkan Gambar 3.105. peringkat indeks daya saing investasi Kota Langsa berada pada posisi stabil, namun secara nilai terstandar mengalami fluktuatif, belum menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik serta Stabilitas Ekonomi Makro terus menurun dan cenderung melemah pada tahun 2025.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kota Langsa berada pada urutan ke 13 dengan nilai terstandar sebesar -0,551 atau menurun -0,168 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.106. dapat

dilihat bahwa semua sub lingkup pada lingkup berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan Kota Langsa memiliki pertumbuhan ekonomi yang stagnan, kelemahan perdagangan dan jasa, dan kurang kompetitif menarik investor, sehingga perlu perbaikan di sektor perdagangan dan iklim investasi.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain pertumbuhan PDRB melambat, meningkatnya angka inflasi, investasi (asing dan domestik) menurun drastis. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kota Langsa dapat meningkat dengan nilai terstandar menjadi -0,245 peringkat 12.



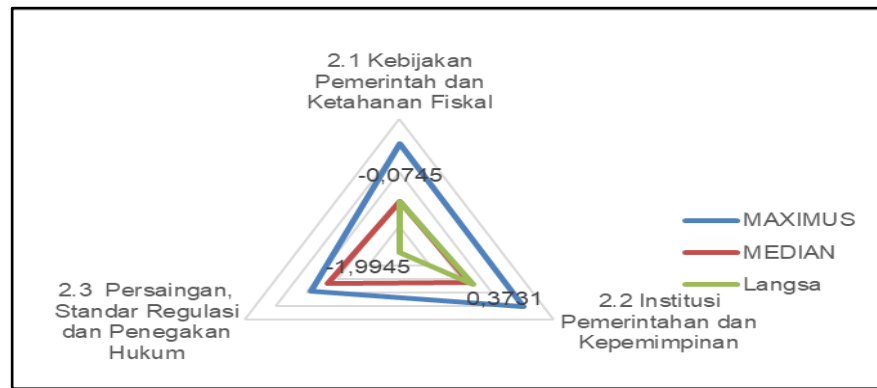
Gambar 3. 106. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kota Langsa

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kota Langsa berada pada urutan ke 21 dengan nilai terstandar sebesar -0,972 atau menurun 0,047 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 3.107. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal mendekati rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan kondisi fiksai relatif stabil. Pada Sub Lingkup Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan berada sedikit di atas rata-rata kabupaten/kota, ini menjadi kelebihan Kota Langsa di tata kelola pemerintahan.

Sedangkan Sub Lingkup Persaingan, Regulasi, dan Penegakan Hukum menjadi Sub Lingkup yang paling rendah pada lingkup ini, ini menandakan perlu adanya perbaikan regulasi, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi untuk mendukung investasi.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait penurunan pada lingkup ini, yaitu kondisi fiskal daerah membaik, namun kontribusi pajak masih minim sehingga perlu intensifikasi pajak dan inovasi PAD. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kota Langsa dapat meningkat drastis sampai peringkat 12 dengan nilai terstandar 0,116.

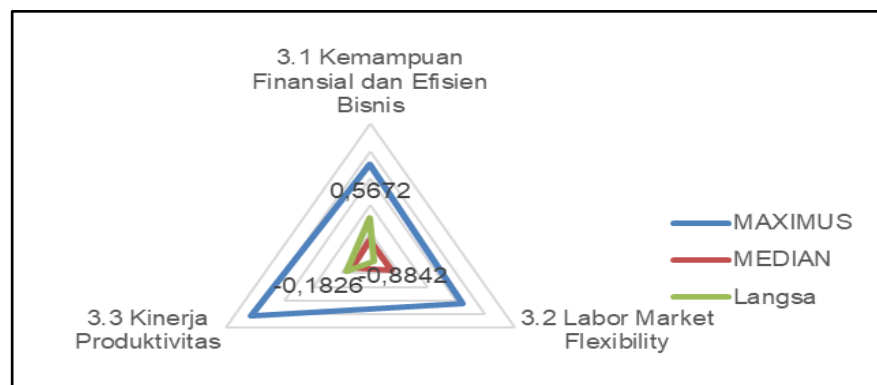


Gambar 3. 107. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kota Langsa

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kota Langsa berada pada urutan ke 12 dengan nilai terstandar sebesar -0,237 atau meningkat 0,527 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.108. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kemampuan Finansial dan efisiensi bisnis berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan kondisi perbankan dan bisnis relatif sehat dan cukup baik. Sedangkan Sub Lingkup Labor Market Flexibility berada di bawah rata-rata kabupaten/kota, ini menunjukkan pasar kerja belum fleksibel.

Pada Sub Lingkup Kinerja Produktivitas berada sedikit di bawah rata-rata kabupaten/kota, menandakan produktivitas relatif stagnan. Peningkatan lingkup dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan tenaga kerja membaik, pengangguran mulai menurun. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kota Langsa dapat meningkat sampai peringkat 11 dengan nilai terstandar 0,163.



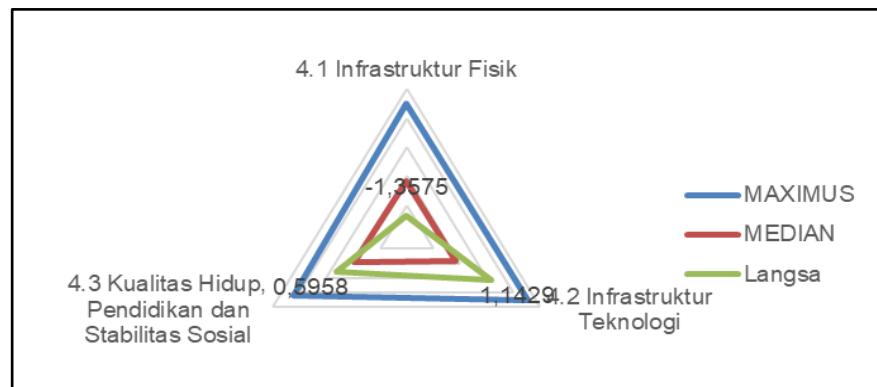
Gambar 3. 108. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kota Langsa

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kota Langsa berada pada urutan ke 8 dengan nilai terstandar sebesar 0,248 atau meningkat -0,232 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.109. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur Fisik berada

di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menandakan infrastruktur fisik (jalan, air, transportasi) masih kurang memadai. Sedangkan untuk 2 (dua) sub lingkup lainnya berada di atas rata-rata kabupaten/kota ditandai dengan akses telekomunikasi internet relatif bagus, dan kualitas pendidikan serta sosial cukup baik.

Hal ini dipengaruhi oleh Infrastruktur fisik (jalan, listrik, air, jaringan internet) dan pendidikan (APS, Rasio Guru) cukup membaik, tetapi akses internet rumah tangga masih rendah, namun indikator yang patut mendapat perhatian untuk lebih dioptimalkan agar lebih memadai. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kota Langsa dapat meningkat drastis sampai peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,986.



Gambar 3. 109. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kota Langsa

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kota Langsa dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kota Sabang yang pada tahun 2024 berada pada posisi 15 akan meningkat menjadi peringkat 6 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,505.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Memperkuat regulasi dan kepastian hukum agar investasi tidak menurun;
- b. Membangun infrastruktur fisik (jalan, air, transportasi) untuk mendukung perdagangan dan jasa;
- c. Meningkatkan fleksibilitas pasar kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja; dan
- d. Mendorong perdagangan dan jasa untuk dukungan logistik dan promosi produk unggulan.

22. Kota Lhokseumawe

a. Gambaran Umum



Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki luas wilayah 181,06 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 berjumlah 198.705 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 59,12 juta rupiah.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Lhokseumawe menurut lapangan usaha dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 nilai PDRB ADHB Kota Lhokseumawe adalah 11,85 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 678,6 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah 8,21 triliun rupiah, juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 350,4 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,46 persen.

Peranan terbesar dalam struktur ekonomi Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 23,24 persen. Disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,70 persen.

Jumlah realisasi investasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah sebesar 526,16 miliar rupiah atau meningkat sebesar 277,65 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 248,52 miliar rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 4,44 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kota Lhokseumawe adalah di sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan nilai investasi 247,12 miliar rupiah, diikuti oleh sektor perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi 107,45 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 berjumlah 95.783 orang atau turun sebanyak 2.189 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 64,12 persen. Sedangkan, tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe mengalami sedikit penurunan dari 8,78 persen pada tahun sebelumnya menjadi 8,47 persen di tahun 2024.

Infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian di Kota Lhokseumawe adalah tersedianya Pelabuhan Penyeberangan Krueng Geukueh/Lhokseumawe, dan infrastruktur jalan beraspal yang tidak mengalami perubahan/penurunan dari tahun yang lalu. Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di

daerah. Pada tabel 3.49. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kota Lhokseumawe terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 49. Peringkat Daya Saing Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kota Lhokseumawe	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 4 Nilai Terstandar : 0,811	
Stabilitas Ekonomi Makro 6 Nilai Terstandar : 0,616	Pemerintahan dan Institusi Publik 11 Nilai Terstandar : 0,216
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 4 Nilai Terstandar : 1,033	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 3 Nilai Terstandar : 1,379

Berdasarkan tabel 3.49. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 berada di peringkat 4 dengan nilai terstandar 0,811 atau meningkat 0,269 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 6 dengan nilai terstandar 0,542. Ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam daya saing investasi secara keseluruhan, terutama karena perbaikan di semua lingkup. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro meningkat 0,320 poin dari tahun sebelumnya, menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang semakin stabil dan kuat. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik meningkat 0,330 poin, menunjukkan perbaikan dalam pelayanan publik dan koordinasi birokrasi.

Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja berada di peringkat 4 dengan nilai terstandar 1,033, menunjukkan iklim bisnis dan sektor ketenagakerjaan membaik. Hal ini disebabkan adanya peningkatan investasi, pertumbuhan UMKM, serta penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Sedangkan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur berada di peringkat 3 dengan nilai terstandar 1,379, menunjukkan kualitas hidup masyarakat meningkat dengan dukungan dari pembangunan infrastruktur fisik dan layanan publik yang semakin membaik.

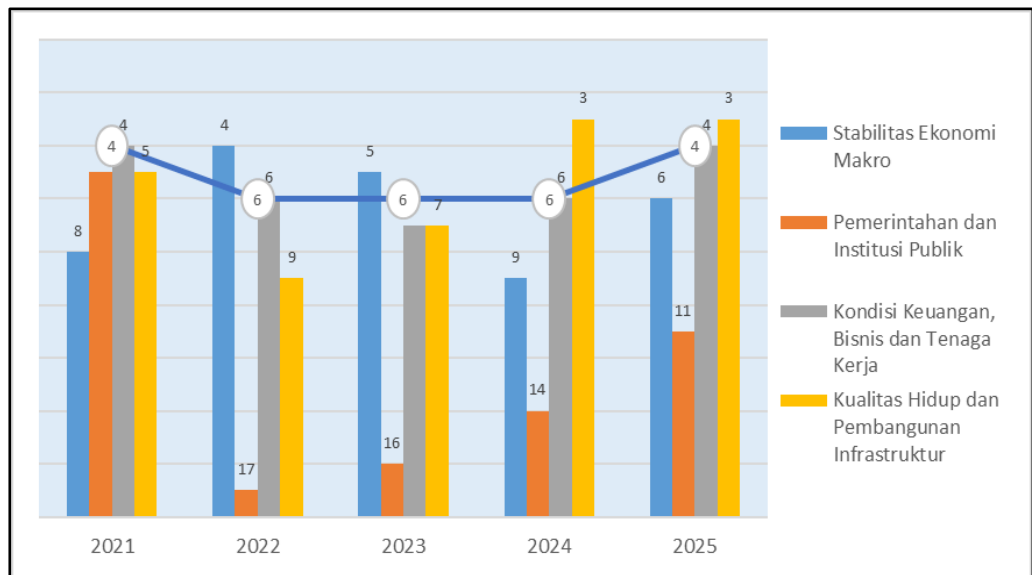
Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.50. jika hal ini terus diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 1,372 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 2. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kota Lhokseumawe akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3. 50. Simulasi What If Kota Lhokseumawe

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		4		2	
Nilai Terstandar		0,811		1,372	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	6	3	Peringkat	11	6
Nilai Terstandar	0,616	0,736	Nilai Terstandar	0,216	0,569
Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	4	2	Peringkat	3	1
Nilai Terstandar	1,033	1,399	Nilai Terstandar	1,379	2,782

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 110. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Peringkat indeks daya saing investasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 meningkat menjadi peringkat 4. Secara keseluruhan arah tren daya saing menunjukkan konsolidasi positif dan perbaikan berkelanjutan. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro mengalami fluktuasi. Setelah melonjak tinggi pada tahun 2022, indeks menurun tajam pada 2024 akibat inflasi atau perlambatan ekonomi lokal, namun menunjukkan arah pemulihan pada tahun 2025.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik dari tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami penurunan drastis (0,456 menjadi -0,339). Namun pada tahun 2024-

2025 mulai membaik perlahan, menunjukkan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan mulai efektif. Sedangkan Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja selalu positif dan menjadi penopang utama daya saing Kota Lhokseumawe. Nilai tinggi pada tahun 2025 (1,033) menunjukkan pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan investasi.

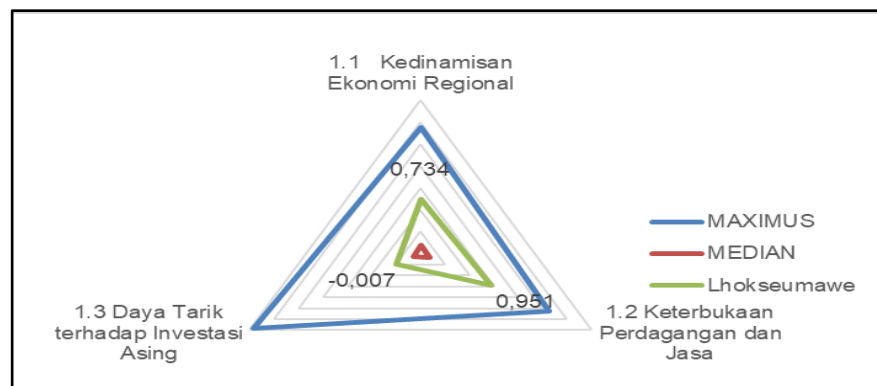
Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur relatif stabil dari tahun 2021 sampai tahun 2023, lalu meningkat tajam di tahun 2024 (1,237) dan tahun 2025 (1,379). Kenaikan konsisten, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pembangunan dan layanan publik. Ini adalah pilar paling stabil dan unggul bagi Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan Gambar 3.110. Indeks daya saing investasi Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan konsisten sepanjang 2024-2025 setelah sempat menurun di periode 2022-2023. Lingkup Bisnis, Tenaga Kerja dan Pembangunan Infrastruktur menjadi penggerak utama peningkatan daya saing.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke 6 dengan nilai terstandar sebesar 0,616 atau menurun 0,320 poin dibanding tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.111. dapat dilihat bahwa seluruh sub lingkup di lingkup ini berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan ekonomi Kota Lhokseumawe cukup dinamis, sektor perdagangan dan jasa relatif terbuka (potensi untuk penguatan ekspor dan impor), kelemahannya ada pada daya tarik investasi.

Kondisi lingkup ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi makin didominasi sektor sekunder dan tersier, laju pertumbuhan stabil, daya beli masyarakat terjaga, ketergantungan impor masih besar, sehingga neraca perdagangan defisit semakin lebar. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro Kota Lhokseumawe akan meningkat sampai peringkat 3 dengan nilai terstandar 0,736.



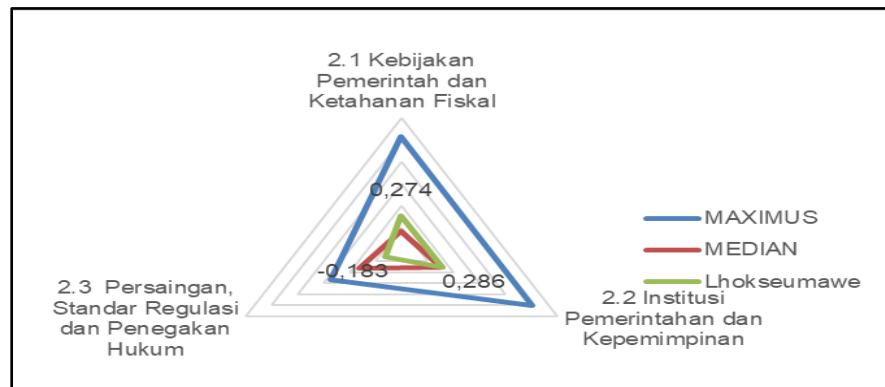
Gambar 3. 111. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kota Lhokseumawe

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke 11 dengan nilai terstandar sebesar 0,216 atau meningkat 0,330 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar

3.112. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal serta Sub Lingkup Intitusi Pemerintahan dan Kepemimpinan berada sedikit di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan kedua Sub Lingkup ini perlu penguatan dalam tata kelola dan kualitas kepemimpinan dan kebijakan fiskal. Sedangkan Sub Lingkup persaingan, Standar Regulasi, dan Penegakan Hukum berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan tantangan besar dalam regulasi, persaingan usaha yang sehat, serta penegakan hukum.

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan total pemda dibandingkan tahun sebelumnya ditunjukkan dengan adanya kestabilan kapasitas fiskal, namun efektivitas kinerja pemda perlu ditingkatkan agar mendukung pertumbuhan. Indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, adalah meningkatnya pengeluaran pemerintah daerah dan meningkatnya angka kriminalitas. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kota Lhokseumawe dapat meningkat drastis sampai peringkat 6 dengan nilai terstandar 0,569.



Gambar 3. 112. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kota Lhokseumawe

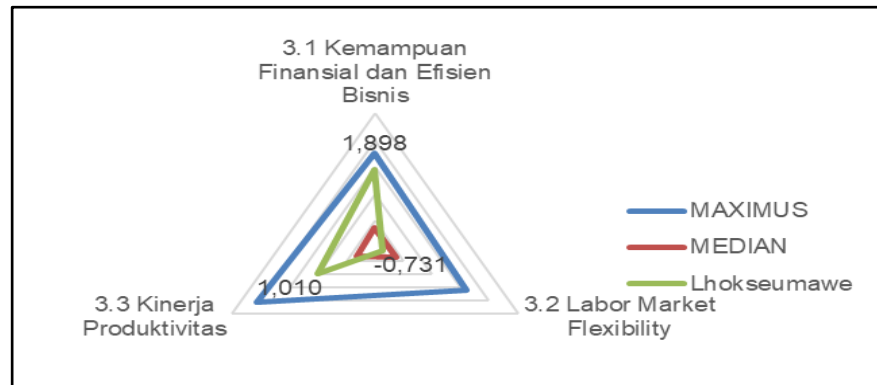
3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke 4 dengan nilai terstandar sebesar 1,033 atau meningkat 0,283 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.113. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kemampuan Finansial dan Efisiensi jauh berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan perbankan dan efisiensi bisnis cukup tinggi.

Kondisi sama terjadi pada Sub Lingkup Produktivitas, ini menunjukkan bahwa produktivitas cukup baik. Sedangkan Sub Lingkup Fleksibilitas Tenaga Kerja berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menandakan rigiditas pasar tenaga kerja masih lemah. Peningkatan lingkup ini dipengaruhi kredit bermasalah rendah, pergeseran tenaga ke sektor sekunder, dan produktivitas sektor tersier meningkat pesat.

Namun terdapat indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain tingkat partisipasi tenaga kerja dan masih tingginya tingkat pengangguran. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup

Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dapat meningkat menjadi peringkat 2 dengan nilai terstandar 1,399.



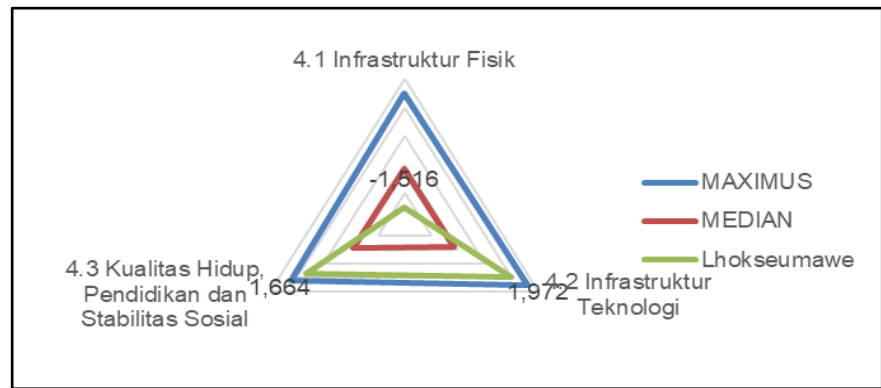
Gambar 3. 113. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kota Lhokseumawe

4) **Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur**

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, peringkat daya saing Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke 3 dengan nilai terstandar sebesar 1,379 atau meningkat 0,142 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.114. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi dan Sub Lingkup Kualitas Hidup dan Pendidikan berada di atas rata-rata kabupaten/kota dan menjadi kekuatan/keunggulan bagi Kota Lhokseumawe. Sedangkan Sub Lingkup Infrastruktur Fisik sangat lemah berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan jalan, air dan transportasi menjadi masalah utama.

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh infrastruktur fisik terus membaik, terutama listrik (sudah 100 persen) dan kepemilikan rumah, konektivitas internet terus meningkat hampir menyeluruh (>99 persen), terutama akses rumah dan telepon genggam, sektor pendidikan membaik (lama sekolah meningkat, buta huruf menurun, partisipasi sekolah tinggi). Sektor kesehatan juga meningkat dengan tambahan fasilitas dan tenaga medis, sanitasi membaik.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, antara lain akses air pipa menurun dan penggunaan telepon genggam untuk komunikasi sedikit menurun. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kota Lhokseumawe dapat meningkat drastis sampai peringkat 1 dengan nilai terstandar 2,782.



Gambar 3. 114. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kota Lhokseumawe

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

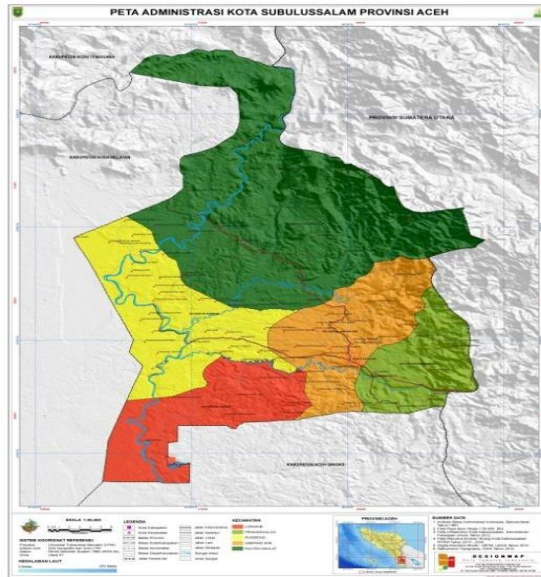
Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kota Lhokseumawe dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kota Lhokseumawe yang pada tahun 2024 berada pada posisi 4 akan meningkat menjadi peringkat 2 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 1,372.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Membangun infrastruktur fisik (jalan, air bersih, transportasi publik);
- b. Memperkuat daya tarik investasi asing melalui insentif, kawasan industri, kepastian hukum;
- c. Meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dengan vokasi, skema kerja modern;
- d. Mendorong fiskal sehat melalui digitalisasi pajak dan efisiensi belanja publik; dan
- e. Memperkuat digitalisasi dan pendidikan melalui perluasan internet sekolah, vokasi industri, UMKM digital.

23. Kota Subulussalam

a. Gambaran Umum



Kota Subulussalam merupakan salah satu kota di Aceh yang memiliki luas wilayah 1.391 km². Menurut data BPS, jumlah penduduk Kota Subulussalam pada tahun 2024 berjumlah 105.553 orang, dengan PDRB per kapita sebesar 27,88 juta rupiah.

Nilai PDRB Kota Subulussalam atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 2,76 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 202 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai 2,56

triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK Kota Subulussalam juga mengalami peningkatan, pada tahun 2024 mencapai 1,62 triliun rupiah atau meningkat sebesar 4,12 persen dibanding tahun 2023 yang mencapai 1,56 triliun rupiah. Selama tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Subulussalam sebesar 4,12 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Subulussalam pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 25,05 persen. Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,37 persen, disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,64 persen.

Jumlah realisasi investasi Kota Subulussalam pada tahun 2024 adalah 648,85 miliar rupiah atau meningkat jauh sebanyak 244,81 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 404,04 miliar rupiah. Total realisasi investasi tersebut setara dengan 23,49 persen PDRB tahun 2024. Berdasarkan data manajerial investasi PMA dan PMDN tahun 2024 realisasi investasi terbesar di Kota Subulussalam adalah di sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan nilai investasi 335,83 miliar rupiah, diikuti oleh sektor industri makanan dengan nilai investasi 299,42 miliar rupiah.

Berdasarkan kondisi tenaga kerja dapat diinformasikan jumlah angkatan kerja Kota Subulussalam pada tahun 2024 berjumlah 46.434 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 1.672 orang. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 68,60 persen. Sedangkan, tingkat pengangguran Kota Subulussalam tahun 2024 mengalami penurunan dari 5,69 persen pada tahun sebelumnya menjadi 5,12 persen di tahun 2024. Hal tersebut di atas masih belum menggambarkan iklim investasi yang kondusif. Dengan indeks daya saing investasi dapat dilihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi iklim investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada tabel 3.51. di bawah ini dapat dilihat peringkat daya saing investasi Kota Subulussalam terhadap kabupaten/kota lain tahun 2025.

Tabel 3. 51. Peringkat Daya Saing Kota Subulussalam Tahun 2025

Indeks Daya Saing Investasi Kota Subulussalam	
Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan 22 Nilai Terstandar : -1,043	
Stabilitas Ekonomi Makro 17 Nilai Terstandar : -0,643	Pemerintahan dan Institusi Publik 22 Nilai Terstandar : -1,514
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja 22 Nilai Terstandar : -1,366	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur 18 Nilai Terstandar : -0,649

Berdasarkan tabel 3.51. di atas, dapat disimpulkan bahwa daya saing investasi secara keseluruhan Kota Subulussalam pada tahun 2025 berada di peringkat 22 dengan nilai terstandar -1,043 atau menurun 0,212 poin dibandingkan tahun 2024 di peringkat 20 dengan nilai terstandar -0,831. Penurunan ini dipengaruhi oleh 2 (dua) lingkup yang mengalami penurunan nilai terstandar. Hal ini disebabkan oleh lemahnya tata kelola pemerintahan dan sektor bisnis. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik menurun tajam mencapai 1,147 poin. Kinerja sektor keuangan dan ketenagakerjaan melemah karena iklim usaha yang belum kondusif atau produktivitas tenaga kerja yang stagnan.

Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro menunjukkan peningkatan pada beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali atau peningkatan investasi daerah sehingga terjadi perbaikan pada lingkup ini. Sedangkan untuk Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur menunjukkan peningkatan dalam kualitas hidup masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Dengan simulasi what if sesuai Tabel 3.52. jika hal ini dapat diperbaiki, maka total nilai terstandar dapat meningkat menjadi 0,196 yang disertai dengan meningkatnya peringkat daya saing investasi menjadi peringkat 12. Hal ini diasumsikan bila kabupaten/kota lain tidak melakukan perbaikan pada indikator-indikator daya saing. Dengan meningkatnya daya saing investasi yang berdampak pada perbaikan iklim investasi, diharapkan target investasi di Kota Subulussalam akan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang.

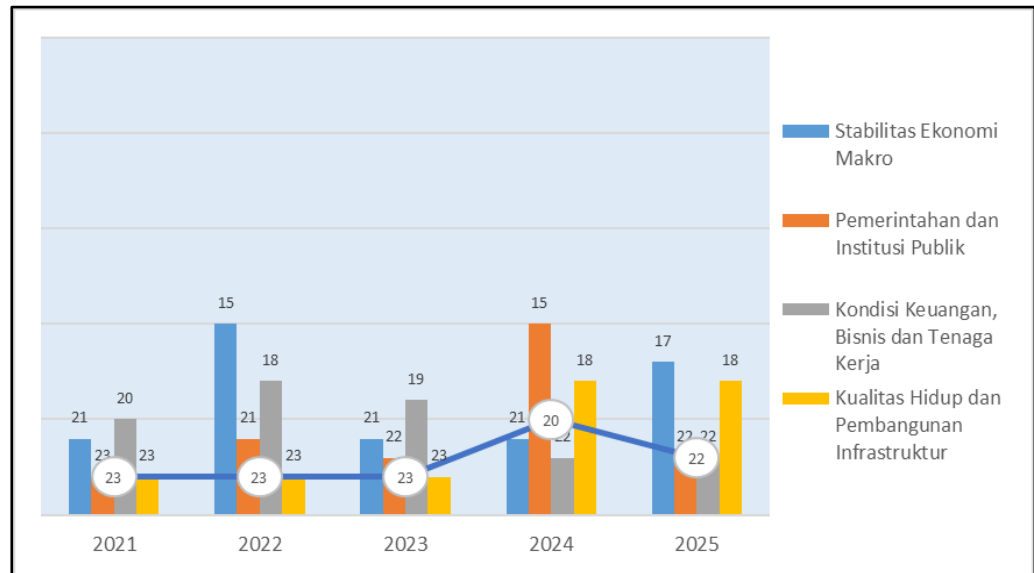
Tabel 3. 52. Simulasi What If Kota Subulussalam

Indeks Daya Saing Investasi Keseluruhan					
		Sebelum		Menjadi	
Peringkat		22		12	
Nilai Terstandar		-1,043		0,196	
Stabilitas Ekonomi Makro			Pemerintahan dan Institusi Publik		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	17	12	Peringkat	22	16
Nilai Terstandar	-0,643	-0,072	Nilai Terstandar	-1,514	-0,280

Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja			Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
Sebelum		Menjadi	Sebelum		Menjadi
Peringkat	22	15	Peringkat	18	10
Nilai Terstandar	-1,366	-0,522	Nilai Terstandar	-0,649	0,089

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

b. Kondisi Daya Saing Investasi



Gambar 3. 115. Peringkat Lingkup dan Indeks Daya Saing Investasi Kota Subulussalam Tahun 2021-2025

Peringkat indeks daya saing investasi Kota Subulussalam pada tahun 2025 menurun menjadi peringkat 22. Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Kondisi membaik signifikan pada tahun 2022, pada tahun 2025 menunjukkan pemulihan ekonomi dibanding tahun 2024. Hal ini yang dipengaruhi oleh peningkatan investasi, perbaikan inflasi atau pertumbuhan PDRB yang lebih stabil.

Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik dari tahun 2021 ke tahun 2024 terjadi perbaikan drastis (-4,248 menjadi -0,368), namun pada tahun 2025 mengalami penurunan tajam dengan nilai terstandar -1,514. Lingkup Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja relatif stabil selama 2021–2024 (-1,121 menjadi -1,121) tetapi turun tajam pada tahun 2025 (-1,366), menandakan melemahnya iklim bisnis dan ketenagakerjaan.

Sedangkan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur terjadi perbaikan konsisten sejak 2022 dan terus meningkat hingga tahun 2025, mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembangunan fisik, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan akses infrastruktur publik.

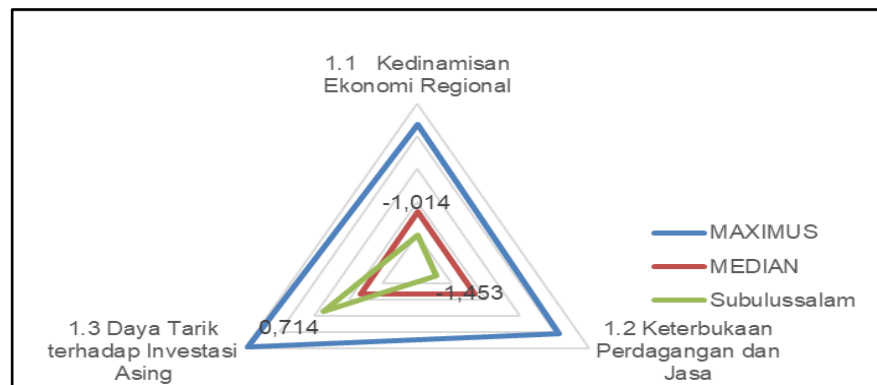
Berdasarkan Gambar 3.115. Indeks daya saing investasi Kota Subulussalam berada dalam posisi stabil pada tahun 2021-2023, dan mengalami peningkatan/perbaikan di tahun 2024. Namun pada tahun 2025 mengalami

penurunan kembali, dikarenakan tata kelola publik yang melemah sehingga memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi dan performa daya saing.

1) Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro

Dilihat dari Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro, peringkat daya saing Kota Subulussalam berada pada urutan ke 17 dengan nilai terstandar sebesar -0,643 atau meningkat 0,286 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.116. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Kedinamisan Ekonomi Regional serta Sub Lingkup Keterbukaan Perdagangan dan Jasa berada di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi Subulussalam masih kurang kompetitif dan aktivitas ekspor impor relatif rendah. Sedangkan Sub Lingkup Daya Saing Investasi Asing berada di atas rata-rata kabupaten/kota. Ini menunjukkan Subulussalam punya daya tarik investasi cukup baik.

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi investasi, pertumbuhan PDRB, menurunnya inflasi, dan keterbukaan perdagangan sedikit naik. Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini adalah PDRB, pembentukan modal tetap bruto, ekspor dan impor. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Stabilitas Ekonomi meningkat menjadi peringkat 12 dengan nilai terstandar -0,072.

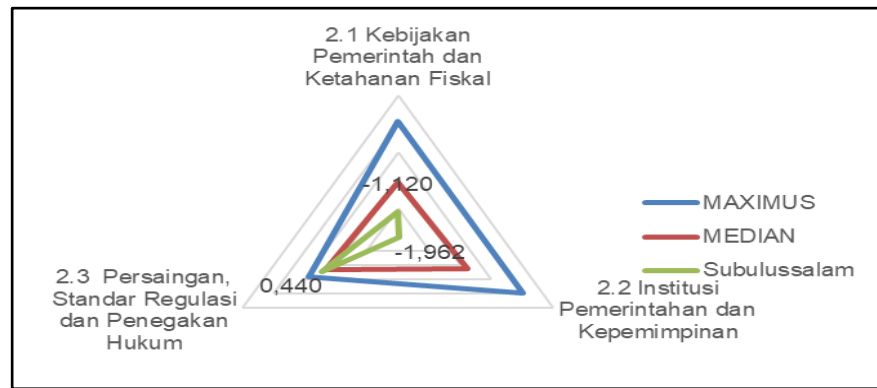


Gambar 3. 116. Perbandingan Lingkup Stabilitas Ekonomi Makro per Sub Lingkup Kota Subulussalam

2) Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik

Dilihat dari Lingkup Pemerintahan dan Institusi, peringkat daya saing Kota Subulussalam berada pada urutan ke 22 dengan nilai terstandar sebesar -1,514 atau meningkat -1,147 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.117. dapat dilihat bahwa seluruh sub lingkup pada lingkup ini di bawah rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan tata kelola pemerintahan menjadi kelemahan utama, dibutuhkan reformasi birokrasi dan fiskal yang lebih kuat.

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh menurunnya angka kriminalitas, meningkatnya angka penyelesaian kriminalitas dan opini audit LKPD Pemda. Namun terdapat indikator perlu diperbaiki, yaitu total pendapatan pemda dan pendapat pajak menurun. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Pemerintahan dan Institusi Kota Subulussalam dapat meningkat drastis sampai peringkat 16 dengan nilai -0,089.

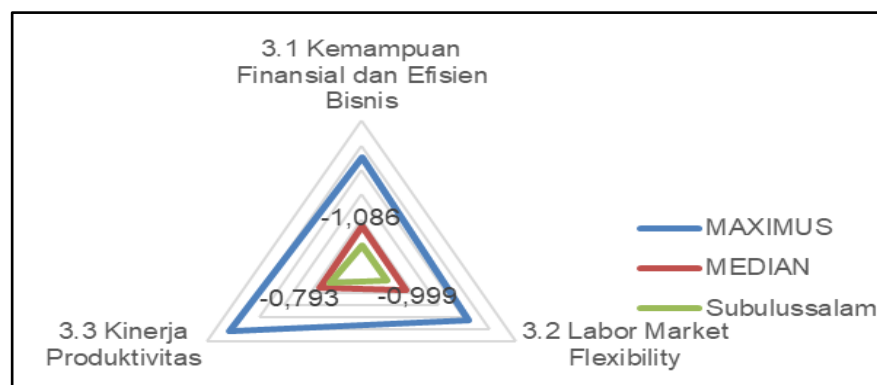


Gambar 3. 117. Perbandingan Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik per Sub Lingkup Kota Subulussalam

3) Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja

Dilihat dari Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja, peringkat daya saing Kota Subulussalam berada pada urutan ke 22 dengan nilai terstandar sebesar -1,366 atau menurun -0,262 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.118. dapat dilihat bahwa seluruh sub lingkup di lingkup ini berada hampir mendekati rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa sektor keuangan dan pasar tenaga kerja Kota Subulussalam masih terbatas, serta produktivitas relatif rendah.

Sejumlah indikator yang patut mendapat perhatian terkait dengan lingkup ini, adalah perbandingan penduduk dengan layanan perbankan masih timpang/kurang optimal, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja (tersier). Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja Kota Subulussalam dapat meningkat sampai naik pada peringkat 53 dengan nilai terstandar -0,522.



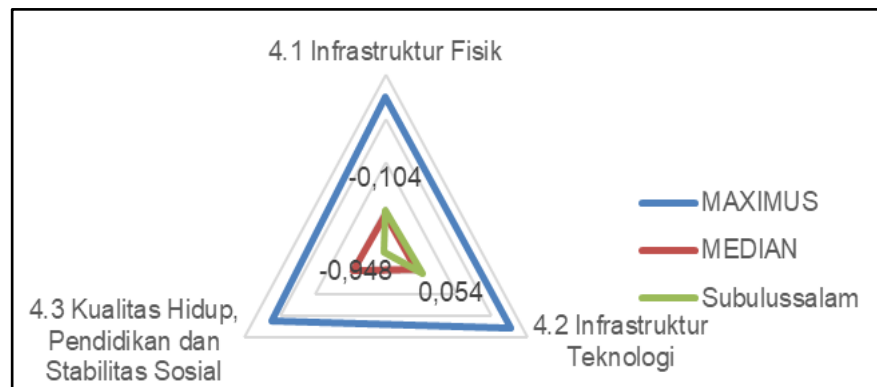
Gambar 3. 118. Perbandingan Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja per Sub Lingkup Kota Subulussalam

4) Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur

Dilihat dari Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur, Peringkat daya saing Kota Subulussalam berada pada urutan ke 18 dengan nilai terstandar sebesar -0,649 atau meningkat 0,276 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 3.119. dapat dilihat bahwa Sub Lingkup Infrastruktur

Fisik dan Sub Lingkup Infrastruktur Teknologi berada sedikit di atas rata-rata kabupaten/kota. Hal ini menandakan kondisi infrastruktur fisik (jalan, air dan transportasi publik) dan akses internet relatif baik. Sedangkan Sub Lingkup Kualitas Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial berada di bawah rata-rata kabupaten/kota, dikarenakan angka harapan hidup dan IPM belum maksimal.

Peningkatan lingkup ini dipengaruhi oleh infrastruktur fisik (akses listrik dan air) sudah optimal, akses internet rumah tangga membaik, kualitas hidup membaik (IPM dan harapan hidup terus meningkat). Namun terdapat indikator yang patut mendapat perhatian terkait pada lingkup ini, yaitu resiko bencana alam yang meningkat. Jika indikator tersebut dapat diperbaiki, maka Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Kota Subulussalam dapat meningkat drastis sampai peringkat 10 dengan nilai terstandar 0,089.



Gambar 3. 119. Perbandingan Lingkup Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur per Sub Lingkup Kota Subulussalam

c. Perbaikan Daya Saing Investasi

Berdasarkan simulasi What If, jika indikator daya saing terendah Kota Subulussalam dilakukan perbaikan, maka peringkat daya saing Kota Subulussalam yang pada tahun 2024 berada pada posisi 22 akan meningkat menjadi peringkat 12 pada tahun berikutnya. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan nilai terstandar menjadi 0,196.

Untuk upaya perbaikan peringkat tersebut, maka Pemerintah, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota dapat melakukan sejumlah program/kebijakan di beberapa indikator, antara lain:

- a. Melakukan reformasi tata kelola pemerintahan dan penguatan fiskal;
- b. Meningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja untuk menyerap investasi;
- c. Melakukan penguatan sektor perdagangan dan UMKM berbasis digital; dan
- d. Melakukan mitigasi risiko bencana demi keberlanjutan pembangunan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemetaan peringkat daya saing investasi 23 kabupaten/kota se Aceh melalui pendekatan 4 (empat) lingkup, meliputi Stabilitas Ekonomi Makro; Pemerintahan dan Institusi Publik; Kondisi Finansial, Bisnis, dan Tenaga Kerja; serta Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur dengan 12 Sub Lingkup yang terdiri dari 76 indikator merujuk pada model yang dikembangkan oleh *Asia Competitiveness Institute* (ACI), maka dapat disimpulkan:

1. Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota se Aceh tahun 2025 secara keseluruhan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan beberapa kabupaten/kota (Banda Aceh, Bener Meriah dan Langsa) mengalami stagnasi hingga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024.
2. 10 (sepuluh) kabupaten/kota mengalami penurunan nilai indeks daya saing total, menunjukkan bahwa upaya peningkatan iklim investasi belum merata di seluruh wilayah di Aceh.
3. Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Aceh Barat Daya mengalami peningkatan nilai indeks daya saing investasi yang menunjukkan perbaikan pada aspek ekonomi makro, kualitas infrastruktur, dan dinamika kegiatan usaha lokal.
4. Kabupaten Gayo Lues, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Barat, dan Aceh Jaya mengalami penurunan yang cukup signifikan, akibat lemahnya pada aspek stabilitas ekonomi, keterbatasan infrastruktur dasar, dan rendahnya efektivitas tata kelola pemerintahan.
5. Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi masih bertahan pada peringkat pertama sejak tahun 2019, dengan nilai terstandar 1,535 pada tahun 2025 atau meningkat 0,318 poin dibandingkan tahun 2024.
6. Kabupaten Simeulue menjadi kabupaten yang memiliki peringkat terendah pada tahun 2025 dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan nilai indeks daya saing mencapai -1,258. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya semua lingkup pendukung Indeks Daya Saing Investasi.
7. Lingkup Pemerintahan dan Institusi Publik serta Kualitas Hidup dan Infrastruktur menjadi lingkup dengan kinerja terlemah pada sebagian besar kabupaten/kota. Kondisi ini menandakan bahwa perbaikan tata kelola birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, dan percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kabupaten/kota dalam memperkuat daya saing investasi daerah.
8. Kesenjangan antar kabupaten/kota yang cukup lebar antara daerah dengan indeks tertinggi (seperti Banda Aceh, Aceh Besar) dan daerah dengan indeks terendah (seperti Simeulue, Gayo Lues). Hal ini menandakan bahwa pembangunan investasi belum terlaksana secara inklusif, khususnya wilayah pinggiran Aceh.

9. Strategi dan kebijakan daerah yang terarah akan berdampak positif dalam upaya meningkatkan Indeks Daya Saing Investasi kabupaten/kota, khususnya pelayanan dan kinerja investasi.

4.2. Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan di atas, berikut beberapa rekomendasi sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan Nilai Indeks Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota se Aceh:

1. Pemerintah kabupaten/kota perlu mempedomani simulasi *What If* dalam rangka melakukan perbaikan dan meningkatkan daya saing investasi di wilayahnya masing-masing dengan tetap mempertimbangkan pergerakan kabupaten/kota lainnya.
2. Pemerintah perlu menyiapkan program/kegiatan yang tepat sasaran dalam upaya meningkatkan investasi di daerah melalui pelibatan masyarakat dan stakeholder.
3. Memperkuat stabilitas ekonomi makro daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi unggulan berbasis sumber daya alam sekaligus mendukung sektor hilirisasi dan industrialisasi.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan institusi publik melalui peran digitalisasi layanan, transparansi, dan akuntabilitas.
5. Mendorong pertumbuhan dunia usaha dan tenaga kerja melalui penguatan ekosistem UMKM, kewirausahaan, dan pelatihan vokasi.
6. Membangun fasilitas infrastruktur dasar dan konektivitas, seperti jalan, air bersih, listrik, dan jaringan internet terutama di wilayah tertinggal.
7. Membangun fasilitas sosial dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata dan terjangkau.
8. Melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi ekonomi lokal (SDA), termasuk ketersediaan bahan baku, SDM dan pasar dengan memprioritaskan pembangunan daerah dalam menarik minat investor.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota memprioritaskan beberapa indikator utama untuk diperbaiki dalam upaya meningkatkan indeks daya saing investasi, termasuk peningkatan kolaborasi antardaerah.
10. Penyusunan indeks daya saing investasi perlu dilakukan secara konsisten setiap tahun dalam rangka memantau (*tracking*) tren perkembangan indeks daya saing investasi 23 kabupaten/kota, sekaligus menciptakan semangat untuk berkompetisi secara sehat dan positif antar kabupaten/kota se Aceh.
11. Pemberian penghargaan (*award*) kepada daerah yang berkinerja terbaik dalam rangka memberikan *reward* dengan prestasi kinerja selama ini.

LAMPIRAN

INDIKATOR-INDIKATOR INDEKS DAYA SAING INVESTASI
KABUPATEN/KOTA SE ACEH

No	Indikator	Satuan	Sumber Data
1.	Stabilitas Ekonomi Makro		
1.1	Kedinamisan Ekonomi Regional		
1.1.01.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Rp Juta	BPS, Aceh Dalam Angka
1.1.02.	PDRB, nonmineral	Rp Juta	BPS, Aceh Dalam Angka
1.1.03.	Pertumbuhan PDRB	%	BPS, Aceh Dalam Angka
1.1.04.	PDRB per Kapita	Rp Juta	BPS, Aceh Dalam Angka
1.1.05.	PDRB per Kapita, nonmineral	Rp Juta	BPS, Aceh Dalam Angka
1.1.06.	PDRB Industri Primer	%	BPS, Aceh Dalam Angka
1.1.07.	PDRB Industri Sekunder	%	BPS, Aceh Dalam Angka
1.1.08.	PDRB Industri Tersier	%	BPS, Aceh Dalam Angka
1.1.09.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Rp Juta	BPS, Aceh Dalam Angka
1.1.10.	Inflasi [R]	%	BPS, Aceh Dalam Angka
1.2	Keterbukaan Perdagangan dan Jasa		
1.2.01.	Ekspor	Rp Juta	BPS, Aceh Dalam Angka
1.2.02.	Ekspor, nonmigas	Rp Juta	BPS, Aceh Dalam Angka
1.2.03.	Impor	Rp Juta	BPS, Aceh Dalam Angka
1.2.04.	Impor, nonmigas	Rp Juta	BPS, Aceh Dalam Angka
1.2.05.	Keterbukaan dalam Perdagangan	%	BPS, Aceh Dalam Angka
1.3	Daya Tarik terhadap Investasi Asing		
1.3.01.	Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	rupiah	DPMPSTP Aceh
1.3.02.	Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	rupiah	DPMPSTP Aceh
2.	Pemerintahan dan Institusi Publik		
2.1	Kebijakan Pemerintah dan Ketahanan Fiskal		
2.1.01.	Pendapatan Total Pemda	ribu	BPS-Pemda/ Statistik Keuangan Daerah Aceh
2.1.02.	Pendapatan Pajak Pemda	ribu	BPS-Pemda/ Statistik Keuangan Daerah Aceh
2.1.03.	Pendapatan Pajak per Pendapatan Total Pemda	rasio	BPS-Pemda/ Statistik Keuangan Daerah Aceh
2.1.04.	Pengeluaran Pemda	ribu	BPS-Pemda/ Statistik Keuangan Daerah Aceh
2.1.05.	Keseimbangan Fiskal	rasio	BPS-Pemda/ Statistik Keuangan Daerah Aceh
2.2	Institusi Pemerintahan dan Kepemimpinan		
2.2.02.	Opini Audit LKPD Pemda		Web BPK
2.2.03.	Evaluasi Kinerja Pemda	%	Biro Organisasi
2.3	Persaingan, Standar Regulasi dan Penegakan Hukum		
2.3.01.	Tingkat Kriminalitas		BPS/Pemda/Aceh Dalam Angka
2.3.02.	Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	%	BPS/Pemda/Aceh Dalam Angka
3.	Lingkup Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja		
3.1	Kemampuan Finansial dan Efisien Bisnis		
3.1.01.	Total Tabungan dan Deposito di Bank	Rp Juta	BI
3.1.02.	Total Pinjaman Bank	Rp Juta	BI
3.1.03.	Jumlah Kredit Bermasalah	%	BI
3.1.04.	Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	Rasio	BI
3.1.05.	Jumlah Layanan Perbankan	Cabang/Kantor	OJK
3.1.06.	Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	Rasio	BPS/OJK
3.2	Labor Market Flexibility		
3.2.01.	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	BPS, Aceh Dalam Angka

3.2.02.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	BPS, Aceh Dalam Angka
3.2.03.	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	BPS, Aceh Dalam Angka
3.2.04.	Jumlah Pekerja di Sektor Primer	Orang	BPS, Aceh Dalam Angka
3.2.05.	Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	Orang	BPS, Aceh Dalam Angka
3.2.06.	Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	Orang	BPS, Aceh Dalam Angka
3.2.07.	Tingkat Pengangguran	%	BPS, Aceh Dalam Angka
3.3	Kinerja Produktivitas		
3.3.01.	Produktivitas Keseluruhan	Rp juta/pekerja/ tahun	BPS, Aceh Dalam Angka
3.3.02.	Produktivitas Keseluruhan, non migas	Rp juta/pekerja/ tahun	BPS, Aceh Dalam Angka
3.3.03.	Produktivitas industri Primer	Rp juta/pekerja/ tahun	BPS, Aceh Dalam Angka
3.3.04.	Produktivitas industri Sekunder	Rp juta/pekerja/ tahun	BPS, Aceh Dalam Angka
3.3.05.	Produktivitas industri Tersier	Rp juta/pekerja/ tahun	BPS, Aceh Dalam Angka
4.	Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur		
4.1	Infrastruktur Fisik		
4.1.01.	Jumlah Penduduk	Jiwa	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.1.02.	Pertumbuhan Penduduk	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.1.03.	Penduduk Perkotaan	Jiwa	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.1.04.	Panjang Jalan Beraspal (total)	Km	BPS, Aceh Dalam Angka
4.1.05.	Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	Rasio	BPS, Aceh Dalam Angka
4.1.06.	Jumlah Ketersediaan pelabuhan	Unit	Statistik Transportasi Udara dan Laut
4.1.07.	Jumlah ketersediaan bandara	Unit	Statistik Transportasi Udara dan Laut
4.1.08.	Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.1.09.	Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.1.10.	% kepemilikan rumah	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.2	Infrastruktur Teknologi		
4.2.01.	% Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.2.02.	% Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.2.03.	% Penduduk Menggunakan Komputer	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.2.04.	Akses Internet di Rumah	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.2.05.	Akses Internet di Kantor	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.2.06.	Akses Internet di Sekolah	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.2.07.	Akses Internet dengan Telepon Genggam	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.3	Kualitas Hidup, Pendidikan dan Stabilitas Sosial		
4.3.01.	Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	%	Statistik Pendidikan Prov Aceh
4.3.02.	Rata-rata Lama Sekolah	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.3.03.	Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat / Statistik Pendidikan Prov Aceh
4.3.04.	Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.3.05.	Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	%	Statistik Kesejahteraan Rakyat
4.3.06.	Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	%	BPS, Aceh Dalam Angka
4.3.07.	Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	%	BPS, Aceh Dalam Angka
4.3.08.	Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	%	BPS, Aceh Dalam Angka
4.3.09.	Indeks Pembangunan Manusia	%	BPS, Aceh Dalam Angka
4.3.10.	Angka Harapan Hidup saat lahir	%	BPS, Aceh Dalam Angka
4.3.11.	Rasio Gini	%	BPS, Aceh Dalam Angka
4.3.12.	Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	%	BPS, Aceh Dalam Angka
4.3.13.	Rasio penduduk/ total jumlah tenaga kesehatan	%	BPS, Aceh Dalam Angka
4.3.14.	% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	BPS, Aceh Dalam Angka
4.3.15.	Jumlah kejadian bencana alam		BPS, Aceh Dalam Angka

INDEKS DAYA SAING INVESTASI KABUPATEN/KOTA SE ACEH TAHUN 2025
20 (Dua Puluh) Indikator Tertinggi Dan Terendah

1. Kab. Simeulue					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	1,867	1	2.1.05. Keseimbangan Fiskal	-3,319	1
4.2.05. Akses Internet di Kantor	1,048	2	2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	-2,573	2
4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	1,044	3	2.1.04. Pengeluaran Pemda	-1,700	3
4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	1,024	4	4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-1,610	4
4.1.10. % kepemilikan rumah	0,942	5	2.1.01. Pendapatan Total Pemda	-1,525	5
4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	0,896	6	4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	-1,513	6
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,885	7	3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-1,465	7
4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	0,795	8	1.1.07. PDRB Industri Sekunder	-1,185	8
4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	0,772	9	1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,112	9
3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0,689	10	1.2.01. Ekspor	-1,105	10
4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	0,672	11	1.2.02. Ekspor, nonmigas	-1,105	11
4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	0,670	12	1.2.03. Impor	-1,101	12
4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	0,632	13	1.2.04. Impor, nonmigas	-1,101	13
4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	0,611	14	3.1.02. Total Pinjaman Bank	-1,035	14
4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	0,514	15	3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-1,026	15
4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	0,493	16	1.1.02. PDRB, nonmineral	-1,025	16
4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	0,463	17	3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-1,018	17
4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	0,457	18	4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-1,011	18
4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	0,428	19	3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	-1,005	19
4.2.04. Akses Internet di Rumah	0,424	20	4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	-1,001	20

2. Kab. Aceh Singkil					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	1,896	1	4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1,397	1
2.1.05. Keseimbangan Fiskal	1,721	2	4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	-1,353	2
4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	1,657	3	4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-1,331	3
4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	1,333	4	4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-1,273	4
2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	1,151	5	3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-1,261	5
4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	1,044	6	1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,237	6
4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	0,649	7	2.1.01. Pendapatan Total Pemda	-1,169	7
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,457	8	4.2.06. Akses Internet di Sekolah	-1,134	8
4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	0,454	9	1.2.03. Impor	-1,069	9
3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	0,420	10	1.2.04. Impor, nonmigas	-1,069	10
4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	0,404	11	2.1.04. Pengeluaran Pemda	-1,018	11
4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	0,403	12	1.1.04. PDRB per Kapita	-1,006	12
4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	0,400	13	1.2.01. Ekspor	-0,994	13
4.1.10. % kepemilikan rumah	0,366	14	1.2.02. Ekspor, nonmigas	-0,994	14
4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	0,280	15	4.2.05. Akses Internet di Kantor	-0,983	15
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	0,236	16	1.1.02. PDRB, nonmineral	-0,981	16
4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	0,135	17	1.1.03. Pertumbuhan PDRB	-0,955	17
2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	0,111	18	1.1.05. PDRB per Kapita, nonmineral	-0,950	18
4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	0,014	19	3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	-0,950	19
4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	0,003	20	1.1.01. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,947	20

3. Kab. Aceh Selatan					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	1,657	1	4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-1,598	1
2.1.05. Keseimbangan Fiskal	1,600	2	4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	-1,482	2
4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	1,416	3	4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-1,423	3
4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	1,044	4	4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-1,411	4
4.1.10. % kepemilikan rumah	0,866	5	4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-1,368	5
3.1.06. Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	0,818	6	1.1.03. Pertumbuhan PDRB	-1,221	6
4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	0,621	7	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-1,219	7
3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	0,558	8	3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-1,052	8
3.1.05. Jumlah Layanan Perbankan	0,488	9	4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	-1,041	9
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	0,460	10	4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-1,016	10
3.2.07. Tingkat Pengangguran	0,404	11	4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-1,011	11
4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	0,397	12	4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	-0,848	12
4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	0,383	13	4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	-0,793	13
2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	0,304	14	4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	-0,737	14
2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	0,265	15	4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	-0,729	15
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,237	16	4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	-0,719	16
4.2.04. Akses Internet di Rumah	0,175	17	3.3.03. Produktivitas industri Primer	-0,702	17
4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	0,072	18	1.1.04. PDRB per Kapita	-0,679	18
3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	0,046	19	4.2.06. Akses Internet di Sekolah	-0,649	19
4.1.01. Jumlah Penduduk	0,003	20	2.1.02. Pendapatan Pajak Pemda	-0,631	20

4. Kab. Aceh Tenggara					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	3,848	1	4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	-2,435	1
2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	1,077	2	4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-2,412	2
4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	1,044	3	4.2.05. Akses Internet di Kantor	-1,623	3
4.2.06. Akses Internet di Sekolah	0,970	4	4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	-1,482	4
3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0,605	5	2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	-1,269	5
3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	0,604	6	4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-1,269	6
4.3.11. Rasio Gini	0,582	7	3.3.04. Produktivitas industri Sekunder	-1,04	7
4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	0,563	8	4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-1,011	8
4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	0,498	9	1.1.07. PDRB Industri Sekunder	-0,967	9
4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	0,393	10	1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0,898	10
4.2.04. Akses Internet di Rumah	0,327	11	4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,896	11
4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	0,322	12	4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-0,887	12
4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	0,320	13	4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-0,88	13
4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	0,293	14	3.3.01. Produktivitas Keseluruhan	-0,859	14
3.2.07. Tingkat Pengangguran	0,278	15	3.3.03. Produktivitas industri Primer	-0,842	15
3.1.02. Total Pinjaman Bank	0,264	16	4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-0,836	16
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	0,159	17	1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,818	17
4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	0,109	18	1.1.03. Pertumbuhan PDRB	-0,813	18
4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	0,085	19	3.3.02. Produktivitas Keseluruhan, non migas	-0,810	19
3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	0,083	20	1.1.04. PDRB per Kapita	-0,805	20

5. Kab. Aceh Timur					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	3,504	1	4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-3,442	1
3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	1,611	2	3.1.06. Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	-2,067	2
4.1.01. Jumlah Penduduk	1,397	3	3.2.07. Tingkat Pengangguran	-1,336	3
4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	1,346	4	4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	-1,131	4
1.2.03. Impor	1,301	5	4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	-1,088	5
1.2.04. Impor, nonmigas	1,301	6	4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	-1,000	6
3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	1,173	7	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	7
3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	1,125	8	4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	-0,920	8
4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	1,110	9	3.3.04. Produktivitas industri Sekunder	-0,844	9
2.1.01. Pendapatan Total Pemda	1,098	10	4.2.06. Akses Internet di Sekolah	-0,841	10
2.1.04. Pengeluaran Pemda	0,989	11	3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0,817	11
1.1.06. PDRB Industri Primer	0,953	12	4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,802	12
4.3.11. Rasio Gini	0,896	13	4.2.04. Akses Internet di Rumah	-0,747	13
1.2.01. Ekspor	0,884	14	4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-0,666	14
1.2.02. Ekspor, nonmigas	0,884	15	1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0,649	15
4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	0,876	16	2.3.01. Tingkat Kriminalitas	-0,633	16
1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	0,874	17	1.1.05. PDRB per Kapita, nonmineral	-0,539	17
3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	0,798	18	1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0,531	18
1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,752	19	4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-0,517	19
4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	0,709	20	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-0,514	20

6. Kab. Aceh Tengah					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
3.3.04. Produktivitas industri Sekunder	2,832	1	4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-1,237	1
1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	2,006	2	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	2
4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	1,864	3	3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0,895	3
3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1,620	4	1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	-0,844	4
4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	1,479	5	4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,802	5
4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	1,403	6	4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-0,589	6
4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	1,189	7	2.1.03. Pendapatan Pajak per Pendapatan Total Pemda	-0,544	7
3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	1,160	8	2.1.02. Pendapatan Pajak Pemda	-0,531	8
4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	1,086	9	1.1.10. Inflasi [R]	-0,530	9
2.1.05. Keseimbangan Fiskal	0,847	10	3.3.03. Produktivitas industri Primer	-0,476	10
1.1.03. Pertumbuhan PDRB	0,683	11	4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	-0,460	11
3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	0,641	12	4.2.06. Akses Internet di Sekolah	-0,382	12
3.2.07. Tingkat Pengangguran	0,595	13	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-0,380	13
4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	0,508	14	4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,310	14
4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	0,483	15	1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0,298	15
4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	0,465	16	3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-0,264	16
4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	0,464	17	1.2.03. Impor	-0,200	17
4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	0,462	18	1.2.04. Impor, nonmigas	-0,200	18
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	0,441	19	3.1.02. Total Pinjaman Bank	-0,197	19
4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	0,427	20	1.1.08. PDRB Industri Tersier	-0,147	20

7. Kab. Aceh Barat					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
1.1.10. Inflasi [R]	3,897	1	1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	-1,945	1
1.1.03. Pertumbuhan PDRB	3,389	2	3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	-1,572	2
1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	2,598	3	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-1,387	3
3.3.03. Produktivitas industri Primer	2,307	4	4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-1,011	4
3.3.02. Produktivitas Keseluruhan, non migas	1,775	5	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	5
3.3.01. Produktivitas Keseluruhan	1,671	6	3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0,907	6
1.1.05. PDRB per Kapita, nonmineral	1,617	7	4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	-0,777	7
1.1.04. PDRB per Kapita	1,534	8	4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-0,719	8
2.1.05. Keseimbangan Fiskal	1,227	9	4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	-0,689	9
1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,031	10	3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-0,679	10
3.3.05. Produktivitas industri Tersier	0,998	11	4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,653	11
4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	0,987	12	1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0,513	12
1.1.06. PDRB Industri Primer	0,931	13	3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-0,425	13
2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	0,876	14	4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-0,361	14
4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	0,855	15	3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	-0,332	15
4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	0,839	16	3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	-0,330	16
2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	0,715	17	4.1.01. Jumlah Penduduk	-0,240	17
4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	0,703	18	1.2.03. Impor	-0,234	18
4.2.06. Akses Internet di Sekolah	0,677	19	1.2.04. Impor, nonmigas	-0,234	19
1.1.02. PDRB, nonmineral	0,619	20	3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0,231	20

8. Kab. Aceh Besar					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	2,886	1	4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	-2,010	1
1.1.07. PDRB Industri Sekunder	2,592	2	4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	-2,000	2
2.1.02. Pendapatan Pajak Pemda	2,475	3	4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-1,483	3
3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	2,074	4	3.2.07. Tingkat Pengangguran	-1,434	4
2.1.03. Pendapatan Pajak per Pendapatan Total Pemda	1,880	5	2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	-1,318	5
4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	1,667	6	4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	-1,008	6
1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,651	7	4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-0,880	7
1.2.03. Impor	1,483	8	4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,697	8
1.2.04. Impor, nonmigas	1,483	9	4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-0,660	9
4.2.06. Akses Internet di Sekolah	1,468	10	2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	-0,400	10
3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	1,459	11	1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	-0,284	11
3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	1,402	12	4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-0,224	12
3.1.05. Jumlah Layanan Perbankan	1,364	13	4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-0,211	13
3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	1,329	14	4.3.11. Rasio Gini	-0,176	14
3.1.02. Total Pinjaman Bank	1,317	15	3.3.05. Produktivitas industri Tersier	-0,168	15
4.1.01. Jumlah Penduduk	1,291	16	4.1.10. % kepemilikan rumah	-0,137	16
1.1.02. PDRB, nonmineral	1,277	17	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-0,077	17
1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	1,243	18	2.2.02. Opini Audit LKPD Pemda	0,000	18
4.2.05. Akses Internet di Kantor	1,201	19	3.1.01. Total Tabungan dan Deposito di Bank	0,021	19
1.1.01. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,086	20	1.1.04. PDRB per Kapita	0,045	20

9. Kab.Pidie					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	1,665	1	4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-2,057	1
2.1.01. Pendapatan Total Pemda	1,587	2	4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-1,438	2
4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	1,549	3	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-1,387	3
2.1.04. Pengeluaran Pemda	1,543	4	4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	-1,336	4
3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	1,493	5	3.3.04. Produktivitas industriSekunder	-1,316	5
3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	1,474	6	4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-1,279	6
4.1.01. Jumlah Penduduk	1,459	7	4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	-1,219	7
3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	1,215	8	4.2.04. Akses Internet di Rumah	-1,175	8
4.3.11. Rasio Gini	1,210	9	4.2.05. Akses Internet di Kantor	-1,103	9
3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	1,203	10	4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-1,011	10
4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	1,069	11	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	11
1.2.03. Impor	0,960	12	1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0,874	12
1.2.04. Impor, nonmigas	0,960	13	4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-0,843	13
4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	0,940	14	4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,802	14
4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	0,756	15	3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-0,791	15
4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	0,710	16	4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	-0,751	16
1.1.02. PDRB, nonmineral	0,694	17	4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,651	17
2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	0,648	18	4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	-0,630	18
1.1.06. PDRB Industri Primer	0,624	19	3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0,621	19
1.2.01. Ekspor	0,582	20	2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	-0,604	20

10. Kab.Bireuen					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	2,523	1	4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	-2,894	1
3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	1,781	2	4.2.04. Akses Internet di Rumah	-1,994	2
4.2.06. Akses Internet di Sekolah	1,712	3	4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-1,495	3
1.2.01. Ekspor	1,708	4	3.3.04. Produktivitas industri Sekunder	-1,285	4
1.2.02. Ekspor, nonmigas	1,708	5	4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-1,074	5
3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	1,692	6	3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-1,054	6
3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	1,555	7	4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-1,037	7
1.2.03. Impor	1,545	8	4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-1,011	8
1.2.04. Impor, nonmigas	1,545	9	4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-0,980	9
2.1.04. Pengeluaran Pemda	1,509	10	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	10
4.1.01. Jumlah Penduduk	1,504	11	2.3.01. Tingkat Kriminalitas	-0,915	11
2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	1,504	12	3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	-0,839	12
2.1.01. Pendapatan Total Pemda	1,410	13	1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0,831	13
1.1.02. PDRB, nonmineral	1,272	14	4.1.06 Jumlah Ketersedian pelabuhan	-0,802	14
1.1.01. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1,082	15	4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-0,762	15
3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	1,081	16	4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,636	16
1.1.08. PDRB Industri Tersier	1,058	17	1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0,531	17
4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	0,925	18	3.1.06. Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	-0,418	18
4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	0,885	19	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-0,413	19
4.1.03. Penduduk Perkotaan	0,882	20	4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	-0,410	20

11. Kab.Aceh Utara					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
1.1.06. PDRB Industri Primer	3,506	1	4.2.04. Akses Internet di Rumah	-2,818	1
2.1.01. Pendapatan Total Pemda	2,938	2	4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	-2,398	2
2.1.04. Pengeluaran Pemda	2,785	3	3.1.06. Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	-2,205	3
1.2.01. Ekspor	2,775	4	4.2.05. Akses Internet di Kantor	-2,062	4
1.2.02. Ekspor, nonmigas	2,775	5	4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-1,202	5
4.1.01. Jumlah Penduduk	2,699	6	1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	-1,166	6
1.1.01. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2,671	7	3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-1,077	7
3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	2,413	8	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-0,950	8
3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	2,392	9	3.2.07. Tingkat Pengangguran	-0,861	9
1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,279	10	1.1.03. Pertumbuhan PDRB	-0,844	10
3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	2,256	11	4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,802	11
1.1.02. PDRB, nonmineral	2,004	12	4.2.06. Akses Internet di Sekolah	-0,737	12
3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	2,004	13	4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	-0,680	13
1.1.07. PDRB Industri Sekunder	2,004	14	4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	-0,642	14
1.2.03. Impor	1,873	15	4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-0,605	15
1.2.04. Impor, nonmigas	1,873	16	4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-0,575	16
3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	1,798	17	4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	-0,567	17
3.3.03. Produktivitas industri Primer	1,582	18	3.3.04. Produktivitas industri Sekunder	-0,439	18
4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	1,422	19	4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	-0,428	19
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	1,169	20	1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0,426	20

12. Kab. Aceh Barat Daya					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	1,360	1	2.1.05. Keseimbangan Fiskal	-1,367	1
4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	1,116	2	4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	-0,958	2
4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	1,044	3	4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	-0,951	3
4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	0,896	4	4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-0,903	4
4.1.10. % kepemilikan rumah	0,866	5	3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0,867	5
3.2.07. Tingkat Pengangguran	0,802	6	4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	-0,862	6
4.3.11. Rasio Gini	0,766	7	4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-0,847	7
4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	0,756	8	2.1.04. Pengeluaran Pemda	-0,758	8
4.2.04. Akses Internet di Rumah	0,733	9	4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,750	9
4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	0,729	10	4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,713	10
4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	0,728	11	1.1.02. PDRB, nonmineral	-0,691	11
3.1.06. Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	0,645	12	1.1.01. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,685	12
4.2.05. Akses Internet di Kantor	0,566	13	4.1.03. Penduduk Perkotaan	-0,666	13
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,539	14	4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-0,665	14
3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	0,475	15	3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	-0,656	15
4.1.06. Jumlah Ketersediaan pelabuhan	0,428	16	3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	-0,641	16
2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	0,401	17	4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-0,619	17
4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	0,351	18	3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	-0,604	18
4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	0,333	19	1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0,590	19
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	0,275	20	1.2.01. Ekspor	-0,582	20

13. Kab. Gayo Lues					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1,891	1	4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	-4,024	1
3.2.07. Tingkat Pengangguran	1,582	2	4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-2,384	2
4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	1,402	3	4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	-1,377	3
4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	1,366	4	4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-1,282	4
4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	1,314	5	4.2.04. Akses Internet di Rumah	-1,273	5
4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	1,158	6	1.1.03. Pertumbuhan PDRB	-1,172	6
4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	1,107	7	4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	-1,167	7
1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	1,051	8	1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,068	8
4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	1,044	9	3.1.02. Total Pinjaman Bank	-1,037	9
4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	1,037	10	3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-1,016	10
4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	0,938	11	4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1,007	11
3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	0,835	12	1.1.02. PDRB, nonmineral	-0,960	12
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,816	13	1.2.03. Impor	-0,941	13
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	0,645	14	1.2.04. Impor, nonmigas	-0,941	14
1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	0,465	15	3.3.03. Produktivitas industri Primer	-0,936	15
4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	0,460	16	4.1.01. Jumlah Penduduk	-0,931	16
4.3.11. Rasio Gini	0,373	17	1.1.01. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,928	17
4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	0,368	18	4.1.03. Penduduk Perkotaan	-0,913	18
2.1.05. Keseimbangan Fiskal	0,209	19	3.1.05. Jumlah Layanan Perbankan	-0,881	19
4.2.05. Akses Internet di Kantor	0,198	20	1.2.01. Ekspor	-0,868	20

14. Kab. Aceh Tamiang					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	1,289	1	4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	-1,745	1
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	1,168	2	4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-1,412	2
3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	1,153	3	3.3.05. Produktivitas industri Tersier	-1,045	3
4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	0,918	4	4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-0,960	4
4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	0,907	5	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	5
4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	0,896	6	4.2.05. Akses Internet di Kantor	-0,952	6
4.2.04. Akses Internet di Rumah	0,853	7	3.2.07. Tingkat Pengangguran	-0,900	7
4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	0,843	8	4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,802	8
4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	0,806	9	2.3.01. Tingkat Kriminalitas	-0,672	9
4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	0,756	10	2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	-0,604	10
4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	0,738	11	3.3.02. Produktivitas Keseluruhan, non migas	-0,603	11
3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	0,702	12	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-0,547	12
1.1.06. PDRB Industri Primer	0,695	13	1.1.05. PDRB per Kapita, nonmineral	-0,538	13
3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	0,668	14	2.1.05. Keseimbangan Fiskal	-0,443	14
3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	0,661	15	4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	-0,397	15
3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	0,645	16	3.3.01. Produktivitas Keseluruhan	-0,382	16
2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	0,613	17	1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	-0,357	17
4.1.03. Penduduk Perkotaan	0,611	18	1.1.08. PDRB Industri Tersier	-0,343	18
4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	0,563	19	2.1.02. Pendapatan Pajak Pemda	-0,338	19
3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0,495	20	1.1.04. PDRB per Kapita	-0,291	20

15. Kab. Nagan Raya					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	4,016	1	4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-1,428	1
4.3.11. Rasio Gini	2,518	2	4.2.06. Akses Internet di Sekolah	-0,981	2
1.1.05. PDRB per Kapita, nonmineral	1,769	3	4.1.03. Penduduk Perkotaan	-0,838	3
1.1.04. PDRB per Kapita	1,684	4	3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-0,834	4
3.3.02. Produktivitas Keseluruhan, non migas	1,671	5	4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-0,831	5
3.3.03. Produktivitas industri Primer	1,665	6	2.1.03. Pendapatan Pajak per Pendapatan Total Pemda	-0,826	6
3.3.01. Produktivitas Keseluruhan	1,569	7	4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,802	7
1.1.10. Inflasi [R]	1,512	8	2.1.02. Pendapatan Pajak Pemda	-0,788	8
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	1,088	9	4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,780	9
4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	1,044	10	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-0,749	10
3.3.04. Produktivitas industri Sekunder	1,039	11	4.2.05. Akses Internet di Kantor	-0,602	11
1.1.06. PDRB Industri Primer	0,992	12	3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0,556	12
4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	0,949	13	4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	-0,526	13
2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	0,883	14	2.1.04. Pengeluaran Pemda	-0,524	14
4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	0,833	15	2.1.01. Pendapatan Total Pemda	-0,500	15
3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	0,793	16	4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	-0,488	16
1.2.01. Ekspor	0,738	17	3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	-0,467	17
1.2.02. Ekspor, nonmigas	0,738	18	3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	-0,466	18
3.3.05. Produktivitas industri Tersier	0,738	19	4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,461	19
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,603	20	4.1.01. Jumlah Penduduk	-0,450	20

16. Kab. Aceh Jaya					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	1,580	1	3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-2,324	1
4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	1,432	2	4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	-2,010	2
3.2.07. Tingkat Pengangguran	1,391	3	3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	-1,890	3
4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	1,285	4	4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1,128	4
4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	1,249	5	4.1.03. Penduduk Perkotaan	-1,091	5
3.1.06. Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	1,007	6	4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-1,011	6
1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	0,971	7	3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-0,988	7
3.3.04. Produktivitas industri Sekunder	0,876	8	3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	-0,988	8
4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	0,860	9	4.1.01. Jumlah Penduduk	-0,984	9
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,810	10	3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	-0,975	10
4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	0,800	11	3.1.02. Total Pinjaman Bank	-0,974	11
3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0,664	12	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	12
4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	0,628	13	1.1.02. PDRB, nonmineral	-0,956	13
4.1.10. % kepemilikan rumah	0,590	14	4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,939	14
4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	0,563	15	3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0,929	15
4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	0,428	16	1.1.01. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,924	16
4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	0,378	17	1.2.01. Ekspor	-0,911	17
4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	0,331	18	1.2.02. Ekspor, nonmigas	-0,911	18
4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	0,321	19	1.2.03. Impor	-0,899	19
4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	0,320	20	1.2.04. Impor, nonmigas	-0,899	20

17. Kab. Bener Meriah					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	2,563	1	4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	-2,148	1
2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	2,017	2	4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	-2,107	2
3.2.07. Tingkat Pengangguran	1,691	3	4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	-1,218	3
4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	1,133	4	1.1.10. Inflasi [R]	-1,211	4
4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	1,044	5	1.1.03. Pertumbuhan PDRB	-1,156	5
3.3.04. Produktivitas industri Sekunder	1,009	6	4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-0,935	6
1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	0,991	7	1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0,894	7
4.2.04. Akses Internet di Rumah	0,912	8	3.1.02. Total Pinjaman Bank	-0,831	8
4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	0,876	9	4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	-0,802	9
4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	0,863	10	3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-0,797	10
3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	0,798	11	3.3.03. Produktivitas industri Primer	-0,738	11
4.2.05. Akses Internet di Kantor	0,756	12	3.3.01. Produktivitas Keseluruhan	-0,728	12
4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	0,711	13	3.3.05. Produktivitas industri Tersier	-0,697	13
4.3.11. Rasio Gini	0,661	14	3.3.02. Produktivitas Keseluruhan, non migas	-0,676	14
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,624	15	3.1.05. Jumlah Layanan Perbankan	-0,662	15
4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	0,617	16	3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-0,658	16
4.1.10. % kepemilikan rumah	0,538	17	1.1.08. PDRB Industri Tersier	-0,651	17
4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	0,514	18	4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	-0,601	18
4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	0,512	19	4.1.03. Penduduk Perkotaan	-0,585	19
4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	0,441	20	3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-0,552	20

18. Kab. Pidie Jaya					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	1,706	1	4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	-1,730	1
4.3.11. Rasio Gini	1,079	2	4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-1,547	2
4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	0,841	3	4.2.06. Akses Internet di Sekolah	-1,534	3
3.2.07. Tingkat Pengangguran	0,807	4	4.2.05. Akses Internet di Kantor	-1,531	4
2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	0,798	5	3.3.04. Produktivitas industriSekunder	-1,331	5
3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	0,724	6	4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1,328	6
4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	0,632	7	4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-1,260	7
4.1.10. % kepemilikan rumah	0,626	8	4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	-1,143	8
4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	0,624	9	3.1.02. Total Pinjaman Bank	-1,086	9
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,558	10	1.1.07. PDRB Industri Sekunder	-1,039	10
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	0,516	11	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	11
4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	0,516	12	3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0,954	12
4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	0,426	13	4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,924	13
2.1.01. Pendapatan Total Pemda	0,341	14	1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,920	14
2.1.04. Pengeluaran Pemda	0,327	15	4.1.03. Penduduk Perkotaan	-0,911	15
4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	0,298	16	4.2.04. Akses Internet di Rumah	-0,834	16
4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	0,291	17	1.1.04. PDRB per Kapita	-0,826	17
4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	0,289	18	1.2.01. Ekspor	-0,826	18
1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	0,285	19	1.2.02. Ekspor, nonmigas	-0,826	19
1.1.03. Pertumbuhan PDRB	0,213	20	1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	-0,803	20

19. Kota Banda Aceh					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
3.1.01. Total Tabungan dan Deposito di Bank	4,528	1	2.3.01. Tingkat Kriminalitas	-3,983	1
3.3.05. Produktivitas industri Tersier	4,069	2	4.1.10. % kepemilikan rumah	-3,455	2
1.1.08. PDRB Industri Tersier	3,844	3	3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	-2,720	3
3.1.05. Jumlah Layanan Perbankan	3,718	4	2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	-2,659	4
4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	3,570	5	3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	-2,229	5
2.1.03. Pendapatan Pajak per Pendapatan Total Pemda	3,549	6	4.3.11. Rasio Gini	-2,191	6
3.3.02. Produktivitas Keseluruhan, non migas	3,461	7	4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-2,187	7
1.1.05. PDRB per Kapita, nonmineral	3,440	8	1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	-1,983	8
2.1.02. Pendapatan Pajak Pemda	3,352	9	3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	-1,429	9
1.1.04. PDRB per Kapita	3,339	10	3.2.07. Tingkat Pengangguran	-1,227	10
3.3.01. Produktivitas Keseluruhan	3,320	11	4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-1,059	11
4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	3,274	12	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	12
3.1.02. Total Pinjaman Bank	3,095	13	1.1.06. PDRB Industri Primer	-0,914	13
4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	3,006	14	4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	-0,914	14
4.1.03. Penduduk Perkotaan	2,809	15	4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	-0,850	15
1.1.02. PDRB, nonmineral	2,425	16	4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	-0,633	16
4.2.06. Akses Internet di Sekolah	2,357	17	3.3.04. Produktivitas industri Sekunder	-0,579	17
3.3.03. Produktivitas industri Primer	2,176	18	4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-0,574	18
1.1.01. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2,120	19	4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	-0,530	19
4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	2,016	20	4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,509	20

20. Kota Sabang					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	1,918	1	4.1.10. % kepemilikan rumah	-1,447	1
3.3.04. Produktivitas industriSekunder	1,839	2	3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	-1,442	2
4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	1,640	3	3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	-1,433	3
4.2.05. Akses Internet di Kantor	1,479	4	3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	-1,392	4
4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	1,323	5	4.1.01. Jumlah Penduduk	-1,369	5
4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	1,319	6	4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	-1,355	6
3.2.07. Tingkat Pengangguran	1,282	7	3.1.02. Total Pinjaman Bank	-1,233	7
4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	1,241	8	1.1.02. PDRB, nonmineral	-1,220	8
4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	1,233	9	4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	-1,209	9
4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	1,223	10	1.2.01. Ekspor	-1,206	10
3.1.06. Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	1,165	11	1.2.02. Ekspor, nonmigas	-1,206	11
4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	1,160	12	3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-1,181	12
4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	1,048	13	1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,167	13
4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	1,044	14	1.1.01. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-1,162	14
4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	1,041	15	1.2.03. Impor	-1,144	15
4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	0,986	16	1.2.04. Impor, nonmigas	-1,144	16
4.2.04. Akses Internet di Rumah	0,972	17	2.1.01. Pendapatan Total Pemda	-1,103	17
2.1.05. Keseimbangan Fiskal	0,857	18	3.2.05. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder	-1,075	18
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,821	19	4.3.11. Rasio Gini	-1,040	19
4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	0,763	20	2.1.04. Pengeluaran Pemda	-1,024	20

21. Kota Langsa					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.1.03. Penduduk Perkotaan	1,474	1	2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	-2,853	1
4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	1,390	2	4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	-2,758	2
4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	1,376	3	4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	-1,436	3
4.2.06. Akses Internet di Sekolah	1,344	4	4.1.10. % kepemilikan rumah	-1,323	4
4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	1,321	5	4.3.11. Rasio Gini	-1,301	5
4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	1,160	6	4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	-1,269	6
4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	1,107	7	3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	-1,252	7
4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	1,096	8	4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-1,242	8
4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	0,963	9	3.2.07. Tingkat Pengangguran	-1,112	9
4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	0,914	10	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	10
4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	0,728	11	3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0,937	11
3.1.06. Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	0,716	12	1.1.06. PDRB Industri Primer	-0,857	12
4.2.05. Akses Internet di Kantor	0,672	13	4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,676	13
4.2.04. Akses Internet di Rumah	0,636	14	2.3.01. Tingkat Kriminalitas	-0,620	14
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	0,613	15	1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	-0,554	15
4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	0,545	16	1.2.01. Ekspor	-0,533	16
3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	0,544	17	1.2.02. Ekspor, nonmigas	-0,533	17
4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	0,448	18	1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0,521	18
4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	0,443	19	3.3.04. Produktivitas industriSekunder	-0,478	19
4.1.06 Jumlah Ketersediaan pelabuhan	0,428	20	4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-0,464	20

22. Kota Lhokseumawe					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	2,519	1	4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	-3,548	1
4.3.12. Rasio penduduk per fasilitas kesehatan pertama	2,506	2	4.3.11. Rasio Gini	-1,851	2
1.1.07. PDRB Industri Sekunder	2,125	3	3.2.07. Tingkat Pengangguran	-1,729	3
2.1.03. Pendapatan Pajak per Pendapatan Total Pemda	1,689	4	4.1.04. Panjang Jalan Beraspal (total)	-1,266	4
4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	1,580	5	3.2.04. Jumlah Pekerja di Sektor Primer	-1,165	5
4.2.03. % Penduduk Menggunakan Komputer	1,475	6	4.1.07. Jumlah ketersediaan bandara	-0,957	6
4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	1,403	7	4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	-0,819	7
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	1,386	8	1.1.06. PDRB Industri Primer	-0,733	8
4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	1,373	9	4.1.08. Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-0,712	9
3.1.02. Total Pinjaman Bank	1,371	10	2.1.04. Pengeluaran Pemda	-0,709	10
4.1.03. Penduduk Perkotaan	1,262	11	2.1.01. Pendapatan Total Pemda	-0,709	11
3.1.06. Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	1,226	12	4.3.06. Rasio Murid per Guru (Sekolah Dasar)	-0,683	12
4.3.15. Jumlah kejadian bencana alam	1,160	13	4.3.07. Rasio Murid per Guru (Menengah Pertama)	-0,517	13
1.2.05. Keterbukaan dalam Perdagangan	1,147	14	4.1.10. % kepemilikan rumah	-0,500	14
4.2.02. % Penduduk Menggunakan Telepon Genggam	1,110	15	2.3.01. Tingkat Kriminalitas	-0,428	15
3.3.01. Produktivitas Keseluruhan	1,081	16	1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0,386	16
4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	1,064	17	3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	-0,350	17
4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	1,061	18	3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	-0,303	18
1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,049	19	4.1.01. Jumlah Penduduk	-0,284	19
1.1.04. PDRB per Kapita	1,008	20	3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0,262	20

23. Kota Subulussalam					
20 Indikator Tertinggi			20 Indikator Terendah		
Indikator	Nilai terstandar	Peringkat	Indikator	Nilai terstandar	Peringkat
4.1.02. Pertumbuhan Penduduk	2,911	1	2.2.03. Evaluasi Kinerja Pemda	-1,962	1
4.2.07. Akses Internet dengan Telepon Genggam	1,326	2	3.1.06. Penduduk per Jumlah Cabang/Kantor Bank	-1,797	2
4.3.03. Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	0,998	3	4.3.01. Tingkat Buta Huruf (Dewasa)	-1,536	3
4.3.04. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Pertama)	0,843	4	4.3.14. % rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-1,460	4
4.3.08. Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	0,696	5	4.3.10. Angka Harapan Hidup saat lahir	-1,448	5
1.3.01. Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	0,677	6	1.2.03. Impor	-1,192	6
4.1.09. Rumah Tangga dengan Sambungan Listrik	0,563	7	1.2.04. Impor, nonmigas	-1,192	7
3.1.04. Jumlah Kredit Bermasalah per total Pinjaman Bank	0,478	8	4.3.02. Rata-rata Lama Sekolah	-1,176	8
2.3.01. Tingkat Kriminalitas	0,438	9	1.2.01. Ekspor	-1,151	9
1.3.02. Rata-rata Penanaman Modal Domestik dalam 3 tahun terakhir	0,432	10	1.2.02. Ekspor, nonmigas	-1,151	10
4.1.05. Jumlah Kendaraan Bermotor per Panjang Jalan Beraspal	0,419	11	3.1.05. Jumlah Layanan Perbankan	-1,100	11
4.1.10. % kepemilikan rumah	0,417	12	2.1.04. Pengeluaran Pemda	-1,085	12
4.3.13. Rasio penduduk per total jumlah tenaga kesehatan	0,366	13	1.1.02. PDRB, nonmineral	-1,084	13
4.2.04. Akses Internet di Rumah	0,343	14	1.1.09. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,083	14
2.3.02. Tingkat Penyelesaian Kriminalitas	0,328	15	4.3.09. Indeks Pembangunan Manusia	-1,075	15
3.2.02. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0,325	16	3.2.03. Jumlah Penduduk Bekerja	-1,064	16
4.2.01. % Penduduk Menggunakan Sambungan Telepon	0,300	17	3.2.01. Jumlah Angkatan Kerja	-1,055	17
3.1.03. Jumlah Kredit Bermasalah	0,254	18	3.2.06. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier	-1,050	18
4.3.05. Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	0,151	19	1.1.01. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-1,039	19
3.3.04. Produktivitas industri Sekunder	0,142	20	3.3.03. Produktivitas industri Primer	-1,033	20



dpmp
ts
aceh

Jln. Tgk. Imeum Lueng Bata, Gampong Cot Masjid
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh (23246)